



PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2021



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR **10** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah terjadinya pemetaan wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu (3) tahun sebagaimana sisa masa berlaku RPJMD 2019-2024, berpedoman kepada RPJPD dan RTRW,
 - (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup
 - (2) Isi dan Uraian Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat daerah dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan daerah dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
 - b. Bappeda dalam penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 29-12-2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 29-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

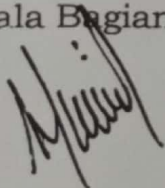
Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024 : (10-215/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1 - 4
DAFTAR TABEL	5 - 9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Topografi	II-3
2.1.1.3. Hidrologi	II-4
2.1.1.4. Klimatologi	II-6
2.1.1.5. Geologi	II-7
2.1.1.6. Ekoregion	II-7
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	II-9
2.1.2.2. Rencana Struktur Ruang	II-12
2.1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.3. Daerah Rawan Bencana	II-19
2.1.4. Kondisi Demografi	II-21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-22
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-22
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	II-25
2.2.1.3. PDRB Per Kapita	II-27
2.2.1.4. Laju Inflasi	II-29
2.2.1.5. Kemiskinan	II-29
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia	II-34
2.2.1.7. Indeks Gini	II-36
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-37
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	II-37
2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-39



2.2.2.3	Angka Partisipasi Kasar	II-39
2.2.2.4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-40
2.2.2.5	Angka Partisipasi Murni	II-41
2.2.2.6	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	II-42
2.2.2.7	Usia Harapan Hidup	II-42
2.2.2.8	Penduduk Bekerja	II-43
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II-45
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-46
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-46
2.3.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-47
2.3.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-52
2.3.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-63
2.3.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-85
2.3.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat	II-87
2.3.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-91
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-93
2.3.2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-93
2.3.2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-95
2.3.2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-98
2.3.2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	II-99
2.3.2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-101
2.3.2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	II-103
2.3.2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-106
2.3.2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ...	II-109
2.3.2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-111
2.3.2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-113
2.3.2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-114
2.3.2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-116
2.3.2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	II-119
2.3.2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-120
2.3.2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-122
2.3.2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-124
2.3.2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-125
2.3.2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-126
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-128
2.3.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-128
2.3.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-129
2.3.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-131
2.3.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	II-138
2.3.3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	II-139



2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-140
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-142
2.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-147
2.3.7	Unsur Pemerintahan Umum	II-149
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-150
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-150
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-154
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-155
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-155
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Utara	II-157
2.6	Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-173
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III -1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III -2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020	III -5
3.1.2	Neraca Daerah	III-18
3.1.2.1	Aset	III-23
3.1.2.2	Kewajiban	III-23
3.1.2.3	Ekuitas	III-23
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-24
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-26
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-27
3.3	Kerangka Pendanaan	III-31
3.3.1	Proyeksi Pendapatan Daerah	III-32
3.3.2	Proyeksi Belanja Daerah	III-36
3.3.3	Proyeksi Pembiayaan	III-39
3.3.4	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-41
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-1
4.1.2	Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-3
4.1.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-10
4.2	Isu Strategis	IV-17
4.2.1	Telaahan Isu Global	IV-17
4.2.1.1	Pandemi Covid-19	IV-17
4.2.1.2	Sustainable Development Goals	IV-19
4.2.1.3	Perubahan Iklim Global	IV-21
4.2.1.4	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV-23
4.2.1.5	Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia	IV-24
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-24
4.2.2.1	Isu Perekonomian Nasional	IV-24



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

4.2.2.2	Agenda Pembangunan Nasional	IV-25
4.2.2.3	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	IV-28
4.2.2.4	Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara	IV-30
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-9
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-4
6.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2020)	VI-5
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2021)	VI-5
6.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2022)	VI-6
6.2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2023)	VI-6
6.2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2024)	VI-7
6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-16
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	VIII-1
8.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VIII-2
8.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-2
8.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII-4
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara	II-4
Tabel 2.3	Jenis dan Luasan (Ha) Ekoregion Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-8
Tabel 2.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017 – 2037	II-14
Tabel 2.5	Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-16
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-19
Tabel 2.7	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 2017 – 2037	II-19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-21
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-23
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-25
Tabel 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2020	II-25
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.14	PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 2.15	Pendapatan per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-31
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.19	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kab. Tapanuli Utara Tahun 2018-2020	II-33
Tabel 2.20	IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.21	IPM Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.22	Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.23	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.24	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Nasional Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs	II-40
Tabel 2.26	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020	II-40
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016 – 2020	II-41
Tabel 2.28	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020	II-42



Tabel 2.29	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.30	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2016 – 2020	II-44
Tabel 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 -2020	II-44
Tabel 2.32	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016 – 2020	II-45
Tabel 2.33	Perkembangan Seni Budaya Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.34	Prestasi Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020	II-46
Tabel 2.35	PAUD di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2016 – 2020	II-49
Tabel 2.37	Persentase Kelulusan dan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.38	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.39	Rata-rata Rasio Siswa dan Guru Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.40	Fasilitas sekolah dan kualifikasi Guru Tahun 2016 – 2020	II-52
Tabel 2.41	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020	II-55
Tabel 2.42	Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.43	Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan) Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.44	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.45	Balita Menurut Penolong Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.46	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.47	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.48	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSUD Tarutung Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.49	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.50	Perkembangan Panjang Jalan dan Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.51	Kondisi Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2020 ...	II-65
Tabel 2.52	Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 ...	II-75
Tabel 2.53	Kondisi Daerah Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2020	II-76
Tabel 2.54	Capaian Indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.56	Indikator Kinerja Penanganan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.57	Data Bencana Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.58	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.59	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.60	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.61	Perkembangan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pangan Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II-102



Tabel 2.63	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.64	Jumlah Kepala Keluarga, Rata-rata Anggota Keluarga dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020	II-104
Tabel 2.65	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.67	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020	II-109
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.69	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.70	Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten	II-115
Tabel 2.71	Perkembangan Permodalan Koperasi Tahun 2016-2020	II-116
Tabel 2.72	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.73	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.74	Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.75	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.76	Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2016 -2020..	II-125
Tabel 2.77	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 -2020	II-129
Tabel 2.78	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016 -2020	II-130
Tabel 2.79	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2016 -2020	II-131
Tabel 2.80	Rata-rata Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2016 -2020	II-133
Tabel 2.81	Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Buah - buahan Tahun 2016 -2020	II-134
Tabel 2.82	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2016 -2020	II-135
Tabel 2.83	Perkembangan Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2016 - 2020	II-136
Tabel 2.84	Perkembangan Kelembagaan Pertanian Tahun 2016 -2020	II-138
Tabel 2.85	Perkembangan Industri Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2016 -2020	II-138
Tabel 2.86	Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 -2020	II-140
Tabel 2.87	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 -2020	II-141
Tabel 2.88	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016 -2020	II-142
Tabel 2.89	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -2020	II-143
Tabel 2.90	Indikator Kinerja Urusan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020	II-144
Tabel 2.91	Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 -2020	II-145
Tabel 2.92	Data Pendidikan dan Pelatihan ASN Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016 -2020	II-147
Tabel 2.93	Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016 -2020	II-148
Tabel 2.94	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	II-149
Tabel 2.95	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 .	II-151
Tabel 2.96	Pengeluaran dan Distribusi Konsumsi Rumah Tangga Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 (Atas Dasar Harga Berlaku)	II-153
Tabel 2.97	Fasilitas Sarana Prasarana Wilayah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-154



Tabel 2.98	Indikator Iklim Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-155
Tabel 2.99	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-156
Tabel 2.100	Rasio Ketergantungan Penduduk Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	II-157
Tabel 2.101	Capaian Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara	II-159
Tabel 2.102	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional di Kabupaten Tapanuli Utara	II-161
Tabel 2.103	Realisasi Capaian Indikator TPB Tahun 2016-2020	II-163
Tabel 2.104	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional di Kabupaten Tapanuli Utara	II-171
Tabel 2.105	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-173
Tabel 2.106	Matriks Penelaahan Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	II-177
Tabel 3.1	Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	III-4
Tabel 3.2	Perkembangan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	III-11
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-Tahun 2020	III-15
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-Tahun 2020	III-17
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – Tahun 2020	III-20
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	III-27
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	III-28
Tabel 3.9	Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	III-30
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 –2024	III-34
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2024	III-38
Tabel 3.12	Pembiayaan Tahun 2019-2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 – 2024	III-40
Tabel 3.13	Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi untuk Tahun 2022-2024	III-42
Tabel 3.14	Realisasi Kapasitas Riil Pagu Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi untuk Tahun 2022-2024	III-43
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024	III-44
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-4
Tabel 4.2	Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	IV-14
Tabel 5.1	Definisi Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	V-3
Tabel 5.2	Keselarasan Misi pada RPJMD Kabupaten Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten	V-4
Tabel 5.3	Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024	V-6
Tabel 5.4	Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017- 2037 dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	V-8



Tabel 5.5	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024	V-9
Tabel 5.6	Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024	V-13
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024	VI-1
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024	VI-8
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	VI-17
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024	VII-4
Tabel 7.2	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024	VII-6
Tabel 7.3	Program Prioritas yang disertai Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Target Pendanaan Tahun 2021 Kabupaten Tapanuli Utara	VII-8
Tabel 7.4	Proyeksi Pendanaan per Urusan, Perangkat Daerah dan Program Tahun 2022-2024	VII-55
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024	VIII-3
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	II-3
Gambar 2.2	Wilayah Kelerengan Kabupaten Tapanuli Utara	II-4
Gambar 2.3	Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tapanuli Utara	II-5
Gambar 2.4	Wilayah Hujan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-6
Gambar 2.5	Wilayah Ekoregion Kabupaten Tapanuli Utara	II-8
Gambar 2.6	Peta Rencana Pembangunan Prasarana Kab. Tapanuli Utara	II-12
Gambar 2.7	Peta Sistem Jaringan Tranportasi Kab. Tapanuli Utara	II-13
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara	II-15
Gambar 2.9	Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Utara	II-20
Gambar 2.10	Proporsi Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara	II-160
Gambar 2.11	Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara terhadap target	II-160
Gambar 2.12	Jumlah Capaian Indikator TPB Kategori SS	II-162
Gambar 4.1	Misi dan Agenda Perkembangan Nasional Tahun 2020-2024	IV-26
Gambar 7.1	Indikasi Program Pembangunan RPJMD	VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika pembangunan senantiasa mengalami perubahan sebagai respon terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yang dimulai sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara mendasar telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada pasal 258 ayat (1) telah diamanatkan bahwa pembangunan dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, secara berkesinambungan guna mencapai harapan yang dicita-citakan. Karena itu, pendekatan pembangunan daerah harus dimulai dengan menetapkan cita-cita ideal, dalam bentuk pernyataan visi pembangunan yang akan menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sebelum melaksanakan pembangunan, perlu dilakukan persiapan yang matang dengan cara merencanakan apa saja yang diperlukan, apa yang harus dilakukan, berapa anggarannya, kapan harus dilakukan, menentukan target. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah memiliki gambaran dan arahan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 menetapkan Kepala Daerah terpilih **Bapak Drs. Nikson Nababan, M.Si** sebagai Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara dan **Bapak Sarlandy Hutabarat, SH** sebagai Wakil Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 23 April 2019 untuk masa jabatan tahun 2019-2024.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Tapanuli Utara menyusun RPJMD untuk merefleksikan pembangunan yang menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk pembangunan 20 tahun (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pembangunan 5 tahun serta (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan tahunan. Sesuai periodisasi saat ini RPJMD merupakan pelaksanaan tahapan keempat dalam tahapan RPJPD. RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara akan dilaksanakan tiap tahun melalui RKPD 2020-2024 dan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara periode 2019-2024 telah memasuki tahun ke (2) pelaksanaan RPJMD pada RKPD 2020 dan RKPD 2021 (berjalan). Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 344 Perubahan RPJMD berlaku **mutatis mutandis**. Kemudian pada pasal 342 ayat (1) diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- 1 Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- 2 Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- 3 Terjadi perubahan yang mendasar.

Kemudian pada ayat (2) perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:

- Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Merujuk pernyataan di atas, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan perubahan RPJMD didasari dengan adanya perubahan yang mendasar yaitu hasil evaluasi paruh waktu RPJMD, terbitnya berbagai kebijakan Nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah dan terjadinya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Perubahan ini juga mengakomodir perubahan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2021 serta menyesuaikan kebijakan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dikaitkan dengan wabah pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran serta program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian kembali.

Terbitnya berbagai kebijakan Nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan kinerja pemerintah daerah, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan Masyarakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan.

Selanjutnya, hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19) dan pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan persebaran yang semakin meluas. Perkembangan Covid-19 telah berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Covid-19 juga telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk Tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kebijakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi. Kebijakan ini telah mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Konsekuensinya adalah perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat hasil (*outcome*)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini juga terkait dengan Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan Perangkat Daerah akan mempengaruhi tujuan dan sasaran, indicator dan target kinerja serta alokasi anggaran Perangkat Daerah.

Adanya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 juga menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini, yaitu dalam rangka penyesuaian kebijakan dan program antar tingkatan pemerintahan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini (*ter-update*).

Substansi perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini meliputi gambaran umum wilayah, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, pendanaan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disiase*.
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 telah diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.

1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan RPJPD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2025 dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman bagi Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan rencana kegiatan dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037 yang dilakukan melalui penyesuaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara.

Salah satu dokumen penting yang ditelaah dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Utara 3 (tiga) tahun ke depan yang holistik-tematik-integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil RPJMD, terbitnya berbagai kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan serta percepatan penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Provinsi Sumatera Utara.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi menjelaskan analisis kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan daerah maupun dunia internasional, kebijakan nasional dan regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 – 2019 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah didasarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah. Program Perangkat Daerah ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja serta pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditetapkan menjadi oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Berdasarkan beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1°20' - 2° 41' Lintang Utara dan 98°05' - 99°16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km² yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km² dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km². Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan

Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, 11 (sebelas) Kelurahan dan 241 Desa sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1.

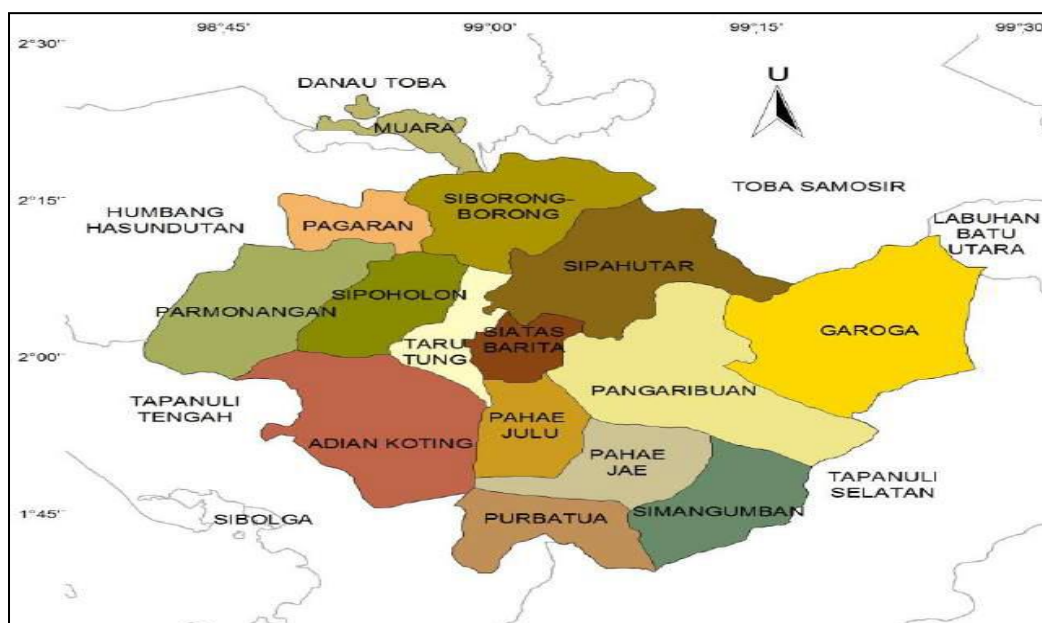
Tabel 2.1
Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Total Luas
			Desa	Kelurahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Parmonangan	Parmonangan	14	-	257.35	6,78
2	Adiankoting	Adiankoting	16	-	502.9	13,26
3	Sipoholon	Sipoholon	13	1	189.2	4,99
4	Tarutung	Tarutung	24	7	107.68	2,84
5	Siatas Barita	Siatas Barita	12	-	92.92	2,45
6	Pahae Julu	Onan Hasang	18	1	165.9	4,37
7	Pahae Jae	Sarulla	12	1	203.2	5,36
8	Purbatua	Parsaoran Janji Angkola	11	-	191.8	5,06
9	Simangumban	Simangumban	8	-	150.00	3,95
10	Pangaribuan	Pangaribuan	26	-	459.25	12,10
11	Garoga	Garoga	13	-	567.58	14,96
12	Sipahutar	Sipahutar	25	-	408.22	10,76
13	Siborongborong	Siborongborong	20	1	279.91	7,38
14	Pagaran	Sipultak	14	-	138.05	3,64
15	Muara	Muara	15	-	79.75	2,10
	JUMLAH.....		241	11	3,793.71	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km² atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km² atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara.



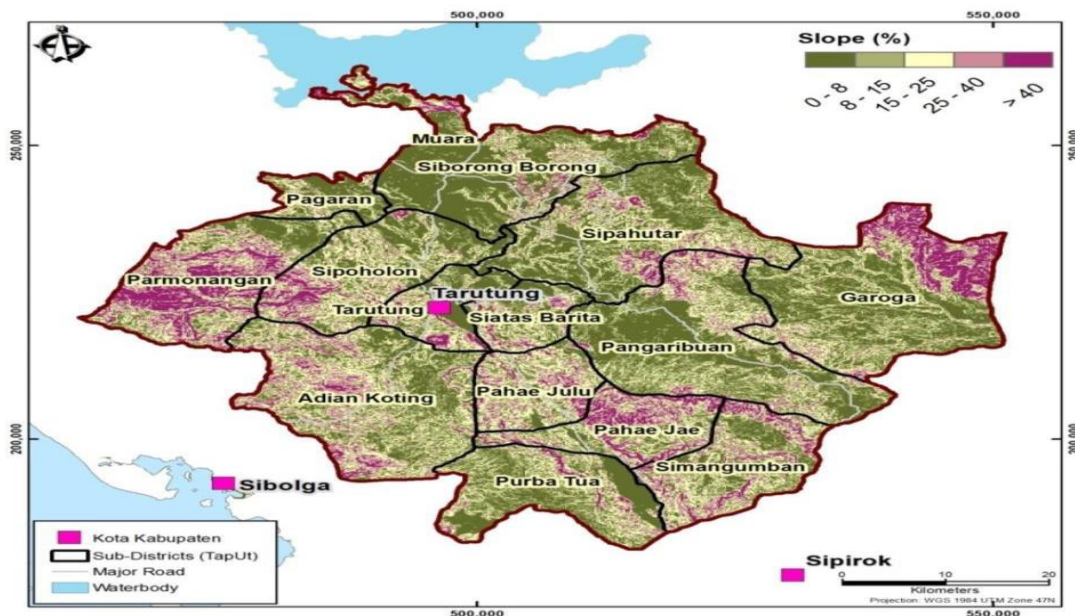
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.1.2 Topografi

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembah dengan suhu antara 12°C-28°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150-1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dengan kisaran > 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan, Sipahutar, Siatas Barita, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu Kecamatan Parmonangan, Adiankotting, Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen, daerah miring sebesar 25,63 persen dan daerah terjal 44,35 persen.

Berdasarkan Peta Geologi dari Puslitbang Geologi, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara terbentuk pada masa tersier dan masa kwarter, yakni pada letusan Gunung Toba 75.000 tahun lalu, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh liparitsche effusifa yang tergolong ke dalam tipe formasi pematang, yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir, dan konglomerat breksi yang menghasilkan tanah dengan jenis podsolik/spodosol.

Gambar 2.2
Wilayah Kelereng Kabupaten Tapanuli Utara



2.1.1.3 Hidrologi

Pemanfaatan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara melalui irigasi didukung oleh keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di wilayah ini.

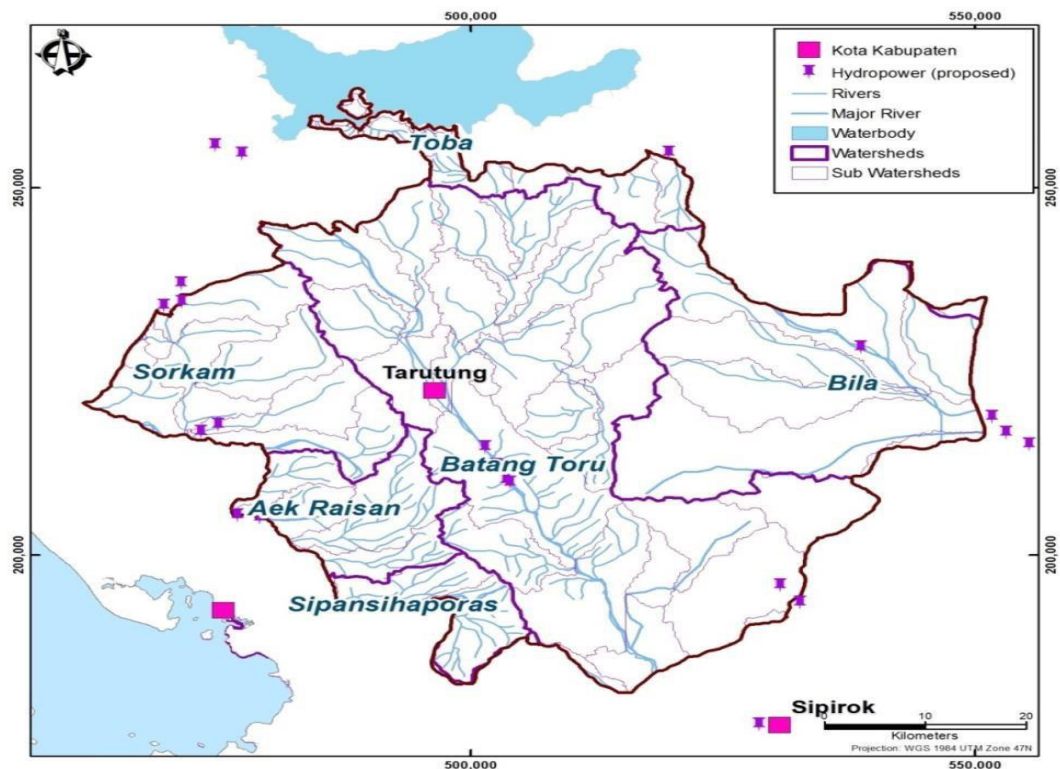
Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km ²)
1	2	3	4
1.	Sipoholon	Batang Toru, Kolang	18.920
2.	Pangaribuan	Bilah, Batang Toru	45.925
3.	Adiankoting	Batang Toru, Kolang	50.290
4.	Sipahutar	DTA Danau Toba, Batang Toru	40.822
5.	Garoga	Bilah	56.758
6.	Tarutung	Batang Toru	10.768
7.	Simangumban	Batang Toru	15.000
8.	Purbatua	Batang Toru	19.180
9.	Pahae Jae	Batang Toru	20.320
10.	Pahae Julu	Batang Toru	16.590
11.	Siborongborong	DTA. Danau Toba, Batang Toru	27.991
12.	Siatas Barita	Batang Toru	9.292
13.	Parmonangan	Batang Toru, Sibundong, Kolang	25.735
14.	Pagaran	Batang Toru, Sibundong	13.805
15.	Muara	DTA. Danau Toba	7.975

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2014

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki nilai yang sangat strategis karena terletak di wilayah hulu yang merupakan sumber air untuk kabupaten/kota di sekitarnya. Terdapat enam daerah aliran sungai utama di Kabupaten Tapanuli Utara. DAS kecil di Toba bagian utara mengalir ke Danau Toba, tiga daerah aliran sungai di sebelah barat (Sorkam, Aek Raisan dan Sipansihaporos) mengalir ke Samudera Hindia melalui Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan DAS Bila di sebelah Timur mengalir ke Selat Malaka. DAS terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara (Batang Toru) meliputi dua pertiga dari wilayah kabupaten dan mengalir ke Kabupaten Tapanuli Selatan.

Studi literatur tentang proses hidrologis di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh CI-Indonesia menunjukkan bahwa di Bagian Barat Kabupaten relative kaya akan air, dengan air yang dihasilkan dari curah hujan tinggi di sebelah Barat Pegunungan Bukit Barisan, dipengaruhi oleh system musim yang membawa hujan dari Samudera Hindia. Wilayah Hulu Sungai Bila dan Bagian Timur Laut Sungai Batang Toru menghasilkan air yang lebih sedikit dan oleh karenanya sangat berkemungkinan untuk merasakan dampak yang lebih besar dari kekeringan pada waktu Dipole Samudera Hindia Positif atau terjadinya El-Nino. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada gambar berikut.



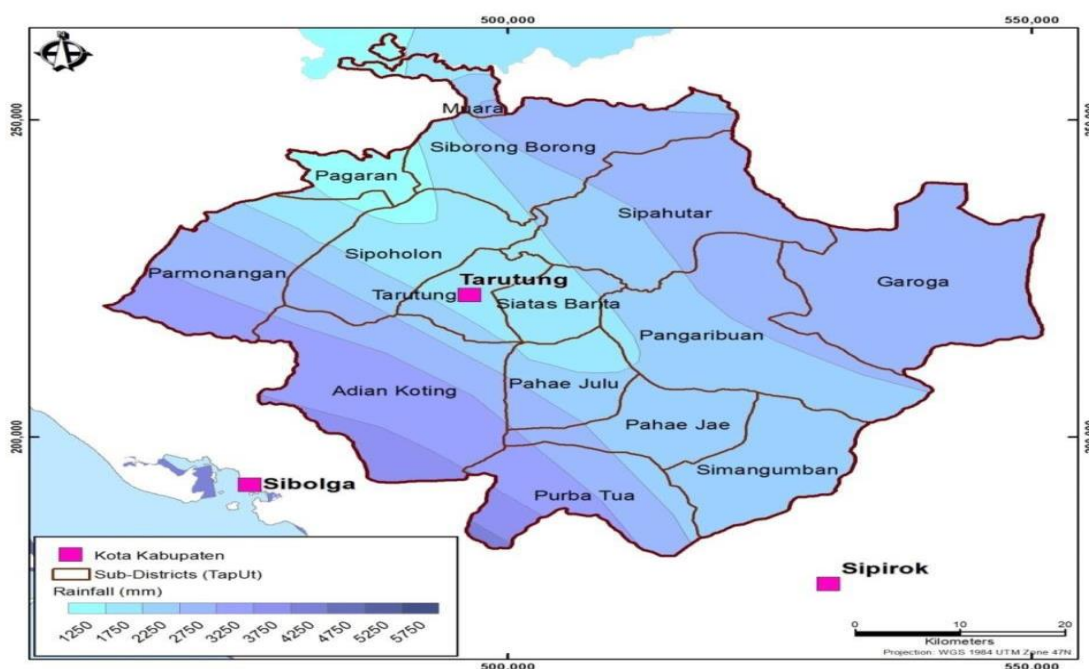
Gambar 2.3
Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.1.4 Klimatologi

Uraian tentang klimatologi bermanfaat untuk mengenali tingkat pengaruh iklim terhadap fungsi ruang yang akan ditetapkan. Guna melakukan analisis daya dukung lahan, klimatologi dijadikan kriteria penilaian tingkat kesesuaian unit lahan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi klimatologi suatu daerah diantaranya adalah besaran curah hujan, kondisi atau tingkat suhu udara rata-rata, tingkat kelembaban udara dan intensitas penyinaran matahari. Secara umum iklim tergolong ke dalam daerah beriklim tropis (karena berada dekat garis khatulistiwa) yang mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar daerah atau kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki curah hujan rata-rata sekitar 100-200 mm/tahun. Hanya sebagian kecil yang memiliki curah hujan dengan rentang antara 200-300 mm/tahun. Suhu udara kisaran maksimum 29° C, minimum 17° C serta kelembapan udara rata-rata 85,04% .

Kondisi iklim di Tapanuli Utara sangat dipengaruhi oleh posisinya yang dekat dengan Pegunungan Bukit Barisan di sebelah Barat. Gambar 2.4 menggambarkan wilayah pengaruh bayangan hujan di bagian tengah kabupaten sebagai pengaruh posisinya yang lebih rendah dibandingkan pegunungan di sebelah Barat dan Timur. Walaupun wilayah bayangan hujan relatif lebih kering, namun intensitas hujannya masih lebih dari 1.250 mm per tahun.

Gambar 2.4
Wilayah Hujan di Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.1.5 Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh jenis batuan sedimen aluvium muda dan aluvium tua. Berdasarkan hasil analisis peta geologi yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe formasi pematang yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir dan konglomerat breksi. Hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi Kabupaten Tapanuli Utara adalah peralihan antara masa tertier dan masa kwartier yakni pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh liparitsche effusifa yang menghasilkan tanah dengan jenis podsolik yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang bervariasi di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik sebagai salah satu bahan pembentuk batuan sumberdaya mineral.

Selain itu, Kabupaten Tapanuli Utara berada di situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 (enam belas) situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano. Penyebaran situs geologi utama yang ada di kawasan Geopark Kaldera Toba tersebut berada di 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki lintas geopark yang terhubung satu dengan yang lainnya, yakni di situs HUT Hutaginjang-Muara Rentetan Dinding Kaldera Kaldera supervolcano Toba juga dikenal sebagai Kaldera Sibandang yang menghasilkan Tuf Toba Termuda dan Situs MUS Muara Sibandang, Post-Calderic Volcanism Kubah-kubah tertutup dikekstrusi di bagian Selatan-Barat Danau Toba melalui beberapa sesar yang berada di Kecamatan Muara.

2.1.1.6 Ekoregion

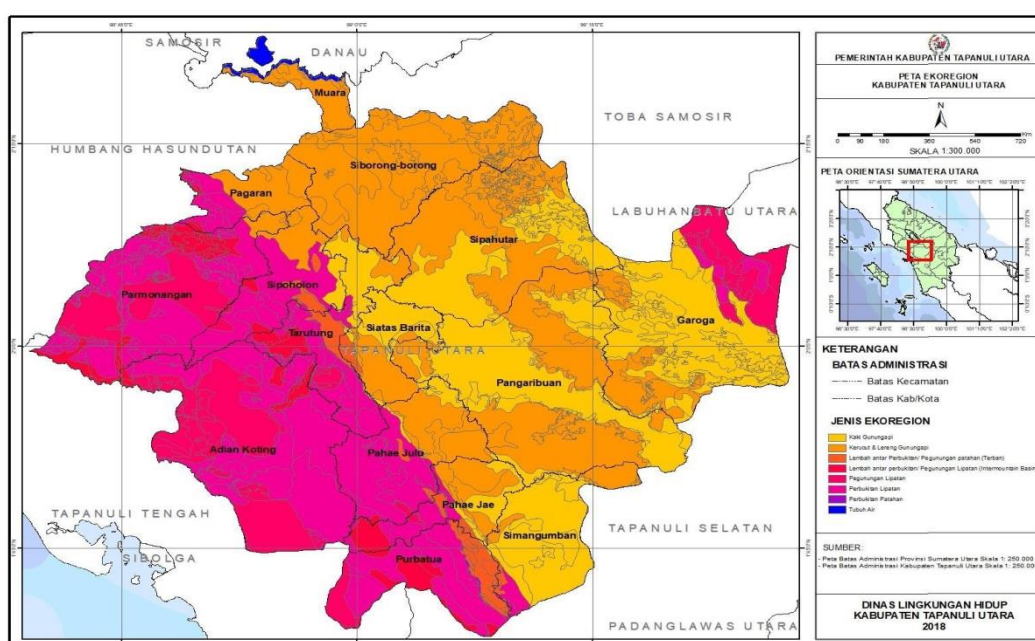
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara umum, ekoregion Tapanuli Utara didominasi oleh jenis ekoregion kerucut dan lereng gunung api yang hampir mencapai luasan sebesar 121.613,21 hektar atau sekitar 31,99 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Tapanuli Utara. Ekoregion kerucut dan lereng gunung api sebagian

besar terdapat di Kecamatan Siborongborong (32.375,27 Ha), Kecamatan Pangaribuan (26.125,91 Ha) dan Kecamatan Sipahutar (21.152,16 Ha).

Tabel 2.3
Jenis dan Luasan (Ha) Ekoregion Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Jenis Ekoregion	Luas (Ha)														
		Adian Koting	Garoga	Muara	Pagaran	Pahae Jae	Pahae Julu	Pangaribuan	Parmonangan	Purbatus	Siatas Barita	Siborong-borong	Simangumban	Sipahutar	Sipoholon	Tarutung
1	Kaki Gunungapi		27,418.83			2,439.51	1,388.57	25,680.68		62.22	5,139.72	108.47	15,010.41	16,597.77	1,215.95	4,215.63
2	Kerucut & Lereng Gunungapi		7,185.05	4,231.32	6,111.00	4,549.56	7,282.26	26,125.91	1,128.23		4,508.76	32,375.28	2,347.56	21,152.16	3,069.68	1,546.44
3	Intermountain Basin	1,593.05			432.14	1,527.78	118.01		4,772.37	2,832.06					485.27	1,755.41
4	Terban					556.49	328.26			2,824.48	667.85			388.69	1,028.24	1,365.22
5	Pegunungan Lipatan	19,634.21	8,880.62			178.47	241.86		10,388.73	1,778.47			27.29		428.18	875.20
6	Perbukitan Lipatan	26,369.02	1,707.21		3,302.68	2,957.79	11,268.94		19,335.89	11,003.58	40.26		1,037.26		9,714.43	7,737.08
7	Perbukitan Patahan									116.45						
8	Tubuh Air			1,552.89												
TOTAL		47,596.28	45,191.71	5,784.21	9,845.82	12,209.60	20,627.91	51,806.59	35,625.22	18,617.25	10,356.59	32,483.74	18,811.21	37,749.92	15,941.75	17,494.99
																380,142.80

Dominasi ekoregion selanjutnya adalah ekoregion kaki gunung api yang luasannya 99.277,75 hektar atau mencapai 26,12 persen dari luas kabupaten. Persebaran ekoregion ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Garoga dan Kecamatan Pangaribuan dengan luas mencapai 25.680,68 hektar. Ekoregion ketiga yang juga cukup mendominasi adalah ekoregion perbukitan lipatan yang luasnya mencapai 94474.14 hektar atau sekitar 24,85 persen luas kabupaten. Persebaran ekoregion ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Adiankoting seluas 26.369,02 hektar dan Kecamatan Parmonangan seluas 19.335,89 hektar.



Gambar 2.5
Wilayah Ekoregion di Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

Rancangan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara memuat Kebijakan Rencana dan Program (KRP) sekaligus. Kebijakan terkandung dalam tujuan, kebijakan dan strategi. Kebijakan kemudian dijabarkan menjadi rencana yang terdiri atas Rencana Struktur Ruang (Sistem Pusat dan Infrastruktur), Rencana Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) dan Rencana Kawasan Strategis. Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikasi program. Tujuan dari perencanaan tata ruang di Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk membuat rencana tata ruang berbasis pertanian dan agroindustri yang didukung oleh sektor pariwisata, pertambangan dan energi yang produktif, efisien, aman dan mengutamakan pentingnya pengembangan wilayah yang adil, mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh RTRW yang perlu dilihat penjabarannya dalam rencana pola dan struktur ruang serta indikasi program.

Kebijakan untuk mencapai tujuan tata ruang tersebut dirumuskan dalam enam kebijakan strategi yang keseluruhannya sudah bersifat menyeluruh, multi dimensi, integratif dan konseptual, yaitu :

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah pengembangan.
2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan risiko bencana alam.
3. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Adapun yang menjadi strategi pencapaian untuk enam kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi :

1. *Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah pengembangan.*

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan pergerakan transportasi darat ke setiap bagian wilayah pengembangan.
 - b. Membangun dan mengembangkan potensi pembangkit energi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan energi untuk kebutuhan pembangunan wilayah.
 - c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, telekomunikasi, energi listrik, pemerintahan).
 - d. Mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan asset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. *Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan risiko bencana alam.*
 - a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
 - b. Mengembangkan energi alternatif.
 - c. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis.
 - d. Mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana.
3. *Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.*
 - a. Menerapkan konsep intensifikasi lahan pertanian irigasi teknis untuk meningkatkan hasil produksi.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif.
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian dengan konsep ekstensifikasi sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
4. *Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan.*
 - a. Membangun dan memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.
 - b. Melakukan intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan untuk mendukung pengembangan sektor sekunder.

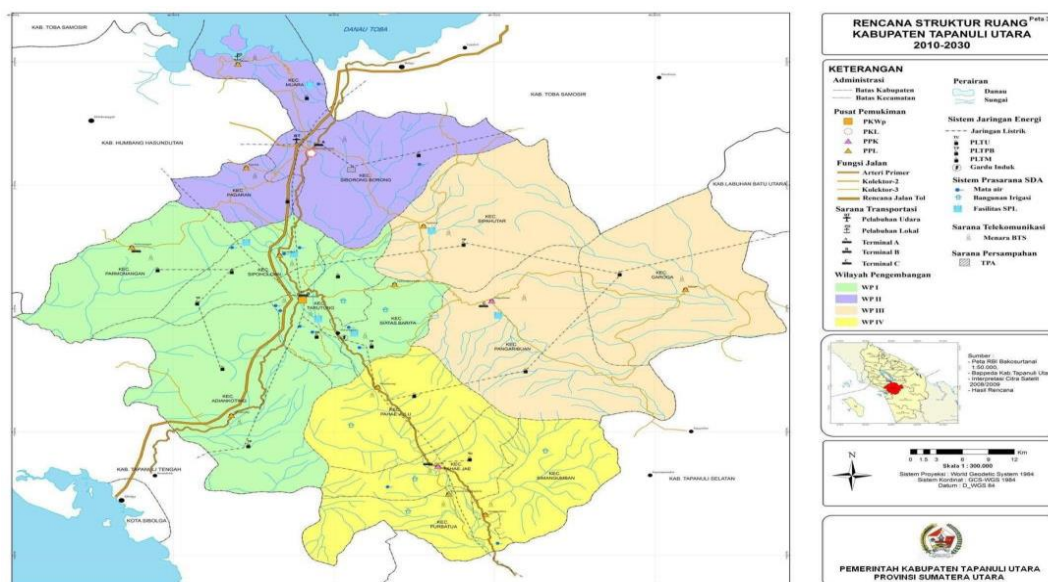
- c. Meningkatkan produktifitas subsector peternakan dan perikanan (minapolitan).
 - d. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis sumber daya alam.*
- a. Mengembangkan sektor pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.
 - b. Mendirikan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan pada lokasi- lokasi produksi.
 - c. Membudidayakan peternakan hewan besar dan kecil pada kawasan bukan perkotaan.
 - d. Mengembangkan perikanan darat pada daerah yang dekat dengan sumber daya air.
 - e. Mengeksploitasi daerah penghasil barang tambang dengan memperhatikan dampak lingkungan.
 - f. Membangun sarana dan prasarana pada kantong-kantong produksi dan lokasi wisata.
6. *Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.*
- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan budi daya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan

Strategi pencapaian kebijakan sudah menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, namun penterjemahan ke dalam rencana struktur dan pola ruang serta indikasi program perlu dicermati lebih lanjut baik konsistensi maupun muatannya.

2.1.2.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang yang terdapat pada RTRW Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Rencana Sistem Pusat Pelayanan (Sistem Perkotaan) dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten (gambar 2.6).

Gambar 2.6
Peta Rencana Pembangunan Prasarana Kab. Tapanuli Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

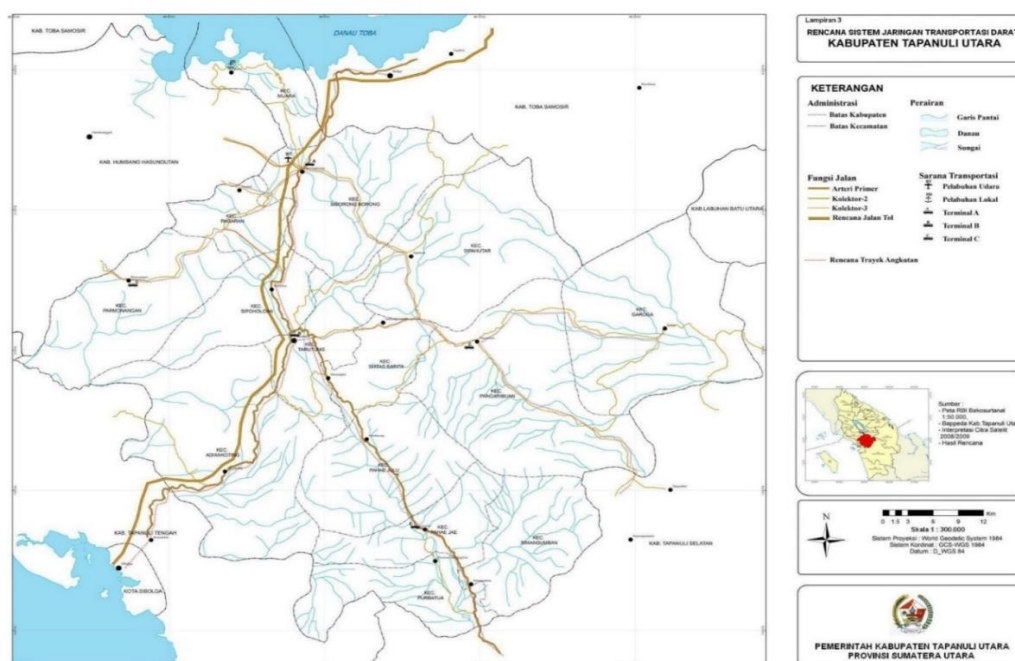
Sistem perkotaan di dalam Rancangan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara meliputi 15 kota utama sebagai berikut:

1. Tarutung berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) : Tarutung berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Primer I (untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara).
2. Siborongborong berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Primer II.
3. Pangaribuan dan Pahae Jae berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Sekunder (Pendukung Pusat Kegiatan Pelayanan Primer I dan II).

Siatas Barita, Sipoholon, Parmonangan, Adiankotting, Muara, Pagaran, Garoga, Sipahutar, Purbatua, Pahae Julu, dan Simangumban berperan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten memuat beberapa sistem jaringan prasarana yang masing-masing diterjemahkan kedalam indikasi program. Rencana Struktur Ruang secara umum dan Sistem Jaringan Prasarana dan Transportasi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi- Darat dan Udara.
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi.
3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air - (Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi, Kabupaten/Kota; Jaringan Irigasi; Jaringan Air Baku dan Air Bersih; Sistem Pengendalian Banjir).
4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.
5. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan (Prasarana TPA dan TPS; Pengolahan Limbah Cair; Sistem Drainase Wilayah).
6. Rencana Pengembangan Sarana Lainnya (Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana Peribadatan; Sarana Perdagangan).



Gambar 2.7
Peta Sistem Jaringan Transportasi Kab. Tapanuli Utara

Rencana struktur ruang yang terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana pembangunan infrastruktur tampaknya disusun untuk mempercepat pembangunan ekonomi, namun tampak bahwa rencana struktur ruang tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup, seperti sumber daya air, hutan dan keanekaragaman hayati. Kajian mengenai perkiraan dampak struktur ruang terhadap lingkungan hidup telah dilakukan pada tahap pengkajian KLHS.

2.1.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pada RTRW Kabupaten Tapanuli Utara menyisihkan sekitar 37,1 persen wilayahnya sebagai kawasan lindung dan sisanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, hutan suaka alam dan kawasan lindung setempat. Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, lahan kering, lahan basa, perkebunan, hortikultura dan permukiman.

Tabel 2.4
Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017 - 2037

Pola	Rencana Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	2	3
Lindung	Hutan Lindung	127.994,23
Lindung	Hutan Suaka Alam	2.208,28
Lindung	Setempat	10.575,14
Sub Total		140.777,65
Budidaya	Hutan Produksi	22.449,78
Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	59.338,05
Budidaya	Lahan Kering	67.370,74
Budidaya	Lahan Basah	13.924,41
Budidaya	Perkebunan	30.583,82
Budidaya	Hortikultura	36.255,28
Budidaya	Pemukiman	8.671,28
Sub Total		238.593,36
TOTAL		379.371.01

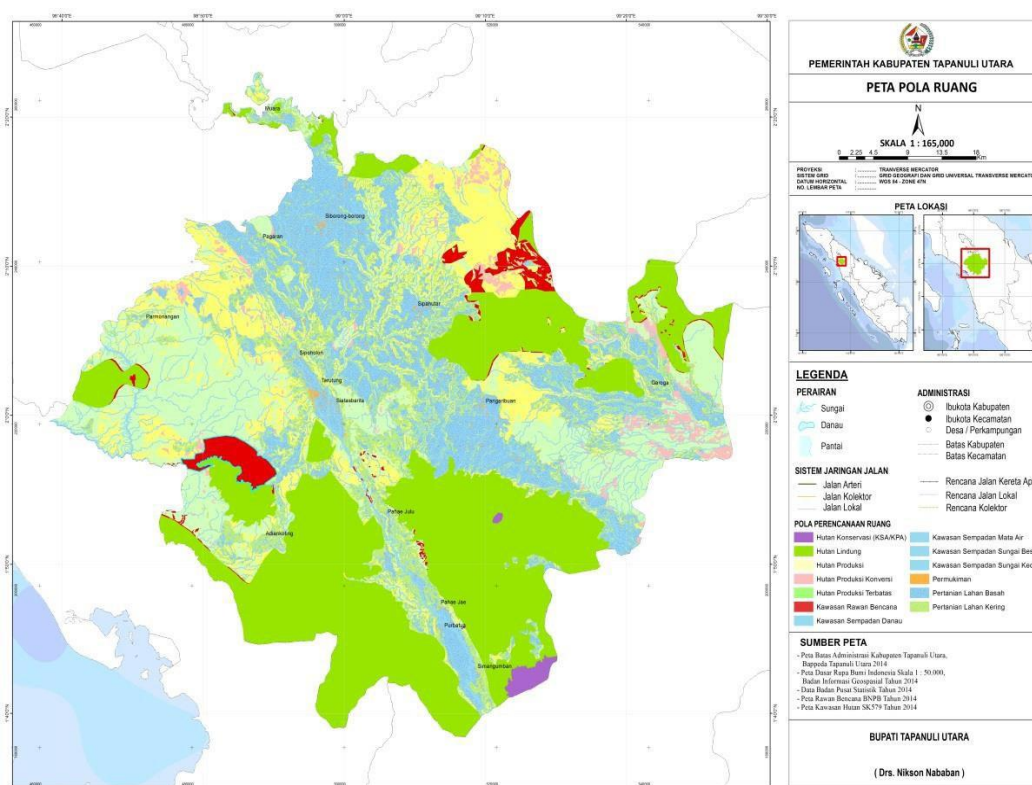
Sumber RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi dengan pendekatan kebijakan perwilayahan.

Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan diseluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah secara kewilayahan diarahkan menjadi lima pusat pelayanan, yaitu:

- Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan Tarutung.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar, Muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barita, Adiankoting dan Parmonangan.
- Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Gambar 2.8
Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

Selain pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian lahan yang diarahkan untuk budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Tabel 2.5
Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
I. KAWASAN LINDUNG		
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan ini mencakup Kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan yang berfungsi untuk menjaga fungsi utama sungai, waduk dan mata air. Kawasan ini mencakup daerah di sekitar Danau Toba, Kecamatan Muara.
3.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan yang berfungsi menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tipe ekosistemnya masih alami (belum diganggu manusia). Kawasan ini mencakup Kawasan Suaka Alam Dolok Saut Kecamatan Pangaribuan dan Sijaba Huta Ginjang Kecamatan Muara serta Kawasan Konservasi Simangumban.
4.	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan yang memiliki gejala geologi yang meliputi kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan Lindung Geologi tersebar di Kecamatan Sipahutar, Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Adiankoting, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan dan Garoga serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
II. KAWASAN BUDIDAYA		
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan yang berfungsi sebagai hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan ini mencakup hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara seluas 95.690 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah untuk pengembangan tanaman pangan seluas 36.839,193 Ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.500,01 Ha, kawasan tanaman tahunan/perkebunan seluas 16.159,001 Ha, kawasan pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Pahae Jae, Siborongborong, Purbatua dan Muara seluas + 4.570 Ha dan kawasan pengembangan peternakan ternak kecil di 15 kecamatan dan pengembangan ternak besar di Kecamatan Siborongborong, Muara, Parmonangan, Pagaran, Sipoholon, Garoga, Pangaribuan, Sipahutar dan Tarutung.
3.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan A, B dan C. Kawasan ini meliputi : (1) Kecamatan Parmonangan dan Pahae Julu berupa Kaolion. (2) Kecamatan Pangaribuan, Adiankoting dan Pahae Julu berupa Feldspar.

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
		<p>(3) Kecamatan Simangumban dan Pahae Jae berupa Zeolit.</p> <p>(4) Kecamatan Pagaran, Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, Tarutung, Adiankoting berupa Batu Gamping.</p> <p>(5) Kecamatan Pahae Jae dan Parmonangan berupa Batu Apung.</p> <p>(6) Kecamatan Tarutung dan Pahae Julu berupa Belerang.</p> <p>(7) Kecamatan Siborongborong berupa gambut.</p> <p>(8) Kecamatan Pangaribuan berupa mika.</p> <p>(9) Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar dan Pangaribuan berupa tras.</p> <p>(10) Kecamatan Adiankoting berupa granit.</p> <p>(11) Kecamatan Pahae Julu berupa batu setengah mulia dan sabak.</p> <p>(12) Kecamatan Parmonangan dan Pangaribuan berupa silica.</p> <p>(13) Kecamatan Pahae Julu dan Simangumban berupa lempung.</p> <p>(14) Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung, Sipahutar, Siatas Barita, Siborongborong, Pagaran, Purbatua, Adiankoting berupa pertambangan panas bumi.</p> <p>(15) Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Adiankoting, Pahae Jae, Simangumban, Purbatua, Siborongborong, Sipahutar, Sipoholon, Pangaribuan, Parmonangan dan Garoga berupa bahan tambang mineral logam.</p>
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang meliputi industri kecil menengah yang diarahkan di 15 kecamatan serta industri besar yang diarahkan ke Kecamatan Siborongborong dan Tarutung.
5.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	<p>Kawasan yang berfungsi untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepariwisataan, yang terdiri dari:</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi yang meliputi Panaroma Alam Hutaginjang dan Pantai Muara di Kecamatan Muara, Air Soda di Parbubu, Air Panas Hutabarat, Ugan dan Saitnihuta serta Gua Natumandi di Kecamatan Tarutung; Air Panas Sipoholon di Kecamatan Sipoholon dan Pacuan Kuda di Kecamatan Siborongborong;</p> <p>(2) Kawasan peruntukan pariwisata budidaya/sejarah yang meliputi Sopo Partungkoan dan Pohon Durian di Kecamatan Tarutung serta Situs Hindu Hopong di Kecamatan Simangumban;</p> <p>(3) Kawasan peruntukan wisata rohani meliputi Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barita; Makam Musnson & Lyman - Lobu Pining di Kecamatan Adiankoting; Kantor Pusat HKBP Pea Raja, Tugu Nomensen-Saitnihuta, Gereja Dame-Saitnihuta, Makam</p>

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	2	3
		Pendeta Johansen - Pansur Napitu di Kecamatan Tarutung, Seminarium HKBP di Kecamatan Sipoholon dan Makam Pendeta Johannes Siregar di Kecamatan Muara.
6.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan yang berfungsi untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan ini terdiri dari : (1) Kawasan permukiman berkepadatan tinggi di Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon dan Sipahutar; (2) Kawasan permukiman berkepadatan sedang di Kecamatan Pagaran, Garoga, Adiankoting, Muara dan Parmonangan; (3) Kawasan permukiman berkepadatan rendah di Kecamatan Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua dan Pangaribuan.
III. KAWASAN STRATEGIS		
1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kawasan Minapolitan dan Kawasan Bandara Silangit.
2.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi Kawasan Suaka Margasatwa Dolok Saut, Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang dan Kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
3.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yang mencakup Kawasan Wisata Rohani dengan penekanan sosial budaya.
4.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yang mencakup Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dengan penekanan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dan Kawasan Sebaran Potensi Tenaga Air dengan penekanan sumberdaya alam.

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

Dari total wilayah daratan seluas 3.793,71 Km², luas hutan lindung mencapai 32,6 persen, hutan produksi terbatas 12,9 persen dan hutan produksi seluas 12,3 persen. Sedangkan untuk permukiman adalah 1,7 persen dari seluruh luas daratan. Penggunaan lahan untuk pertanian adalah sebesar 38 persen. Penggolongan lahan ini dalam bentuk penggunaan lahan utama dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Jenis Guna Lahan	Luas (Km2)	%
1	2	3	4
1.	Hutan Lindung (HL)	1.236,7	32,6
2.	Hutan Produksi (HP)	0,4660	12,3
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	0,4909	12,9
4.	Hutan Suaka Alam (HSA)	0,0182	0,48
5.	Hutan Rakyat	0,2475	6,5
6.	Kawasan Sempadan Danau	0,0017	0,05
7.	Kawasan Sempadan Mata Air	0,0009	0,02
8.	Kawasan Sempadan Sungai Besar	0,0154	0,4
9.	Kawasan Sempadan Sungai Kecil	0,0934	2,5
10.	Kawasan Tambang	0,0079	0,21
11.	Holtikultura	0,1761	12,3
12.	Perkebunan	0,1616	4,3
13.	Permukiman	0,0641	1,7
14.	Pertanian Lahan Basah	0,3684	9,7
15.	Pertanian Lahan Kering	0,4450	11,7
Jumlah.....		3.793,71	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

2.1.3 Daerah Rawan Bencana

Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai struktur sesar/patahan yang merupakan proses dislokasi pada batuan yang diikuti oleh pergeseran batuan. Indikasi adanya proses ini umumnya dapat terlihat dari gejala-gejala morfologi pada peta topografi seperti adanya pembelokan sungai, pergeseran bukit dan bentuk-bentuk khas lain yang menunjukkan gejala adanya sesar/patahan.

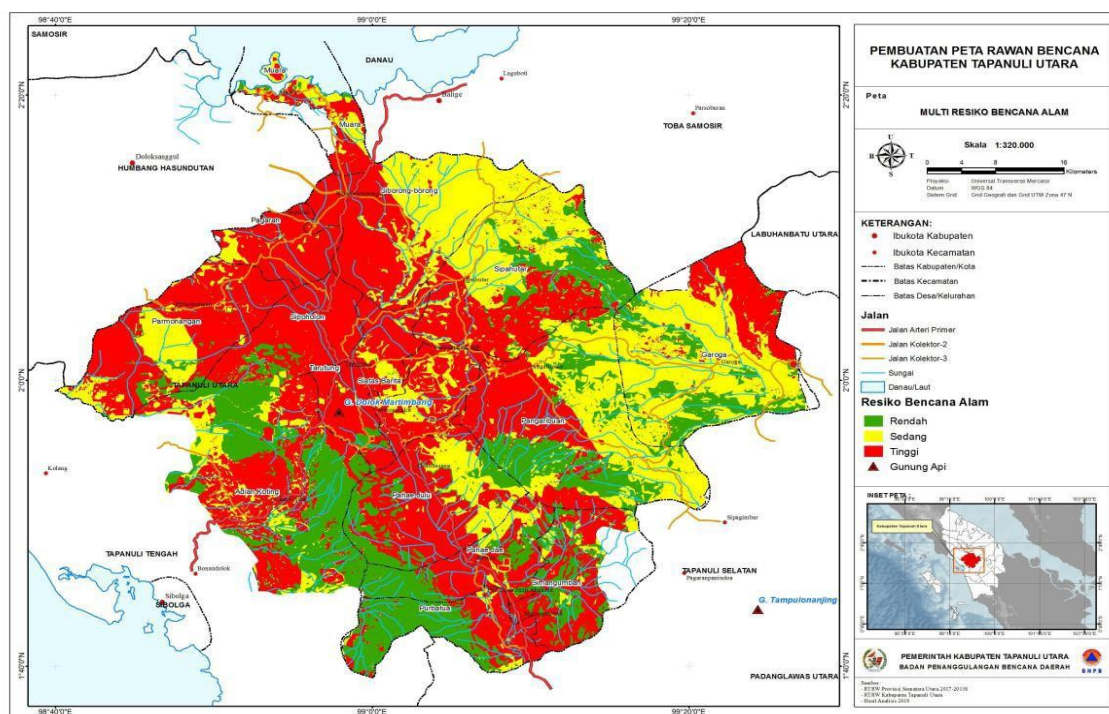
Tabel 2.7
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Bencana Kab. Tapanuli Utara 2017 – 2037

Kawasan Lindung Bencana	Pada Kawasan Lindung (Ha)	Pada Kawasan Budidaya (Ha)	Total
1	2	3	4
Longsor	19.128,62	51.601,87	70.730,49
Gempa	8.903,88	9.641,20	18.545,08
Total Rawan Bencana Tiap Kawasan	28.032,50	61.243,07	89.275,57

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

Sesar/patahan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah bagian dari Sesar Semangko yang diinterpretasikan sebagai suatu sesar mendatar yang umumnya berarah relatif barat laut tenggara yang masih aktif dan telah terjadi beberapa kali gempa bumi yang cukup besar. Kejadian gempa dan curah hujan yang diatas rata-rata akan menyebabkan potensi timbulnya longsor terutama mengarah ke kawasan permukiman penduduk di bagian tengah. Dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 telah ditepakan dalam pola ruang terkait penetapan kawasan lindung untuk daerah rawan bencana yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Gambar 2.9
Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber: BPBD Kab. Tapanuli Utara, Peta Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Utara

Perlu digarisbawahi bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki modal alamiah yang tidak ternilai harganya yaitu hutan primer yang sangat luas, terutama Hutan Batang Toru. Pada tahun 2013, hutan primer di Kabupaten Tapanuli Utara mencakup wilayah seluas sekitar 186,116 Ha, atau sekitar 50,4 persen dari total wilayah kabupaten, lebih tinggi dari rata-rata proporsi tutupan hutan Pulau Sumatera sebesar 30 persen. Laju deforestasi wilayah hutan primer ini cukup rendah selama kurun waktu 2010-2013, yaitu 0,17 persen per tahun. Hutan Batang Toru merupakan aset yang tidak terukur nilainya karena fungsi kuncinya sebagai daerah tangkapan air untuk Kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten/kota yang berada di wilayah hilir serta kekayaan keanekaragaman hayatinya.

2.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran dan kemiskinan serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 sebanyak 319.110 jiwa.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)/Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Parmonangan	16.366	16.493	17.019	14.952	15.046
2	Adiankotoring	16.274	16.521	16.816	15.528	15.475
3	Sipoholon	25.585	26.129	27.090	24.529	24.644
4	Tarutung	43.034	43.735	45.102	42.882	43.198
5	Siatas Barita	14.783	14.745	15.222	14.430	14.629
6	Pahae Julu	14.527	14.604	15.223	13.685	13.865
7	Pahae Jae	12.618	12.997	13.480	12.406	12.276
8	Purbatua	8.942	9.195	9.450	8.487	8.392
9	Simangumban	9.063	9.244	9.766	8.647	8.668
10	Pangaribuan	31.548	32.271	33.177	30.594	30.355
11	Garoga	18.872	19.283	20.233	18.358	18.475
12	Sipahutar	28.871	29.588	30.388	28.611	28.664
13	Siborongborong	52.925	54.583	56.618	50.294	51.383
14	Pagaran	20.266	20.801	21.767	19.120	19.257
15	Muara	15.544	15.842	16.366	15.147	14.783
	Kab. Tapanuli Utara	329.218	336.031	347.717	317.036	319.110

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 adalah sebanyak 319.110 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2020 terdapat di Kecamatan Siborong-borong yaitu sebanyak 51.383 jiwa atau 16,10 persen dari total jumlah penduduk dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Purbatua yaitu 8.392 jiwa atau 2,62 persen.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Menurut BPS bahwa Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,931,594,980.61	46,61	3,087,034,159.40	45,65	3,223,924,893.31	44,18	3,389,840,341.19	42,97	3.583.971,91	43,31
2	Pertambangan dan Penggalian	4,365,428.20	0,07	4,695,788.20	0,07	5,016,758.20	0,07	5,349,797.78	0,07	5.804,95	0,07
3	Industri Pengolahan	126,751,468.72	2,01	143,773,366.63	2,13	161,397,523.65	2,21	175,935,355.81	2,23	188.103,55	2,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,501,561.45	0,07	5,178,790.52	0,07	6,093,064.40	0,08	7,217,508.64	0,09	7.942,61	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,758,831.58	0,11	7,178,664.28	0,11	7,485,214.50	0,10	7,773,082.26	0,10	8.165,21	0,10
6	Konstruksi	804,147,195.62	13,57	903,642,391.28	14,53	1,025,138,804.76	14,05	1,138,792,991.61	14,44	1.170.047,69	14,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	841,694,288.28	12,81	915,183,908.78	12,93	1,056,492,848.18	14,48	1,204,109,977.26	15,26	1.297.159,79	15,68
8	Transportasi dan Pergudangan	309,998,142.98	4,92	339,380,491.90	5,01	370,623,729.52	5,08	403,176,040.21	5,11	401.972,94	4,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	161,230,116.84	2,57	174,070,746.71	2,58	187,618,738.36	2,57	200,935,859.52	2,55	202.583,39	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	48,156,830.00	0,75	50,318,681.92	0,72	53,530,235.18	0,73	61,137,532.05	0,77	67.014,14	0,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,482,654.62	1,70	114,135,710.60	1,69	120,773,281.12	1,66	128,625,464.41	1,63	133.078,50	1,61
12	Real Estate	157,553,486.28	2,48	168,911,064.95	2,47	179,715,257.42	2,46	190,553,016.28	2,42	198.042,62	2,39
13	Jasa Perusahaan	18,259,404.24	0,29	19,826,612.47	0,29	21,160,976.90	0,29	23,294,589.53	0,30	25.893,33	0,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,926,201.59	9,54	660,794,666.51	9,31	696,437,631.32	9,54	758,517,852.10	9,61	780.178,16	9,43
15	Jasa Pendidikan	106,595,982.29	1,63	112,293,196.42	1,60	118,268,557.68	1,62	125,487,738.67	1,59	133.147,58	1,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,955,636.61	0,74	50,146,631.22	0,70	53,223,705.72	0,73	57,596,881.16	0,73	60.474,12	0,73
17	Jasa lainnya	8,317,865.06	0,13	9,126,274.52	0,13	9,877,880.73	0,14	10,705,529.56	0,14	10.853,14	0,13
	PDRB.....	6,300,290,074.97	100	6,765,691,146.31	100,00	7,296,779,100.95	100	7,889,049,558.04	100	8.274.433,62	100

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,415,455,975.91	47,96	2,474,596,684.81	47,39	2,533,960,024.49	45.81	2,601,040,478.00	45,12	2.660.742,48	45,47
2	Pertambangan dan Penggalian	3,762,947.38	0,07	4,000,274.44	0,08	4,207,017.01	0.08	4,406,483.27	0,08	4.668,90	0,08
3	Industri Pengolahan	101,726,737.82	2,01	108,309,065.79	2,05	114,605,547.29	2.08	122,242,518.41	2,12	124.811,82	2,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,583,123.87	0,11	5,884,119.00	0,11	6,303,543.92	0.11	6,868,135.62	0,12	7.544,15	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,364,678.68	0,11	5,466,547.28	0,10	5,618,793.81	0.10	5,817,975.35	0,10	6.072,48	0,10
6	Konstruksi	629,966,048.39	12,54	681,156,951.23	13,15	736,605,318.00	13.39	798,351,915.78	13,85	791.882,98	13,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	637,664,692.72	12,32	684,638,149.28	12,37	736,718,859.18	13.53	793,919,610.40	13,77	824.019,73	14,08
8	Transportasi dan Pergudangan	237,217,567.73	4,68	252,567,253.64	4,78	268,420,441.22	4.87	285,440,214.76	4,95	274.441,89	4,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,990,466.68	2,23	119,980,218.53	2,26	127,082,528.61	2.31	134,991,871.59	2,34	135.381,19	2,31
10	Informasi dan Komunikasi	47,653,288.91	0,94	48,876,594.96	0,93	50,211,138.94	0.91	52,832,116.78	0,92	57.326,15	0,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	79,909,157.61	1,58	82,769,108.32	1,57	85,629,793.34	1.55	88,332,938.02	1,53	91.330,70	1,56
12	Real Estate	110,692,778.51	2,16	114,905,736.30	2,15	118,393,252.53	2.15	121,763,788.38	2,11	122.998,54	2,10
13	Jasa Perusahaan	14,254,062.15	0,28	14,790,812.47	0,28	15,361,641.50	0.28	15,918,494.28	0,28	16.718,15	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	527,284,675.74	10,30	540,832,924.62	10,15	562,256,605.50	10.2	585,167,903.84	10,15	580.304,08	9,92
15	Jasa Pendidikan	92,334,771.13	1,79	93,515,137.88	1,76	95,273,013.00	1.73	97,137,480.97	1,68	102.102,80	1,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,529,531.88	0,79	41,326,145.54	0,76	42,177,395.63	0.77	43,043,699.27	0,75	43.461,24	0,74
17	Jasa lainnya	6,804,341.94	0,13	7,073,052.12	0,13	7,365,183.73	0.13	7,661,694.24	0,13	7.595,97	0,13
	PDRB.....	5,070,194,847.05	100	5,280,688,776.21	100	5,510,190,097.70	100	5,764,937,318.96	100	5.851.403,24	100

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Utara, nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sebesar 5,07 triliun rupiah dan meningkat menjadi 5.85 triliun pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini membuat banyak lapangan usaha mengalami kesulitan untuk tumbuh. Apabila kita melihat tabel 2.11 maka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 1,50 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus sebesar 1,07 persen dan secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4,12	4,15	4.35	4.62	1,50
2.	Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,12	5.18	5.22	-1,07
3.	Nasional	5,02	5,07	5.17	5.02	-2,07

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Akibat dampak Covid-19 dari 7 (tujuh) Kabupaten di Kawasan Danau Toba, terdapat 2 (dua) Kabupaten yang pertumbuhan ekonomi melambat pada Tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,50 persen dan Kabupaten Simalungun sebesar 1,01 persen sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4,12	4,15	4.35	4.62	1,50
2.	Kabupaten Simalungun	5,4	5,18	5,18	5,2	1,01
3.	Kab. Humbang Hasundutan	5,02	5,04	5,04	4,94	-0,13
4.	Kabupaten Toba	4,78	4,96	4,96	4,85	-0,27
5.	Kabupaten Samosir	5,27	5,58	5,58	5,7	-0,59
6.	Kabupaten Karo	5,17	4,55	4,55	4,6	-0,8
7.	Kabupaten Dairi	5,07	5,01	5,01	4,82	-0,94

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang tahun 2020 didukung oleh tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan Tahun 2019 adalah pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 3,29 persen dan lapangan usaha pendidikan yang tumbuh 3,15 persen.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	2,45	2,40	2,65	2,30
2	Pertambangan dan Penggalian	6,29	6,31	5,17	4,74	5,96
3	Industri Pengolahan	6,28	6,47	5,81	6,66	2,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,72	5,39	7,13	8,96	9,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,80	1,90	2,79	3,54	4,37
6	Konstruksi	8,90	8,13	8,14	8,38	-0,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,24	7,37	7,61	7,76	3,79
8	Transportasi dan Pergudangan	5,57	6,47	6,28	6,34	-3,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	5,25	5,92	6,22	0,29
10	Informasi dan Komunikasi	1,71	2,57	2,73	5,22	8,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	3,58	3,46	3,16	3,39
12	Real Estate	4,74	3,81	3,04	2,85	1,01
13	Jasa Perusahaan	2,78	3,77	3,86	3,62	5,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,09	2,57	3,96	4,07	-0,83
15	Jasa Pendidikan	1,61	1,28	1,88	1,96	5,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,00	1,97	2,06	2,05	0,97
17	Jasa lainnya	3,99	3,95	4,13	4,03	-0,86
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,12	4,15	4,35	4,62	1,50

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.13, beberapa lapangan usaha sepanjang tahun 2020 ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah :

1. Pertambangan dan Penggalian dari 4,74 persen menjadi 5,96 persen (tumbuh sebesar 1,22 persen)
2. Pengadaan Listrik dan Gas dari 8,96 persen menjadi 9,84 persen (tumbuh sebesar 0,88 persen)
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 3,54 persen menjadi 4,37 persen (tumbuh sebesar 0,83 persen)

4. Informasi dan Komunikasi dari 5,22 persen menjadi 8,51 persen (tumbuh sebesar 3,29 persen)
5. Jasa Keuangan dan Asuransi dari 3,16 persen menjadi 3,39 persen (tumbuh sebesar 0,23 persen)
6. Jasa Perusahaan dari 3,62 persen menjadi 5,02 persen (tumbuh sebesar 1,40 persen)
7. Jasa Pendidikan dari 1,96 persen menjadi 5,11 persen (tumbuh sebesar 3,15 persen)

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pendapatan per kapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata. PDRB per kapita dapat diukur dengan menggunakan pendekatan PDRB atas harga konstan.

Tabel 2.14
PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	PDRB ADHB	21.312.628,59	22.718.451,43	24.332.248,79	26.140.944,69	27.246.495
2.	PDRB ADHK	17.151.461,02	17.731.975,77	18.374.588,91	19.102.542,89	19.267.812

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2020

PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 21.312.628,59 rupiah dan meningkat sampai dengan Rp. 27.246.495 rupiah di tahun 2020. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2016-2020 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp. 19.267.812. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita secara positif akan meningkatkan daya beli. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Tapanuli Utara yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pasar lokal Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka pendapatan per kapita penduduk termasuk rendah. Kabupaten Karo menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Pendapatan per Kapita Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tapanuli Utara	21.312.628,59	22.718.451,43	24.332.248,79	26.140.945	27.246.495
2.	Simalungun	35.326.467,10	38.211.192,09	41.038.393,00	43.848.908	45.247.609
3.	Humbang Hasundutan	25.828.988,59	27.483.734,02	29.325.411,00	31.291.803	31.930.248

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
4.	Toba	33.954.467,90	36.499.646,11	39.204.402,00	41.779.457	42.524.221
5.	Samosir	27.655.311,47	29.989.293,81	32.469.661,00	35.143.764	35.852.360
6.	Karo	42.179.797,30	44.801.602,99	46.917.382,00	49.497.030	49.703.135
7.	Dairi	26.490.917,86	28.312.002,77	30.228.407,00	32.241.619	32.639.340

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2017-2021

2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sidempuan.

2.2.1.5 Kemiskinan

Pada tahun 1990 World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu Kemiskinan adalah kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter, tidak mempunyai akses ke sekolah, tidak mengetahui bagaimana caranya membaca, tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang, kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih, ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Definisi kemiskinan

lainnya juga dapat didasari pada jenis kemiskinan secara konseptual yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006). Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, maka penduduk dikatakan miskin secara absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut tetap (tidak berubah) dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Namun demikian, antara negara yang satu dengan lainnya memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, World Bank menetapkan garis kemiskinan internasional agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Garis kemiskinan tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US \$ 1 atau \$ 2 per hari dalam dolar PPP (Purchasing Power Parity). Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2008). Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengurangi tingkat kemiskinan sehingga selama periode 2016-2020 terjadi penurunan tingkat kemiskinan dimana tahun 2016 BPS memperkirakan sekitar 33.200 jiwa atau 11,25 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 28.410 jiwa penduduk atau 9,37 persen, namun Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Jumlah Penduduk (Jiwa)	295.613	297.806	299.881	301.789	312.758
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	33.200	33.750	29.200	28.570	28.410
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,25	11,35	9,75	9,48	9,37
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,60	1,83	1,08	1,60	1,18
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,36	0,48	0,16	0,16	0,47
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	325.606	344.644	357.464	377.948	406.813

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tetap dilakukan sepanjang waktu melalui berbagai kegiatan. Selain perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, rumah layak huni), pemberian bantuan, pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai jenis pelatihan yang mengikutsertakan masyarakat juga tetap dilakukan. Upaya ini dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin dari 11,25 persen pada tahun 2016 menjadi 9,37 persen pada tahun 2020. Apabila dilihat mulai tahun 2016-2020, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Tahun 2016 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tapanuli adalah 0,36 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,21. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa jauh selisih pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut keluar dari kemiskinan.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maka angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019 masih lebih tinggi

sebesar 0,54 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional maka angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 masih lebih rendah 0,82 persen.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	11,25	11,35	9,75	9,48	9,37
2.	Provinsi Sumatera Utara	10,27	9,28	8,94	8,63	8,83
3.	Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara masih lebih tinggi walaupun ada kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Kabupaten Dairi menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terendah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	11,25	11,35	9,75	9,48	9,37
2.	Kabupaten Simalungun	10,81	10,65	9,31	8,81	8,46
3.	Kab. Humbang Hasundutan	9,78	9,85	9	8,75	9,36
4.	Kabupaten Toba	10,08	10,19	8,67	8,6	8,71
5.	Kabupaten Samosir	14,4	14,72	13,38	12,52	12,48
6.	Kabupaten Karo	9,81	9,97	8,67	8,23	8,7
7.	Kabupaten Dairi	8,9	8,87	8,2	7,7	8,04

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2017-2021

Secara nasional upaya penanggulangan kemiskinan tetap dilakukan melalui pemberian bantuan kepada keluarga tidak mampu yang terdata pada Basis Data Terpadu. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah rumah tangga yang tercatat pada Basis Data Terpadu adalah sebanyak 26.298 rumah tangga dengan jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial pangan (Rastr), bantuan iuran kesehatan dan bantuan Program Keluarga Harapan. Melalui bantuan sosial yang diberikan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.19
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2020

Kecamatan	Jenis Bantuan														
	Jumlah BDT (Rumah Tangga)			Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)			Penerima Bantuan Iuran (PBI) Sesuai BDT			Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BDT			Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)		
				(KK)			(Jiwa)			(Jiwa)			(KK)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Parmonangan	1.478	1.412	1.408	996	996	1.135	5.084	5.084	5.486	2.325	726	214	726	720	748
Adiankoting	1.868	1.784	1.769	1.125	1.125	1.441	5.885	5.885	5.970	2.924	857	231	857	834	819
Sipoholon	2.185	2.108	2.087	1.076	1.076	1.483	6.674	6.674	7.685	2.754	791	247	791	777	708
Tarutung	3.032	2.914	2.849	1.253	1.253	1.940	8.553	8.553	10.021	3.003	735	144	735	727	788
Siatas Barita	1.465	1.303	1.287	760	760	885	3.804	3.804	4.633	1.152	485	64	485	479	467
Pahae Julu	1.685	1.699	1.674	894	894	1.951	4.842	4.842	5.489	1.831	584	144	584	576	603
Pahae Jae	1.257	1.182	1.177	629	629	979	3.527	3.527	4.124	1.377	438	84	438	425	440
Purbatua	1.056	1.061	1.050	557	557	796	2.916	2.916	2.911	1.008	375	57	375	370	414
Simangumban	1.044	934	930	704	704	879	3.566	3.566	3.967	1.351	475	114	475	469	472
Pangaribuan	2.334	2.191	2.156	1.308	1.308	1.719	7.597	7.597	8.673	3.485	1.061	262	1.061	1.056	1043
Garoga	2.298	2.283	2.272	1.443	1.443	1.701	7.541	7.541	8.285	217	1.058	248	1.058	1.040	1044
Sipahutar	2.493	2.376	2.363	1.535	1.535	1.942	916	9.160	10.073	2.926	1.089	176	1.089	1.075	1156
Siborongborong	3.082	2.866	2.822	2.035	2.035	2.393	1.155	11.550	12.190	3.733	1.322	309	1.322	1.241	1336
Pagaran	1.262	1.213	1.202	836	836	1.013	5.026	5.026	5.380	2.432	683	290	683	670	642
Muara	1.277	1.271	1.247	787	787	1.000	4.382	4.382	5.044	1.648	591	83	591	585	583
Total.....	27.816	26.597	26.293	15.938	15.938	20.547	71.468	90.107	99.931	32.166	11.270	2.667	11.270	11.044	11.263

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - e_0) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
2. Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
3. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS) yang didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Selanjutnya secara global, IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara maju, negara

berkembang atau negara terbelakang. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu : IPM rendah ($IPM < 60$); IPM sedang ($60 \leq IPM < 70$); IPM tinggi ($70 \leq IPM < 80$); IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2016 berada pada posisi sangat tinggi, yaitu 71,96 tahun 2016 dan menjadi 73,47 pada tahun 2020. Secara umum nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2016 mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik. Apabila dibandingkan nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, maka capaian nilai IPM masih lebih tinggi. Hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga hasil pembangunan manusia dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.20
IPM Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kab. Tapanuli Utara	71,96	72,38	72,91	73,33	73,47
Prov. Sumatera Utara	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka nilai IPM di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung lebih tinggi daripada beberapa daerah. Kabupaten Toba menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
IPM Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	71,96	72,38	72,91	73,33	73,47
2.	Kabupaten Simalungun	71,48	71,83	72,49	72,98	73,25
3.	Kab. Humbang Hasundutan	66,56	67,3	67,96	68,83	68,87
4.	Kabupaten Toba	73,61	73,87	74,48	74,92	75,16
5.	Kabupaten Samosir	68,82	69,43	69,99	70,55	70,63
6.	Kabupaten Karo	73,29	73,53	73,91	74,25	74,43
7.	Kabupaten Dairi	69,61	70,36	70,89	71,42	71,57

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2017-2021

2.2.1.7 Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Salah satu indikator suksesnya pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi dan dinamisnya stabilitas sosial masyarakat sehingga mampu meningkatkan investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat. Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan rendah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan tinggi tumbuh dengan cepat. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik di negara miskin, negara berkembang maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Tabel 2.22
Indeks Gini Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kab. Tapanuli Utara	0,308	0,328	0,282	-	-
Prov. Sumatera Utara	0,319	0,315	0,318	0,317	0,316
Nasional	0,397	0,393	0,389	0,382	0,381

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Artinya distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Apabila kita melihat tabel 2.23, maka angka melek huruf penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 adalah sebesar 99,67 persen dan angka buta huruf sebesar 0,33 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian karena ketidakmapuan membaca dan menulis seseorang akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut di waktu yang akan datang.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.23
Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

Kemampuan Baca Tulis	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Huruf Latin	99,70	98,57	99,12	99,81	98,72	99,25	99,59	98,91	99,25	99,95	99,59	99,77	99,92	99,43	99,67
Huruf Latin dan Arab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huruf Latin dan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huruf Arab	1,12	1,60	1,37	2,58	2,23	2,4	2,44	3,08	2,77	4,29	2,97	3,61	2,86	3,09	2,98
Huruf Lainnya	1,92	1,66	1,79	4,93	4,23	4,57	5,39	4,51	4,94	7,41	6,82	7,11	7,43	7,17	7,29
Melek Huruf	99,70	98,75	99,22	100	98,72	99,34	99,74	99,04	99,38	99,95	99,59	99,77	99,92	99,43	99,67
Buta Huruf	0,30	1,25	0,78	0	1,28	0,66	0,26	0,96	0,62	0,05	0,41	0,23	0,08	0,57	0,33
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya penduduk bersekolah mulai sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Dari Tabel 2.24 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 9,32 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,85 tahun pada tahun 2020. Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2.24
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	9,32	9,46	9,65	9,71	9,85
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	9,11	9,25	9,34	9,45	9,54
Nasional	Tahun	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a. SD/MI	%	105,38	119,75	104,83	95,73	96,55
b. SMP/MTs	%	98,95	114,23	114,95	115,23	112,24

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

Nilai APK di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan untuk semua jenjang tingkat pendidikan. Makin tinggi nilai APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota atau daerah perbatasan yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

2.2.2.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapainya. Sejalan dengan itu, pola dan distribusi pendidikan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan penduduk yang semakin membaik. Secara umum persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016 - 2020

No	Ijazah Tertinggi	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak/belum pernah sekolah	0,00	0,80	0,65	0,54	0,39
2	Tidak/belum tamat SD	20,98	19,90	18,11	16,48	15,52
3	SD/MI/Sederajat	36,14	21,09	20,95	21,07	16,02
4	SMP/MTs/Sederajat	12,30	22,82	22,77	22,20	27,51
5	SMA/MA/Sederajat	20,83	22,80	26,72	28,20	29,08
6	SMK	3,44	3,86	4,67	4,37	5,51
7	Diploma I/II	0,65	0,78	0,39	0,07	0,00
8	Diploma III	0,77	2,14	0,97	1,76	0,90
9	Diploma IV/S-1	4,89	5,81	4,77	5,28	5,06
	Jumlah.....	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.26, maka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi pendidikan dasar jumlahnya semakin kecil dan pendidikan menengah semakin tinggi. Keinginan penduduk untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat dan perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Adanya program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis melalui mekanisme pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pendidikan tertinggi penduduk. Demikian juga halnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi Diploma IV/S-1 yang angkanya masih sangat kecil perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan tinggi, terutama universitas negeri. Saat ini jumlah universitas negeri di Provinsi Sumatera Utara hanya ada 3 dan apabila dibandingkan dengan potensi mahasiswa (lulusan sekolah menengah sederajat) yang ada, maka kebutuhan atas keberadaan universitas negeri sangat tinggi.

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM berfungsi hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah untuk SD/MI adalah umur 7-12 tahun, untuk SMP/MTs adalah umur 13-15 tahun dan untuk SMA/MA/SMK adalah umur 16-18 tahun. Perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Angka Partisipasi Murni (APM)						
a. SD/MI	%	90,18	90,08	89,05	84,64	83,76
b. SMP/MTs	%	72,35	81,30	100,50	79,43	74,58

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah siswa yang masuk Sekolah Dasar dengan usia dibawah 7 tahun. Kemajuan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi atau kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah adalah aspek pendidikan penduduk.

2.2.2.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian bayi di Indonesia saat ini dipergunakan dari hasil berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Tabel 2.28
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	5.775	5.762	6.996	4.819	4.513
2	Angka kematian bayi (jiwa)	66	50	30	27	50
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran	11,43	8,68	6,32	5,60	11,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, AKB di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah dan hal ini kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

2.2.2.7. Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama disektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 2.29
Angka Harapan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	67,71	67,86	68,11	68,46	68,63
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	68,33	68,37	68,61	68,95	69,10
Nasional	Tahun	70,90	71,06	71,20	71,34	71,52

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan serta peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

2.2.2.8. Penduduk Bekerja

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dari pengertian tersebut terdapat kata "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan," itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan penduduk di satu wilayah yang masuk dalam usia kerja (diatas 15 tahun sampai 64 tahun) baik yang bekerja maupun tidak bekerja (menganggur) namun tidak termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Jadi angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja, hal ini karena penduduk yang tidak aktif

dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja.

Tabel 2.30
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian	-	65,91	67,80	60,39	61,90
2	Manufaktur	-	3,60	6,09	11,59	10,12
3	Jasa-jasa	-	30,49	26,11	28,02	27,97
	Jumlah.....	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Seiring dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara terlihat mulai adanya pergeseran lapangan pekerjaan utama dari sebelumnya bekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor jasa-jasa. Pergeseran ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa secara kualitas terjadi peningkatan SDM pada tenaga kerja diluar sektor pertanian sehingga tenaga kerja mampu beralih pada profesi selain pertanian. Namun hal ini juga harus tetap dicermati mengingat bahwa penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Tapanuli Utara saat ini adalah sektor pertanian. Artinya berkurangnya keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian harus diimbangi dengan penggunaan teknologi untuk menunjang sektor pertanian agar tetap dapat berkembang. Tingkat pengangguran Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu Tahun 2017-2019 mengalami penurunan, yaitu dari 1,89 pada tahun 2017 menjadi 1,33 pada tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, maka terjadi peningkatan angka pengangguran baik di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional.

Tabel 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kab. Tapanuli Utara	-	1,89	1,42	1,33	2,94
Provinsi Sumatera Utara	5,84	5,60	5,56	5,41	6,91
Nasional	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung tinggi daripada beberapa daerah. Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi daerah dengan TPT terendah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan
Danau Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	-	1,89	1,42	1,33	2,94
2.	Kabupaten Simalungun	-	5,62	5,1	4,39	4,58
3.	Kab. Humbang Hasundutan	-	0,31	0,34	0,33	0,84
4.	Kabupaten Toba	-	2,18	2,15	1,26	2,5
5.	Kabupaten Samosir	-	1,28	1,35	1,25	1,2
6.	Kabupaten Karo	-	1,34	1,5	1,09	1,83
7.	Kabupaten Dairi	-	1,42	1,69	1,58	1,75

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2017-2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Seni dan budaya daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan, khususnya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, dimana Tarutung sebagai ibukota kabupaten selama ini telah dikenal sebagai Kota Wisata Rohani. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama pemangku kepentingan lainnya berusaha mengembangkan seni dan budaya di daerah ini dengan mengikuti berbagai event kebudayaan yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara, pemerintah provinsi/kabupaten lainnya maupun untuk tingkat nasional. Terjadinya pandemic Covid-19 tahun 2020 menyebabkan kegiatan budaya yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.33
Perkembangan Seni Budaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di daerah (kali)	4	3	2	0	0
2	Kegiatan seni budaya yang diikuti di luar daerah (kali)	-	-	-	-	-
3	Jumlah group kesenian (kelompok)	2	3	-	-	-
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni & budaya (unit)	1	1	1	1	1
5	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan (unit)	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Olahraga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Melalui olahraga pemuda diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olahraga merupakan salah satu sarana dalam

mengembangkan diri yang nantinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah, dimana untuk mengembangkan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara telah tersedia berbagai fasilitas pendukung.

Tabel 2.34
Prestasi Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Perolehan medali emas tingkat provinsi	3	4	30	27	5
2	Perolehan medali perak tingkat provinsi	4	5	24	38	2
3	Perolehan medali perunggu tingkat provinsi	6	6	23	49	9
4	Perolehan medali emas tingkat nasional	1	1	14	21	8
5	Perolehan medali perak tingkat nasional	4	3	12	20	8
6	Perolehan medali perunggu tingkat nasional	5	4	11	22	10
7	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	-	-	-	-	-
	Lapangan olahraga	4	4	4	4	4
	Gedung olahraga	-	-	-	-	-
8	Jumlah club olahraga tingkat kabupaten	22	22	22	22	22

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara, 2021

Secara umum sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan prestasi olahraga melalui perolehan medali di semua peringkat baik di tingkat provinsi maupun nasional. Namun berkurang pada Tahun 2020. Adapun cabang olahraga penyumbang medali terbanyak adalah cabang olahraga karate, tinju dan wushu.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Urusan wajib yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah terbagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, bahwa untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah, perlu melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus. Yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Penetapan Daerah Khusus ini bertujuan untuk memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah.

Sekaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Kriteria Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil. Peraturan ini ditetapkan bertujuan sebagai acuan dalam menseleksi dan menetapkan sekolah yang memerlukan dukungan khusus berdasarkan kriteria aksesibilitas dan sarana dan prasarana dasar.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0-6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 4-≤6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 0-<2 tahun, 2-<4 tahun, 4-≤6 tahun dan program pengasuhan untuk anak usia 0-≤6 tahun, kelompok bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2-<4 tahun dan 4-≤6 tahun.

Tabel 2.35
PAUD di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok PAUD sejenis (unit)	227	250	255	275	278
2	Jumlah Guru PAUD	648	570	596	718	746
3	Jumlah Siswa PAUD	6.173	5.993	7.107	7.571	7.785

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, 2021

Tabel 2.35 menunjukkan bahwa jumlah kelompok, guru dan peserta PAUD mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara semakin peduli terhadap masalah pendidikan anak usia dini sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk kedepannya.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS juga dapat digunakan melihat tingkat kemampuan lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam menyerap warga belajar terutama anak usia sekolah.

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2016-2020

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	7 - 12 tahun	99,13	111,07	111,17	99,89	83,76
2	13 - 15 tahun	97,15	100,40	150	86,56	74,58

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Dari tabel 2.36 menunjukkan bahwa secara umum nilai APS menurut tingkatan usia, terutama untuk pendidikan dasar sudah bagus. Kemudian nilai APS menjadi turun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (akademi, perguruan tinggi). Salah satu penyebabnya adalah dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat juga oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung.

c. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan

Peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara telah memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilihat dari banyak faktor, diantaranya angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah. Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus pada tingkat pendidikan per jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tahun sebelumnya, sedangkan angka melanjutkan sekolah menunjukkan persentase murid yang melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.37
Persentase Kelulusan dan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I.	Angka Kelulusan (%)					
	1. SD/MI	100	100	100	100	100
	2. SMP/MTs	100	100	100	100	100
II.	Angka Melanjut Sekolah (%)					
	1. SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Tabel 2.37 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2016-2020 yang ditunjukkan oleh peningkatan angka persentase kelulusan murid pada semua jenjang pendidikan serta peningkatan jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan (sekolah) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melihat kondisi di atas, pelayanan bidang pendidikan di daerah ini perlu lebih ditingkatkan agar mutu lulusan mempunyai life skill dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja.

d. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia karena harapan lama sekolah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tabel 2.38
Harapan Lama Sekolah Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	13,61	13,65	13,66	13,68	13,69
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	13,00	13,10	13,14	13,15	13,23
Nasional	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Tapanuli Utara, anak-anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2020 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,69 tahun (hingga Diploma I).

e. Rasio Guru dan Siswa

Rasio guru dan murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat seberapa cukup ketersediaan guru untuk melayani atau membimbing siswa yang ada. Kemudian dibandingkan dengan ukuran jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah maksimal setiap 1 (satu) peserta didik rombongan adalah:

SD/MI : 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

SMP/MT : 32 (dua puluh delapan) peserta didik.

Tabel 2.39
Jumlah Guru, Jumlah Siswa dan Rata-rata Rasio Siswa dan Guru
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Guru SD/MI	3.565	3.640	3.513	3.410	3.442
2	Jumlah Guru SMP/MTs	1.472	1.641	1.417	1.451	1.461
3	Jumlah Siswa SD/MI	46.120	46.207	44.546	42.952	41.556
4	Jumlah Siswa SMP/MTs	22.082	22.119	22.533	22.902	22.475
5	SD/MI	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 12
6	SMP/MTs	1 : 15	1 : 14	1 : 16	1 : 16	1 : 16

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Dari tabel 2.39 dapat dilihat bahwa secara rata-rata untuk Kabupaten Tapanuli Utara, rasio jumlah siswa dengan ketersediaan guru yang ada untuk semua jenjang pendidikan telah tercukupi, walaupun untuk beberapa kecamatan terdapat angka yang sedikit berbeda (penyebaran guru belum merata). Yang perlu menjadi perhatian adalah besaran gaji guru tidak tetap yang masih dibawah upah minimum, padahal guru adalah jabatan profesional yang harus bertanggung jawab dengan keahlian di bidangnya untuk mendidik dan mengajar murid yang nantinya akan menjadi generasi muda dalam membangun nusa dan bangsa.

f. Fasilitas Sekolah dan Kualifikasi Guru

Salah satu komponen pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta kompetensi tenaga pengajar. Komponen sarana prasarana sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan alat dan fasilitas yang dapat memperlancar proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh pelajar. Selain itu, peranan guru dalam mengajar juga merupakan hal yang sangat penting karena kompetensi guru juga dapat mempengaruhi keterlibatan guru dalam menggunakan fasilitas dalam proses belajar mengajar. Apabila kondisi fasilitas sekolah yang kurang memadai dan kinerja guru yang kurang optimal, maka proses belajar mengajar tidak akan efektif.

Tabel 2.40
Fasilitas sekolah dan kualifikasi Guru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Sekolah Dasar/MI	389	390	386	390	386
2	Jumlah SMP/MTs	82	83	83	82	79
3	Jumlah SMA/SMK/MA	51	52	52	52	52
4	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SD/MI	46,71	65,01	65,20	74,33	69,78
5	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat SMP/MTs	90,22	92,00	95,00	92,97	49,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, 2021

Saat ini kebutuhan sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara telah terpenuhi untuk semua jenjang pendidikan. Setiap kecamatan telah memiliki sekolah tingkat dasar hingga menengah pertama. Dengan adanya sistem zonasi maka kebutuhan sarana prasarana sekolah perlu ditingkatkan untuk menampung siswa di setiap Kecamatan. Sedangkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di tingkat SMP mengalami penurunan disebabkan banyaknya guru yang berpindah fungsi menjadi tenaga struktural di Perangkat Daerah.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan anansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran serta kendali mutu dan kendali biaya.

Untuk mendapatkan keadaan dimana masyarakat bisa sehat dan berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengaplikasikan kebijakan bidang kesehatan diantaranya adalah meningkatkan kuantitas jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan non medis). Pendekatan lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) dan yang tinggal di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan termasuk tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Dengan demikian pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berakselerasi positif dan bersinergis terhadap kegiatan pembangunan di bidang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya. Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi

adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap wilayah. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada masyarakat kurang mampu dan perempuan di wilayah perbatasan/terluar/terpencil.

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Faktor penyebab utama kematian maternal adalah keterlambatan mencari, mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Disamping itu beberapa faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah pengetahuan ibu yang kurang, jarak yang sulit dicapai dan masih adanya beberapa desa yang belum mempunyai tenaga kesehatan utamanya bidan desa. Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan bahwa jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka 100.000 sehingga angka kematian ibu yang disajikan pada tabel berikut merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi.

Tabel 2.41
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	5.775	5.762	6.996	4.819	4.513
2	Jumlah ibu meninggal (jiwa)	5	8	4	4	8
3	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	87	79	73,2	71,7	68,7
4	Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	28,55	38,33	44,56	51,1	78,6
5	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83	73	67,10	66,8	63,4
6	Persentase cakupan pelayanan nifas	82,36	72,90	64,6	60,5	60
7	Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	1	5,4	3	25,5	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Apabila kita hitung secara persentase, maka rata-rata selama lima tahun terakhir angka kematian ibu melahirkan berdasarkan jumlah bayi yang lahir hidup berada pada kisaran 0,1 persen (lebih rendah dari target nasional sebesar 0,30 persen) dengan cakupan kunjungan ibu hamil yang berfluktuasi.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemangungan Jangka Menengah Nasional adalah peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Kekurangan gizi buruk dapat menyebabkan terjadinya stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensional. Intervensi stunting sangat memerlukan konvergensi program,/intervensi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, prevalensi Stunting di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 34,8 persen dan pada tahun 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 38 persen. Sehingga pada tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Utara melalui Keputusan Menteri Bappenas ditetapkan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Agar Kabupaten Tapanuli Utara dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai dengan target nasional yaitu sebesar 14 persen diharapkan keterlibatan semua pihak.

Tabel 2.42
Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Jumlah balita (jiwa)	22.152	28.277	34.711	34.146	23.190
Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	32	25	19	20	11
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Prevalensi Stunting	N/A	N/A	34,8*	38**	8,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021
Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018
Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2019

Jumlah balita gizi buruk setiap tahun kecenderungannya mengalami penurunan. Hal ini harus tetap dipertahankan agar kualitas hidup anak dimasa yang akan datang semakin baik.

c. Pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi selain kesehatan ibu, juga masa persalinan, pemberian ASI dan makanan tambahan serta pemberian imunisasi. Oleh karena itu, lamanya masa pemberian ASI dan lengkapnya pemberian imunisasi perlu diperhatikan. Pemberian ASI eksklusif juga akan mempengaruhi perkembangan dan tingkat inteligensi anak kelak.

Tabel 2.43
Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan) Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah bayi (lahir hidup)	5.775	5.762	6.996	4.819	4.513
2	Jumlah bayi yang diberi asi eksklusif	780	820	961	2.914	2.898

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.43, mulai tahun 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah bayi yang diberi asi eksklusif yaitu hanya 13,51 persen pada tahun 2016 menjadi 64,21 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat dicapai berkat sosialisasi atau penyuluhan serta pendampingan oleh petugas kesehatan di tingkat poskesdes, puskesmas pembantu hingga puskesmas bagi ibu hamil mengenai pentingnya asi eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan.

d. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tuberkulosis, difteri, tetanus, hepatitis B, polio dan campak. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100 persen desa/kelurahan.

Tabel 2.44
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel UCI (Tahun)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Parmonangan	14	13	13	7	9	11
2	Adiankoting	16	15	15	13	13	16

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel UCI (Tahun)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Sipoholon	14	11	11	13	12	11
4	Tarutung	31	25	25	25	27	27
5	Siatas Barita	12	10	10	12	11	9
6	Pahae Julu	19	18	18	17	18	16
7	Pahae Jae	13	11	11	10	11	10
8	Purbatua	11	11	11	9	10	9
9	Simangumban	8	8	8	7	6	6
10	Pangaribuan	26	25	25	21	21	18
11	Garoga	13	8	8	10	9	9
12	Sipahutar	25	22	22	23	21	21
13	Siborongborong	21	20	20	21	20	18
14	Pagaran	14	12	12	11	13	14
15	Muara	15	15	15	13	15	15
	Kabupaten	252	224	224	212	216	210

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi dimana 80% dari jumlah bayi telah mendapatkan imunisasi secara lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis campak yang dilakukan melalui pelayanan rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sesuai data pada tabel tersebut cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2020 mencapai 210 desa/kelurahan atau sekitar 83,33 persen.

e. Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari yang ditolong oleh dukun atau yang lainnya.

Tabel 2.45
Balita Menurut Penolong Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2016-2020

No	Penolong Anak Lahir Hidup	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter kandungan (%)	22	25.34	13.92	17.9	25.59
2	Dokter umum (%)	3	2.2	0	0	0
3	Bidan (%)	57	61.23	86.08	82.1	74.41
4	Tenaga kesehatan lainnya/famili (%)	2	10.28	0	0	0
5	Dukun beranak/paraji (%)	16	0.95	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.45, dapat dilihat bahwa penolong anak lahir hidup lebih banyak ditangani oleh bidan sehingga ketersediaan bidan yang terlatih di pusat pelayanan dasar maupun puskesmas harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar pelayanan persalinan dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian, persentase dokter kandungan sebagai penolong anak lahir hidup juga semakin tinggi dan mencapai 25,59 persen pada tahun 2020.

f. Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis

Salah satu indikator kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan termasuk sarana kesehatan dan tenaga medis.

Tabel 2.46
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	2
2	Jumlah Puskesmas					
	a. Biasa	14	14	14	14	14
	b. Rawat Inap	6	6	6	7	7
	c. Puskesmas dengan akreditasi dasar	-	-	6	12	12
	d. Puskesmas dengan akreditasi madya	-	1	3	7	7
3	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	60	60	61	61	62
	a. Parmonangan	4	4	4	4	4
	b. Adiankoting	6	6	6	6	6
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5
	d. Tarutung	5	5	5	5	5

No	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	e. Siatas Barita	4	4	4	4	4
	f. Pahae Julu	5	5	6	5	6
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	1	1	1	1	1
	i. Simangumban	1	1	1	1	1
	j. Pangaribuan	8	8	8	8	8
	k. Garoga	5	5	5	5	5
	l. Sipahutar	3	3	3	3	3
	m. Siborongborong	6	6	6	6	6
	n. Pagaran	4	4	4	4	4
	o. Muara	3	3	3	3	3
4	Poskesdes	93	95	95	95	95
	a. Parmonangan	13	14	14	14	14
	b. Adiankoting	3	3	3	3	3
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5
	d. Tarutung	3	3	3	3	3
	e. Siatas Barita	1	1	1	1	1
	f. Pahae Julu	3	4	4	4	4
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	3	3	3	3	3
	i. Simangumban	3	3	3	3	3
	j. Pangaribuan	13	13	13	13	13
	k. Garoga	9	9	9	9	9
	l. Sipahutar	9	9	9	9	9
	m. Siborongborong	12	12	12	12	12
	n. Pagaran	9	9	9	9	9
	o. Muara	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

Kabupaten Tapanuli Utara terus berbenah dan berupaya meningkatkan pembangunan kesehatan untuk mencapai Kabupaten Sehat. Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya tersebut adalah dengan mendirikan sarana pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat serta menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan. Guna meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, penambahan tenaga medis khususnya jumlah dokter spesialis juga tetap dilakukan.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.47
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Tenaga Kesehatan	Puskesmas					RSU					Klinik Dinkes					Dinkes				
		Tahun					Tahun					Tahun					Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	20	25	22	31	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Umum	35	37	37	32	38	17	15	15	16	22	1	2	1	1	1	2	5	4	3	1
3	Dokter Gigi	12	13	12	14	16	3	2	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidan	485	793	812	764	826	61	62	60	57	62	3	5	-	3	7	-	14	14	6	23
5	Perawat	104	203	225	213	239	163	175	188	195	212	-	2	7	2	2	-	18	18	6	15
6	Perawat Gigi	5	3	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tenaga teknis kefarmasian	9	15	15	14	21	16	16	16	16	18	-	-	-	-	-	5	5	3	7	6
8	Apoteker	-	-	-	-	-	4	5	5	10	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
9	Kesehatan Masyarakat	27	38	36	26	32	7	8	7	13	8	-	-	-	-	-	-	7	6	7	7
10	Nutrisi	13	9	14	14	29	6	8	8	10	11	-	-	-	-	-	-	4	6	5	4
11	Dietisien	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Fisioterapis	-	-	-	-	-	3	3	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Radiografer	5	6	6	-	-	6	6	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Teknisi elektromedis	-	-	-	-	-	-	4	4	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Analisis kesehatan	4	4	4	-	-	7	7	7	7	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
16	Kesehatan lingkungan	6	6	6	5	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Rekam medis dan infokes	1	2	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pengelola program kes	32	-	-	-	-	1	1	1	-	28	-	-	-	-	-	56	8	29	40	24
19	Tenaga kes lainnya	-	8	8	87	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total	739	1.138	1.178	1.169		320	343	346	382		4	9	9	6		64	64	82	76	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Sesuai data yang diperoleh, upaya penambahan tenaga kesehatan terus dilakukan baik di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSUD Tarutung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	61,75	67,02	67,02	55,50	48,11
2	Average Length of Stay (ALOS) (hari)	4,7	4,8	4,81	4,86	5,34
3	Turn Over Internal (TOI) (hari)	2,9	2,37	2,37	3,89	5,76
4	Bed Turn Over (BTO)	47,9	50,9	50,9	41,71	32,39
5	Gross Death Rate (GDR)	29,98	36,1	43,81	43,59	55,73
6	Net Death Rate (NDR)	16,94	18,49	26,05	24,05	24,17
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RSUD Tarutung	76,6	76,92	79,17	81,79	85,27

Sumber : RSUD Tarutung Tahun 2021

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dengan kondisi ideal adalah antara 60-85 persen. Kondisi BOR untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 48,11 persen. Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. Kondisi ALOS untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 5,34 hari. Turn Over Internal (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, idealnya tempat tidur kosong /tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Kondisi TOI untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 5,76 hari. Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Kondisi BTO untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 32,39 kali. Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar. Idealnya adalah <45 persen. Kondisi GDR untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 55,73 persen. Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000

penderita keluar. Idealnya angka NDR adalah < 25 persen. Kondisi NDR untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 24,17 persen.

g. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu fundamental right yang menjadi tanggung jawab bersama oleh negara dan masyarakat itu sendiri, tetapi yang terjadi justru akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah, terlebih lagi semakin meningkatnya biaya kesehatan akan menjauhkan pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat miskin. Hal ini terkait dengan belum berjalannya sistem jaminan sosial terutama bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting memberikan porsi yang cukup besar bagi jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kurang mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui jaminan kesehatan masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayannya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pada umumnya.

Tabel 2.49
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jaminan Kesehatan Nasional	179.134	202.173	193.211	194.206	201.262
	▪ Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	113.825	114.101	120.727	117.752	129.714
	▪ PBI APBD Provinsi	5.677	7.346	7.073	9.703	3.048
	▪ Pekerja Penerima Upah (PPU)	31.864	31.864	25.959	66.751	68.500
	▪ Pekerja Bukan Penerima Upah/ Mandiri	17.909	37.270	31.473		
	▪ Bukan Pekerja	11.375	11.375	5.979		
2	Jamkesda	14.999	19.999	29.588	29.962	34.357
	Jumlah	194.133	222.172	222.799	224.168	235.619
	Cakupan persentase (%)	65,67	74,61	74,3	74,3	73,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan, dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan irigasi merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pembangunan jalan lingkar, jalan poros/penghubung dan jalan utama serta pembangunan jalan ke sentra-sentra produksi perkotaan dan perdesaan diharapkan menjadi faktor yang dapat memecahkan permasalahan yang ada.

a. Kondisi Jalan

Peran dan fungsi jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/ kabupaten serta kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat serta orang/penumpang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019 lebih kurang 1.551,74 Km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 140,420 Km, jalan provinsi sepanjang 199,300 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.074,009 Km dan jalan desa sepanjang 138,010 Km. Perkembangan panjang jalan dan tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Perkembangan Panjang Jalan dan Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panjang jalan (Km)	1.672,25	1.524,25	1.551,739	1.551,739	1.551,739
	a. Jalan negara	138,85	138,85	140,42	140,42	140,42
	b. Jalan provinsi	173,4	173,4	199,3	199,3	199,3
	c. Jalan kabupaten	1.222	1.074	1.074	1.074	1.074
	d. Jalan desa	138	138	138	138	138
2.	Kondisi jalan kabupaten (Km)			1.074,009	1.074,009	1.074,009
	a. Kondisi baik	367,50	533,32	547,249	551,55	563,054
	b. Kondisi sedang rusak	405,68	149,08	159,536	163,830	158,157
	c. Kondisi rusak ringan	359,76	344,65	249,208	201,33	240,866
	d. Kondisi rusak berat	89,06	46,95	118,016	157,30	111,932
3.	Panjang jalan yang ditingkatkan	95,87	51,15	83,145	55,783	92,057
4.	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	1,01	958	829	1.552	1.985
5.	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	10,13	5,08	23,538	26,072	52,486
6.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min 1,5 m)	30	33	35	36	36
7.	Persentase drainase kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	35	38	45	45,21	45,369
8.	Tersedianya database jalan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	11	11	13	13	13

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.50 menunjukkan bahwa panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terus meningkat dan pada tahun 2020 sudah mencapai 46,46 persen. Adanya perbedaan panjang jalan disesuaikan berdasarkan hasil updating data base jalan pada tahun 2016. Kondisi jalan baik akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (kecamatan dan desa) karena pembangunan wilayah akan terhambat jika tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai. Kondisi ruas jalan kabupaten tahun 2018-2020 diuraikan pada tabel 2.51.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.51
Kondisi Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	002	TARUTUNG – HAREAN	2,553	2,5	97,92	0,053	2,08	2,5	97,92	0,053	2,08	2,273	89,03	0,05	1,96	2,273	89,03	0,05	1,96	2,553	100,00	0,00	0,00
2	003	AEK SIANSIMUN – SIANDORANDOR – SIMANINGGIR	13,3	7,41	55,71	1	7,52	7,41	55,71	1	7,52	6,65	50	0,7	5,26	6,65	50	0,7	5,26	7,71	58	1,4	10,53
3	004	TARUTUNG – SIMP. SEMINARIUM	5,5	3,672	66,76	0,577	10,49	3,672	66,76	0,577	10,49	2,329	42,35	0,221	4,02	2,329	42,35	0,221	4,02	2,804	50,98	1,696	30,84
4	015	TUSAM – SIMUAK	11,31	9,557	84,50	0,877	7,75	7,457	86,25	0,451	5,22	7,21	63,75	1	8,84	7,21	63,75	1	8,84	10,01	88,51	1	11,49
5	036	HUTA BAGINDA – SAIT NIHUTA	1,605	0,721	44,92	0,000	0,00	6,544	23,53	3,872	13,92	1,105	68,85	0		1,105	68,85	0	0	0,805	50,16	1	37
6	177	SAIT NIHUTA – HUTABARAT	1,516	0,108	7,12	0,000	0,00	8,934	86,11	1,441	13,89	0,866	57,12	0	0	0,866	57,12	0	0	0,906	59,76	0	0
7	178	SAIT NIHUTA – PARBUBUEPA	3,9	0,486	12,46	2,114	54,21	12,948	54,55	2,416	10,18	3,33	85,38	0	0	3,33	85,38	0	0	3,60	92,31	0	8
8	198	SIMP. JL NEG – PANGANAN LOMBU	1,689	1,689	100,00	0,000	0,00	0,876	14,14	1,449	23,38	1,689	100	0	0	1,689	100	0	0	1,600	95	0	5
9	273	SP. JLN NEGARA – PANAHARAN	1,956	1,9	95,81	0	0,00	4,5	100,00	0	0,00	1,5	76,69	0,4	20,45	1,5	76,69	0,4	20,45	1,0	51,13	1,0	48,88
10	333	HUTA SUMUR – HAPOLTAHAN	1,266	0,688	54,34	0	25,67	7,442	82,11	0	0,00	1,066	84,2	0	0	1,066	84,2	0	0	1,266	100,0	0	0
11	343	SP. SOSUNGGULON – SOSUNGGULON	1,388	0,374	26,95	0	33,93	4,978	100,00	0	0,00	0,4	28,82	0,35	25,22	0,4	28,82	0,35	25,22	1,1	75,65	0,34	24,35
12	344	SP. JLN NEGARA – LBN.SITUMORANG	1,279	0,687	53,71	0	23,92	3,886	97,30	0	0,00	0,35	27,37	0	0	0,35	27,37	0	0	0,60	46,91	1	42
13	353	SIARANG-ARANG – PARTALI JULU	3,972	0,136	3,42	2	49,65	8,147	59,24	0	0,00	2,3	57,91	0,1	2,52	2,3	57,91	0,1	2,52	3,8	94,97	0,2	5,04
14	418	KELILING PASAR TARUTUNG	1,506	1,484	98,54	0,000	0,00	9,557	84,50	0,877	7,75	1,352	89,77	0,132	8,76	1,352	89,77	0,132	8,76	0,922	61,22	0,584	38,78
15	419	SIARANGARANG – AEK NASIA	2,275	1,680	73,85	0	6,59	5,724	79,44	0	0,00	1,746	76,75	0,204	8,97	1,746	76,75	0,204	8,97	1,000	43,96	1,075	47,25
16	420	PERUM BARAT INDAH – PAGAR SINONDI	7,641	2,700	35,34	1,112	14,55	9,622	40,99	4,559	19,42	0	0	3,309	43,31	0	0	3,309	43,31	0	3	1,000	13,09
17	421	DALAM KOTA TARUTUNG	7,829	3,354	42,84	1,113	14,22	6,354	59,02	1,071	9,95	3,354	42,84	1,113	14,22	3,354	42,84	1,113	14,22	7,429	94,89	0,400	5,11
18	218	BANUAREA – PANSURNAPITU	0,631	0,631	100,00	0	0,00	6,016	35,56	0	0,00	0	0	0,2	31,7	0	0	0,2	31,7	0	32	0,2	31,7



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	037	DALAM KOTA ADIANKOTING	0,2	0,000	0,00		0,00	2,003	54,44	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
20	058	PARSINGKAMAN - PARLOBULOBUAN	11,692	7,1	60,96	0,530	4,53	0,579	30,31	0	0,00	6,7	57,3	1,6	13,68	6,7	57,3	1,6	13,68	8,4	71,6	1,7	14,47
21	059	SITAREALAMAN - BANUAJI	7,499	5,40	71,97	0	2,95	2,081	19,69	0	0,00	6,8	90,68	0,2	2,67	6,8	90,68	0,2	2,67	7,5	99,35	0,0	0,00
22	060	LAPO GAMBIRI - PANCUR BATU	10,569	5,287	50,02	0,000	0,00	4,538	62,67	0	0,00	5,369	50,8	0,4	3,78	5,369	50,8	0,4	3,78	8,120	76,8	1,6	15,15
23	214	SIDARI - SITORGOM	2,033	1,737	85,44	0,000	0,00	0	0,00	10,334	53,97	1,3	63,94	0,733	36,06	1,3	63,94	0,733	36,06	1,2	60,65	0,400	19,68
24	268	PAGARAN PISANG - SOPO SABA	2,587	0,275	10,63	0,661	25,55	3,505	25,52	1,9	13,83	2,587	100	0	0	2,587	100	0	0	2,387	92	0	8
25	269	ADIANKOTING - AEK MATIO JAE- JULU	2,679	0,000	0,00	0,584	21,80	2,725	62,23	0,852	19,46	1,329	49,61	0,9	33,59	1,329	49,61	0,9	33,59	1,879	70,14	0,8	29,86
26	352	SP. MUNSON LYMAN - MUNSON LYMAN	0,405	0,000	0,00	0,405	100,00	1,019	36,03	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
27	396	PANCUR BATU - LOBU HAMIJON	16,2	5,300	32,72	0,000	0,00	0,673	53,50	0	0,00	0,4	2,47	13	80,25	0,4	2,47	13	80,25	2,0	12,16	1	7,41
28	397	SIANTAR NAIPOPOS - LOBU HAMIJON - GOMBURAN (BTS TAPTENG)	8,176	0,0	0,00	2	25,39	0,721	44,92	0	0,00	0	0	2,076	25,39	0	0	2,076	25,39	0	2	0,000	0,00
29	398	SP. PAGARAN LAMBUNG II - PAGARAN LAMBUNG II - SIDARI	2,977	0,977	32,82	2	67,18	0	0,00	0	0,00	2,977	100	0	0	2,977	100	0	0	2,967	100	0	0
30	405	SIMATE-MATE - AEK GODANG	5,1	1,800	35,29	0	0,00	9,966	85,42	0,805	6,90	0,2	3,92	0,3	5,88	0,2	3,92	0,3	5,88	0,6	11,77	0,8	15,69
31	006	SIPOHOLON (SIMENARIUM) - RURA JULU	27,814	6,544	23,53	4	13,92	1,8	32,14		0,00	6,3	22,65	4,9	17,62	6,3	22,65	4,9	17,62	11,8	42,43	5,2	18,70
32	007	SILANGKITANG - HUTA TINGGI	10,375	8,934	86,11	1	13,89	0	0,00	0	0,00	8,575	82,65	1	9,64	8,575	82,65	1	9,64	9,800	94,46	0	3,61
33	106	AEK RANGAT - SANDARAN - HUTATINGGI	11,298	7,626	67,50	0,814	7,20	7,7	72,70	0,561	5,30	6,798	60,17	2,6	23,01	6,798	60,17	2,6	23,01	7,400	65,50	0,3	2,99
34	179	SP. PASAR SIRONGIT - SEMINARIUM	1,917	1,421	74,13	0	25,87	7,128	60,96	0,53	4,53	1,917	100	0	0	1,917	100	0	0	1,424	74	0	26
35	262	DALAM KOTA SIPOHOLON	0,853	0,000	0,00	0,000	0,00	5,397	71,97	0,221	2,95	0,15	17,58	0,456	53,46	0,15	17,58	0,456	53,46	0,85	100,00	0,000	0,00
36	270	SILANGKITANG - CEKDAM	1,708	0,567	33,20	0,000	0,00	5,287	50,02	0	0,00	0,958	56,09	0	0	0,958	56,09	0	0	0,600	35,13	0	23
37	271	SILANGKITANG - SIBADAK I / II	4,288	0,820	19,12	1	27,92	2,788	29,87	1,823	19,53	1,65	38,48	1	23,32	1,65	38,48	1	23,32	1,20	27,99	2	41,98



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38	272	HUTA BARU - LBN HARIARA - PANGALOAN	1,3	0,0	0,00	0,300	23,08	3,718	23,17	7,974	49,69	0,6	46,15	0	0	0,6	46,15	0	0	0,8	61,54	0	31
39	364	SP. SILANGKITANG - PERUMNAS - PAGAR BATU	1,139	1,14	100,00	0	0,00	7,626	67,50	0,814	7,20	1,139	100	0	0	1,139	100	0	0	1,139	100	0	0
40	365	TAPIAN NAULI - LBN. TONGA-TONGA	8,484	1,238	14,59	3,672	43,28	2,182	100,00	0	0,00	1,6	18,86	1,184	13,96	1,6	18,86	1,184	13,96	5,3	62,28	0,000	0,00
41	366	SP. PAGAR BATU - DOLOK IMUN	3,412	1,288	37,75		0,00	0	0,00	3,2	100,00	0,8	23,45	0,4	11,72	0,8	23,45	0,4	11,72	1,0	29,66	1,4	41,03
42	367	PANGGABEAN - LBN. TONGA-TONGA	4,421	1,160	26,24	1,663	37,62	7,454	42,73	3,593	20,59	1,4	31,67	0,2	4,52	1,4	31,67	0,2	4,52	4,2	95,48	0,2	4,52
43	012	SIBORONG BORONG - BUTAR	4,978	4,978	100,00	0,000	0,00	8,922	63,73	0,347	2,48	4,878	97,99	0	0	4,878	97,99	0	0	4,778	95,98	0	4
44	013	SP.BUTAR - SIAMBOLAS	3,994	3,886	97,30	0,000	0,00	1,639	42,22	1,275	32,84	3,795	95,02	0,091	2,28	3,795	95,02	0,091	2,28	3,794	94,99	0,200	5,01
45	016	PARPANGIRAN - LUMBAN HOLBUNG	7,205	5,724	79,44	0,000	0,00	2,344	44,51	1,056	20,05	3,5	48,58	0,3	4,16	3,5	48,58	0,3	4,16	7,2	100,00	0,0	0,00
46	035	LOBU SIREGAR - SANGKAE TORUAN	1,258	0,7	53,50	0	0,00	4,814	55,60	0,798	9,22	0,8	63,59	0	0	0,8	63,59	0	0	0,0	0,00	0	32
47	038	SILANGIT - SIANJUR	11,667	9,966	85,42	1	6,90	5,495	91,40	0,517	8,60	5,067	43,43	2,1	18	5,067	43,43	2,1	18	11,667	100,00	0,0	0
48	039	SP. PACUAN - SILAITLAIT - BTS HUMBAHAS	5,6	1,800	32,14	0	0,00	6,885	55,36	1,798	14,46	1,56	27,86	0,4	7,14	1,56	27,86	0,4	7,14	1,80	32,14	0,0	0,00
49	047	BAHAL BATU I - ONAN RUNGGU II	10,592	7,700	72,70	1	5,30	3,509	51,93	1,189	17,60	1,9	17,94	3,2	30,21	1,9	17,94	3,2	30,21	10,4	98,19	0,0	0,00
50	124	BUTAR - SITAMPURUNG	5,266	2,344	44,51	1	20,05	3,076	47,76	3,194	49,60	2,065	39,21	0,675	12,82	2,065	39,21	0,675	12,82	3,200	60,77	0,000	0,00
51	127	PEA LANGGE - BATU GONTING	8,659	4,814	55,60	0,798	9,22	4,695	85,36	0	0,00	6,109	70,55	0,15	1,73	6,109	70,55	0,15	1,73	7,273	83,99	0,80	9,24
52	221	SIBORONG BORONG - SIMAROMPU - OMPU - LB.SIREGAR	6,007	4,859	80,89	1	10,02	1,173	46,46	0	0,00	2,9	48,28	0,7	11,65	2,9	48,28	0,7	11,65	3,8	63,38	0,0	0,00
53	234	DALAM KOTA SIBORONGBORONG	2,13	2,130	100,00	0,000	0,00	6,723	47,87	0,889	6,33	2,13	100	0	0	2,13	100	0	0	1,57	73	1	27
54	235	SINUR PETERNAKAN - KTR CAMAT	3,112	3,112	100,00	0,000	0,00	0,764	17,93	1,989	46,68	2,162	69,47	0	0	2,162	69,47	0	0	3,112	100,00	0	0
55	315	SIMP. JL. NEGARA - SILALAH	1,632	0,250	15,32	1	30,94	4,183	82,59	0,245	4,84	1,1	67,4	0	0	1,1	67,4	0	0	1,0	61,3	0	26
56	316	SIGALINGGING - SIGUMBANG	3,117	2,0	64,04	0,000	0,00	0,304	24,24	0	0,00	1	32,08	0,6	19,25	1	32,08	0,6	19,25	1	19,25	1,0	32,08
57	317	SINUR PETERNAKAN - HARIARA	6,003	2,74	45,56	0	0,00	0,108	7,12	0	0,00	2,403	40,03	0,5	8,33	2,403	40,03	0,5	8,33	3,000	49,98	1,0	16,66



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
58	336	BAHAL BATU I - BAHAL BATU III	0,755	0,0	0,00	0,657	87,02	0,486	12,46	2,114	54,21	0,455	60,26	0	0	0,455	60,26	0	0	0,355	47,02	0	26
59	348	HOPONG - BUTAR	5,173	2,21	42,64	1	21,26	1,421	74,13	0,496	25,87	1,5	29	0,7	13,53	1,5	29	0,7	13,53	4,8	92	0,2	3,87
60	349	SITAMPURUNG - SIBORONG- BORONG	5,266	1,344	25,52	1,017	19,31	1,524	68,28	0,172	7,71	2,05	38,93	0,311	5,91	2,05	38,93	0,311	5,91	1,90	36,08	0,800	15,19
61	373	SP. AEK MAS - AEK MAS - BATU GONTING	7,032	5,062	71,99	0,704	10,01	0	0,00	0	0,00	2,532	36,01	0,4	5,69	2,532	36,01	0,4	5,69	1,232	17,52	2,4	34,13
62	375	SP. SIHATANDOHAN - SIHATANDOHAN - POKKI	6,715	5,215	77,66	0,000	0,00	4,821	62,68	0	0,00	2,415	35,96	2,1	31,27	2,415	35,96	2,1	31,27	6,315	94,04	0,0	0,00
63	370	SP. PURBA SINOMBA - PURBA SINOMBA - NAGA SARIBU	15,548	5,107	32,85	4,000	25,73	1,3	19,12	5,5	80,88	5	32,16	3,048	19,6	5	32,16	3,048	19,6	8	48,24	2,600	16,7
64	008	HUTA TINGGI - PARMONANGAN	23,738	12,948	54,55	2,416	10,18	1,689	100,00	0	0,00	17,438	73,46	0	0	17,438	73,46	0	0	20,338	85,68	1	3
65	009	PARMONANGAN - HUTA JULU	6,197	0,876	14,14	1,449	23,38	6,761	60,54	0	0,00	1,9	30,66	0	0	1,9	30,66	0	0	2,8	45,14	0	3
66	010	RANGGITGIT - SIMARIGUNG/BTS HUMBAHAS	4,5	4,5	100,00	0	0,00	2,198	72,09	0	0,00	0	0	4,5	100	0	0	4,5	100	4	96	0,0	0
67	011	HUTA TINGGI - BUTAR	9,063	7,442	82,11	0	0,00	0,856	43,50	1,1	55,89	4,1	45,24	1,3	14,34	4,1	45,24	1,3	14,34	8,5	93,38	0,4	4,41
68	107	SP.SISORDAK - SISORDAK	2,182	2,182	100,00	0	0,00	3,708	49,16	0,389	5,16	2,182	100	0	0	2,182	100	0	0	1,200	55	1	27
69	117	SP.HARIARA - RAPP	14	8,922	63,73	0	2,48	1,737	85,44	0	0,00	0,452	3,23	0,06	0,43	0,452	3,23	0,06	0,43	2,800	20,00	1,00	7,14
70	180	PARRATUSAN - PARMONANGAN	2,232	1,524	68,28	0	7,71	0,631	100,00	0	0,00	0,732	32,8	0,9	40,32	0,732	32,8	0,9	40,32	0,740	33,2	0,6	28,32
71	181	SP TUGU - PARRATUSAN	3,1	0,000	0,00	0,000	0,00	1,187	83,59	0,233	16,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	182	HUTA TINGGI - SIMAMORA	7,692	4,821	62,68	0	0,00	4,859	80,89	0,602	10,02	3,542	46,05	1,2	15,6	3,542	46,05	1,2	15,6	3,967	51,57	1,5	19,8
73	368	AEK RAJA - HAU GANJANG - LOBU SUNUT	6,623	4,049	61,14	0,798	12,05	2,13	100,00	0	0,00	3,936	59,43	0,113	1,71	3,936	59,43	0,113	1,71	1,925	29,07	2,283	34,47
74	369	SIMARGALUNG - LOBU SUNUT	1,433	0,627	43,75	0,179	12,49	3,112	100,00	0	0,00	0,627	43,75	0,179	12,49	0,627	43,75	0,179	12,49	0,300	20,94	0,800	55,83
75	371	SP. HORISAN - SAMPINUR	7,575	6,321	83,45	0	0,00	3,5	43,75	3,5	43,75	4,622	61,02	1,699	22,43	4,622	61,02	1,699	22,43	0,800	10,56	1,375	18,15
76	372	AEK RAJA - HORISAN	3,625	2,8	76,41	0,493	13,60	3,615	74,09	0,953	19,53	0,582	16,06	2,681	73,96	0,582	16,06	2,681	73,96	1,860	51,31	0,400	11,03
77	374	RAPP - BATU ARIMO - BTS.TAPTENG	11,306	5,4	47,82	0,300	2,65	0,685	15,15	2,107	46,62	5,406	47,82	0,3	2,65	5,406	47,82	0,3	2,65	0,200	1,77	4,8	42,46



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
78	410	RAPPA - TUMUS - HAJORAN	12,458	4,61	37,03	1	6,78	0	0,00	0,853	73,98	4,613	37,03	0,845	6,78	4,613	37,03	0,845	6,78	1,000	8,03	1,600	12,84
79	014	BUTAR - SILABAN - BTS HUMBANG HAS	13,753	8,147	59,24	0,000	0,00	2,5	100,00	0	0,00	13	94,52	0	0	13	94,52	0	0	14	100,00	0	0
80	244	SIPULTAK - SIMAMORA - HASIBUAN	4,879	3,615	74,09	0,953	19,53	0,714	46,30	0	0,00	2,799	57,37	0,9	18,45	2,799	57,37	0,9	18,45	3,679	75,41	0,0	0,00
81	318	PARHORBOAN - SIBARAGAS	3,319	1,063	32,03	2,100	63,27	0	0,00	0	0,00	0,415	12,5	0	0	0,415	12,5	0	0	3,319	100,0	0	0
82	319	LBN.INAINA - LUBIS	1,423	0,491	34,50	0,179	12,58	0,275	10,63	0,661	25,55	0,2	14,05	0,566	39,78	0,2	14,05	0,566	39,78	0,7	49,19	0,000	0,00
83	376	SIMAMORA - HASIBUAN - SIBARAGAS	3,868	3,600	93,07	0,000	0,00	0	0,00	0,584	21,80	1,088	28,13	2,065	53,39	1,088	28,13	2,065	53,39	1,398	36,14	0,000	0,00
84	377	HUTABULU - SIMARANTAJAU	2,827	1,860	65,79	0,404	14,29	0,567	33,20	0	0,00	1,552	54,9	0,875	30,95	1,552	54,9	0,875	30,95	1,100	38,9	0,000	0,00
85	378	PEALINTA - SIMARANTAJAU	1,313	0,6	43,26	0	21,86	0,82	19,12	1,197	27,92	0,5	38,08	0	0	0,5	38,08	0	0	1,0	76,16	0	0
86	379	SP. SIHITE - LUMBAN INA-INA - BATU HARANG	8,908	6,834	76,72	1	10,42	0	0,00	0,3	23,08	0,28	3,14	0	0	0,28	3,14	0	0	4,91	55,10	0	0
87	411	SIPULTAK - SIPULTAK DOLOK	2,355	2,000	84,93	0	0,00	1,874	95,81	0	0,00	1,7	72,19	0,2	8,49	1,7	72,19	0,2	8,49	2,0	83,02	0,4	16,99
88	424	BOLAK PASARAN - SIPULTAK DOLOK	1,609	1,354	84,15	0	15,85	0,687	100,00	0	0,00	1,031	64,08	0,269	16,72	1,031	64,08	0,269	16,72	0,600	37,29	0,949	58,98
89	425	SP. SIHITE - LUMBAN MOTUNG	2,558	2,558	100,00	0	0,00	0,661	47,21	0,739	52,79	1,6	62,55	0,758	29,63	1,6	62,55	0,758	29,63	1,6	62,55	0,958	37,45
90	426	HUTA BULU - HUTA PASAR	2,553	2,553	100,00	0,000	0,00	0,446	100,00	0	0,00	1,5	58,75	0,186	7,29	1,5	58,75	0,186	7,29	2,2	84,33	0,000	0,00
91	427	SIBARAGAS - PEA TIKKO	2	2,000	100,00	0	0,00	0,632	100,00	0	0,00	1,785	89,25	0	0	1,785	89,25	0	0	0,070	3,50	2	87
92	428	LBN.INAINA - SIMARGALUNG	2,647	1,066	40,27	0,841	31,77	2,351	29,42	2,222	27,80	0,547	20,66	0,2	7,56	0,547	20,66	0,2	7,56	1,547	58,44	0,7	26,45
93	433	UNTE MUNGKUR - PANDAN	2,364	1,716	72,59	0,388	16,41	7,188	95,52	0	0,00	1,864	78,85	0,5	21,15	1,864	78,85	0,5	21,15	1,364	57,70	0,8	33,84
94	044	SP III MUARA - HUTAGINJANG	3,3	0,000	0,00	0	0,00	2,309	44,55	0	0,00	3,1	93,94	0,2	6,06	3,1	93,94	0,2	6,06	3,3	100,00	0,0	0,00
95	109	SITANGGOR - MEAT (BTS. TOBASA)	3,2	0,0	0,00	3,200	100,00	0,25	15,32	0,505	30,94	0	0	2	62,5	0	0	2	62,5	3	100	0	0,0
96	285	DALAM KOTA MUARA	0,446	0,4	100,00	0,000	0,00	1,996	64,04	0	0,00	0,446	100	0	0	0,446	100	0	0	0,446	100	0	0
97	434	SILALI TORUAN - SIDEMPULA	1,046	0,3	32,89	0,000	0,00	2,735	45,56	0	0,00	0,946	90,44	0	0	0,946	90,44	0	0	0,646	61,76	0	38



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
98	308	UNTE MUNGKUR - BATU BINUMBUN - SIMATUPANG	5,183	2,31	44,55	0	0,00	1,063	32,03	2,1	63,27	5,183	100	0	0	5,183	100	0	0	5,183	100	0	0
99	399	SP. HUTAGINJANG - GANTOLE HUTAGINJANG	1,77	1,770	100,00	0,000	0,00	0,491	34,50	0,179	12,58	1,5	84,75	0,27	15,25	1,5	84,75	0,27	15,25	1,8	100,00	0,00	0,00
100	400	SP. ARITONANG - GANTOLE ARITONANG	1,454	0,215	14,79	0,579	39,82	2,104	100,00	0	0,00	1	68,78	0	0	1	68,78	0	0	1	96,29	0	0
101	401	SP. SIMATUPANG - ARITONANG	2,726	1,093	40,10	1,633	59,90	5,204	42,10	1,577	12,76	2	73,37	0	0	2	73,37	0	0	3	100,00	0	0
102	402	HUTAGINJANG - SITANGGOR	5,263	2,401	45,62	2,311	43,91	0	0,00	1,918	60,72	2,2	41,8	1,263	24	2,2	41,8	1,263	24	1,8	34,2	2,600	49
103	403	MUARA - HUTA NAGODANG	2,243	0,729	32,50	0,314	14,00	0,688	54,34	0,325	25,67	0,9	40,12	0	0	0,9	40,12	0	0	1,9	86,05	0	14
104	417	SIBANDANG - SAMPURAN - SIBANDANG	11,858	4,518	38,10	2,459	20,74	0	0,00	0,657	87,02	9,658	81,45	0	0	9,658	81,45	0	0	8,818	74,36	2	19
105	409	SP. SILANDO - SILANDO	4,665	1,7	36,59	0	0,00	0,374	26,95	0,471	33,93	0,8	17,15	1,863	39,94	0,8	17,15	1,863	39,94	2,9	61,84	0,580	12,43
106	432	BARIBA NI AEK - SILOMBU - SITINDAK TAPIAN NAULI	3,139	1,012	32,24	0	0,00	0,687	53,71	0,306	23,92	0,7	22,3	0,391	12,46	0,7	22,3	0,391	12,46	2,1	68,0	0,200	6,37
107	018	SIMORANGKIR - SIMANAMPANG	10,765	6,354	59,02	1	9,95	1,7	67,95	0,67	26,78	4,65	43,2	1,765	16,4	4,65	43,2	1,765	16,4	8,26	76,7	2,505	23,3
108	149	HAREAN - PANSURNAPITU	5,5	4,695	85,36	0	0,00	2,206	42,64	1,1	21,26	5,35	97,27	0,1	1,82	5,35	97,27	0,1	1,82	4,50	81,82	1,0	18,18
109	332	SP. LOBUHOLE - LOBUHOLE	3,159	0,000	0,00	2	60,72	1,344	25,52	1,017	19,31	1,25	39,57	1,909	60,43	1,25	39,57	1,909	60,43	1,40	44,32	0,800	25,32
110	346	SIMORANGKIR - TALPE	2,502	1,700	67,95	0,670	26,78	3,87	30,93	0,662	5,29	1,308	52,28	0,292	11,67	1,308	52,28	0,292	11,67	1,998	79,86	0,504	20,14
111	380	SALIB KASIH - PEA TOLONG	3,568	2,248	63,00	0	0,00	0,756	12,68	0,455	7,63	1,533	42,97	2,035	57,03	1,533	42,97	2,035	57,03	2,768	77,58	0,800	22,42
112	381	SP. PUSTU - HUTA NAMORA	3,218	1,920	59,66	1,298	40,34	0	0,00	0,405	100,00	0,318	9,88	2,2	68,37	0,318	9,88	2,2	68,37	1,000	31,08	1,8	55,94
113	382	SIMANAMPANG - GONTING PEGE	3,681	1,454	39,50	0,000	0,00	0,136	3,42	1,972	49,65	0,681	18,5	1,7	46,18	0,681	18,5	1,7	46,18	1,481	40,2	1,4	38,03
114	429	HUTA NAMAMORA - SIARANGARANG	6,401	2,575	40,23	2	25,00	1,477	50,90	1,425	49,10	1,1	17,18	3,984	62,24	1,1	17,18	3,984	62,24	1,0	15,62	0,000	0,00
115	005	SIPAHUTAR - LUMBAN RIHIT	8,646	7,5	86,25	0,451	5,22	0	0,00	1,639	81,06	2	23,13	3,346	38,7	2	23,13	3,346	38,7	2	18,51	5,246	60,7
116	017	SIPAHUTAR - DOLOK NAGODANG - PARLOMBUAN - NAGA SARIBU (BTS. TOBASA)	23,473	9,6	40,99	4,559	19,42	5,023	56,20	0	0,00	7,2	30,67	11,423	48,66	7,2	30,67	11,423	48,66	12,6	53,81	2,395	10,20



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
1	2	3	4	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
117	027	SP. SIGALA-GALA - JANJI MARIA (BTS TOBASA)	19,146	0,00	0,00	10	53,97	0,924	21,61	0,536	12,54	0	0	14,496	75,71	0	0	14,496	75,71	0	2	4,456	23,27
118	123	ONAN TUKKA - PANJAITAN	3,882	1,639	42,22	1,275	32,84	0,403	24,38	1,25	75,62	1,1	28,34	2,05	52,81	1,1	28,34	2,05	52,81	1,8	46,68	2,07	53,32
119	139	SIPAHUTAR - SIMARHOMPA	6,012	5,495	91,40	0,517	8,60	2,511	45,19	2,679	48,21	1,4	23,29	1	16,63	1,4	23,29	1	16,63	6,0	100,00	0	0,00
120	144	HUTA GURGUR - SITAPONGAN	6,757	3,509	51,93	1,189	17,60	3,66	83,54	0,378	8,63	5,357	79,28	0,4	5,92	5,357	79,28	0,4	5,92	5,957	88,16	0,8	11,84
121	206	ONAN TUKKA - SIMANAMPANG	7,543	3,708	49,16	0,389	5,16	1,416	42,18	0,375	11,17	2,27	30,09	3,33	44,15	2,27	30,09	3,33	44,15	6,14	81,44	1,40	18,56
122	243	ONAN RUNGGU - LBN. RANG - LBN. LOBU - TAPIAN NAULI	8	3,500	43,75	3,500	43,75	0	0,00	0,4	16,00	2,1	26,25	3,65	45,63	2,1	26,25	3,65	45,63	2,3	28,19	2,75	34,31
123	247	DALAM KOTA SIPAHUTAR	2,5	2,500	100,00	0,000	0,00	1,139	100,00	0	0,00	2,45	98	0	0	2,45	98	0	0	1,85	74	0	8
124	300	ONAN RUNGGU - SILMABAHAL - HUTAGURGUR	7,992	2,4	29,42	2	27,80	1,238	14,59	3,672	43,28	4,462	55,83	0,9	11,26	4,462	55,83	0,9	11,26	2,500	31,28	2,2	27,53
125	354	LUMBAN JULU - SITAPONGAN	2,902	1,477	50,90	1	49,10	1,288	37,75		0,00	1,2	41,35	1,2	41,35	1,2	41,35	1,2	41,35	2,9	100,00	0,0	0,00
126	355	SP. LUMBAN SIANTAR - LUMBAN SIANTAR	2,022	0,000	0,00	2	81,06	1,16	26,24	1,663	37,62	0,7	34,62	1,3	64,29	0,7	34,62	1,3	64,29	0,7	34,62	0,2	9,89
127	356	SIPARENDEAN - HUTA MAMUNGKA - ADIAN NALAMBOK	8,938	5,023	56,20	0	0,00	4,049	61,14	0,798	12,05	2,088	23,36	4,85	54,26	2,088	23,36	4,85	54,26	4,738	53,01	2,60	29,09
128	357	HUTA MAMUKKA - BONAN DOLOK - SIALOGO	4,276	0,924	21,61	1	12,54	0,627	43,75	0,179	12,49	0,45	10,52	1,6	37,42	0,45	10,52	1,6	37,42	1,08	25,16	1,2	28,06
129	358	AEK NAULI III - LUMBAN HARIARA	1,653	0,403	24,38	1,250	75,62	5,107	32,85	4	25,73	0	0	1,153	69,75	0	0	1,153	69,75	1	48	0,653	39,50
130	359	LUMBAN JULU - SANGKAR NI HUTA	5,557	2,511	45,19	3	48,21	6,321	83,45	0	0,00	1,946	35,02	3,011	54,18	1,946	35,02	3,011	54,18	3,200	57,59	1,000	18,00
131	360	SIPAHUTAR - LUMBAN GUGGUK	4,381	3,660	83,54	0,378	8,63	2,77	76,41	0,493	13,60	1,7	38,8	2,481	56,63	1,7	38,8	2,481	56,63	1,2	27,0	2,200	50,22
132	361	SP. LUMBAN BIRU - LUMBAN BIRU	3,357	1,416	42,18	0,375	11,17	5,062	71,99	0,704	10,01	1,007	30	1,3	38,73	1,007	30	1,3	38,73	1,957	58	0,6	17,87
133	363	SP. INGUL - INGUL	2,5	0,000	0,00	0	16,00	5,406	47,82	0,3	2,65	0	0	1,1	44	0	0	1,1	44	0	8	1,8	72
134	404	HUTA GURGUR - AMBAR HODA - SOSOR TAMBISU	8,152	2,8	34,62	1,487	18,24	5,215	77,66	0	0,00	1,768	21,69	2,113	25,92	1,768	21,69	2,113	25,92	3,080	37,78	0,600	7,36
135	422	LBN. BIRU - PANJAITAN	2,203	1,42	64,59	0	20,11	3,6	93,07	0	0,00	0,9	40,85	0	0	0,9	40,85	0	0	1,6	72,76	0	18
136	423	LUMBAN SILITONGA - PANJAITAN	2,149	0,299	13,91	1,007	46,86	1,86	65,79	0,404	14,29	0	0	1,799	83,71	0	0	1,799	83,71	1	47	0,949	44,16



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
137	019	SIBINGKE LOBUGOTI - SOPORARU - PEA NORNOR	16,916	6,016	35,56	0,000	0,00	0,568	43,26	0,287	21,86	7	41,38	2,092	12,37	7	41,38	2,092	12,37	7	40,20	1,800	10,64
138	022	ONAN SABTU - SIBUDIL	10,569	2,081	19,69	0,000	0,00	6,834	76,72	0,928	10,42	1,405	13,29	1,203	11,38	1,405	13,29	1,203	11,38	3,400	32,17	0,000	0,00
139	147	RAHUT BOSI - LOBU GALA	6,44	3,076	47,76	3,194	49,60	2,248	63,00	0	0,00	1,9	29,5	1,6	24,84	1,9	29,5	1,6	24,84	2,4	37,3	2,4	37,27
140	150	SP.LBN.SORMIN - LUMBAN SORMIN	2,525	1,173	46,46	0,000	0,00	1,92	59,66	1,298	40,34	1,2	47,52	0,925	36,63	1,2	47,52	0,925	36,63	1,3	49,51	0,625	24,75
141	199	PARSORMINAN - BATU NADUA	11,167	6,761	60,54	0,000	0,00	1,454	39,50	0	0,00	4,467	40	1,2	10,75	4,467	40	1,2	10,75	8,567	77	1,8	16,12
142	245	SIBINGKE - PARLOMBUAN	4,52	0,7	15,15	2	46,62	2,4	100,00	0	0,00	1,37	30,31	2	44,25	1,37	30,31	2	44,25	4,52	100,00	0	0,00
143	251	DALAM KOTA PANGARIBUAN	1,542	0,714	46,30	0	0,00	1,348	91,58	0,124	8,42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	61	0	13
144	307	SIGOTOM - SIMANAMPANG	7,525	7,188	95,52	0	0,00	2,638	77,43	0	0,00	1,4	18,6	2,48	32,96	1,4	18,6	2,48	32,96	0,9	12,3	0,60	7,97
145	034	PADANG PARSADAAN - PARUREAN	2,828	1,019	36,03	0	0,00	4,26	42,19	1,624	16,09	0,5	17,68	1,1	38,9	0,5	17,68	1,1	38,9	1,1	39,60	0,5	17,7
146	383	PARSIBARUNGAN - SITONONG	2,4	2,400	100,00	0	0,00	0,435	19,75	1,32	59,95	0	0	2,2	91,67	0	0	2,2	91,67	2	67	0,0	0,00
147	384	HUTALAMA - PANSURNATOLU	1,472	1,348	91,58	0,124	8,42	2,967	17,20	0,581	3,37	0	0	0,672	45,65	0	0	0,672	45,65	0	14	0,272	18,48
148	385	LBN. SINAGA - SIBARABARA - PAROMBURAN	3,407	2,638	77,43	0	0,00	1,267	36,12	1,578	44,98	0,7	20,55	0,373	10,95	0,7	20,55	0,373	10,95	0,8	23,48	0,400	11,74
149	386	SIGOTOM - DUSUN SIMANJUNTAK-SIGOTOM	10,096	4,260	42,19	1,624	16,09	7,813	70,40	0,387	3,49	0,8	7,92	0	0	0,8	7,92	0	0	1,0	9,91	3	30
150	387	BATUHAPUR - PURBATUA	2,202	0,435	19,75	1,320	59,95	0,989	73,81	0	0,00	0,8	36,33	0,243	11,04	0,8	36,33	0,243	11,04	1,2	54,59	0,600	27,25
151	392	PARLOMBUAN - SIDAGAL	3,667	0,874	23,83	2	54,16	0,874	23,83	1,986	54,16	0,2	5,45	2,558	69,76	0,2	5,45	2,558	69,76	0,1	1,83	2,800	76,36
152	412	SAMPAGUL - DESA HUTARAJA - PARLOMBUAN	4,138	2,8	67,28	0,861	20,81	2,59	44,52	0	0,00	0,8	19,33	3,138	75,83	0,8	19,33	3,138	75,83	2,2	54,08	1,200	29,00
153	413	SP.SIOMAOMA - SIOMAOMA	3,323	2,52	75,96	0	0,00	0,898	36,68	0,147	6,00	3,223	96,99	0	0	3,223	96,99	0	0	3,323	100,00	0	0
154	414	SILANTOM TONGA - SILANTOM JAE	3,555	2,3	63,60	0,000	0,00	0,7	15,06	0	0,00	0,755	21,24	0	0	0,755	21,24	0	0	1,800	50,63	0	11
155	415	SP.KARMEL - KARMEL	1,726	1,39	80,42	0	0,00	5,3	32,72	0	0,00	0	0	0,8	46,35	0	0	0,8	46,35	0	23	0,0	0,00
156	416	SP.SIMANINGGIR - SIMANINGGIR	0,841	0,000	0,00	0,000	0,00	0	0,00	2,076	25,39	0,2	23,78	0	0	0,2	23,78	0	0	0,0	4,88	1	71



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
157	032	SIMP.BOLON - PEA OMBUN	13,735	3,505	25,52	1,900	13,83	0,977	32,82	2	67,18	0,4	2,91	4,3	31,31	0,4	2,91	4,3	31,31	0,4	2,91	0,8	5,83
158	033	RAMBA SIALA - TAPUS	4,379	2,725	62,23	0,852	19,46	1,77	100,00	0	0,00	1,722	39,32	0,957	21,85	1,722	39,32	0,957	21,85	2,830	64,63	0,800	18,27
159	092	GAROGA - PEA RAJA/BTS TAPSEL	9,334	2,788	29,87	1,823	19,53	0,215	14,79	0,579	39,82	5,984	64,11	1,5	16,07	5,984	64,11	1,5	16,07	6,134	65,72	0,8	8,57
160	093	GAROGA - RIANIATE	16,047	3,718	23,17	7,974	49,69	1,093	40,10	1,633	59,90	5,75	35,83	0,4	2,49	5,75	35,83	0,4	2,49	6,39	39,80	3,8	23,93
161	155	SP.PARINSORAN - PANGORIAN	14,044	6,723	47,87	0,889	6,33	2,401	45,62	2,311	43,91	4,35	30,97	3,25	23,14	4,35	30,97	3,25	23,14	4,47	31,83	2,43	17,30
162	246	DALAM KOTA GAROGA	1,153	0,0	0,00	1	73,98	0,729	32,50	0,314	14,00	1,033	89,59	0	0	1,033	89,59	0	0	0,953	82,65	0	17
163	326	LUMBAN PINASA - GONTING HOPO - PADANG SIANDOMANG	12,36	5,204	42,10	2	12,76	2,822	34,62	1,487	18,24	2,981	24,12	4,553	36,84	2,981	24,12	4,553	36,84	1,881	15,22	1,000	8,09
164	350	PARGAWAHAN - LOBU TONGA	12,511	3,870	30,93	1	5,29	1,8	35,29	0	0,00	0	0	7,655	61,19	0	0	7,655	61,19	2	15	0,800	6,39
165	388	SP.PARANGINAN - HADATARAN - PARSOSORAN	17,252	2,967	17,20	1	3,37	3,586	71,52	0,873	17,41	2,511	14,55	4,051	23,48	2,511	14,55	4,051	23,48	4,180	24,23	1,165	6,75
166	351	SP. BULU PAYUNG - SIBARGOT	5,963	0,756	12,68	0	7,63	3,429	69,67	0,534	10,85	0,324	5,43	1,376	23,08	0,324	5,43	1,376	23,08	0,108	1,81	0,000	0,00
167	389	SP. PARMANUHAN - PARMANUHAN	3,508	1,267	36,12	1,578	44,98	1,707	36,59	0	0,00	0,52	14,82	0,7	19,95	0,52	14,82	0,7	19,95	1,31	37,29	0,8	22,81
168	390	LUMBAN PINASA - PARSOSORAN - GOTTING SALAK	11,098	7,813	70,40	0	3,49	4,613	37,03	0,845	6,78	3,5	31,54	0	0	3,5	31,54	0	0	5,5	49,69	4	34
169	391	SP. TRANSMIGRASI - TRANSMIGRASI	1,34	0,989	73,81	0,000	0,00	2	84,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
170	393	AEK TANGGA - HUTA GURGUR - PARINSORAN	5,817	2,590	44,52	0,000	0,00	2,784	67,28	0,861	20,81	1,45	24,93	0,592	10,18	1,45	24,93	0,592	10,18	2,18	37,46	0,725	12,46
171	394	PARINSORAN - LUMBAN BAGASAN	2,448	0,898	36,68	0	6,00	2,524	75,96	0	0,00	0,4	16,34	0,9	36,76	0,4	16,34	0,9	36,76	1,7	68,14	0,4	16,34
172	395	SIMP. III PEARAJA - BATU MAMAK	4,647	0,7	15,06	0,000	0,00	2,261	63,60	0	0,00	1,35	29,05	1,6	34,43	1,35	29,05	1,6	34,43	2,80	60,25	0,4	8,61
173	431	SP. SIMATANIARI - SIMATANIARI	1,563	0,00	0,00	2	100,00	1,388	80,42	0	0,00	0,242	15,48	0,4	25,59	0,242	15,48	0,4	25,59	1,363	87,20	0,2	12,80
x174	026	SIMP.SIGOMPULON - SIGOMPULON	7,241	4,5	62,67	0,000	0,00	0	0,00	0	0,00	6,941	95,86	0,2	2,76	6,941	95,86	0,2	2,76	6,20	85,624	0,64	8,8
175	183	SP.SIBAGANDING - SIMATANIARI - HUTAJULU	6,8	1,30	19,12	6	80,88	4,518	38,10	2,459	20,74	2,9	42,65	1,4	20,59	2,9	42,65	1,4	20,59	4,40	64,7	1,60	23,5



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	2016				2017				2018				2019				2020			
				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi				Panjang Tiap Kondisi			
				Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang		Baik		Sedang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
176	201	SITAPEAN - PANTIS	3,049	2,198	72,09	0,000	0,00	1,484	98,54	0	0,00	1,4	45,92	0	0	1,4	45,92	0	0	1	45,9	0,45	15
177	202	SIGOMPULON - BONANI DOLOK	1,968	0,856	43,50	1,100	55,89	1,68	73,85	0,15	6,59	0	0	1	50,81	0	0	1	50,81	1,40	71	0	0
178	320	SP. JLN. NEGARA - PARIK MATIA	2,104	2,104	100,00	0,000	0,00	2,7	35,34	1,112	14,55	2,004	95,25	0	0	2,004	95,25	0	0	2	80,989	0,20	10
179	408	SIGOMPULON - SIMARDANGIANG	4,922	3,429	69,67	0,534	10,85	3,354	42,84	1,113	14,22	1,622	32,95	0	0	1,622	32,95	0	0	2	34,986	0,80	16
180	430	JONGGI - PANGONDOTAN	1,084	0,000	0,00	0,205	18,91	1,423	64,59	0,443	20,11	0,404	37,27	0	0	0,404	37,27	0	0	1	73,801	0,20	18
181	020	PANGALOAN - PAGARAN	3,679	2,003	54,44	0,000	0,00	0,299	13,91	1,007	46,86	1,839	49,99	0	0	1,839	49,99	0	0	1	38,054	0,40	11
182	021	PANGALOAN - LIANG SINGA	1,91	0,6	30,31	0	0,00	1,354	84,15	0,255	15,85	1,558	81,57	0,128	6,7	1,558	81,57	0,128	6,7	0,6	31,414	1,00	52,356
183	171	SARULLA - TORDOLOK NAULI - ONAN JORO	4,261	0,764	17,93	2	46,68	2,558	100,00	0	0,00	1,988	46,66	0,2	4,69	1,988	46,66	0,2	4,69	1,25	29,359	1,40	32,9
184	173	PARSAORAN NAINGGOLAN - PARSAORAN NAINGGOLAN	1,254	0,304	24,24	0	0,00	2,553	100,00	0	0,00	0,304	24,24	0	0	0,304	24,24	0	0	1	68,102	0,00	0
185	274	PARSAORAN NAINGGOLAN - SAMOSIR - HARIARA	0,687	0,687	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0,387	56,33	0	0	0,387	56,33	0	0	0	58,224	0,00	0
186	288	DALAM KOTA SARULLA	0,632	0,632	100,00	0	0,00	1,066	40,27	0,841	31,77	0,632	100	0	0	0,632	100	0	0	1	100,000	0	0
187	110	SARULLA - SIPETANG	17,446	7,454	42,73	3,593	20,59	2,575	40,23	1,6	25,00	12,35	70,79	0,05	0,29	12,35	70,79	0,05	0,29	11,95	68,47	1,00	5,73
188	172	JANJI MARIA - BONANI DOLOK	5,065	4,183	82,59	0	4,84	0	0,00	0,205	18,91	1,9	37,51	1,7	33,56	1,9	37,51	1,7	33,56	2,67	52,6	1,00	19,7
189	220	JANJI ANGKOLA - PARSAORAN - JANJI NAULI	1,42	1,187	83,59	0,233	16,41	0	0,00	1,563	100,00	0,55	38,73	0,32	22,54	0,55	38,73	0,32	22,54	1,02	71,83	0,40	28,17
190	279	JANJI ANGKOLA - AEK NALAS	1,4	0,661	47,21	1	52,79	1,012	32,24	0	0,00	0,3	21,43	0,056	4	0,3	21,43	0,056	4	0,8	57,14	0,600	43
191	143	SIMANGUMBAN - HOPONG	12,436	6,885	55,36	1,798	14,46	1,716	72,59	0,388	16,41	4,8	38,6	3,577	28,76	4,8	38,6	3,577	28,76	7,3	58,7	0,800	6,43
192	407	HUTA GURCUR - MUARA TOLANG - BATAS TAPSEL	5,014	3,586	71,52	1	17,41	0,344	32,89	0	0,00	1,465	29,22	3,191	63,64	1,465	29,22	3,191	63,64	1,000	19,94	2,214	44,16
193	436	SP. LOBI SIHIM - SOBU SIHIM	1,4	0,000	0,00	0,000	0,00	0	0	0	0,00	1,4	100	0	0	1,4	100	0	0	0,8	57	0	29
194	435	PANONGKALAN - SP. MUARA TOLANG	13	0,000	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	2,3	17,69	0	0	2,3	17,69	2	14	0,2	1,54
		TOTAL	1074,009	517,433	48,18	157,515	14,67	517,433	48,18	157,515	15,00	533,323	49,65	149,085	21,02	547,249	50,95	159,536	21,02	563,054	52,43%	158,157	14,73

b. Irigasi

Seiring dengan wewenang urusan wajib pekerjaan umum, maka pembangunan di bidang pengairan sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan di daerah ini, khususnya pengembangan lahan sawah yang didukung oleh pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan areal pertanian. Perkembangan jaringan irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	334.784	334.784	334.784	334.784	334.784
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,02	67,22	65,80	67,50	69,00
3	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya (%)	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06
4	Luas lahan budidaya (Ha)	15.905	15.905	15.905	15.905	15.905

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Sesuai data pada tabel 2.52 dapat dilihat bahwa persentase seluruh sistem jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang berfungsi dalam kondisi baik semakin meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 67,02 persen dan pada tahun 2020 sebesar 69,00 persen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, kondisi irigasi tahun 2018 sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.53.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.53
Kondisi Daerah Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2020

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aek Sibatubatu	Pahae Jae	100	35	20	20	25	45.50	25.01	15.00	14.49	55.50	15.00	15.00	20
2	Aek Bongbongan	Pahae Jae	100	35	25	15	25	45.50	20.01	5.00	29.49	45.50	15.00	5.00	40
3	Aek Botik	Pahae Jae	140	25	25	25		120.50	12.76	5.20	1.54	57.14	10.71	8.93	28
4	Aek Nangali	Pahae Jae	51	30	25	20	25	18.35	17.51	15.00	0.14	35.98	31.37	29.41	8
5	Onan Joro	Pahae Jae	350	75	5	10	10	330.50	10.00	7.50	2.00	94.43	1.43	2.14	7
6	Saba Singkam	Pahae Jae	50	35	20	25	20	15.50	15.00	15.00	4.50	31.00	34.00	30.00	10
7	Simarpinggan	Pahae Jae	60	35	20	25	20	19.50	20.00	8.00	12.50	32.50	41.67	13.33	18
8	Liang Singa	Pahae Jae	40	30	25	20	25	9.50	20.00	8.00	2.50	23.75	50.00	20.00	11
9	Silangkitang	Pahae Jae	200	25	25	25	25	55.50	80.00	9.40	55.10	27.75	7.50	4.70	65
10	Sigurung-gurung	Pahae Jae	47	35	20	20	25	14.30	25.00	5.00	2.70	32.55	53.19	10.64	9
11	Aek Martindi	Pahae Julu	100	35	25	15	25	45.50	25.00	26.00	3.50	30.00	15.00	10.00	50
12	Aek Nambilung	Pahae Julu	130	30	25	20	25	41.00	55.20	7.50	26.30	31.54	11.54	5.77	56
13	Aek Simargalung	Pahae Julu	75	25	15	35	25	48.00	18.75	5.50	2.75	66.67	25.00	7.33	6
14	Onan Hasang	Pahae Julu	135	35	25	30	10	60.00	25.50	27.50	22.00	14.81	25.93	20.37	44
15	Sialang	Pahae Julu	110	35	20	25	20	49.50	20.01	5.00	29.49	63.64	24.55	13.64	3
16	Aek Sitapean	Pahae Julu	75	45	20	20	15	33.00	12.76	5.20	1.54	44.00	29.33	20.00	12
17	Aek Dahasan	Pahae Julu	60	25	20	25	30	23.50	17.51	15.00	0.14	75.00	11.67	8.33	10
18	Sawa Longat	Pahae Julu	40	30	15	25	30	9.50	10.00	7.50	2.00	26.25	50.00	18.75	10
19	Lobu Pining	Pahae Julu	30	25	20	25	30	4.50	15.00	15.00	4.50	15.00	45.00	30.00	15
20	Gonting Desa Janji Matogu	Pahae Julu	45	25	30	20	25	19.00	20.00	8.00	12.50	42.22	33.33	21.67	8
21	Sonak Sigompulon	Pahae Julu	65	35	15	20	30	30.50	20.00	8.00	2.50	46.15	28.77	23.08	7
22	Sitakkapan Lontung Dolok	Pahae Julu	75	20	25	20	35	29.25	80.00	9.40	55.10	39.00	46.67	11.47	8



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Aek Siparpar	Pahae Julu	43	15	30	25	30	13.99	25.00	5.00	2.70	46.51	20.00	25.00	13
24	Simasom	Pahae Julu	43	30	20	30	20	12.70	25.00	26.00	3.50	52.79	17.44	17.44	17
25	Sipurik-purik	Purbatua	150	65	10	10	20	125.50	55.20	7.50	26.30	86.33	8.00	3.33	7
26	Aek Bottar	Purbatua	100	25	20	15	15	85.50	18.75	5.50	2.75	75.50	15.00	6.00	9
27	Aek Sulum	Purbatua	40	30	20	15	10	11.50	25.50	27.50	22.00	97.50	5.00	2.50	0
28	Pasadahon Paduahon	Purbatua	320	20	10	25	25	123.50	27.10	15.00	18.40	7.81	4.69	11.50	81
29	Pardamean	Simangumban	368	65	25	20	10	248.10	12.00	15.00	15.00	67.42	13.59	3.40	21
30	Sidua Mas	Simangumban	50	25	15	10	15	15.50	15.00	10.00	11.50	31.00	44.00	20.00	10
31	Simajambu	Simangumban	200	25	20	20	15	180.50	10.00	7.50	13.00	90.25	7.00	1.75	6
32	Simangumban	Simangumban	70	22	10	22	20	44.50	13.50	9.00	3.00	65.00	17.14	17.14	6
33	Aek Halian	Siatas Barita	60	32	20	15	10	20.50	15.00	9.75	1.25	34.17	50.00	6.67	14
34	Aek Marubun	Siatas Barita	80	25	25	15	15	59.50	18.75	15.00	0.75	75.63	18.75	3.75	7
35	Simarlai-lai	Siatas Barita	80	30	15	10	20	23.50	18.20	8.60	18.95	29.38	46.25	22.50	7
36	Simarombang	Siatas Barita	112	20	25	15	20	23.50	8.60	10.75	9.66	20.98	1.79	15.27	67
37	Sangkaran	Siatas Barita	57	27	20	15	15	13.74	7.50	7.50	15.30	24.11	56.14	17.54	7
38	Parmocian	Siatas Barita	50	29	20	15	10	20.50	5.00	5.00	14.50	46.00	30.00	20.00	9
39	Lumban Siagian	Siatas Barita	50	25	20	20	20	13.00	8.00	6.00	0.50	80.00	4.00	2.00	19
40	Panomburan	Siatas Barita	50	19	20	10	15	7.50	19.00	6.00	3.50	15.00	56.00	26.40	8
41	Bondar Sibabiat	Tarutung	66	45	15	15	10	28.50	145.00	36.80	14.70	98.48	3.03	1.52	2
42	Hasak I	Tarutung	300	25	15	25	20	85.50	85.20	12.50	22.20	70.00	3.33	12.50	19
43	Hasak II	Tarutung	250	23	15	20	15	120.50	20.00	10.00	4.50	30.00	4.00	4.00	67
44	Hutabarat Parbaju	Tarutung	50	25	25	15	10	10.50	14.00	3.50	2.00	25.00	60.00	10.00	10
45	Panaharan	Tarutung	200	19	10	25	25	43.50	12.00	12.00	1.50	21.75	5.00	1.73	77
46	Panganan Lombu	Tarutung	15	17	25	20	15	1.20	18.00	4.00	17.50	8.00	66.67	13.33	17



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	Siborgung Hilir	Tarutung	200	62	15	10	12	160.50	16.00	3.00	1.50	62.75	17.50	1.93	23
48	Siborgung kiri dan kanan	Tarutung	159	22	20	15	15	82.95	33.60	18.00	4.90	70.44	1.89	3.46	29
49	Sipolhas	Tarutung	67	35	15	10	10	25.65	44.10	17.10	27.30	38.28	26.87	14.93	25
50	Partali Julu	Tarutung	100	70	5	10	15	65.50	18.50	10.00	14.76	68.50	15.00	15.00	7
51	Siansimun	Tarutung	60	25	20	20	10	13.50	15.00	10.00	4.50	22.50	25.33	11.33	46
52	Aek Halian Harangan	Sipoholon	68	21	15	20	15	46.50	12.50	13.00	11.50	74.26	6.62	6.88	17
53	Saba Dolok	Sipoholon	18	19	15	10	10	-0.18	12.30	13.20	17.00	5.56	27.78	11.11	61
54	Pangasean	Sipoholon	50	17	20	15	5	6.50	30.00	5.00	2.50	13.00	44.00	11.00	37
55	Sibontar	Sipoholon	55	25	15	20	15	21.75	100.00	37.50	77.00	27.27	45.45	9.09	23
56	Sampuran	Sipoholon	100	29	25	25	15	29.50	55.00	10.00	64.50	75.00	4.00	5.00	21
57	Dusun Pansinaran	Sipoholon	70	25	20	10	15	16.50	32.00	5.00	2.50	23.57	21.43	15.29	45
58	Sibuntuon	Sipoholon	107	55	20	15	5	54.70	22.50	3.45	130.55	62.34	15.42	15.42	12
59	Simanungkalit	Sipoholon	66	25	20	20	10	15.30	10.00	2.00	1.80	38.33	9.32	15.15	42
60	Aek Parpangiran	Sipoholon	75	20	20	20	5	14.25	31.80	3.85	3.85	32.33	40.00	7.80	25
61	Aek Siandurian	Sipoholon	117	30	15	15	15	94.95	34.50	13.40	28.15	83.72	11.11	4.44	6
62	Tambok Nabegu	Sipoholon	52	40	25	10	5	40.00	18.30	10.00	13.05	80.77	9.62	7.69	7
63	Aek Toras	Sipoholon	40	19	20	15	5	13.50	15.00	15.00	4.50	25.00	37.50	1.50	41
64	Aek Pangaloan	Sipoholon	85	21	15	15	10	17.60	15.20	6.80	24.50	20.71	41.18	14.71	28
65	Sisoding	Sipoholon	50	25	20	20	10	8.00	4.50	4.68	12.32	16.00	30.00	30.00	29
66	Sipilo	Sipoholon	60	20	20	10	15	10.50	15.00	2.00	1.18	8.33	83.33	5.00	8
67	Aek Butar	Pagaran	300	30	25	15	15	100.50	20.20	5.50	17.80	8.33	10.67	29.33	32
68	Pagaran Ginjang	Pagaran	84	25	20	20	5	20.70	26.00	5.00	2.25	48.45	23.81	11.90	21
69	Lubis	Pagaran	46	19	20	15	25	9.30	33.10	17.50	19.90	21.74	43.48	10.52	29
70	Parhorboan	Pagaran	116	21	25	20	10	25.66	22.50	10.70	20.30	22.12	8.62	18.45	56



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	Sibaragas	Pagaran	107	25	20	10	10	27.60	16.50	16.50	19.30	25.79	9.35	32.71	37
72	Sidolgi	Pagaran	140	20	15	20	15	51.50	18.75	18.75	13.20	39.64	21.43	16.29	28
73	Sigohi Butuha	Pagaran	339	45	15	25	12	165.00	30.10	5.85	24.80	58.11	1.18	14.45	11
74	Sipultak	Pagaran	85	25	20	10	15	25.00	13.00	5.20	3.85	41.18	30.59	10.71	23
75	Tambok Bolon	Pagaran	91	30	20	20	25	45.00	5.00	4.00	3.00	60.44	27.47	10.99	6
76	Tomburan Sibirik	Pagaran	225	21	20	10	15	197.50	25.50	0.60	0.40	80.00	8.44	2.40	14
77	Lobu Sonak	Pagaran	77	25	20	15	10	26.30	35.00	12.50	19.90	47.14	25.32	12.99	20
78	Janggaleman	Pagaran	40	20	20	15	10	5.50	15.00	15.00	12.00	18.75	43.75	26.25	16
79	Lumban Silintong	Pagaran	70	30	20	15	10	23.50	45.00	3.00	1.50	50.71	22.14	17.86	14
80	Pokkahan	Pagaran	50	25	20	10	15	10.50	80.00	21.00	98.50	29.00	20.00	20.00	36
81	Sipultak Dolok	Pagaran	100	30	25	20	20	70.50	20.00	11.96	31.34	70.00	2.00	5.00	28
82	Sitamba	Pagaran	50	21	20	15	10	8.50	29.80	4.84	2.06	17.00	30.00	12.00	46
83	Simarhilap	Pagaran	60	25	20	20	15	28.50	31.00	21.40	37.94	58.33	8.33	16.67	22
84	Pearung Desa Sibaragas	Pagaran	40	20	20	10	15	5.50	35.00	35.00	9.40	13.75	25.00	31.25	35
85	Lumban Ina-ina	Pagaran	50	30	20	15	10	15.50	50.85	22.80	14.85	37.00	20.00	13.00	35
86	Aek Sitakkubak	Pagaran	98	25	15	25	15	24.90	81.00	21.25	71.75	25.41	10.20	21.43	48
87	Parlombuan	Pagaran	105	19	25	20	20	27.00	26.65	9.10	24.25	52.38	9.52	16.00	27
88	Sisordak	Parmonangan	84	21	15	15	20	24.90	25.00	10.00	11.00	59.52	5.95	5.95	35
89	Parlombuan	Parmonangan	105	40	15	20	15	42.75	19.25	5.40	2.85	48.33	19.05	10.71	27
90	Saba Najonok	Parmonangan	45	20	20	15	10	6.75	19.50	10.00	21.20	15.00	24.44	25.00	41
91	Saba Lobu	Parmonangan	45	30	15	25	15	20.00	17.50	10.50	6.50	55.56	17.78	12.22	19
92	Hutaraja Julu	Parmonangan	40	25	25	20	20	7.50	15.50	12.50	18.50	31.25	31.25	32.50	10
93	Aek Raja	Parmonangan	50	19	15	25	15	7.50	25.00	10.00	4.50	30.00	30.00	19.20	26
94	Aek Ussim	Parmonangan	40	21	20	10	10	5.90	12.50	12.00	5.00	27.25	30.00	37.50	10



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	Aek Parinsoran	Parmonangan	60	25	15	20	10	13.50	15.00	6.00	20.50	34.17	25.00	13.33	33
96	Aek Horasan	Adian Koting	40	20	10	25	25	9.50	10.00	10.00	11.50	38.75	37.50	20.00	9
97	Pagaran Lambung	Adian Koting	40	30	20	20	10	9.50	12.50	12.50	9.50	26.25	37.50	31.25	10
98	Aek Narorongan	Adiankoting	50	25	15	25	15	10.50	24.50	6.50	3.50	90.00	2.00	4.00	9
99	Munson Lyman	Adiankoting	50	19	10	15	25	7.50	30.00	21.00	22.10	41.00	30.00	25.00	9
100	Aek Burburan	Adiankoting	50	21	20	20	15	8.50	36.80	16.80	24.40	30.00	36.00	30.00	9
101	Aek Raisan	Adiankoting	75	25	20	20	15	18.00	15.75	26.25	17.10	33.33	26.67	20.00	25
102	Pansur Batu	Adiankoting	75	20	20	15	10	29.25	28.50	11.25	22.50	80.00	4.00	6.67	14
103	Aek Bulu Godang	Adiankoting	75	30	25	10	10	21.75	11.25	11.25	15.75	42.33	20.00	20.33	22
104	Aek Siaro	Siborongborong	61	25	20	15	15	13.80	8.20	5.50	11.30	34.10	16.39	19.67	35
105	Banjar Sitabotabo	Siborongborong	60	19	20	10	15	22.50	12.50	13.00	7.00	42.50	33.33	23.67	6
106	Hariara Silaban	Siborongborong	80	21	15	25	20	16.30	18.90	9.60	14.00	31.63	25.00	28.13	20
107	Hutasoit	Siborongborong	90	29	20	20	10	26.10	12.00	15.00	7.10	50.00	11.11	0.33	44
108	Lobu Siregar	Siborongborong	53	65	10	10	15	35.25	30.50	8.00	8.00	47.64	37.74	13.02	7
109	Lobu Sonak	Siborongborong	46	60	5	10	20	15.40	8.00	8.00	14.50	76.09	4.35	4.35	20
110	Lumban pea	Siborongborong	200	25	20	15	20	155.50	12.50	12.50	5.50	85.25	2.50	4.30	13
111	Mabar	Siborongborong	43	30	15	20	20	10.55	15.00	13.00	11.50	52.44	11.63	20.93	20
112	Sambariba Horbo	Siborongborong	90	70	10	10	10	67.50	15.00	12.50	15.00	66.67	16.67	15.00	7
113	Siborongborong	Siborongborong	135	75	5	10	10	69.75	18.75	15.00	7.75	52.41	3.70	7.41	10
114	Sidilanitano Kanan/Kiri	Siborongborong	500	70	10	10	10	345.50	25.00	15.00	17.00	91.10	1.00	0.20	13
115	Sidoras Kiri/Kanan	Siborongborong	384	55	15	15	15	369.50	18.75	18.75	8.25	35.16	1.04	5.21	64
116	Sigalingging/Pealangge	Siborongborong	41	30	25	20	20	13.95	15.25	15.25	22.75	34.15	24.39	35.61	11
117	Sigumbang	Siborongborong	73	40	15	15	15	28.35	12.00	12.00	23.20	41.58	36.99	18.84	8
118	Sijaba	Siborongborong	115	27	20	15	10	53.00	20.00	14.20	3.30	47.83	8.70	13.04	35



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119	Simokmok	Siborongborong	200	70	10	10	10	145.50	18.90	22.50	22.30	85.25	6.00	3.13	11
120	Sitampurung	Siborongborong	225	45	15	17	20	203.00	20.00	0.30	43.60	66.67	2.22	1.20	35
121	Siugan-ugan	Siborongborong	51	25	15	15	20	10.80	2.30	6.90	8.55	25.10	19.61	11.37	49
122	Sosor Tambak	Siborongborong	120	21	25	25	5	26.70	23.00	5.00	2.60	42.25	8.33	11.17	43
123	Silait-lait	Siborongborong	67	23	20	20	30	22.30	8.60	8.60	27.30	59.70	32.84	3.28	9
124	Lumban Tora	Siborongborong	72	65	15	10	10	45.90	9.00	9.00	14.45	66.53	13.89	10.97	14
125	Lumban Pea Dolok	Siborongborong	79	70	10	10	10	54.75	6.75	13.50	2.25	70.57	12.66	9.49	12
126	Sianpapaga	Siborongborong	150	45	20	15	15	120.50	50.00	10.00	5.25	63.33	11.33	2.63	28
127	Simarompumpu	Siborongborong	93	22	25	15	10	35.00	27.00	0.00	127.50	86.02	2.15	5.38	11
128	Panggasean	Siborongborong	64	19	20	20	10	10.86	9.00	4.20	1.30	32.59	15.63	25.00	32
129	Sampean	Siborongborong	80	21	20	15	15	16.30	10.95	14.60	1.50	45.38	12.50	28.13	19
130	Lobu Dusun Pangkirapan	Siborongborong	90	25	20	25	20	31.50	28.75	13.75	2.15	50.00	11.11	13.33	31
131	Pangambatan	Siborongborong	60	20	20	10	20	10.50	20.00	15.00	27.00	34.17	16.67	25.00	29
132	Sitamba Lbn. Pea Dolok	Siborongborong	75	30	20	5	10	25.50	22.50	6.25	25.75	34.00	13.33	9.33	48
133	Pananggele	Siborongborong	150	25	20	25	15	80.00	15.30	2.70	4.00	63.33	10.00	9.24	22
134	Lumban Julu Pohan	Siborongborong	66	19	20	10	15	11.34	30.00	5.80	4.40	47.48	15.15	18.94	23
135	Dolok Martumbur	Muara	50	21	20	10	20	8.50	13.40	13.40	66.50	37.00	40.00	20.00	8
136	Sosor Sihilap	Muara	50	25	20	15	10	10.50	10.80	2.20	31.70	41.00	30.00	24.00	10
137	Suppol	Muara	60	55	15	20	10	31.50	7.90	7.90	10.30	52.50	25.00	5.00	23
138	Bondar Barat	Muara	80	30	20	25	15	18.00	15.00	7.50	1.75	46.25	25.00	8.75	25
139	Silando	Muara	70	25	25	20	20	25.00	23.25	3.95	2.30	42.86	14.29	24.89	23
140	Huta Ginjang	Muara	67	19	20	25	20	11.58	19.00	16.00	23.00	38.18	41.79	17.91	7
141	Silaput/Sitanggor	Muara	60	21	20	20	25	25.50	24.00	16.00	13.14	47.50	25.00	25.00	8
142	Aritonang	Muara	60	25	20	20	20	16.50	20.00	22.50	21.20	66.67	8.33	3.33	27



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
143	Sidempula	Muara	160	49	20	20	10	125.50	20.00	12.00	26.50	93.75	3.13	9.38	-1
144	Sigansip	Muara	100	30	25	20	20	45.50	22.00	15.00	12.50	80.00	4.00	1.00	20
145	Simanosor	Muara	55	25	20	20	10	12.00	37.50	7.00	5.00	41.82	36.36	17.82	9
146	Ugan	Muara	49	19	20	20	15	10.00	19.80	13.86	36.34	100.00	4.08	4.08	-3
147	Untemungkur	Muara	25	21	25	20	15	1.75	20.00	12.50	22.16	19.00	40.00	20.00	26
148	Nalas	Sipahutar	100	25	25	15	10	21.00	20.00	10.00	11.50	52.00	25.00	12.50	16
149	Hoda Sipahutar	Sipahutar	50	20	20	20	10	7.00	15.00	12.00	12.50	20.00	60.00	10.00	15
150	Simanuk	Sipahutar	125	22	23	25	30	45.00	24.00	3.00	1.50	40.00	8.00	2.40	55
151	Aek Boruan	Sipahutar	40	21	15	20	15	5.90	35.00	7.00	20.00	17.25	62.50	17.50	8
152	Sampean	Pangaribuan	80	25	25	15	20	27.50	21.00	17.42	6.58	46.88	25.00	25.00	8
153	Saba Bolak	Pangaribuan	400	128	10	10	10	355.50	20.00	12.00	23.42	36.25	5.00	1.25	10
154	Siomaoma	Pangaribuan	100	20	20	25	30	35.50	15.00	15.00	4.50	62.00	4.00	1.00	25
155	Parsibarungan	Pangaribuan	40	67	10	13	10	7.50	20.20	0.00	23.30	125.00	5.00	5.00	15
156	Saroha Sampean	Pangaribuan	45	20	20	30	30	6.75	25.00	3.50	6.00	44.44	22.22	28.33	10
157	Aek Bontar	Pangaribuan	75	30	25	20	15	21.75	19.25	11.00	24.25	40.00	33.33	23.33	8
158	Aek Sitarolo	Pangaribuan	70	25	20	20	15	15.50	17.30	9.80	15.90	42.86	14.29	27.86	20
159	Huta Julu	Pangaribuan	75	19	25	25	10	14.00	30.00	5.00	4.00	29.33	13.33	32.67	30
160	Aek Tangga	Garoga	70	21	15	20	15	15.00	15.20	5.00	3.05	37.14	28.57	17.86	21
161	Aek Sisudung	Garoga	50	25	20	25	30	10.00	20.00	12.50	46.50	60.00	10.00	21.00	35
162	Aek Pansur Godang	Garoga	75	20	25	25	30	14.25	33.00	5.00	5.00	33.33	46.67	15.00	5
163	Saba Aron	Garoga	45	30	25	25	20	11.25	70.00	3.00	7.00	77.78	4.44	6.67	30
164	Saba Kole	Garoga	50	30	20	25	25	10.00	24.00	7.00	3.10	52.00	30.00	11.00	30
165	Sitangko Rahot	Garoga	33	25	25	20	30	10.00	20.00	20.00	12.50	90.91	3.03	3.03	30
166	Saba Lobu	Garoga	36	20	25	25	30	11.50	25.00	15.00	4.50	97.22	2.78	5.56	8



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Kondisi Tahun 2018				Kondisi Tahun 2019				Kondisi Tahun 2020			
				Panjang Tiap Kondisi	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)	Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
167	Aek Sibio-bio	Garoga	72	30	25	25	20	15.00	45.00	3.00	16.50	48.61	41.67	6.94	3
168	Aek Salak/sisudung	Garoga	97	25	25	20	30	15.00	12.70	13.50	6.30	30.93	20.62	10.31	38
	TOTAL		15.905	30,56	19,13	18,05	16,57	44.08	23.95	10.93	15.90	47.24	21.76	13.86	21.98

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

c. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu : (1) adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang : manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat serta pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut; (2) proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang serta untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara diwaktu mendatang, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Prioritas. Implementasi pengembangan budidaya dan kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 memperlihatkan kondisi fungsi dan peran yang belum optimal. Hal tersebut dilihat dari skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana. Kondisi pola ruang yang dilihat dari pencapaian kebijakan kawasan lindung, dimana kawasan ini ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2013 di daerah ini terdapat kawasan hutan (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan hutan konservasi cagar) seluas 311.125,20 Ha atau 82,01 persen dari luas daratan Kabupaten Tapanuli Utara. Penyimpangan pemanfaatan ruang (kawasan lindung) diperlihatkan oleh adanya alih fungsi lahan kawasan hutan (hutan primer maupun hutan sekunder) yang disebabkan pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan jumlah penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi pada umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan. Tingginya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) mengakibatkan berkurangnya kawasan resapan air pada kawasan hulu sungai. Di sisi lain, alih fungsi pada umumnya mengabaikan rencana tata ruang seperti yang terjadi pada alih

fungsi lahan kawasan budidaya pertanian produktif (sawah) menjadi kawasan permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan yang menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan di daerah ini. Perubahan alih fungsi lahan tersebut merupakan indikasi rentannya kondisi lahan yang menjadi penyebab degradasi lingkungan. Penyimpangan alih fungsi lahan disebabkan karena belum efektif berfungsinya aspek pengendalian dalam pelaksanaan penataan ruang serta terkait dengan kewenangan perijinan pemanfaatan ruang yang sepenuhnya masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya pemanfaatan kawasan lindung di daerah ini dilaksanakan penandaan batas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).

2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah rumah tinggal (unit)	67.905	68.316	69.221	69.138	69.302
2	Luas wilayah permukiman (Ha)	2.443	2.543	2.683	2.691	5.038
3	Luas permukiman layak huni (Ha)	239	250	1.548	2.375	4.150
4	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	8,98	8,14	7,3	6,46	6,16
5	Persentase rumah tinggal layak huni	76,2	76,7	90,29	82,35	84,51
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak	75,80	79,90	72	87,85	88,39
7	Persentase rumah tinggal menggunakan listrik	98,48	99,01	TD	TD	TD
8	Persentase rumah tinggal menggunakan air bersih	81,23	86,15	80,60	94,57	94,86
9	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	2	2	2	2	2
10	Luas TPU (Ha)	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
11	Daya tampung TPU (Kavling)	7.696	7.657	7.640	7.527	7.451

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.54 menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selama tahun 2016-2020 terdapat peningkatan jumlah rumah tempat tinggal hunian di Kabupaten Tapanuli Utara dari 67.905 unit pada tahun 2016 menjadi sebesar 69.302 unit pada tahun 2020. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah tinggal pada periode waktu sama juga terdapat peningkatan rumah tinggal layak huni dari 76,20 persen tahun 2016 menjadi 84,51 persen pada tahun 2020. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, diantaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan). Guna mendukung peningkatan akses air bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memberikan ketersediaan fasilitas air bersih dan sehat untuk kehidupan masyarakat. Jumlah rumah tangga yang telah dapat mengakses air bersih meningkat dari 81,23 persen pada tahun 2016 menjadi 94,86 persen pada tahun 2020. Demikian juga halnya dengan rumah tangga berakses sanitasi yang mengalami peningkatan dari 75,80 persen pada tahun

2016 menjadi 88,39 persen pada tahun 2020. Berdasarkan data ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengakses air bersih dan sanitasi pada seluruh wilayah permukiman.

2.3.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Manajemen pemerintahan yang efektif dilakukan dengan melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan pembangunan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama tahun 2015-2019 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat di lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat. Dalam rangka pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya telah disiagakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah personil Satpol PP (orang)	163	242	256	251	250
	a. Laki-laki	143	227	237	29	229
	b. Perempuan	20	15	19	2	21
2	Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun (kejadian)	6	4	9	16	1
3	Jumlah penertiban penduduk liar, gelandangan, pengemis, orang gila, orang terlantar dan tuna susila	8	10	10	15	20
4	Jumlah penertiban PKL	10	12	14	18	20
5	Jumlah penindakan baliho/spanduk yang sudah lewat waktu	8	12	12	18	25
6	Jumlah titik reklame tanpa ijin yang dibongkar	0	6	8	8	10
7	Jumlah operasi kasih sayang kepada pelajar (kali)	96	88	108	108	10
8	Jumlah operasi penertiban izin/peraturan daerah (kali)	116	92	96	96	104
9	Jumlah operasi penyakit masyarakat (PEKAT) (kali)	24	24	24	25	21
10	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	33	33	40	45	183
11	Jumlah mobil pemadam kebakaran	-	5	5	5	5

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
12	Jumlah kasus kebakaran	35	40	40	40	30
13	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	54	60	60	60	60
14	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	80	85	85	85	86

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.55 menunjukkan bahwa jumlah aparat polisi pamong praja telah meningkat dari 163 orang pada tahun 2016 menjadi 250 orang pada tahun 2020, dimana keberadaan aparat satuan polisi pamong praja telah melakukan peningkatan operasi dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah ini, diantaranya melalui penertiban PKL, penindakan baliho/spanduk yang sudah lewat waktu, operasi kasih sayang serta operasi penertiban izin/peraturan daerah. Operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menaati peraturan yang akan dapat menciptakan ketentraman bagi mereka.

Sementara dalam hal bencana berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian yaitu suatu sirkum atau jajaran gunung api yang membentang dari Sumatera paling utara sampai Sumatera bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan. Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini juga merupakan tempat bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan (sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-patahan yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya

longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar sampai terjal. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam rangka pelayanan tersebut telah disiagakan aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.56

Tabel 2.56
Indikator Kinerja Penanganan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan dokumen penanggulangan bencana daerah 1. Peta Rawan Bencana 2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 3. Rencana Kontijensi Longsor 4. Rencana Kontijensi Banjir 5. Rencana Kontijensi Gempa Bumi 6. Rencana Kontijensi Cuaca Ekstrem 7. Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana	0	0	0,14 1 dok	0,14	0,14
2	Jumlah Desa Tangguh	0	0	0	0	0
3	Sarana Prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana (jumlah)	0	0	0	72	72
4	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan (jumlah yang mendapatkan pelatihan: jumlah penduduk x 100%)	0	0,00172	0,00174	0,001574	0,001574
5	Ketersediaan peta rawan bencana Kabupaten (Ada/Tidak Ada)	0	0	ada	ada	ada
6	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat (jumlah goni yang disalurkan dibagi jumlah masyarakat)	0,081	0,0069	0,5234	0,0960	0,0597
7	Persentase tim penanggulangan bencana terdidik (Personil Satgas)	0	10	10	10	10
8	Response time mencapai lokasi bencana	2x24 jam	2x24 jam	2x24 jam	2x24 jam	2x24 jam
9	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan (jumlah bencana yang ditangani 1 x 24 jam : jumlah bencana x 100%)	-	-	-	15,67	27,38

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
10	Jumlah Kejadian Bencana					
	a. Gempa Bumi	-	-	-	-	-
	b. Banjir	18	6	23	9	8
	c. Tanah Longsor	47	52	150	123	71
	d. Angin Puting Beliung	10	2	3	2	3
	e. Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-
	f. Bencana lainnya	4	-	-	-	4
11	Nilai Kerugian Bencana	-	-	-	-	
	a. Jumlah korban meninggal/ hilang (jiwa)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	1
	b. Jumlah kerugian materi (Rp.) (data perkiraan berdasarkan laporan bencana)	0	0	9.171.714.118	3.803.865.704,99	2.815.752.167,95
12	Ketersediaan fasilitas pasca bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (jumlah penanganan : jumlah laporan bencana x 100%)	68	55	10	10	81

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.56 menunjukkan jumlah kejadian bencana pada tahun 2020 untuk bencana banjir sebanyak 8 kejadian, tanah longsor sebanyak 71 kejadian, angin puting beliung 3 dan bencana lainnya 4 kejadian. Data kejadian bencana per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Data Bencana Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Tarutung	29	14	50	34	32
2	Kecamatan Sipoholon	5	2	11	3	4
3	Kecamatan Pagaran	-	3	7	4	1
4	Kecamatan Siborongborong	5	6	19	25	13
5	Kecamatan Siatas Barita	7	4	9	8	9
6	Kecamatan Adiankoting	6	4	9	3	2
7	Kecamatan Pahae Julu	2	3	8	16	3
8	Kecamatan Pahae Jae	5	3	18	3	4
9	Kecamatan Simangumban	-	-	3	-	-
10	Kecamatan Purbatua	5	-	6	10	1
11	Kecamatan Parmonangan	6	2	8	7	2

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
12	Kecamatan Sipahutar	3	4	8	9	3
13	Kecamatan Pangaribuan	3	2	5	6	2
14	Kecamatan Garoga	3	2	6	5	3
15	Kecamatan Muara	1	-	8	3	5

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.57 dapat kita lihat bahwa kejadian bencana terbanyak tahun 2020 terjadi di Kecamatan Tarutung yaitu sebanyak 32 kejadian dan Kecamatan Simangumban tidak mempunyai kejadian bencana.

2.3.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan dapat dilihat pada table berikut ini.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.58
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah PMKS (Tahun)					PMKS yang Ditangani (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Anak balita terlantar	3	-	-	2	1	8	-	-	2	1
2	Anak terlantar	36	10	-	1	1	-	-	-	1	1
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	63	30	10	26	25	60	6	10	26	25
4	Anak jalanan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	121	121	121	221	2	-	-	-	221	2
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	28	28	-	1	1	-	-	-	1	1
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	32	32	-	2	1	-	-	-	2	1
8	Lanjut usia telantar	675	675	675	1.172	-	675	240	-	1.172	-
9	Penyandang disabilitas	1.185	1.508	1.509	2.043	5	57	35	-	2.043	5
10	Tuna Susila	8	45	-	24	-	8	45	-	24	-
11	Gelandangan	3	3	-	-	25	-	-	-	-	25
12	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	142	2	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	32	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Korban trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban bencana alam	-	-	134	163	163	-	-	46	97	-
22	Korban bencana sosial	-	-	37	63	63	-	-	120	28	79
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	633	1.260	1.260	-	-	10	10	-	-	-
24	Fakir Miskin	11.287	15.733	27.810	11.287	-	6.690	6.648	11.270	11.287	-
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KK)	50	50	50	91	91	50	50	50	91	91

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

Uraian dan capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan akan disampaikan pada penjelasan berikut ini.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja.

Tabel 2.59
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angkatan Kerja (penduduk umur > 15 tahun)					
	a. Bekerja (orang)	n/a	160.853	161.862	158.946	167.428
	b. Pengangguran (orang)	n/a	3.099	2.329	2.135	5.065
	c. Jumlah penduduk angkatan kerja	n/a	163.952	164.191	161.081	172.493
2	Bukan Angkatan Kerja					
	a. Sekolah	n/a	9.704	11.749	12.755	n/a
	b. Mengurus RT	n/a	13.408	11.128	12.349	n/a
	c. Lainnya	n/a	5.990	8.853	10.776	n/a
	d. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja	n/a	29.102	31.730	35.880	37.397
3	Rasio penduduk yang bekerja	-	98,11	98,58	98,67	97,06
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)n	-	84,93	83,80	81,78	81,82
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	1,89	1,42	1,33	2,94
6	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22,92	38,04	46,99	53,00	50,00
7	Persentase pekerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1,42	1,87	7,86	8,71	6,12
8	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	37,84	23,75	22,62	23,70	7,58
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0,00	47,50	93,50	90,00	90,00
10	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
11	Persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Tidak diuji	56,25	Tidak diuji	Tidak diuji	41,61
12	Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK atau diatas UMK	70	70	70	70	75

Sumber : BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.59, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan dari 1,89 persen tahun 2016 menjadi 1,33 persen tahun 2019. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak

memperoleh pekerjaan. Namun pandemic Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 mengakibatkan angka pengangguran bertambah menjadi 2,94 persen.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya kesetaraan gender. Upaya perbaikan pemberdayaan perempuan dikenal dengan nama pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), yaitu upaya untuk memperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan tersebut memerlukan dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Proses perbaikan ini dapat dilakukan dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi. Upaya perbaikan kondisi atau pencapaian kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan tersebut dilandasi berbagai kesepakatan baik di tingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional, diantaranya penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah ini. Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Peran perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV maupun di lembaga legislatif. Perkembangan jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah pekerja perempuan	75.090	75.767	78.342	79.056	79.056
2.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah:					
	a. Eselon II	2	5	2	2	2
	b. Eselon III	30	50	31	35	7
	c. Eselon IV	237	240	210	215	242
	d. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.717	3.706	3.424	3.214	3.029
3.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga legislatif	3	3	3	3	3
4.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	71.373	72.000	74.672	75.587	75.773
5.	Jumlah kasus KDRT	4	6	9	9	9
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum (%)	91	50	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.60 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 capaian partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada rata-rata adalah 3.418 sedangkan capaian partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Tapanuli Utara) pada tahun 2016-2020 sebanyak tiga orang. Partisipasi perempuan pada bidang politik dan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat. Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta menunjukkan jumlah yang semakin besar dari 71.373 orang tahun 2016 menjadi 75.773 orang pada tahun 2020. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri". Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain :

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki, bahwa laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Adanya diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi berupa pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak, istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2016 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2020 ada 9 kasus. Hal ini perlu terus didukung agar kedamaian dalam kehidupan keluarga dapat tercipta. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah bersama-sama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan melalui suatu kebijakan yang mampu mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan, gizi, pemerataan dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Pokok-pokok kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan/keamanan pangan dan gizi terhadap komoditas strategis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah ini, berbagai upaya telah ditempuh melalui berbagai kebijakan, diantaranya: 1) kebijakan peningkatan ketersediaan pangan yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani, pemantapan penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan peningkatan mutu teknologi terapan; 2) kebijakan dalam kewaspadaan dan keamanan pangan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), peningkatan keberdayaan masyarakat pangan, dan peningkatan keamanan mutu dan gizi pangan.

Tabel 2.61
Perkembangan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah penduduk (orang)	295.613	297.806	299.881	301.789	312.578
2.	Pangan karbohidrat (padi)					
	a. Produksi padi gabah kering panen (ton)	172.889	182.734,08	229.175,53	257.999,87	193.992,07
	b. Ketersedian beras (ton)	108.471	97.543,23	122.333,61	137.720,02	123.534,15
	c. Kebutuhan konsumsi beras per kapita (kg)	124,89	97,5	115,5	119,28	116,20
	d. Total kebutuhan beras konsumsi (ton)	36.919,11	29.036,09	34.636,26	35.997,39	36.321,56
	e. Swasembada beras (ton)	79.554	68.507,15	87.697,35	101.722,63	340,11
3.	Protein hewani					
	a. Daging					
	▪ Produksi daging (ton)	1.396,44	1.451,70	1.497,14	1.054,95	554,62

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	▪ Kebutuhan konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	6,8	8,62	7,12	7,15	4,00
	▪ Total kebutuhan daging konsumsi (ton)	2.020,35	2.567,09	2.121,21	2.100,01	1.251,00
	b. Susu					
	▪ Produksi susu (liter)	238.367,23	240.751	237.641	242.151,57	295.020
	▪ Kebutuhan konsumsi susu per kapita (liter/kapita)	0,82	0,84	0,86	0,98	10,00
	▪ Total kebutuhan susu konsumsi (liter)	238.367,23	250.157,04	257.898	295.753	3.125.780
	c. Telur					
	▪ Produksi telur (kg)	466.969	472.613,06	474.466,19	496.709,63	508.239
	▪ Kebutuhan konsumsi telur per kapita (kg/kapita)	6,98	8,62	10,5	10,7	7,00
	▪ Total kebutuhan telur konsumsi (kg)	2.063.378,74	2.308.000	3.148.751	3.229.142	2.189,31

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.61 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pangan karbohidrat yang bersumber dari beras di daerah ini selama tahun 2016-2020 telah mencapai swasembada. Pencapaian swasembada pangan beras di Kabupaten Tapanuli Utara tidak diikuti dengan pencapaian swasembada pangan protein hewani yang berasal dari daging, susu dan telur. Guna mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikembangkan distribusi dan peningkatan akses pangan di masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan pembinaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut pada ayat (2) disampaikan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan pada ayat (1) maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang

penggunanya dalam daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Dalam lampiran undang-undang tersebut pada pada huruf J mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada sembilan sub urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub urusan tersebut terdiri atas; (1) izin lokasi, (2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (3) sengketa tanah garapan, (4) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, (5) subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee, (6) tanah ulayat, (7) tanah kosong, (8) izin membuka tanah, dan (9) penggunaan tanah. Dari kesembilan sub urusan tersebut terdapat tiga sub urusan yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat, yaitu urusan tanah ulayat, tanah kosong dan izin membuka tanah. Kewenangan penerbitan izin membuka tanah hanya ada pada pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu kewenangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya ada pada pemerintah pusat dan daerah propinsi. Berdasarkan aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat penyebutan secara lebih konkrit mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tanah, yaitu (1) penyelesaian sengketa tanah garapan, (2) penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan dan (3) penyelesaian masalah tanah kosong. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada semua level pemerintahan, sedangkan kewenangan penyelesaian masalah tanah kosong hanya ada pada level pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan bidang pertanahan pada umumnya dan bidang sengketa tanah pada khususnya masih memerlukan aturan yang lebih konkrit, karena itu peraturan pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan pasal 21 UU 23 Tahun 2014 perlu segera direalisasikan. Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Dengan semakin berkembangnya perekonomian global maka pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah serta meningkatnya pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menyentuh masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup dengan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang sesuai untuk mendukung kehidupan manusia yang jika tidak diatasi pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya lingkungan, khususnya terkait dengan masalah persampahan dan kualitas air.

Dalam mencapai tujuan meningkatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan demi mewujudkan daerah yang nyaman dan ramah lingkungan, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera memperoleh penanganan seperti masih terjadinya pencemaran air maupun tanah, belum optimalnya pengelolaan persampahan, belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungannya, serta masih terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang berfungsi untuk interaksi sosial masyarakat. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan bidang Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan, dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar.

Namun demikian pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk SPM bidang Lingkungan Hidup tetap dilaksanakan oleh daerah mengingat indikator-indikator yang ada di dalamnya merupakan bagian kegiatan dari urusan bidang lingkungan hidup. Perkembangan indikator capaian pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Hasil pengukuran indeks kualitas air	83	82	80	80	80
5	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	70,10	70,11	70,12	70,13	70,14
6	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana PPLHD					
	d. Jumlah PPLHD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	e. Jumlah PPLHD yang dilatih	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	f. Sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani					
	a. Jumlah pengaduan	-	9	7	16	20
	b. Jumlah yang ditangani	-	9	7	16	20
9	Pengelolaan sampah					
	a. Jumlah sampah (m ³)	53.949	54.349	54.728	54.950	55.236
	b. Jumlah sampah yang ditangani (%)	11,232	13,104	15,912	15,980	22
	c. Jumlah petugas pengelola sampah	125	125	125	125	122
10	Prestasi/penghargaan yang diterima di bidang lingkungan hidup					
	a. Penghargaan yang diterima perorangan	-	-	13	Tidak Ada	Tidak Ada
	b. Penghargaan yang diterima oleh kelompok	-	-	13	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Persentase sampah yang berkurang melalui 3R	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah					
	a. Jumlah TPA sampah (unit)	2	2	2	2	2
	b. Luas TPA (Ha)	2,8	2,8	2,8	2,8	1,5
	c. Kapasitas/daya tampung TPA (ton)	-	-	-	-	74,460
	d. Persentase TPA yang sudah digunakan	50	60	70	80	80
13	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah (unit)	200	328	328	328	328
14	Jumlah truk pengangkut sampah (unit)	15	17	17	17	17

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
15	Cakupan pengawasan Amdal					
	a. Jumlah usaha/ kegiatan wajib Amdal	2	1	2	2	2
	b. Jumlah usaha/ kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	2	1	2	2	2
	c. Jumlah usaha/ kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	2	1	2	2	2
16	Luas lahan kritis (Ha)	38.952,43	38,933.43	4.439,99	38.425.43	127.620
17	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	-	12	14,25	14,33	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara telah menimbulkan permasalahan lingkungan antara lain sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam lainnya. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Utara terus mendapat perhatian karena jumlah sampah terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di daerah ini. Tabel 2.63 menunjukkan bahwa produksi sampah di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat setiap tahunnya dan tahun 2020 mencapai 670.064 m³. Peningkatan jumlah sampah ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan unit usaha. Pengelolaan sampah dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasana pengelolaan sampah, dimana pada tahun 2020 terdapat 328 unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah. Melihat pengelolaan sampah yang belum optimal, pengelolaan persampahan diselenggarakan melalui pembinaan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan.

2.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2020 sebanyak 319.110 jiwa.

Tabel 2.63
Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)/Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Parmonangan	16.366	16.493	17.019	14.952	15.046
2	Adiankoting	16.274	16.521	16.816	15.528	15.475
3	Sipoholon	25.585	26.129	27.090	24.529	24.644
4	Tarutung	43.034	43.735	45.102	42.882	43.198
5	Siatas Barita	14.783	14.745	15.222	14.430	14.629
6	Pahae Julu	14.527	14.604	15.223	13.685	13.865
7	Pahae Jae	12.618	12.997	13.480	12.406	12.276
8	Purbatua	8.942	9.195	9.450	8.487	8.392
9	Simangumban	9.063	9.244	9.766	8.647	8.668
10	Pangaribuan	31.548	32.271	33.177	30.594	30.355
11	Garoga	18.872	19.283	20.233	18.358	18.475
12	Sipahutar	28.871	29.588	30.388	28.611	28.664
13	Siborongborong	52.925	54.583	56.618	50.294	51.383
14	Pagaran	20.266	20.801	21.767	19.120	19.257
15	Muara	15.544	15.842	16.366	15.147	14.783
Kabupaten Tapanuli Utara		324.606	329.218	347.717	317.670	319.110

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Jumlah penduduk terbanyak tahun 2020 terdapat di Kecamatan Siborongborong yaitu sebanyak 51.383 jiwa (16,10 persen) dan terendah terdapat di Kecamatan Purbatua yaitu 8.392 jiwa atau 2,63 persen.

Tabel 2.64
Jumlah Kepala Keluarga, Rata-rata Anggota Keluarga dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata Anggota Keluarga	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5	6
1	Parmonangan	257,35	3.827	3,93	58,47
2	Adiankoting	502,90	4.031	3,84	30,77
3	Sipoholon	189,20	6.627	3,72	130,25
4	Tarutung	107,68	12.269	3,52	401,17
5	Siatas Barita	92,92	4.015	3,64	157,44
6	Pahae Julu	165,90	3.767	3,68	83,57
7	Pahae Jae	203,20	3.516	3,49	60,41
8	Purbatua	150,00	2.232	3,76	55,95
9	Simangumban	191,80	2.228	3,89	45,19

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata Anggota Keluarga	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5	6
10	Pangaribuan	459,25	7.902	3,84	66,10
11	Garoga	567,58	4.694	3,94	32,55
12	Sipahutar	408,22	7.315	3,92	70,22
13	Siborongborong	279,91	13.369	3,84	183,57
14	Pagaran	138,05	5.092	3,78	139,49
15	Muara	79,75	4.089	3,62	185,37
	Kab. Tapanuli Utara	3.793,71	84.968	3,76	84,12

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Pada tabel 2.64 dapat kita lihat bahwa tahun 2020 rata-rata jumlah anggota keluarga untuk masing-masing kepala keluarga adalah 4 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tarutung, yaitu 401,17 orang/Km². Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Dalam bidang penyelenggaraan urusan kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya dan berkomitmen meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dimana hasil indikator hasil capaian yang dilakukan pemerintah daerah didalam urusan kependudukan pada tahun 2016-2020, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	329.218	336.031	347.717	317.670	319.110
2.	Kepemilikan KTP Elektronik					
	a. Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa)	224.549	228.844	237.604	211.221	213.778
	b. Jumlah penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP (jiwa)	203.411	208.347	234.016	184.306	212.087
	c. Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP	90,59	91,04	98,49	87,26	99,21
3.	Kepemilikan Akta Lahir					

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	a. Jumlah penduduk wajib akta lahir (jiwa)	329.218	336.031	347.717	317.670	319.110
	b. Jumlah penduduk wajib akta lahir yang telah memiliki akta lahir (jiwa)	116.631	137.420	116.576	125.237	141.080
	c. Persentase penduduk yang mempunyai akte lahir	35,43	40,90	33,53	39,42	44,21
4.	Kepemilikan Akta Nikah					
	a. Jumlah pasangan nikah wajib akta nikah	57.456	60.739	128.643	122.255	74.584
	b. Jumlah pasangan nikah wajib akta nikah yang telah memiliki akta nikah	29.973	35.050	43.557	47.649	50.713
	c. Persentase pasangan nikah ber-akte nikah	52	58	33,86	38,98	67,99
5.	Kepemilikan Akta Kematian					
	a. Jumlah penduduk meninggal (jiwa)	2.258	2.959	18.652	14.924	19.944
	b. Jumlah penduduk meninggal yang memiliki akta kematian	2.258	2.959	3.935	4.970	17.124
6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	82,17	81,23
7.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.65 tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahun dimana angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah ini untuk memiliki KTP sudah semakin meningkat disamping adanya ketentuan single identity yang diterapkan pemerintah. Demikian juga halnya dengan kepemilikan akte kelahiran dan akte nikah yang meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan semakin baik.

2.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang semaksimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha dinilai berhasil sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja. Berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara

dilaksanakan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, dimana setiap pengelola kegiatan khususnya SKPD dituntut untuk peka terhadap aspirasi masyarakat, sehingga dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Desa yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Pemerintah pusat mendorong adanya otonomi desa dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pembangunan diharapkan dukungan dan peran berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat desa juga sangat dibutuhkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan

bertaqwa serta berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, sejahtera dan adil dalam hal gender serta sadar hukum dan lingkungan.

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Desa	241	241	241	241	241
2.	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	75	75	75	75	75
3.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan	241	241	241	241	241
4.	Jumlah LPM berprestasi	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	6	10	13	15	17
6.	Jumlah desa sangat tertinggal	24	24	20	9	8
7.	Jumlah desa tertinggal	177	177	165	138	116
8.	Jumlah desa berkembang	40	40	56	66	94
9.	Jumlah desa maju	-	-	-	-	-
9.	Jumlah desa swadaya	10	10	10	10	10
10.	Jumlah desa swakarya	231	231	231	231	231
11.	Jumlah desa yang tertib administrasi desa	200	200	200	200	200
12.	Persentase Raperdes yang disetujui	100	100	100	100	100
13.	Persentase BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ	100	100	100	100	100
14.	Persentase Kepala Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100
15.	Persentase Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100
16.	Persentase Perangkat Desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100
17.	Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi keuangan dan aset desa	80	80	80	80	80
18.	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	241	241	241	241	241
19.	Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	241	241	241	241	241
20.	Persentase desa yang menyusun Profil Desa	85	85	85	70	70
21.	Jumlah desa yang membentuk BUMDes	6	28	34	128	131
22.	Jumlah desa berprestasi	3	3	3	3	4
23.	Jumlah desa kelompok binaan PKK	241	241	241	241	241
24.	PKK Aktif	252	252	268	268	268
25.	Posyandu Aktif	377	377	408	415	415
26.	Persentase penyerapan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	100	100	100	100	100
27.	Persentase penyerapan Anggaran Dana Desa ((DD)	100	100	99,21	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.66 tersebut menunjukkan bahwa jumlah kelompok usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun 2016 hanya ada 6 kelompok dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 17 kelompok. Demikian juga dengan BUMDes, jumlah BUMDes yang dibentuk pada tahun 2016 hanya ada 6 BUMDes dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 131 BUMDes yang sudah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah mulai membangun komitmen bersama dan adanya motivasi untuk berswadaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

2.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu prioritas sasaran dan arah pembangunan dalam rangka mewujudkan agenda penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal yang dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk serta mengupayakan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian tingkat kelahiran (fertility) penduduk yang dilakukan dengan Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Upaya pengendalian jumlah penduduk terlihat dari rata-rata jumlah anak per keluarga yang berjumlah 4 orang pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.67
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	18,25	19,8	26	24	23
2	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	-	-	-	-	-
3	Persentase Kampung KB yang terbentuk	0,41	5,8	8	8	8
4	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	18,5	22,22	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang menyusun kegiatan berbasis gender	-	2,94	17	17	17
6	Jumlah pasangan usia subur (orang)	33.170	35.363	33.701	32.171	34.051
7	Persentase peserta KB aktif terhadap PUS	74,17	71,26	65,64	67,58	69,24

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
8	Persentase akseptor KB / pemakaian Metode Kotasepsi Jangka Panjang (MJKP) terhadap peserta KB aktif	44,02	45,12	50,25	64,38	55,60
9	Persentase akseptor KB pemakaian metode kontasepsi janka pendek terhadap peserta KB aktif	55,98	54,88	49,75	35,62	44,40
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	80,55	79,32	68,81	54,96	67,03
11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	18,36	20,19	20,63	20,24	21,22
12	Persentase KB Pria terhadap peserta KB aktif	8,65	9,17	0,52	0,53	0,40
13	Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) menggunakan KB	73	75	64,72	69,64	70,74
14	Persentase anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) menggunakan KB	75	78	61,21	63,49	66,17
15	Persentase anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) menggunakan KB	78	80	72,30	75,97	77,19
16	Persentase anggota keluarga UPPKS yang menggunakan KB	60	65	56,45	60,13	73,48
17	Cakupan petugas pembantu pembinaan KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontasepsi di faskes (%)	-	70	100	100	100
19	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	21	23	23	23
20	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah akseptor KB. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian jumlah penduduk tetap dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program KB. Namun demikian, secara umum angka ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana) yang diharapkan mampu mengubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Terkait dengan hal ini telah dibuat beberapa cara untuk mencegah atau menunda kehamilan melalui alat kontrasepsi. Tujuan dari Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya

masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi untuk membentuk keluarga kecil berkualitas. Tabel 2.68 tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase peserta KB aktif. Semakin tingginya jumlah peserta KB berarti bahwa sosialisasi KB kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB berhasil dilakukan. Hal ini perlu terus ditingkatkan guna mensukseskan program KB di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Salah satu faktor penting dalam memperlancar aktivitas kehidupan masyarakat adalah operasional sistem transportasi. Pengembangan sistem transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pengembangan wilayah. Transportasi mempunyai fungsi penghubung fungsional dan spasial antar kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien diarahkan untuk penyediaan alternatif pilihan pelayanan sesuai kepentingan pengguna jasa transportasi dan akomodasi kepentingan penyedia jasa untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu stakeholder untuk menyediakan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien terwujud dalam pelayanan transportasi antar moda yang mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan antar sarana dan fasilitas yang ada di perkotaan dan di perdesaan serta kesetaraan tingkat pelayanan sesuai dengan standar yang dibakukan. Jaringan transportasi di wilayah daerah ini terdiri dari transportasi darat, transportasi danau dan transportasi udara.

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penumpang					
	a. Bus dan Mini Bus	2.775.000	2.856.560	2.856.560	2.856.930	2.854.230
	b. Kapal Danau	54.265	55.139	55.139	55.750	56.050
	c. Pesawat Udara	153.125	282.240	282.240	282.850	141.425
2	Persentase uji kir angkutan umum					
	a. Mobil penumpang umum (%)	20	25	30	30	30
	b. Mobil bus (%)	-	-	-	-	10
	c. Mobil barang (%)	35	35	40	50	60
3	Jumlah kendaraan					
	a. Kendaraan roda empat penumpang umum	2.700	1.456	1.071	1.033	1.078
	b. Kendaraan roda empat bus	227	237	237	240	307
	c. Kendaraan roda tiga (becak bermotor)	265	265	254	100	115
4	Jumlah ijin trayek kendaraan bermotor					
	a. Ijin trayek perkotaan	225	226	226	226	54
	b. Ijin trayek perdesaan	133	127	127	127	16
	c. Jumlah ijin	238	353	353	353	70
5	Jumlah pelabuhan udara (bandara)	1	1	1	1	1
6	Jumlah dermaga danau	3	3	3	3	3
7	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.68 dapat dilihat bahwa persentase uji kir angkutan umum relatif sama setiap tahun. Hal ini perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jumlah terminal bis, pelabuhan danau dan bandara tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah terminal adalah tiga unit, yaitu 1 unit dikelola oleh Kementerian Perhubungan yang berada di Kecamatan Tarutung dan 2 unit dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berada di Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Siborongborong. Transportasi danau di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara yang terletak di Kawasan Danau Toba. Aksesibilitas transportasi danau didukung sarana dermaga danau sebanyak tiga unit. Transportasi udara di Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan keberadaan bandara Silangit di Kecamatan Siborongborong.

2.3.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global saat ini dan memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Melalui pengembangan e-government, pemerintah berharap dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki website resmi dengan alamat www.taputkab.go.id. Diharapkan ke depan website ini semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Tapanuli Utara. Hingga tahun 2020 berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi telah dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan (%)	-	75	75	75	75
2	Cakupan wilayah (kecamatan dan desa) yang mendapat layanan telekomunikasi (%)	-	65,23	74	80	84
3	Persentase rumah tangga dengan akses internet	-	65,23	74	80	84

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
4	Jumlah surat kabar nasional yang masuk ke daerah	5	5	5	5	5
5	Jumlah surat kabar lokal yang ada di daerah	58	60	65	65	65
6	Jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah	3	2	2	2	2
7	Website milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah. Hingga tahun 2020, cakupan wilayah (kecamatan dan desa) di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mendapatkan layanan telekomunikasi mencapai 84 persen.

2.3.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki prospek baik. Sektor koperasi dan UMKM dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara apabila usaha berkembang dengan baik. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah koperasi (unit)	461	464	476	482	486
	a. Koperasi Unit Desa (KUD)	30	30	30	30	30
	b. Koperasi Non KUD	431	434	448	452	456
2	Koperasi aktif (unit)	98	101	94	98	101
3	Koperasi aktif (%)	21,25	21,76	19,75	20,33	20,78
4	Jumlah anggota koperasi (orang)	42.824	48.533	50.966	51.165	51.321
5	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	461	464	478	482	486
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	2.760	3.966	4.832	4.965	28.896
7	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	-	21,84	2,75	482,01
8	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bantuan	368	75	150	89	20.197
	a. Permodalan	318	-	-	4	19.157
	b. Peralatan	-	-	-	-	1.020
	c. Bantuan lainnya (penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pemasaran)	50	75	150	85	40

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.70 menunjukkan bahwa jumlah anggota koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting. Selain itu semakin meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil yang mana pada Tahun 2016 sebanyak 2.760 usaha menjadi 28.896 usaha pada Tahun 2020. Usaha skala mikro umumnya merupakan usaha informal yang menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Peran koperasi dalam memperkuat kehidupan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha koperasi dapat dilihat dari permodalan koperasi tersebut.

Tabel 2.71
Perkembangan Permodalan Koperasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modal Sendiri (Rp.000)	62.308.401	69.798.000	69.859.750	70.013.118	70.713.249
2.	Modal Luar (Rp.000)	50.678.372	56.293.000	56.293.000	56.068.000	56.628.680
3.	Volume Usaha (Rp.000)	314.138.709	429.269.000	464.381.081	464.427.519	464.473.962
4.	Sisa Hasil Usaha (SHU) (Rp.000)	1.216.396	1.405.805	1.445.805	1.439.203	1.445.805
5.	Asset (Rp.000)	114.261.829	143.783.626	169.689.518	169.689.518	169.827.297

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.71 menunjukkan bahwa koperasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memang lebih banyak menggunakan modal sendiri walaupun masih ada juga yang menggunakan modal dari luar. Adapun total modal sendiri pada koperasi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 70.713.249.000,00 sedangkan total modal luar pada koperasi sebesar Rp. 56.628.680,00. Selain itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.445.805.000,00.

2.3.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Penanaman modal merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam mewujudkan pengembangan investasi di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuat sistem pelayanan investasi, yaitu penataan kelembagaan perangkat daerah yang mengacu kepada potensi daerah, melakukan peninjauan daftar prioritas dan daftar investasi negatif secara berkala, penguatan kelembagaan daerah didalam Sistem Pelayanan Investasi yang efisien, meningkatkan promosi investasi, melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu dan mengoptimalkan peran dan fungsi perusahaan daerah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan akan memberikan banyak dampak pengganda (multiplier effects) dan manfaat bagi

banyak pihak termasuk dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, diantaranya:

- 1) Peningkatan dan kerjasama investasi, melalui koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi, koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pengembangan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi, penyelenggaraan pameran investasi, pembuatan media promosi;
- 2) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi;

Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah yang meliputi kajian wisata kampung di daerah kawasan wisata dan Kajian peluang investasi dibidang agribisnis.

Tabel 2.72 menunjukkan bahwa jumlah investor PMDN (Perusahaan) mengalami kenaikan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2016 sebanyak 4 buah menjadi 20 buah pada tahun 2020. Dengan bertambahnya PMDN (Perusahaan) di Kabupaten Tapanuli Utara, membuka peluang kerja bagi para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tapanuli sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.72
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah investor PMDN (Perusahaan)	4	21	11	23	20
2	Nilai Investasi PMDN	1.003.689.166.447	1.006.689.166.447	1.009.689.166.447	1.979.214.300.560	5.529.375.166.447
3	Realisasi Investasi PMDN	130.818.000.000	141.248.479.803	161.246.719.803	241.050.355.765	370.753.324.216
4	Jumlah Investor PMA	3	1	1	3	2
5	Nilai Investasi PMA	147.882.118.460	157.882.118.460	4.489.882.118.460	167.882.118.460	115.000.000.000
6	Realisasi Investasi PMA	107.882.118.460	117.882.118.460	4.175.139.111.461	71.497.605.091	9.842.012.600
7	Jumlah Perijinan yang mempunyai retribusi yang diterbitkan					
	a. Ijin mendirikan bangunan	71	45	92	44	61
	b. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol	-	-	4	-	7
8	Nilai retribusi ijin yang dikeluarkan					
	a. Ijin mendirikan bangunan	1.182.846.600	1.123.373.203	1.112.713.450	967.222.700	1.511.846.762.
	b. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol	-	585.000	19.305.500	-	18.585.000
9	Persentase penerbitan ijin tepat waktu	100	100	100	100	100
10	Jumlah permohonan ijin dalam 1 tahun	2.297	850	1161	997	646
11	Persentase permohonan ijin yang diproses dalam 1 tahun	86,77	50,53	100	100	100
12	Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan	69,41	79,5	88,25	79,5	87,79

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

2.3.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, pemuda dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar pemuda dapat berfikir positif untuk berkreasi yang akan melahirkan karya-karya nyata dan membawa pengaruh dan perubahan yang besar dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Disamping itu pemuda juga diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global. Kebutuhan akan pentingnya olah raga, disamping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olah raga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi antar pemuda. Pembinaan olahragawan yang berbakat merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dari atlet agar bisa meningkatkan prestasinya di kancah nasional maupun internasional. Pada tabel berikut ini kita dapat melihat beberapa capaian indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2016-2020.

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah organisasi pemuda	22	22	22	35	35
2	Jumlah organisasi pemuda aktif	22	22	22	22	22
3	Jumlah pemuda pelopor	2	4	5	8	8
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	15	20	28	38	-
5	Persentase wirausaha muda	3	3	3	4	4
6	Jumlah organisasi olahraga tingkat kabupaten	24	26	26	27	27
7	Jumlah organisasi olahraga aktif	24	26	26	19	19
8	Jumlah klub olah raga tingkat kabupaten	22	22	22	22	22
9	Jumlah kegiatan olahraga	7	6	7	7	-
10	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	4	4	4	4	4
	a. Lapangan olah raga	4	4	4	4	4
	b. Gedung olah raga	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
11	Cakupan pembinaan olahraga aktif (%)	30	35	40	45	45
12	Cakupan pelatih bersertifikat (%)	7	9	12	16	16
13	Cakupan pembinaan atlet muda berprestasi (%)	25	35	45	50	50
14	Jumlah atlet berprestasi	187	207	125	227	227
15	Jumlah prestasi olahraga	23	114	177	125	125

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Sepanjang tahun 2020 indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga cenderung tetap. Hal ini disebabkan pandemic yang terjadi sehingga semua kegiatan pemuda dan olahraga dibatalkan.

2.3.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Urusan Statistik 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Ketersediaan data statistik daerah sangat penting untuk melihat gambaran umum daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah dan informasi tersebut dikelola dalam SIPD. Namun saat ini ketersediaan data yang terintegrasi belum dimiliki, sehingga ke depannya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan merencanakan membangun Data Desa Presisi. Data Desa Presisi adalah data yang bersumber dari desa yang dihasilkan melalui pendekatan spasial, partisipatif dan sensus (Sjaf, 2020). Dengan pengambilan data yang dimulai dari desa dengan menggabungkan metode konvensional dengan pendekatan digital berbasiskan partisipasi warga desa. Pendekatan baru ini diinisiasi dengan nama Drone Participatory Mapping (disingkat DPM). DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan drone (Unmanned Aerial Vehicle) dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa.

Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, database yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun artificial intelligence Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa. (Sjaf 2018 – Desa Presisi Tinggi). Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan IPB University, yang pada saat ini sedang melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pembentukan Tim Data Desa Presisi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya untuk menjaga stabilitas negara. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi. Secara etimologis sandi diartikan sebagai kode rahasia atau perubahan fonologis yang terjadi pada sebuah kata karena pengaruh *fonem* yang didekatnya. Sandi atau persandian lebih luas dikenal sebagai kriptologi yaitu ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Terdapat dua bagian kriptologi yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi merupakan cara untuk mengolah tulisan dalam berita sehingga menjadi tulisan yang berlainan dan *incoherent*. Kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem dan kuncinya. Kegiatan persandian pada hakekatnya dimulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman dan penyimpanan. Informasi tersebut terkait dengan isu-isu strategis dan merupakan informasi yang dikecualikan. Pengamanan terhadap informasi yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan enkripsi. Kemudian distribusi informasi yang menggunakan sarana komunikasi digital diamankan dengan melakukan enkripsi jaringan dan keutuhan informasi dengan *hash function*. Sementara itu distribusi dalam bentuk *hardcopy* pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan. Persandian sangat membantu komunikasi intern organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melindungi informasi dari potensi ancaman. Terdapat empat macam ancaman terhadap informasi yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi dan fabrikasi. Interupsi adalah halangan penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Intersepsi adalah

penyadapan terhadap pesan yang sedang disalurkan. Modifikasi adalah merubah pesan dari pengirim sehingga pesan yang diterima berbeda dengan aslinya. Fabrikasi adalah pembuatan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi. Ancaman tersebut merupakan dasar perlu dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis sehingga pelayanan publik akan menghasilkan data yang otentik, utuh, terbebas dari kebocoran dan kerusakan informasi. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebelumnya kedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan persandian di lingkungan pemerintah daerah diwadahi dalam lingkup Sekretariat Daerah. Sekarang sesuai ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan bidang persandian tergabung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik serta perumpunan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan oleh Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu maka layanan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nir-sangkal. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan persandian dilihat dari jumlah informasi yang diamankan menurut peraturan perundang-undangan. Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian. Jumlah aset atau fasilitas yang diamankan. Jumlah rata-rata kegiatan penting yang didukung pengamanannya dengan persandian dan jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan. Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik. Namun demikian peran dan fungsi persandian belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kualitas sumber daya manusia persandian, yang belum memahami apa yang menjadi pekerjaannya seutuhnya. Sehingga organisasi perangkat daerah

belum bisa memanfaatkan persandian secara utuh. Walaupun demikian pada hakekatnya Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga dapat membantu organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat Tapanuli Utara.

2.3.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kabupaten Tapanuli Utara dalam proses pembangunan juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Keberagaman budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pada pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus mampu sebagai pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di daerah ini. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di daerah ini. Kesenian yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya daerah, seperti pengaruh Batak Toba. Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain adalah pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat di tingkat kabupaten serta penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah di tingkat pelajar.

Tabel 2.75
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	5	3	-
2	Jumlah kelompok/sanggar seni aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	7	7	-	-
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.75 menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 4 kali namun untuk tahun 2020 tidak ada penyelenggaraan festival seni dan budaya akibat pandemic Covid-19.

2.3.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, yang menghendaki perubahan dan evaluasi serta penyempurnaan ke arah terwujudnya administrasi publik yang semakin transparan dan akuntabel, serta tuntutan untuk dapat dilayani berbagai macam jasa layanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar yang efektif. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian, sehingga peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi suatu hal yang penting. Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan sangat penting dilakukan bagi pengelolaan arsip di OPD setiap tahunnya.

Tabel 2.76
Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah buku perpustakaan (exp):	22.642	22.682	23.822	25.387	25.387
	a. TK	100	100	150	150	150
	b. SD/MI	198	198	223	225	225
	c. SMP/MTS	305	305	345	350	350
	d. SMA/SMK/MA	204	204	243	192	192
	e. Diploma/Sarjana	110	110	116	120	120
	f. Buku pengetahuan umum lainnya	21.725	21.765	22.745	24.350	24.350
2.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat kabupaten (unit)	1	1	1	1	1
3.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat desa/kel (unit)	-	-	3	3	3
4.	Jumlah sarana perpustakaan keliling (unit)	2	2	2	2	2

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun					
	a. Perpustakaan umum kabupaten	18.227	19.773	21.740	30.218	6.818
	b. Perpustakaan desa/kelurahan	-	-	-	-	-
6	Jumlah pengunjung perpustakaan yang meminjam buku					
	a. Perpustakaan umum kabupaten	10.222	11.245	12.333	12.389	150
	b. Perpustakaan desa/kelurahan	-	-	-	-	-
7.	Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikat	-	-	-	1	1
8.	Jumlah lembaga yang melakukan pengelolaan kearsipan					
	a. Perangkat Daerah	-	-	22	22	22
	b. Kecamatan	-	-	-	-	-
	c. Desa	-	-	-	-	-
	d. Lembaga lainnya	-	-	-	-	-
9.	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang memiliki sertifikat	-	-	-	-	3

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Peningkatan manajemen perpustakaan dan kearsipan dilakukan melalui pembinaan dan pemantauan kearsipan melalui manajemen perpustakaan dan kearsipan.

2.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Hilangnya beberapa arsip milik negara, polemik asset negara karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di sebuah organisasi, penumpukan arsip disembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan yang sangat kompleks. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Oleh karenanya negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional

Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini beriringan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 yang mengamanatkan bahwa : 1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Adapun jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara pengawasan kearsipan eksternal Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui LKD Provinsi terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota. Sedangkan, pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh LKD Kabupaten terhadap OPD Kabupaten; Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi; dan unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya. Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud

pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Layanan urusan pilihan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi beberapa bidang, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sesuai kondisi alamnya, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang kaya sumber daya air dan sumber lahan, dimana selain memiliki Danau Toba juga terdapat kolam, rawa dan beberapa sungai yang cukup panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Usaha perikanan pada umumnya adalah usaha rumah tangga dalam skala kecil yang sifat usahanya ada yang sudah dikelola secara budidaya dan melalui penangkapan di perairan umum. Rumah tangga budidaya ikan lokasi usahanya ada di kolam dan sawah sedangkan penangkapan ikan dilakukan di sungai, rawa dan danau. Dalam mendukung pengembangan perikanan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap dan kolam. Saat ini terdapat 2 unit Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Balai Benih Ikan Silangkitang di Kecamatan Sipoholon dan Balai Benih Ikan Purbatua di Kecamatan Purbatua.

Tabel 2.77
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi ikan tangkap (ton)	35,40	23,90	62,10	82,8	102,6
2	Produksi ikan budidaya (ton)	1.367,00	1.399,10	1.805,15	2.053,80	2.886,15
3	Persentase ketersediaan ikan sesuai kebutuhan	22,90	22,57	20,76	20,23	23,49
4	Tingkat konsumsi ikan per kapita (Kg/kapita)	20,90	21,20	30	35	40,70
5	Total kebutuhan ikan konsumsi (Ton)	6.124,50	6.305,20	8.996,43	10.562,62	12.721,92

Sumber : Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.77 menunjukkan bahwa produksi ikan budidaya di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat sejak tahun 2016 dengan budidaya terbesar pada jenis ikan nila. Upaya ini perlu terus ditingkatkan guna pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan yang belum bisa mencapai swasembada, dimana tingkat produksi ikan lokal di daerah belum dapat mencukupi kebutuhan protein yang berasal dari ikan yang hanya mencapai 23,49 persen.

2.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan daya tarik dan nilai objek wisata dan tersebar di beberapa kecamatan. Objek wisata tersebut terdiri dari objek wisata rohani atau agama, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya, obyek wisata hutan atau kebun. Potensi wisata di daerah ini terdiri dari wisata atau rekreasi sebanyak 25 buah, wisata sejarah atau budaya sebanyak 21 buah, wisata rohani atau agama sebanyak 8 buah dan wisata hutan atau kebun sebanyak 5 buah.

Dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai program kepariwisataan untuk mendukung daya tarik wisata ke daerah ini, antara lain Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan dan Pengelolaan Keragaman Seni Budaya. Berbagai upaya pengembangan kepariwisataan tersebut telah memberikan kontribusi kepada perkembangan perekonomian daerah ini, yaitu kunjungan wisatawan dan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata.

Tabel 2.78
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Wisatawan	129.813	147.635	153.100	172.010	141.350
	a. Wisatawan mancanegara	1.703	1.870	3.100	3.810	0
	b. Wisatawan Domestik	128.110	145.765	150.000	168.200	141.350
2	Jumlah Daerah Tujuan Wisata	7	7	8	8	8
3	Jumlah Objek Tujuan Wisata	34	35	35	35	35
4	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti diluar daerah	2	2	1	2	0
5	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	0	0	100	400	400
6	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
7	Persentase realisasi kegiatan sesuai kalender pariwisata	100	100	100	100	100
8	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9	Persentase Kontribusi PAD sektor pariwisata	0,11	0,13	0,11	0,16	0,17

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.78 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan 2020 mengalami penurunan diakibatkan pandemic Covid-19. Namun, Kabupaten Tapanuli Utara tetap melakukan beberapa kegiatan untuk dapat meningkatkan jumlah pariwisata dengan menambah objek tujuan wisata yang juga ditunjang dengan perbaikan sarana dan prasarana. Dengan bertambahnya jumlah wisatawan nantinya ke Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pelaku-pelaku usaha dibidang pariwisata dan dapat menonjolkan hasil karya daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor Pertanian memegang peranan penting dan merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sektor pertanian memberikan fasilitas dan dorongan yang lebih terarah bagi perkembangan pembangunan kerakyatan. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Unggulan tanaman pangan adalah padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar serta kacang tanah. Sedangkan unggulan tanaman hortikultura adalah cabai merah, bawang merah, alpukat, jeruk dan nenas. Unggulan tanaman perkebunan adalah kopi dan kakao. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Utara bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Potensi lahan yang cukup luas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok untuk pengembangan pertanian komoditi pangan dan palawija dan pengembangan komoditi perkebunan.

a. Tanaman Pangan

Pengembangan sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Tapanuli Utara cukup potensial karena didukung oleh potensi lahan yang cukup luas, yang meliputi : potensi lahan sawah seluas 16.879 Ha dan lahan kering untuk tanaman pangan dan perkebunan seluas 126.095 Ha.

Tabel 2.79
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Padi Sawah					
	Produksi (Ton)	145.342,64	148.816,55	158.144,96	154.756,97	118.205,75
	Luas panen (Ha)	20.778,00	21.106,00	22.960,30	22.966,80	23.827,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	45,34	46,92	59,06	59,08	49,61
2	Padi Ladang (Gogo)					
	Produksi (Ton)	19.575,93	28.926,46	71.017,16	103.233,90	75.787,23

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Luas panen (Ha)	4.330,00	6.272,00	15.385,00	22.345,00	25.552
	Produktivitas (Kw/Ha)	45,21	46,12	46,16	46,20	29,66
3	Jagung					
	Produksi (Ton)	37.250,33	47.641,55	64.941,22	92.161,41	126.372,10
	Luas panen (Ha)	7.035,00	8.930,00	12.159,00	17.249,00	23.993
	Produktivitas (Kw/Ha)	52,95	53,35	53,41	53,43	52,67
4	Kacang Tanah					
	Produksi (Ton)	2.654,40	2.550,83	2.583,17	2.600,98	2.453,02
	Luas panen (Ha)	630,20	650,17	667,70	894,60	1.598,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	19,75	19,82	19,84	19,87	15,35
5	Ubi Kayu					
	Produksi (Ton)	23.659,24	21.131,49	21.168,29	21.377,73	15.811,30
	Luas panen (Ha)	1.269,00	1.123,00	477	435,50	437
	Produktivitas (Kw/Ha)	186,44	188,17	188,33	188,33	361,81
6	Ubi Jalar					
	Produksi (Ton)	14.197,92	14.544,11	14.599,76	14.465,20	6.187,43
	Luas panen	340,23	367,12	369,40	860,00	367
	Produktivitas (Kw/Ha)	161,34	168,14	168,20	168,20	168,59

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Pada tahun 2020, hampir semua komoditi mengalami penurunan produksi seperti, padi sawah, padi ladang (gogo), kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

b. Tanaman Hortikultura

Sub sektor hortikultura merupakan komoditas yang cukup potensial dikembangkan secara agribisnis karena punya nilai ekonomis dan nilai tambah cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain fungsi ekonomi tersebut tanaman hortikultura mempunyai nilai kalori cukup tinggi, merupakan sumber vitamin, mineral, serat alami dan anti oksidan, sehingga selalu diperlukan oleh tubuh sebagai sumber pangan maupun nutrisi serta berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Melihat manfaat dan fungsinya dapat dikatakan hortikultura dapat diandalkan untuk memajukan perekonomian daerah. Komoditi hortikultura mencakup tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, tanaman hias (florikultura) dan

tanaman bahan obat (biofarmaka). Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada pola pangan harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.80
Rata-rata Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cabe Merah					
	Produksi (Ton)	6.684,32	8.871,72	9.298,80	8.800,65	6.222,40
	Luas panen (Ha)	1.202,00	1.604,00	1.680,00	1.219,00	1.364,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	55,61	55,31	55,35	55,35	45,62
2	Bawang Merah					
	Produksi (Ton)	541,53	609,51	632,15	930,69	476,01
	Luas panen (Ha)	74,00	82,00	85,00	94,00	52,00
	Produktivitas (Kw/Ha)	73,18	74,33	74,37	99,01	91,54

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Kontribusi sub sektor tanaman hortikultura ini perlu terus ditingkatkan, mengingat tanaman ini merupakan tanaman sela diantara musim tanam padi berikut. Beberapa wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara bahkan menjadikan tanaman ini menjadi komoditi utama pertanian dari wilayah bersangkutan.

Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang telah mampu berkontribusi bagi pembangunan. Komoditas ini juga sangat potensial dan prospektif untuk diusahakan karena metode pembudidayaan cenderung mudah dan sederhana. Kegiatan usaha tani buah-buahan juga berperan besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan komoditas tersebut memiliki nilai komersial yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lainnya.

Tabel 2.81
Perkembangan Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Alpukat					
	Produksi (Ton)	816,14	845,76	862,53	879,65	11.957,10
	Luas panen (Ha)	112,00	116,00	118,30	120,50	188,90
	Produktivitas (Kw/Ha)	72,87	72,91	72,91	73,00	632,99
2	Mangga					
	Produksi (Ton)	1.194,02	1.220,80	1.237,31	1.252,84	1.775,70
	Luas panen (Ha)	156,00	159,00	156,65	111,00	115,10
	Produktivitas (Kw/Ha)	76,54	76,78	76,78	76,86	154,27
3	Jeruk					
	Produksi (Ton)	3.132,22	3.260,54	3.304,21	3.361,9	21.906,50
	Luas panen (Ha)	216,00	224,00	227,00	231,75	338,43
	Produktivitas (Kw/Ha)	145,01	145,56	145,56	146,00	647,31
4	Durian					
	Produksi (Ton)	5.819,43	5.884,09	5.903,43	5.935,61	9.176,30
	Luas panen (Ha)	603,30	608,30	610,40	794,20	763,90
	Produktivitas (Kw/Ha)	96,46	96,73	96,73	96,75	120,12
5	Nenas					
	Produksi (Ton)	34.856,81	34.917,95	34.974,38	25.976,75	155.139,20
	Luas panen (Ha)	1.947,09	1.949,09	1.932,04	842,82	978,41
	Produktivitas (Kw/Ha)	179,02	179,15	179,15	178,00	1.585,62

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Nenas menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tapanuli Utara yang produksinya pada tahun 2020 mencapai 155.139,20 ton dengan area pertanaman terluas di Kecamatan Sipahutar. Peningkatan jumlah produksi nenas ini diakibatkan oleh bertambahnya areal panen dan penggunaan teknologi pertanian yang efektif.

c. Tanaman Perkebunan

Ditinjau dari segi iklim dan ketersediaan lahan Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan. Pada umumnya perkebunan di daerah ini merupakan usaha perkebunan rakyat dan belum terdapat usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Walaupun demikian di masa mendatang diharapkan perkebunan rakyat ini semakin berkembang. Jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanaman kopi arabika. Hal ini terlihat dari besarnya luas tanaman kopi arabika dengan luas tanam terbesar ada di Kecamatan Siborongborong. Kemudian diikuti oleh tanaman kemenyan dengan luas tanam terbesar terdapat di Kecamatan Pangaribuan.

Tabel 2.82
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Karet					
	Produksi (Ton)	5.437,61	5.478,36	5.497,75	5.561,77	5.561,73
	Luas panen (Ha)	8.150,75	8.383,11	9.099,63	8.533,60	8.542,56
	Produktivitas (Kg/Ha)	667,13	653,50	655,00	651,75	651,06
2	Kemenyan					
	Produksi (Ton)	3.661,15	3.833,71	3.849,54	3.842,67	3.846,56
	Luas panen (Ha)	13.947,25	13.984,00	16.077,70	14.048,45	14.059,70
	Produktivitas (Kg/Ha)	262,50	274,15	275,14	273,53	273,59
3	Kopi Arabika					
	Produksi (Ton)	10.932,09	11.823,49	11.833,43	14.336,71	14.663,94
	Luas panen	10.131,50	12.052,36	12.062,00	13.296,40	13.225,40
	Produktivitas (Kg/Ha)	1.079,02	981,01	981,05	1.078,24	1.100,45
4	Kopi Robusta					
	Produksi (Ton)	546,93	567,82	568,99	567,80	567,50
	Luas panen (Ha)	1.056,49	1.100,99	1.316,22	1.088,47	1.003,47
	Produktivitas (Kg/Ha)	517,69	515,74	515,81	521,65	565,54
5	Kelapa					
	Produksi (Ton)	253,17	264,16	266,25	269,72	269,72
	Luas panen (Ha)	225,85	242,1	344,75	260,68	260,68
	Produktivitas (Kg/Ha)	1.120,97	1.091,12	1.091,17	1.034,68	1.034,68
6	Kakao					
	Produksi (Ton)	1.404,20	1.772,64	1.774,95	1.776,68	1.778,89
	Luas panen (Ha)	1.955,00	2.628,28	3.215,57	2.671,25	2.704,50
	Produktivitas (Kg/Ha)	718,26	674,45	674,5	665,11	657,75
7	Kulit Manis					
	Produksi (Ton)	1.126,15	1.126,15	1.126,15	1.120,91	1.121,79
	Luas panen	197,20	197,20	257,30	192,79	194,20
	Produktivitas (Kg/Ha)	5.710,70	5.710,70	5.710,72	5.813,85	5.776,00
8	Kemiri					
	Produksi (Ton)	216,65	221,96	223,46	223,47	223,27
	Luas panen (Ha)	276,75	296,00	439,25	298,00	296,25
	Produktivitas (Kg/Ha)	782,84	749,86	749,88	749,90	753,65
9	Aren					

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Produksi (Ton)	174,28	175,78	177,18	178,44	178,81
	Luas panen	270,75	294,9	482,60	296,90	351,00
	Produktivitas (Kg/Ha)	643,69	596,07	596,15	601,01	509,72
10	Tembakau					
	Produksi (Ton)	433,13	468,00	472,99	422,33	495,63
	Luas panen (Ha)	195,00	390,00	700,00	350,00	410,75
	Produktivitas (Kg/Ha)	1.125,00	1.200,00	1.202,00	1.206,65	1.206,65

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

d. Peternakan

Dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini terdapat potensi lahan padang penggembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Melalui berbagai program bidang peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara telah didapat capaian hasil kegiatan pembangunan pada bidang peternakan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Perkembangan Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sapi					
	Populasi (ekor)	469	471	473	494	535
	Produksi (Kg/Tahun)	2.110,04	2.120,59	2.131,20	2.223,99	2.407,50
2	Kerbau					
	Populasi (ekor)	9.527	9.622	9.718	9.678	9767
	Produksi (Kg/Tahun)	114.324,81	115.468,06	116.622,74	116.139,84	117.204,83
3	Kambing					
	Populasi (ekor)	1.959	1.969	1.978	1.975	2.298
	Produksi (Kg/Tahun)	930,67	935,33	940	949,89	1.020,34
4	Babi					
	Populasi (ekor)	61.679	64.454	67.354	43.698	2.955
	Produksi (Kg/Tahun)	1.184.230,05	1.237.520,04	1.293.208,82	839.001,60	56.735,68
5	Ayam					
	Populasi (ekor)	427.822	431.031	434.263	432.000	445.729

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Produksi (Kg/Tahun)	89.842,62	90.516,44	91.195,31	90.720,00	93.603,09
6	Itik					
	Populasi (ekor)	32.700	32.944	33.191	38.380	45.472
	Produksi (Kg/Tahun)	4.970,34	5.007,61	5.045,17	5.833,76	6.911,66
7	Ayam					
	Populasi ayam kampung (ekor)	641.733	646.546	649.193,13	652.321,04	655.549,12
	Produksi telur ayam kampung (Kg/Tahun)	5.133.864	5.172.368	5.193.545	5.254.754	5.307.825
8	Bebek					
	Populasi bebek (ekor)	294.296,25	296.503,5	296.628,13	312.629,37	314.439,27
	Produksi telur bebek (Kg/Tahun)	2.354.370	2.372.028	2.373.025	2.375.329	2.377.437
9	Produksi susu	235.560	240.750,9	237.641,96	242.151,57	294.987

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Secara umum populasi ternak bertambah setiap tahun dan produksi ternak terbanyak adalah kerbau, babi dan ayam yang merupakan konsumsi daging utama masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan untuk protein hewani, populasi dan produksi ternak tersebut harus ditambah agar tercapai swasembada pangan.

e. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau *social interplay* dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia petani dilakukan pemberdayaan petani melalui penyuluhan. Keberadaan balai penyuluhan dan tenaga penyuluh pertanian sangat memegang peranan penting didalam pemberdayaan dan keberhasilan pembangunan sektor pertanian di

daerah ini. Keberadaan kelembagaan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Kelembagaan Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (Orang)	127	180	177	170	165
2	Jumlah Kelompok Tani (Poktan) (Kelompok)	2.126	2.200	2.256	2.298	2.358
3	Jumlah Poktan yang sudah berbadan hukum	-	-	50	517	616
4	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Kel)	203	145	152	152	149
5	Jumlah Gapoktan yang sudah berbadan hukum	-	-	-	-	-
6	Jumlah WKPP (Unit)	127	180	177	170	170

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.84, jumlah PPL tahun 2020 adalah sebanyak 165 orang dan jumlah ini belum memenuhi target yaitu 1 orang PPL per desa hingga tahun 2020. Kondisi PPL ini diharapkan mampu membantu para petani di lapangan dalam menghadapi berbagai permasalahan di bidang pertanian.

2.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pengembangan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur perekonomian antara sektor pertanian dan sektor industri, perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jenis usaha pada umumnya merupakan industri skala kecil/kerajinan menengah.

Tabel 2.85
Perkembangan Industri Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2016-2020

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah industri Pangan					
	a. Unit usaha	656	666	666	668	668
	b. Tenaga Kerja	1.839	1.849	1.849	1.851	1.851
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-
2	Jumlah industri Sandang dan kulit					
	a. Unit usaha	2.251	2.255	2.258	2.258	2.258
	b. Tenaga Kerja	4.234	4.238	4.241	4.241	4.241
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
3	Jumlah industri Kimia & Bahan Bangunan					
	a. Unit usaha	169	186	186	186	186
	b. Tenaga Kerja	571	588	588	588	588
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-
4	Jumlah industri Kerajinan Umum					
	a. Unit usaha	311	350	350	350	350
	b. Tenaga Kerja	659	698	698	698	698
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-
5	Jumlah industri logam					
	a. Unit usaha	347	253	254	254	254
	b. Tenaga Kerja	700	407	410	410	410
	c. Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.85 dapat dilihat bahwa jumlah industri di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 sebanyak 3.734 unit dan menurun pada tahun 2020 menjadi 3.716 unit. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengusaha menutup usahanya. Dengan menurunnya jumlah industri maka tenaga kerja juga semakin menurun dimana pada tahun 2016 sebanyak 8.003 orang menjadi 7.788 orang pada tahun 2020.

2.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat. Adapun perkembangan urusan transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.86.

Tabel 2.86
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas area transmigrasi (Ha)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Jumlah peserta transmigrasi (KK)	100	100	100	100	50
3	Persentase transmigran yang mendapat pelatihan	100	100	100	100	50
4	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya	10	10	14	22	25

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Areal transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara berada di Kecamatan Garoga dengan luas 1.000 Hektar dan jumlah peserta transmigrasi sebanyak 100 kepala keluarga yang berasal dari Pulau Jawa dan transmigran lokal.

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah juga melaksanakan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Program penataan peraturan perundangan di daerah ini dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum telah diterbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tabel 2.87
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Utara	10	5	11	7	6
2	Jumlah Peraturan Bupati Tapanuli Utara	62	51	48	73	62
3	Jumlah Keputusan Bupati	583	544	635	1.289	637
4	Jumlah Nota Kesepakatan	12	14	10	7	13
5	Jumlah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)	4	3	3	3	-
6	Jumlah Perjanjian Kerjasama	11	10	-	3	4
7	Nilai LPPD	2,73	2,76	2,93	32,80	-
8	Nilai SAKIP	36,84	50,08	50,51	54,26	-
9	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	6,67	10,00	-	8,89	8,89
10	Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan publik bernilai baik	6,67	10,00	13,33	8,89	6,67
11	Persentase SOP yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	20,00	25,00	-	66,67	71,11
12	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	10,00	15,00	-	66,67	71,11
13	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun	15,00	15,00	-	71,43	71,43
14	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti					
	a. Jumlah permohonan yang masuk	138	102	138	181	159
	b. Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	110	76	110	153	49
	c. Persentase permohonan yang telah ditindaklanjuti	79,71	74,51	79,71	84,53	30,82
15	Persentase bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran	100	100	100	100	100
16	Jumlah SKPD yang menyusun RUP	35	52	47	45	45
17	Persentase rata-rata capaian laba BUMD/Perusda					
	a. Persentase rata-rata capaian laba PDAM Mual Natio	115	103	-9,74	-1,55	0,15
	b. Persentase rata-rata capaian laba Perusda Pertanian	28,82	18,37	100	28,19	13,97
	c. Persentase rata-rata capaian laba Perusda Industri dan Pertambangan	20,00	22,00	-	-	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.87 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penataan peraturan perundangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini merupakan pembaruan Perda dan Perbup yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah. Penegakan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik, dimana hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

Tabel 2.88
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan (buah)	8	13	9	8	7
2	Jumlah Rapat Dengar Pendapat (kali)	21	23	24	24	20
3	Jumlah Rapat Kerja (kali)	12	14	14	16	18

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara, 2021

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah dan dalam era globalisasi maka dituntut sebuah perencanaan yang akuntabel, efisien, efektif dan transparan. Mendasar pada permasalahan dan kondisi yang ada maka untuk mencapai target yang ditetapkan disusun strategi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengembangan IPTEK. Adapun langkah kebijakan yang ditempuh dengan meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan meningkatkan kinerja fungsi penelitian dan pengembangan IPTEK Daerah. Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis perlu semakin ditingkatkan. Penyusunan RPJMD harus mengacu pada penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketersediaan dokumen perencanaan di daerah dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	V		V		V		V		V		Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017
2.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	V		V		V		V		V		Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006
3.	Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	V		V		V		V		V		Perda Kab. Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020
4.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan Keputusan Kepala SKPD	V		V		V		V		V		
5.	Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	V		V		V		V		V		
6.	Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	V		V		V		V		V		
7.	Dokumen Renja SKPD yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan Keputusan Kepala SKPD	V		V		V		V		V		

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2021

b. Keuangan

Kabupaten Tapanuli Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian indikator kinerja urusan keuangan dapat dilihat dalam tabel 2.90.

Tabel 2.90
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	4,45	5,04	4,69	3,79	5,82
3	Persentase belanja pendidikan	34,59	32,95	30,70	31,42	28,87
4	Persentase belanja kesehatan	12,43	12,97	14,47	15,31	14,04
5	Persentase belanja tidak langsung terhadap total APBD	60,64	63,17	58,41	59,42	52,13
6	Persentase belanja langsung terhadap total APBD	39,36	36,83	41,59	40,58	47,87
7	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja langsung	8,93	12,48	9,85	3,22	3,36
8	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung	42,56	52,36	56,05	61,12	43,79
9	Persentase belanja modal terhadap total belanja langsung	48,51	35,16	34,10	35,65	52,86
10	Jumlah Wajib Pajak Daerah					
	a. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	03,526	05,204	12.490	13.653	16.870
	b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	608	658	461	599	693
	c. Pajak hotel	24	25	26	26	26
	d. Pajak restoran	98	100	705	711	711
	e. Pajak hiburan	13	16	25	25	25
	f. Pajak reklame	44	52	116	138	170
	g. Pajak mineral bukan logam dan batuan	658	438	613	635	1731
	h. Pajak parkir	-	1	2	2	2
	i. Pajak penerangan jalan	1	1	-	-	-
11	Jumlah Wajib Retribusi Sewa Tanah	737	726	751	756	814
12	Persentase Wajib Pajak Daerah yang melakukan pembayaran tepat waktu	86,36	86,54	70,78	83,84	146,56
13	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target	101,92	102,77	91,75	92,11	139,12
14	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target	1,92	2,77	-49,31	6,73	20,13
15	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target	112,43	90,46	70,78	83,84	164,37
16	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap target	12,43	-9,54	13,62	14,16	-12,73
17	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap target	98,70	587,01	63,44	74,11	110,33
18	Persentase penignkatan penerimaan retribusi daerah terhadap target	-1,30	487,01	8,19	8,55	10,59

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam fungsi pengelolaan keuangan adalah adanya dinamika kebijakan pemerintah dan dinamika implementasi penganggaran dari OPD, kurangnya pemahaman OPD terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator, belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah serta kurang optimalnya pendapatan daerah. Target yang akan dicapai pada akhir RPJMD adalah peningkatan pengelolaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mempertahankan kondisi posisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) melalui kebijakan peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan regulasi, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD, peningkatan investasi daerah serta meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaporan keuangan dan aset daerah.

c. Kepegawaian

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer)

Tabel 2.91
Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah ASN	5581	5632	5374	5321	5090
	a. Laki – Laki	2146	2069	1949	1896	1780
	b. Perempuan	3435	3563	3425	3425	3310
2.	ASN berdasarkan Jabatan :					
	A. Eselon II	33	33	33	31	33
	B. Eselon III	164	164	164	159	161
	C. Eselon IV	524	524	524	416	469
3.	Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah	30	32	32	31	33

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	156	164	153	151	161
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.703	3.815	3.674	3.684	3.466

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sampai saat ini antara lain belum meratanya distribusi jumlah pegawai antar OPD. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan PNS disebabkan kuota formasi CPNS yang terbatas, belum optimalnya kapasitas pegawai, belum optimalnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum optimalnya sistem penghargaan atas kinerja pegawai termasuk untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai belum berdasarkan pada beban kerja. Target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD dalam domain fungsi penunjang kepegawaian dan diklat adalah meningkatkan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan dan layanan aparatur yang optimal. Berdasarkan pada permasalahan dan kondisi yang ada maka untuk mencapai target yang ditetapkan disusun strategi dengan peningkatan pendayagunaan, pengembangan dan pelayanan aparatur. Sedangkan kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pengelolaan kepegawaian, meningkatkan kualitas, kuantitas dan jenis pendidikan serta pelatihan bagi aparatur. Kebijakan yang mendorong pengembangan aparatur ini diindikasikan dengan adanya formasi pegawai sebagai pedoman manajemen kepegawaian, keterisian jabatan ASN sesuai kompetensi dan diklat sesuai kebutuhan. Sedangkan kebijakan yang mengarah pada pendayagunaan aparatur diindikasikan dengan ratio distribusi pegawai yang berimbang dan kenaikan pangkat tepat waktu. Untuk kebijakan pembinaan dan pelayanan aparatur diindikasikan dengan penurunan pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin, layanan kepegawaian tepat waktu serta layanan kepegawaian yang berbasis sistem informasi.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang tugasnya masing-masing maupun kepemimpinannya.

Tabel 2.92
Data Pendidikan dan Pelatihan ASN Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah ASN	5.581	5.632	5374	5321	5090
	a. Laki-Laki	2.146	2.069	1949	1896	1780
	b. Perempuan	3.435	3.563	3425	3425	3310
	ASN berdasarkan Jabatan					
2	A. ESELON II					
	a. ASN yang telah mengikuti Diklatpim II	3	3	4	2	2
	b. ASN yang belum mengikuti Diklatpim II	30	30	29	29	31
	B. ESELON III					
	a. ASN yang telah mengikuti Diklatpim III	34	34	34	19	15
	b. ASN yang belum mengikuti Diklatpim III	130	130	130	140	146
	C. ESELON IV					
	a. ASN yang telah mengikuti Diklatpim IV	97	97	97	35	46
	b. ASN yang belum mengikuti Diklatpim IV	427	427	427	381	423
	D. ASN yang mengikuti Diklat					
	a. ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	250	250	480	550	600
	b. ASN yang mengikuti Diklat Teknis	190	190	290	350	364
3	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jam pelatihan)	12	12	14	20	20
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,8	12,5	13	18	20

Sumber : BKD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2021

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan review. Permasalahan yang dihadapi pada konteks fungsi penunjang pengawasan ini adalah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan belum dapat diselesaikan seluruhnya oleh obyek pemeriksaan dan masih adanya kesenjangan jumlah aparat pengawasan/auditor dibandingkan dengan beban kerja obyek pemeriksaan. Target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD adalah meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengawasan desa. Capaian pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.93
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020

LHP	Tahun																								
	2016					2017					2018					2019					2020				
	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B	Jlh Temu-an	Jlh Reko-mendasi	S	D	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Inspektorat Kab. Tapanuli Utara																									
ADD/Dana Desa	51	60	60	0	0	122	120	120	0	0	1.219	1.340	1.316	24	0	1.108	1.212	1.202	10	0	756	758	243	9	0
Fisik/Belanja Modal	143	127	127	0	0	85	63	56	1	6	63	86	79	0	7	45	51	17	0	34	87	89	2	8	19
Kinerja OPD	84	82	82	0	0	90	90	79	11	0	177	201	195	1	5	102	99	91	0	8	21	23	6	1	0
Dana BOS	85	52	50	0	2	92	105	101	2	2	89	106	105	1	0	340	360	359	1	0	45	47	45	0	0
Pengaduan Masyarakat	146	101	101	0	0	192	192	190	2	0	159	105	96	0	9	24	18	17	0	1	135	137	23	5	17
Kinerja Kecamatan	88	88	88	0	0	42	36	36	0	0	82	90	87	0	3	36	40	40	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Kesehatan	43	45	45	0	0	113	123	114	0	9	54	65	65	0	0	-	-	-	-	-	57	59	0	0	0
Lembaga Pendidikan	66	74	74	0	0	113	137	137	0	0	54	57	56	0	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Kinerja UPT	174	183	183	0	0	189	197	190	0	7	173	160	154	2	4	54	57	56	0	1	0	0	0	0	0
Jumlah I	880	812	810	0	2	1.038	1.063	1.023	16	24	2.070	2.210	2.153	28	29	1.709	1.837	1.782	11	44	1.110	1.124	306	22	42
Inspektorat Provinsi																									
Reguler	15	40	36	4	0	16	46	45	1	0	18	90	85	5	0	13	63	54	9	0	13	63	54	9	0
Jumlah II	15	40	36	4	0	16	46	45	1	0	18	90	85	5	0	13	63	54	9	0	13	63	54	9	0
BPK RI Perwakilan Prov. Sumatera Utara																									
LKPD	15	40	34	6	0	26	87	83	4	0	18	90	84	6	0	8	15	0	15	0	297	798	741	52	0
Jumlah III	15	40	34	6	0	26	87	83	4	0	18	90	84	6	0	8	15	0	15	0	297	798	741	52	0
Jumlah I + II + III	910	892	880	14	2	1.080	1.196	1.151	21	24	2.106	2.390	2.322	39	29	1.730	1.915	1.836	35	44	1.420	1.985	1.101	83	42

Sumber : Inspektorat Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dan wajib terpelihara persatuan dan kesatuan masyarakat dan wilayahnya untuk tetap bersatu dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari makna fundamental pentingnya persatuan dan kesatuan tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dimana perkembangan dukungan pelayanan dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Demokrasi Indonesia di Kab. Tapanuli Utara	67,37	68,08	69,09	64,03	70,13
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada					
	a. Pemilu	-	-	70,74	74,50	-
	b. Pilkada	-	-	74,50	-	-
3	Persentase Penurunan Sengketa Pemilu/Pilkada	-	-	12	-	-
4	Jumlah Perselisihan Berlatar Belakang SARA	-	-	-	-	-
5	Jumlah Perselisihan Berlatar Belakang Konflik Sosial	-	-	20	30	3
6	Masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	900	900	1.600	1800	1000
7	Masyarakat yang Paham terhadap Politik (%)	-	70	72	75	75
8	Jumlah Ormas, OKP dan LSM yang Resmi Terdaftar	91	94	84	74	84
	a. Ormas	8	8	26	21	31
	b. OKP	17	17	17	10	10
	c. LSM	66	69	41	43	43
9	Persentase Monitoring dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan NGO	20	-	-	-	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Tabel 2.94 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah Ormas, OKP dan LSM yang resmi terdaftar di Kabupaten Tapanuli Utara adalah 84, terdiri dari 43 organisasi LSM, 10 organisasi kepemudaan dan 43 organisasi kemasyarakatan. Sedangkan untuk indikator masyarakat yang paham terhadap politik adalah 75% pada tahun 2020. Selain itu Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 yaitu 67,37 mengalami peningkatan menjadi 70,13 pada tahun 2020.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, salah satunya melalui konsumsi akhir rumah tangga, yang merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel 2.101 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk impor yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.95
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.164.331,94	3.140.064,52	4.502.152,70	3.272.709,51	4.894.669,58	3.413.757,85	5.127.194,07	3.470.851,93	5.261.941,29	3.428.757,81
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	2.311.102,76	1.779.853,80	2.492.066,15	1.854.459,36	2.709.670,83	1.932.892,77	2.828.430,25	1.958.710,08	2.979.103,05	1.950.342,10
	b. Pakaian dan Alas Kaki	215.051,60	164.203,14	233.590,96	172.730,36	255.716,94	182.132,17	282.088,04	192.112,72	292.208,36	186.931,36
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	505.002,00	383.910,16	542.346,27	398.203,59	583.429,59	411.049,99	595.399,99	411.937,86	608.092,01	413.026,28
	d. Kesehatan dan Pendidikan	286.754,29	225.128,99	308.655,43	233.062,50	324.865,30	238.143,33	347.265,07	238.824,75	344.767,86	234.149,37
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	572.329,95	409.709,41	620.974,46	430.267,49	688.705,70	455.177,26	721.948,67	469.968,06	703.265,83	459.061,38
	f. Hotel dan Restoran	173.331,72	104.595,94	186.505,04	108.110,86	204.191,80	115.107,62	214.976,04	119.140,65	201.096,30	109.690,54
	g. Lainnya	100.759,62	72.663,07	118.014,39	75.875,35	128.089,42	79.254,71	137.086,01	80.157,81	133.407,88	75.556,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	315.959,76	265.278,94	332.997,33	275.082,65	365.198,60	291.672,56	395.755,32	313.659,64	399.925,40	311.893,57
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.137.377,97	884.689,31	1.205.705,23	894.517,95	1.283.193,99	911.145,66	1.311.980,12	914.588,26	1.302.943,37	906.986,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.529.025,64	1.548.932,22	2.849.210,37	1.676.688,61	3.218.025,32	1.810.908,60	3.527.207,90	1.968.305,91	3.585.988,32	1.962.950,09

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel 2.95 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selama periode tahun 2016 - 2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Apabila kita amati, maka komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan sebagian besar untuk makanan, minuman dan rokok.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.96
Pengeluaran dan Distribusi Konsumsi Rumah Tangga Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 (Atas Dasar Harga Berlaku)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Makanan, Minuman dan Rokok	2.311.102,76	36,68	2.492.066,15	36,83	2.709.670,83	37,14	2.828.430,25	35,85	2.979.103,05	36,00
2	Pakaian dan Alas Kaki	215.051,60	3,41	233.590,96	3,45	255.716,94	3,50	282.088,04	3,58	292.208,36	3,53
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	505.002,00	8,02	542.346,27	8,02	583.429,59	8,00	595.399,99	7,55	608.092,01	7,35
4	Kesehatan dan Pendidikan	286.754,29	4,55	308.655,43	4,56	324.865,30	4,45	347.265,07	4,40	344.767,86	4,17
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	572.329,95	9,08	620.974,46	9,18	688.705,70	9,44	721.948,67	9,15	703.265,83	8,50
6	Hotel dan Restoran	173.331,72	2,75	186.505,04	2,76	204.191,80	2,80	214.976,04	2,72	201.096,30	2,43
7	Lainnya	100.759,62	1,60	118.014,39	1,74	128.089,42	1,76	137.086,01	1,74	133.407,88	1,61
	Total Pengeluaran	4.164.331,94	66,10	4.502.152,70	66,54	4.894.669,58	67,08	5.127.194,07	64,99	5.261.941,29	63,59

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Konsumsi rumah tangga per kapita terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2016-2020 (ADHB) secara rata-rata adalah untuk :

1. Makanan, minuman dan rokok rata-rata sebesar 36,5 persen.
2. Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya rata-rata sebesar 9,07 persen.
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga rata-rata sebesar 7,78 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

Tabel 2.97
Fasilitas Sarana Prasarana Wilayah Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik	30,07	49,66	50,95	45,35	46,45
2	Tersedianya aksesibilitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ kota	95	100	100	100	100
3	Persentase rumah tinggal layak huni	76,2	76,7	78,4	82,3	84,51
4	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak	75,80	79,90	79,50	87,85	88,39
5	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	71,47	78,40	80,60	94,57	94,86
6	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	91,89	96,14	96,14	96,16	99,7

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.97, gambaran kondisi fasilitas sarana prasarana wilayah Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun menunjukkan perbaikan. Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik, ketersediaan akses dalam wilayah kabupaten, rumah layak huni, penduduk berakses sanitasi layak, rumah tangga pengguna air bersih dan listrik memperlihatkan angka yang membaik. Kondisi ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan agar kondisi infrastruktur wilayah dapat mendukung iklim investasi yang lebih baik.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor keamanan dan ketertiban, lama proses perijinan dan pajak/retribusi yang akan dibayarkan oleh pelaku usaha. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing-masing.

Tabel 2.98
Indikator Iklim Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah demonstrasi	6	4	9	16	2
2	Jumlah tindak pidana	263	299	240	201	181
3	Jumlah penyelesaian tindak pidana	218	258	201	155	137
4	Persentase yang diselesaikan	83	86	84	85	63
5	Lama proses perijinan (hari)	Maks 14	Maks 14	Maks 14	4-10	4-10
6	Jenis pajak daerah	9	9	9	10	9
7	Jenis retribusi daerah	23	24	21	22	22

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Tarutung, jumlah tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2016-2020 jumlahnya berfluktuasi dengan kecenderungan penurunan kasus, demikian juga halnya dengan persentase kasus yang diselesaikan. Hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi agar rasa aman berinvestasi dapat tercipta. Seluruh komponen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masing-masing.

Pelayanan masyarakat dalam urusan perijinan telah diperbaiki dari sebelumnya pelayanan perijinan secara manual sampai tahun 2018 menjadi pelayanan secara online sejak tahun 2019 dengan menggunakan Online Single Submission (OSS) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengurus ijin menjadi berkurang dari sebelumnya maksimal 14 hari menjadi 4-10 hari.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk menyiapkan SDM

yang terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti : motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.99
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekolah Dasar	10	30	84	21	N/A
2	Sekolah Menengah Pertama	328	356	294	149	N/A
3	SLTA/SMK	524	982	3.049	479	N/A
4	Diploma I	2	-	40	2	N/A
5	Diploma II	-	154	90	1	N/A
6	Sarjana Muda	88	432	678	38	N/A
7	Sarjana	224	-	1.415	25	N/A

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.99 dapat dilihat bahwa pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tapanuli Utara didominasi penduduk dengan lulusan SLTA. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan atau membina para generasi muda untuk menjadi wirausaha muda (data tahun 2020 tidak tersedia).

Tingginya jumlah angkatan kerja juga akan berpengaruh pada besarnya kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial.

Tabel 2.100
Rasio Ketergantungan Penduduk Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	105.459	105.077	105.023	105.054	94.554
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	19.212	19.954	20.804	21.087	22.044
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	124.671	125.031	125.827	126.141	116.598
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	170.942	172.575	174.054	174.152	196.160
5	Rasio ketergantungan	72,93	72,45	72,29	72,43	59,44

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2021

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016 adalah sebesar 72,93. Ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif menanggung 72,93 orang penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas). Pada tahun 2020 rasio ketergantungan berkurang menjadi 59,44 berarti setiap 100 orang penduduk berusia produktif menanggung 59,44 orang penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif.

2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan

manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang. Kemuliaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagian diperlambangkan dalam 17 Tujuan atau Goals yang terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya.

Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan menuntut manusia untuk memperhatikan keterkaitan (interlinkages) antar ke 17 Tujuan, dan saling ketergantungan antar 167 Target yang diukur melalui 241 indikator dan dengan memperhatikan bahwa alam dan seisinya adalah pembatas kelangsungan kehidupan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diuraikan menjadi 17 tujuan, yaitu : (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; (6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern; (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; (11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; (16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

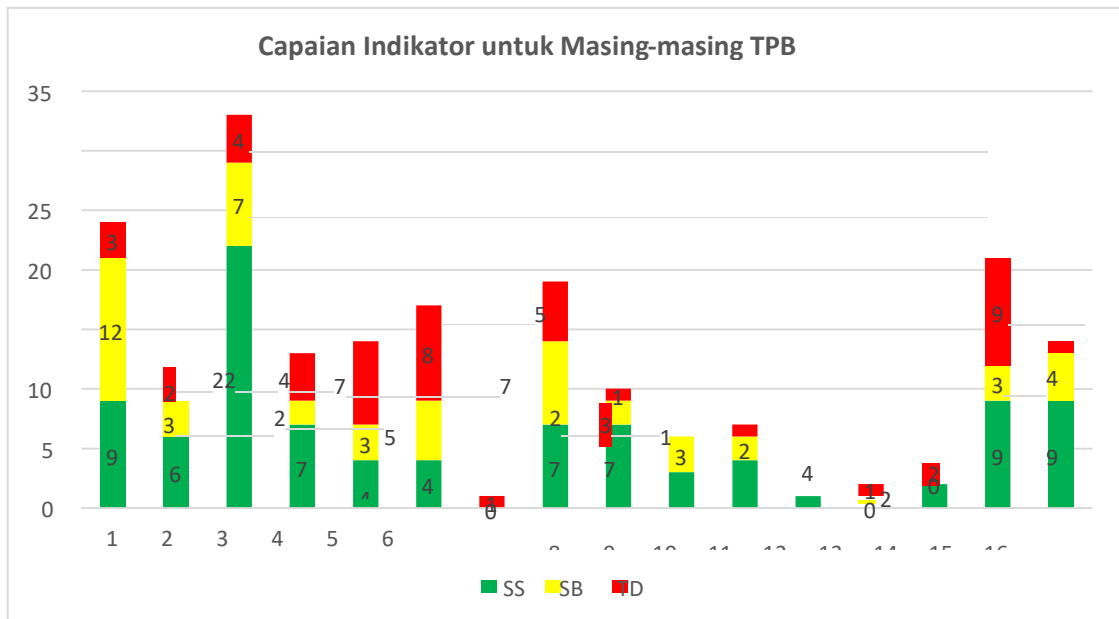
Dari total 204 indikator, indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 148 indikator dan dari indikator yang tersedia datanya sebanyak 94 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) dan 54 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) dan sebanyak 56 indikator belum memiliki data (TD).

Indikator TPB tersebut dibagi kedalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB memiliki capaian yang berbeda-beda. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada Tabel 2.102.

Tabel 2.101
Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai target (SS)	Belum mencapai target (SB)	Tidak ada data (TD)	Jumlah Indikator
1	2	3	4	5	6
1	Tanpa Kemiskinan	9	12	3	24
2	Tanpa Kelaparan	6	3	2	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	22	7	4	33
4	Pendidikan Berkualitas	7	2	4	13
5	Kesetaraan Gender	4	3	7	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	5	8	17
7	Akses Energi yang Terjangkau	0	0	1	1
8	Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi	7	7	5	19
9	Industri, inovasi dan Infrastruktur	7	2	1	10
10	Berkurangnya kesenjangan	3	3	3	9
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	1	7
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	1	0	4	5
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	1	1	2
15	Ekosistem Daratan	2	0	2	4
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	9	3	9	21
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	9	4	1	14
		94	54	56	204

Sumber: Hasil analisis, 2021



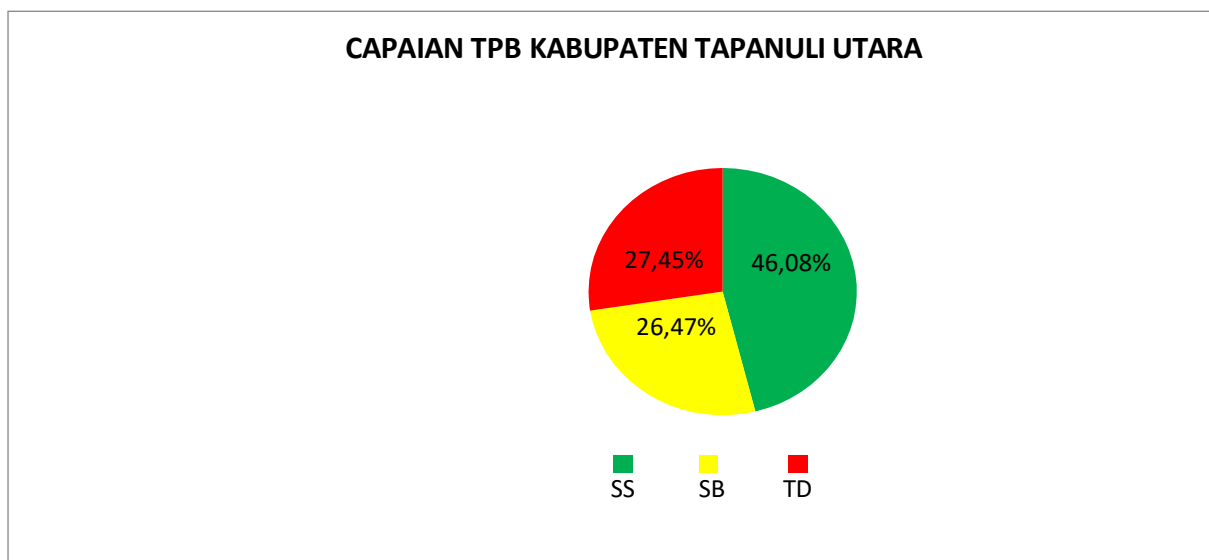
Gambar 2.10

Proporsi Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa TPB yang paling banyak memiliki indikator adalah TPB 3 yaitu sebanyak 33 indikator, sedangkan yang paling sedikit adalah TPB 7 yaitu hanya 1 indikator. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa 148 indikator atau 72,55 % dari 204 indikator yang relevan di Kabupaten Tapanuli Utara telah diisi dimana indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 94 indikator (46,08%) dan sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 54 indikator (26,47%), sementara 56 indikator (27,45%) sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data.

Gambar 2.11

Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara terhadap target



Secara rinci analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Tapanuli Utara akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS).

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 10 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 94 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah kabupaten sebanyak 204 indikator. Indikator-indikator yang sudah

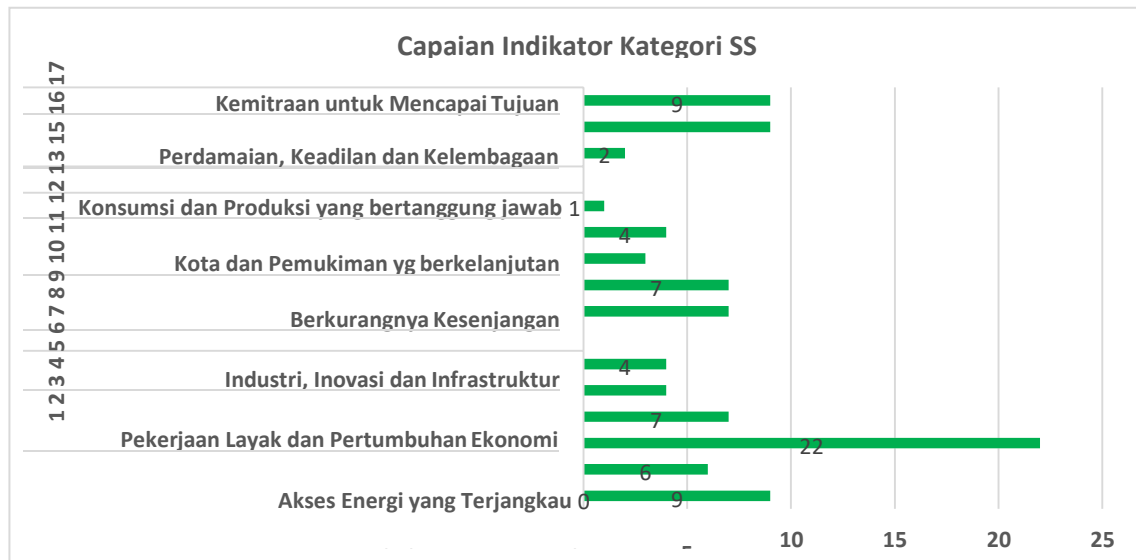
2. dilaksanakan dan sudah mencapai target tersebut harus dipertahankan agar capaiannya tetap baik bahkan bisa lebih meningkat lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 2.102
Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional di Kabupaten Tapanuli Utara

No. TPB	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah Indikator SS
1	2	3
1	Tanpa Kemiskinan	9
2	Tanpa Kelaparan	6
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	22
4	Pendidikan Berkualitas	7
5	Kesetaraan Gender	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
7	Akses Energi yang Terjangkau	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7
10	Berkurangnya Kesenjangan	3
11	Kota dan Pemukiman yg berkelanjutan	4
12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	1
13	Penanganan Perubahan Iklim	0
15	Ekosistem Darat	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	9
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	9
Jumlah		94

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Gambar 2.12
Jumlah Capaian Indikator TPB Kategori SS



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator paling banyak adalah “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”, dengan jumlah 22 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dari 34 target indikator, sedangkan ada 2 tujuan yang merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional paling sedikit yaitu 0 (nol) indikator pada TPB nomor 7 dan 13. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Realisasi Capaian Indikator TPB Tahun 2016-2020

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Dinas Ketenagakerjaan	1,42%	1,90%	3,87%	2,40%	2,58%
2.	1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Dinas Pendidikan	72,35	81,3	100,5	79,43	83,76
3.	1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.06 %	52.05 %	58.72 %	70.55 %	80.02%
4.	1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Dinas Sosial	-	0	0	0	0
5.	1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Dinas Sosial	-	0	0	0	0
6.	1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	BPBD	TD	TD	118	118	118
7.	1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	BPBD	TD	TD	TD	3.803.865.704,99	2.815.752.167,95
8.	1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	BAPPEDA	TD	1,03	2,67	2,65	TD
9.	1	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	BPKPAD	31,76%	29,05%	29,20%	29,69%	31,14%



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	Dinas Kesehatan	0	0	0,76	1,52	2,27
11.	2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Dinas Ketahanan Pangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	Dinas Kesehatan	0,10	0,13	0,45	9,13	7,88
13.	2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	0,21	0,26	0,87	1,40	6,85
14.	2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	Dinas Kesehatan	27,01	28,46	19,73	64,84	66,88
15.	2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	0	0	0	3,30%	3%
16.	3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	Dinas Kesehatan	86,58	138,84	57,18	83,00	177,27
17.	3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	12,47	9,72	5,0	6,85	1,99
18.	3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Dinas Kesehatan	11,43	8,85	4,29	5,60	1,55
19.	3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	Dinas Kesehatan	0,07	0	0	0	0
20.	3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	Dinas Kesehatan	93,33	100	100	100	100
21.	3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100
22.	3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	1	3	0



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0
24.	3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Dinas Kesehatan	0,002	0	0,019	0,003	0,016
25.	3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	Dinas Kesehatan	74,79	189,39	224,09	192,52	193,44
26.	3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Polres	TD	TD	TD	0,25%	0,00%
27.	3	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100
28.	3	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	Dinas Kesehatan	2,87	5,15	4,72	3,20	3,43
29.	3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	Dinas Kesehatan	0,004	0	0	0	0
30.	3	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	DP2KBP3A	69,29	65,85	65,68	65,93	67,03
31.	3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	DP2KBP3A	69,29	65,85	65,68	65,93	67,03
32.	3	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	DP2KBP3A	47,45	53,61	50,25	48,89	45,62
33.	3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Dinas Kesehatan	65,67	74,60	74,30	77,36	82,49



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	Dinas Kesehatan	65,67	74,60	74,30	77,36	82,49
35.	3	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0
36.	3	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100
37.	3	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Dinas Kesehatan	3,81	5,72	5,92	5,80	5,60
38.	4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	Dinas Pendidikan	96,62	98,72	96,28	97,69	97,67
39.	4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	Dinas Pendidikan	91,46	56,63	95,00	98,78	98,73
40.	4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Dinas Pendidikan	98,95	114,23	114,95	115,23	128,49
41.	4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Dinas Pendidikan	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun
42.	4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2)	Meningkat	Dinas Pendidikan	117,44	126,34	145,02	121,75	121,05
			SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.							
43.	4	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	Dinas Pendidikan	99,22	99,30	99,38	99,77	99,77
44.	4	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Dinas Pendidikan	108,79	111,01	130,25	145,43	141,21
45.	5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	DP2KBP3A	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
46.	5	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan	Meningkat menjadi 21 tahun	DP2KBP3A	TD	TD	23,48	23,31	23,50



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pernah kawin umur 25-49 tahun.							
47.	5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	Sekretariat DPRD	8,71%	8,71%	8,71%	5,71%	8,57%
48.	5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Diskominfo	55%	60%	70%	80%	90%
49.	6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Dinas Perkim	2586,25	2398,25	2484	2783,5	3058,5
50.	6	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Dinas Kesehatan	0	0	0	0,95	1,77
51.	6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Dinas Kesehatan	73	48	47	111	188
52.	6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Dinas Kesehatan	0	0	0	1	2
53.	8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	Dinas Ketenagakerjaan	69%	69,12%	69,52%	68,62%	67,72
54.	8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	Dinas Ketenagakerjaan	59,11%	62,90%	63,15%	64,57%	65%
55.	8	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	Dinas Koperasi dan UMKM	16,00	19,00	22,00	25,00	28,00
56.	8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Dinas Ketenagakerjaan	Rp 10.156	Rp 12.471	Rp 13.558	Rp 14.646	Rp 15.621



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Dinas Pariwisata	128.110	145.765	150.931	170.110	141.350
58.	8	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	Perbankan	100% Jumlah Unit Kerja BRI ; Kantor Cabang 1, Kantor Cabang Pembantu 1, BRI Unit 8, Teras BRI 2. Teras Keliling 1. Jumlah ATM 16	100% Jumlah Unit Kerja BRI ; Kantor Cabang 1, Kantor Cabang Pembantu 1, Kantor Cabang Pembantu 1, BRI Unit 8, Teras BRI 2. Teras Keliling 1. Jumlah ATM 17	100% Jumlah Unit Kerja BRI ; Kantor Cabang 1, Kantor Cabang Pembantu 1, BRI Unit 8, Teras BRI 2. Jumlah ATM 26	100% Jumlah Unit Kerja BRI ; Kantor Cabang 1, Kantor Cabang Pembantu 1, BRI Unit 8, Teras BRI 2. Jumlah ATM 25	100% Jumlah Unit Kerja BRI ; Kantor Cabang 1, Kantor Cabang Pembantu 1, BRI Unit 8, Teras BRI 2. Jumlah ATM 25
59.	8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	Dinas Koperasi dan UMKM	16,00	19,00	22	39,00	45,00
60.	9	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Dinas Perhubungan	3	3	5	5	5
61.	9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	BAPPEDA	2,01	2,13	2,21	2,23	2,27
62.	9	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	BAPPEDA	13,42	12,25	9,007	99,89	TD
63.	9	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	Dinas Perindag	11,57%	13,16%	14,77%	15,85%	24,81%



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.							
79.	16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	DP2KBP3A	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
80.	16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi 80%	UKPBJ Setdakab	100%	100%	100%	100%	100%
81.	16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%	BPKPAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Bagian Organisasi Setdakab	50,08	50,51	54,26	54,88	TD
83.	16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	Sekretariat DPRD	8,71%	8,71%	8,71%	5,71%	8,57%
84.	16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20,06 %	52,05 %	58,72 %	70,55 %	80,02 %
85.	16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Bagian Hukum Setdakab	0	0	0	0	0
86.	17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	BPKPAD	7,91%	13,30%	8,19%	8,55%	10,33%



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	No. TPB	No.Indikator	Indikator	Target	OPD	REALISASI CAPAIAN INDIKTOR TPB				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	17	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	BPS	TD	100	100	100	100
88.	17	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	BPS	TD	100	100	96,67	100
89.	17	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	BPS	TD	1	2	3	4
90.	17	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
91.	17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	Diskominfo	0	0	0	10000	15000
92.	17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	BPS	TD	98	100	100	100
93.	17	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Diskominfo	35%	40%	40%	50%	60%
94.	17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Diskominfo	60%	65%	70%	75%	85%

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB). Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 54 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.103 di bawah ini.

Tabel 2.104
Jumlah Indikator Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional di Kabupaten Tapanuli Utara

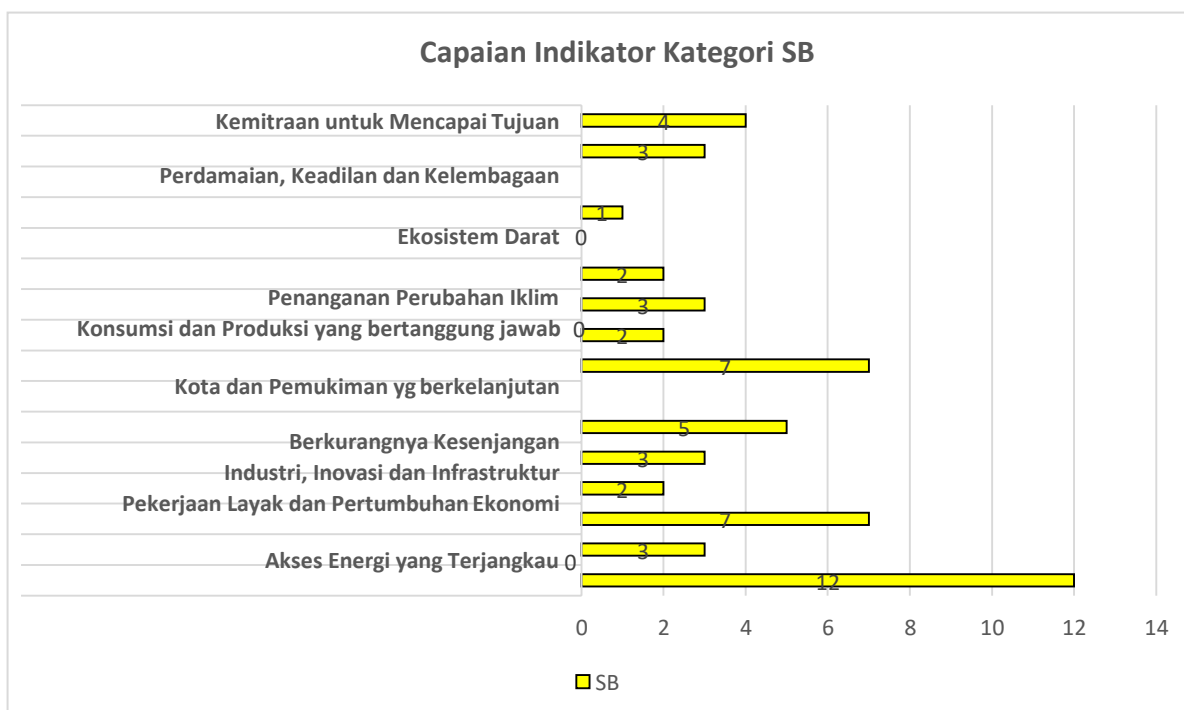
No. TPB	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah Indikator SB
1	2	3
1	Tanpa Kemiskinan	12
2	Tanpa Kelaparan	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	7
4	Pendidikan Berkualitas	2
5	Kesetaraan Gender	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5
7	Akses energi yang terjangkau	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	3
11	Kota dan Pemukiman yg berkelanjutan	2
12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	1
15	Ekosistem Darat	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	3
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	4
Jumlah		54

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetapi belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 15 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 54 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah kabupaten. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional akan menjadi isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan grafik di bawah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan total 54 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target terbanyak ditemui pada Tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua". Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target

RPJMD 2019-2024 memerlukan upaya tambahan di masa depan agar targetnya dapat segera tercapai.



Penetapan Isu Strategis

Isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara disarikan dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target dan yang belum memiliki data dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan data indikator capaian TPB di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat banyak indikator TPB yang belum mencapai target dan belum memiliki data meliputi berbagai aspek. Pada uraian sebelumnya telah digambarkan capaian TPB di Kabupaten Tapanuli Utara dan hubungannya dengan kondisi lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut beberapa aspek yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara lima tahun ke depan meliputi aspek kebencanaan, pemerataan sumber daya air serta peningkatan kualitasnya, pemerataan distribusi sumber daya pangan, kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta kesempatan berusaha, aspek kesehatan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.

Mengingat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara bukan disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam maka untuk penanggulangannya perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perluasan kesempatan berusaha. Sedangkan pembangunan

2.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.105
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM PENDIDIKAN							
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah WN usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	44,62%	48,21%	Dinas Pendidikan	
2.	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah WN usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (D/MI, SMP/MTs)	85,91%	73,62%	Dinas Pendidikan	
3.	Pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah WN usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	100%	Dinas Pendidikan	
SPM KESEHATAN							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	75,7%	68,67%	Dinas Kesehatan	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan	66,8%	63,43%	Dinas Kesehatan	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
		perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan				
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	70,01%	99,91%	Dinas Kesehatan	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	85,46%	73,07%	Dinas Kesehatan	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	99,66%	Dinas Kesehatan	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	57%	23,84%	Dinas Kesehatan	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	80,22%	Dinas Kesehatan	
8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	14,33%	Dinas Kesehatan	
9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN penderita DM yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	90,34%	Dinas Kesehatan	
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita ODGJ Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN terduga TBC yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	
12.	Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya	Jumlah WN dengan resiko	100%	100%	Dinas Kesehatan	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pada Orang dengan Resiko teinfeksi Virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV))	Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	terinfeksi yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Layanan Kesehatan				
PEKERJAAN UMUM							
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum kabupaten	Program Penyediaan SPAM	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	28,83	34,28	Dinas PUPR	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten	Program Pengelolaan SPAL	Jumlah WN yang memperoleh layanan air limbah domestik	79,5	89,32	Dinas PUPR	
PERUMAHAN							
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana yang dikategorikan bencana Kabupaten
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana yang dikategorikan bencana Kabupaten
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.	Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah WN yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	Dinas SATPOL PP	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	BPBD	
3.	Pelayanan Pencegahan dan	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh layanan	100%	100%	BPBD	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	100%	BPBD	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah WN yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Dinas SATPOL PP	
SOSIAL							
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	5 Orang	Dinas Sosial	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	1 Orang	Dinas Sosial	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	0	Dinas Sosial	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna social khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi social dasar tuna social diluar Panti	n/a	24 Orang	Dinas Sosial	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana Kabupaten	Program Penanganan Bencana	Jumlah WN korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	140 KK (60,6%)	Dinas Sosial	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 2.106
Matriks Penelaahan Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Terdapatnya data yang belum valid	Penurunan angka kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibandingkan provinsi dan kawasan di sekitar Danau Toba tetapi lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional.	Permasalahan Kemiskinan	Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Meningkatkan produktivitas komoditi dan produk unggulan	Pendapatan per kapita	Meningkatkan produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	KETERANGAN : diisi dengan penjelasan mengapa target tersebut tidak tercapai	Belum terealisasi kepesertaan semesta (universal Health Coverage)	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terjadi peningkatan PBI Jamkesmas , tetapi cakupan persentase jamkesmas di tahun 2020 mengalami penurunan	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Minimnya bantuan sosial dan pelatihan bagi disabilitas	Penurunan angka kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Peningkatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah keluarga yang tersaji di DTKS masih banyak yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)	Penurunan angka kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	data tahun 2020, jumlah rumah tangga yang tercatat pada Basis Data Terpadu adalah sebanyak 26.298 rumah tangga dengan jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial pangan (Rastra).	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
					bantuan iuran kesehatan dan bantuan Program Keluarga Harapan.										
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Pembanding data capaian dengan sasaran yang terlalu tinggi sehingga nilai capaian rendah	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan mengalami penurunan setiap tahun	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat takut datang ke pelayanan kesehatan , kesibukan pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan Dan Upaya KesehatanMasyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2020 mencapai 210 desa/kelurahan atau sekitar 83,33 persen.	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Kurangnya pemahaman Pasangan Usia 19-45 Tahun tentang pemakaian alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan PUS	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah akseptor KB	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana	Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Kualitas Air Baku belum Memenuhi Syarat Air Minum	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan 2. Peningkatan SPAM	Jumlah rumah tangga yang telah dapat mengakses air bersih meningkat dari 81,23 persen pada tahun 2016 menjadi 94,86 persen pada tahun 2020	Permasalahan Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Meningkatkan pelayananan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
				Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan				Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup							
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Kurangnya ketersediaan lahan untuk membuat akses layanan sanitasi	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	rumah tangga berakses sanitasi yang mengalami peningkatan dari 75,80 persen pada tahun 2016 menjadi 88,39 persen pada tahun 2020	Permasalahan Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Bahwa di tahun 2016-2020 banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan tidak sesuai dengan seluruh anak usia sekolah tepat waktu.	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami kenaikan	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Sistem Aplikasi PLN selalu update secara realtime sehingga data yang tersedia selalu terbaru berdasarkan pertambahan pelanggan.	Peningkatan infrastruktur dasar	Melanjutkan program listrik desa	Persentase rumah tinggal menggunakan listrik Pada Tahun 2017 sudah mencapai 99,01 persen, tetapi tidak ada data pada tahun 2018-2020.	Permasalahan Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum semua korban bencana dapat diberi bantuan sosial (Dampak bencana yang terjadi tidak menimbulkan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas	Program Penanganan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial mengalami kenaikan	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintah an yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		korban jiwa akan tetapi lebih berdampak kepada rusaknya sarana dan prasarana.)	penanggulan gan bencana				pembanguna n berkelanjutan								
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana menurun pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun 2018	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan penanganan bencana	Program Penanggulang an Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD telah memprogramkan kegiatan ini setiap tahun namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran dan covid-19 sehingga harus menghindari kegiatan yang mengakibatkan kerumunan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan mencapai 0,0018	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan jumlah desa tangguh bencana	Program Penanggulang an Bencana	Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	tidak adanya data terkait Cakupan dokumen penanggulangan bencana daerah	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintaha n	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan penanganan bencana	Program Penanggulang an Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	Belum pernah dianggarkan/ belum pernah dilaksanakan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	tingkat pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pangan karbohidrat	Belum Optimalnya ketahanan pangan yang	Penguatan Ketahanan Pangan melalui	Meningkatka n Ketahanan Pangan dan Kesejahteraa	Meningkatk an ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatka n Ketersediaan Pangan	PPH Ketersediaa n	Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Populasi	Program Penyediaan dan pengembanga	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Undemourishment).			Kewenangan Kabupaten/Kota	yang bersumber dari beras di daerah ini selama tahun 2016-2020 telah mencapai swasembada	berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa	revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa	n Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjuta n	berkelanjut an				Ternak dan Ikan	n sarana pertanian	pangan
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tidak pernah dianggarkan/ Tidak pernah dilaksanakan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	tingkat pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pangan karbohidrat yang bersumber dari beras di daerah ini selama tahun 2016-2020 telah mencapai swasembada	Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa	Penguatan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa	Meningkatka n Ketahanan Pangan dan Kesejahteraa n Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjuta n	Meningkatk an Ketersediaa n Pangan	PPH Ketersediaa n	Meningkatka n diversifikasi pangan	PPH Konsumsi	Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berkualitas	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Daerah
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Terjadi peningkatan kasus gizi kurang, karena dimasa pandemi masalah ekonomi menjadi penyebab/akar masalah terjadinya masalah gizi, anak malnutrisi disebabkan kekurangan asupan dan penyakit infeksi yang berulang	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah balita gizi buruk setiap tahun kecenderungannya mengalami penurunan	Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa	Penguatan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa	Meningkatka n Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatr ya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatka n layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggun ya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah memprogramkan anggaran Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) namun tahun 2020 mengalami refocussing anggaran sehingga Skor PPH (skor 86) Tahun 2020 tidak dapat dihitung (target tidak	Peningkatan Ketahanan Pangan	Untuk Skor PPH : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Untuk Tingkat Konsumsi Ikan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan	belum ada data	Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa	Penguatan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa	Meningkatka n Ketahanan Pangan dan Kesejahteraa n Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjuta n	Meningkatk an ketahanan pangan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatka n diversifikasi pangan	PPH Konsumsi	Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berkualitas	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		tercapai). Untuk Tingkat Konsumsi Ikan Anggarannya masih rendah (perlu ditingkatkan) agar target tingkat konsumsi ikan nasional 54,5 kg/kapita/tahun dapat tercapai dan selain itu Tapanuli Utara bukan daerah pesisir sehingga tingkat konsumsi ikan masih rendah.		Pembudidayaan Ikan											
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum ada rumusan tentang Nilai Tambah Pertanian (ada di lingkup Provinsi) tidak ada di lingkup kabupaten.	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program : Penyuluhan Pertanian Kegiatan : Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Penyumbang terbesar dari PDRB Taput adalah pertanian meskipun sedikit mengalami penurunan akibat meningkatnya PDRB dari sektor lain	Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa	Penguatan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa	Meningkatka n Ketahanan Pangan dan Kesejahteraa n Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjuta n	Meningkatk an ketahanan pangan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatka n Ketersediaan Pangan	PPH Ketersediaa n	Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Populasi Ternak dan Ikan	Program Penyediaan dan pengembanga n sarana pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Pembandingan data capaian dengan sasaran yang terlalu tinggi sehingga nilai capaian rendah	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan Dan Upaya KesehatanMasyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan mengalami penurunan setiap tahun	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintaha n	Meningkatka n Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatka n layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggun ya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan jenis tenaga kesehatan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Pembandingan data capaian dengan sasaran yang terlalu tinggi sehingga nilai capaian rendah	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan mengalami penurunan setiap tahun	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintaha n	Meningkatka n Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatk an layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatka n layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatnya jumlah kematian neonatal di fasilitas tingkat rujukan, dengan kejadian kelainan bawaan, asfiksia dan berat bayi lahir rendah	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	maka rata-rata selama lima tahun terakhir angka kematian ibu melahirkan berdasarkan jumlah bayi yang lahir hidup berada pada kisaran 0,1 persen (lebih rendah dari target nasional sebesar 0,30 persen) dengan cakupan kunjungan ibu hamil yang berfluktuasi	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat takut datang ke pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular	cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2020 mencapai 210 desa/kelurahan atau sekitar 83,33 persen.	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Belum optimalnya sosialisasi tentang merokok pada penduduk usia < 18 tahun	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	belum ada data	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Meningkatkan kompetensi kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Kurangnya fasilitator untuk edukasi korban penyalahgunaan napza	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Rehabilitasi SosialKegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	belum ada data	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Meningkatkan kompetensi kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Strategi	Program Pambangu nan	Indikator Program Pembangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan OKP	belum ada data	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Indeks Pambangun an Pemuda	Meningkatka n Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Meningkatkan kompetensi kepemudaan	Program Pengebanga n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Kurangnya pemahaman Pasangan Usia 15-19 Tahun tentang bahaya melahirkan pada usia 15-19 tahun	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Indeks Pambangun an Pemuda	Mengoptimalkan kesetaraan gender	Indeks Pambangun an Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutama an Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutama an gender dan pemberdayaan perempuan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Total Fertility Rate (TFR).	Masih adanya pemikiran dalam masyarakat memiliki anak banyak rejeki	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah akseptor KB	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatka n layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pengendalian Penduduk	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Unmet need pelayanan kesehatan.	Orang yang datang ke Fasilitas Kesehatan umumnya yang sakit, konsultasi dan mengambil rujukan	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan MasyarakatKegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi BOR untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 48,11 persen,Kondisi ALOS untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 5,34 hari, Kondisi TOI untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 5,76 hari, Kondisi BTO untuk RSUD Tarutung tahun 2020 adalah 32,39 kali	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatka n layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggun ya aktivitas dibagi jumlah penduduk	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Strategi	Program Pambangun	Indikator Program Pembangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum optimalnya sosialisasi kampanye bahaya merokok	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan OKP	Peningkatan Kampanye bahaya rokok sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka morbiditas (jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Tidak ditemukan data yang diminta dari birokrasi mengenai Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan standard kemampuan membaca melalui program kearsipan	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Ada siswa yang bersekolah di luar kabupaten tapanuli utara. Sehingga target capaian 2019 tidak tercapai.	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Nilai APK Kabupaten Tapanuli Utara sudah tinggi yaitu untuk tingkat SD/MI = 95,73, dan untuk tingkat b. SMP/MTs = 115,23	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Tidak ditemukan data yang diminta dari Birokrasi mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016 dan 2017	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	belum ada data	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Senantiasa Havat untuk	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi	1. Tidak ditemukan data yang diminta dari Birokrasi mengenai Proporsi remaja dan	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	Upaya dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah. Hingga tahun 2020, cakupan	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-18 tahun yang belum.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Semua	(TIK).	dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 2. Keterbatas Anggaran untuk pemenuhan Laptop/PC bagi setiap siswa di setiap sekolah		Pertama	wilayah (kecamatan dan desa) di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mendapatkan layanan telekomunikasi mencapai 84 persen		kesehatan								menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Mulai 2017 SMA/SMK sudah di bawah Naungan Provsu jadi data untuk 2017-2020 tidak ada	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Penyajian dilakukan di Tabel 2.23 Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Tidak ditemukan data yang diminta dari Birokrasi mengenai Proporsi akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Dilaksanakan melalui Program Pengloaang Pendidikan Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perkim. Untuk data spesifik belum ada	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	tidak adanya sosialisasi dan pemahaman responsif gender yang mendukung	Peningkatan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum Tahun 2018-	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengoptimalkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		Pemberdayaan Perempuan		Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2019 = 100 %	yang baik	n	Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan an Jiwa Kewirausahaan						Perempuan	
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	tidak adanya laporan ke Fasilitas Layanan dikarenakan tidak mengetahui tempat fasilitas layanan pengaduan tindak kekerasan	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUANKegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/KotaPROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAKKegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dilakukan melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan an Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengoptimalkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak adanya data yang spesifik tentang data tersebut	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum dari tahun 2018-2019 adalah 100 %	Belum optimalnya pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan an Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengoptimalkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	masih adanya yang tidak melaporkan Tindak Kekerasan kepada tempat pelayanan/Pengaduan	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum dari tahun 2018-2019 adalah 100 %	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan an Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengoptimalkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Mencapai Kesetaraan Gender dan	Proporsi perempuan umur	Tidak adanya data yang spesifik	Peningkatan kualitas	PROGRAM PERLINDUNGAN	Data yang tertuang hanva mencakup	Belum optimalnya	Perwujudan dan	Meningkatkan Kualitas	Terwujudnya	Indeks Pembangunan	Mengoptimalkan	Indeks Pembangunan	Meningkatkan Koordinasi,	Program Pengarusutamaan	Cakupan pengarusutamaan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Memberdayakan Kaum Perempuan	20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	tentang data tersebut	pendidikan dan kesehatan	PEREMPUAN Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pasangan menikah dan berakte nikah, belum ada data spesifik terkait jumlah pasangan sesuai umur	penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Tatakelola Pemerintaha n	dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Peningkata n Kualitas SDM	an Pemuda	kesetaraan gender	an Gender	Sinkronisasi dan Aadvokasi Pelaksanaan PUG	aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	an gender dan pemberdayaan perempuan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Kurangnya pemahaman Pasangan Usia 15-19 Tahun tentang bahaya melahirkan pada usia 15-19 tahun	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Berdasarkan data tersebut, AKB di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah Tahun 2020 mencapai 0.66	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengoptimal kan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan an Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutama an gender dan pemberdayaan perempuan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	kurangnya kewibawaannya dalam pemikiran dalam kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola pemerintaha n	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	selama tahun 2016-2020 capaian partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada rata-rata adalah 3.418 sedangkan capaian partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Tapanuli Utara) pada tahun 2016-2020 sebanyak tiga orang	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggun an Terbuka (TPT)	Mengoptimal kan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan an Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutama an gender dan pemberdayaan perempuan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Kurangnya pemahaman perempuan dimana pentingnya peran suami dalam hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2020 sebesar 67,03	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatka n Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatr ya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatka n layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga	Kurangnya Pemahaman Pasangan Usia	Peningkatan kualitas pendidikan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli	Belum optimalnya pelayanan	Perluasan akses masvarakat	Meningkatka n Kualitas Layanan	Meningkatr ya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Meningkatka n layanan kesehatan	Jumlah anak yang dilahirkan	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Perempuan	Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Subur (PUS) terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern	dan kesehatan	Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Utara tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah akseptor KB Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana) memalui Program Keluarga Berencana	Pendidikan dan Kesehatan	terhadap pendidikan dan kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat		yang berkualitas	wanita usia subur (Fertility Rate)	kesehatan masyarakat		
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Kurangnya Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) tahun 2020 sebesar 21,22	Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Kualitas Air Baku belum Memenuhi Syarat Air Minum	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan 2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sejak tahun 2017 sudah mencapai 100 %	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Meningkatkan pelayananan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Kualitas Air Baku belum Memenuhi Syarat Air Minum	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan 2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Hasil pengukuran indeks kualitas air sudah berada diatas 80 sejak tahun 2016	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Meningkatkan pelayananan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
								Pelestarian Lingkungan Hidup							
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Kurangnya ketersediaan lahan untuk membuat akses layanan sanitasi	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak tahun 2020 sebesar 88,39 %	Permasalahan Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat di karenakan kurangnya ketersediaan lahan dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota2. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2020 sebesar 90.25	Permasalahan Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat di karenakan kurangnya ketersediaan lahan dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.	Peningkatan infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2020 sebesar 90.25	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan	IPLT yang terstandar belum ada di bangun di Kabupaten Tapanuli Utara	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan : Supervisi pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perl	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sebesar 15 % tahun 2018	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan	Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
	dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		penanggulan gan bencana	uasan Sarana dan Prasarana IPLT.			pembanguna n berkelanjutan	Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup			layak	permukima n layak			
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Data rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja dari tahun tahun sebelumnya tidak ditemukan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sebesar 15 % tahun 2018	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatka n akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukima n layak	Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan n Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kualitas air danau.	Belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Lokasi Danau yang di uji sehingga kualitas air danau belum bisa meningkat.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program : Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan hidupKegiatan :Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan :Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut.	Belum di programkan	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Lokasi Sungai yang di uji sehingga kualitas air danau belum bisa meningkat.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program : Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	Belum di programkan	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
				pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut.				Hidup							
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Terbatasnya petugas pekarya irigasi dan kurangnya komunikasi dengan kelompok tani	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik termasuk mengalami peningkatan	Permasalahana n Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prasarana Irigasi dalam Kondisi baik
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Belum jelasnya kewenangan antara Balai sungai, Provinsi dan Kabupaten (termasuk Sempadan Danau Toba)	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tapanuli Utara tersaji di Tabel 2.22 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara	Permasalahana n Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTR	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan dokumen rencana tata ruang
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Banyaknya Jaringan Irigasi di Kabupaten Taput yang belum masuk ke Permen 14 Tahun 2015	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)Kegiatan :Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, kondisi irigasi tahun 2018 sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.55	Permasalahana n Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prasarana Irigasi dalam Kondisi baik
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Komisi irigasi belum efektif dan Perkumpulan Petani Pengguna	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan	Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Pembinaan dan	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak sudah diatas 88 % pada	Permasalahana n Infrastruktur Dasar	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prasarana Irigasi dalam Kondisi baik



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Air (P3A) belum terbentuk seluruhnya	Peningkatan kualitas angkutan kerja	Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	tahun 2020		berkualitas dan merata	Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	infrastruktur daerah		Air				
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Bauran energi terbarukan.	Belum pernah dilakukan inventarisasi data untu Energi terbarukan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program : Pengelolaan Energi Terbarukan, Kegiatan : Pertambangan	Belum diprogramkan mengingat Perangkat Daerah yang membidangi energi tidak ada di Kabupaten	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Terjadi peningkatan namun terjadi perlambatan akibat Pandemi Covid-19	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkutan kerja	Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan Program dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan PDRB Perkapita sebesar 1,50 pada tahun 2020 merupakan Laju Pertumbuhan tertinggi di seluruh Kabupaten Kawasan Danau Toba	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Meningkatkan produktivitas komoditas dan produk unggulan	Pendapatan per kapita	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan	Pertumbuhan UMKM	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan pengembangan kemitraan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persenentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	PDB per kapita.	Terjadi peningkatan namun terjadi perlambatan akibat Pandemi Covid-19	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas	Program :Program Koordinasi Dan SinkronisasiPerencanaan Pembangunan DaerahKegiatan :- Koordinasi	Pertumbuhan PDRB Perkapita sebesar 1,50 pada tahun 2020 merupakan Laju Pertumbuhan tertinggi di seluruh Kabupaten	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis	Meningkatkan produktivitas komoditas dan produk unggulan	Pendapatan per kapita	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan	Pertumbuhan UMKM	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha	Persenentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			angkatan kerja	perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)- Koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahanProgram dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM	Kawasan Danau Toba		penganggura n	Pertanian dan Sumber Daya Lokal					pengembangan kemitraan	Mikro (UMKM)	standarisasi dan sertifikat produk usaha
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Data sulit dikumpulkan karena tidak pernah dihitung per tenaga kerja	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Pelayanan antar kerja	Pertumbuhan PDRB Perkapita sebesar 1,50 pada tahun 2020 merupakan Laju Pertumbuhan tertinggi di seluruh Kabupaten Kawasan Danau Toba	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausaha an	Terwujudnya Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Meningkatka n produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Ketenagakerjaan telah memprogramkan namun tidak pernah terealisasi	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Pelayanan antar kerja	jumlah industri di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 sebanyak 3.734 unit dan menurun pada tahun 2020 menjadi 3.716 unit. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengusaha menutup usahanya	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausaha an	Terwujudnya Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Meningkatka n produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Menjalin hubungan kerjasama industrial	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Ketenagakerjaan telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Pelayanan antar kerja	Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung tinggi daripada beberapa daerah. Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi daerah dengan TPT terendah sebagaimana	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausaha an	Terwujudnya Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Meningkatka n produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
					ditampilkan pada tabel berikut ini.										
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Ketenagakerjaan telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tingkat pengangguran Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu Tahun 2017-2019 mengalami penurunan, yaitu dari 1,89 pada tahun 2017 menjadi 1,33 pada tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, maka terjadi peningkatan angka pengangguran baik di Kabupaten Tapanuli Utara	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Meningkatka n produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Ketenagakerjaan telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu Tahun 2017-2019 mengalami penurunan, yaitu dari 1,89 pada tahun 2017 menjadi 1,33 pada tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, maka terjadi peningkatan angka pengangguran baik di Kabupaten Tapanuli Utara	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembang an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Meningkatka n produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan. Jumlah wisatawan yang menurun akan mempengaruhi kontribusi terhadap PDB.	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Kontribusi PAD sektor pariwisata sebesar 0.17 tahun 2020 dan selalu meningkat sejak tahun 2016	Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Pengembang an pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Meningkatka n Destinasi Wisata melalui pengembang an kawasan wisata alam, budaya, rohani dan agrowisata	Meningkatn ya jumlah wisatawan	Peningkata n Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatka n kualitas dan kuantitas kepariwisataa n	Peningkata n jumlah kunjungan wisata	Meningkatkan Promosi kepariwisataan	Program Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Jumlah wisatawan mancanegara.	Adanya Pandemi Covid-19	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Penurunan Jumlah Wisatawan Domestik sebesar 17000 orang tahun 2020	Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan	Pengembang an pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnva	Meningkatka n Destinasi Wisata melalui pengembang an kawasan wisata alam, budaya, rohani dan	Meningkatn ya jumlah wisatawan	Peningkata n Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatka n kualitas dan kuantitas kepariwisataa n	Peningkata n jumlah kunjungan wisata	Meningkatkan jumlah dan daya tarik obyek wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan di 3 destinasi pariwisata



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
				Kabupaten/Kota 2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		sektor lainnya		agrowisata							
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Jumlah devisa sektor pariwisata.	salah satu tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pariwisata adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata, sedangkan untuk penentuan devisa belum dapat kami sajikan	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kontribusi PAD sektor pariwisata sebesar 0.17 tahun 2020 dan selalu meningkat sejak tahun 2016	Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Pengembang an pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Meningkatka n Destinasi Wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam, budaya, rohani dan agrowisata	Meningkatn ya jumlah wisatawan	Peningkata n Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatka n kualitas dan kuantitas kepariwisataa n	Peningkata n jumlah kunjungan wisata	Meningkatkan Kapasitas SDM Kepariwisataan	Program Pemasaran Pariwisata	Event pariwisata yang dilaksanakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Ketenagakerjaan telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pekerja pada Industri Pariwisata belum terdata, akan tetapi pemerintah telah memprogramkan pembenahan destinasi wisata melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan dalam pengembangan kemampuan pekerja dibidang pariwisata	Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Pengembang an pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Meningkatka n Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan an Jiwa Kewirausaha an	Terwujudny a Peningkata n Kualitas SDM	Tingkat Penganggur an Terbuka (TPT)	Meningkatka n produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Menjalin hubungan kerjasama industrial	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak pernah dilakukan penghitungan jarak antar lembaga keuangan.	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	belum ada data tersaji terkait lembaga keuangan di Kabupaten Tapanuli Utara	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Meningkatka n Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudny a tata kelola pemerintah an yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatka n kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasaan Masyarakat (akumulasi)	Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Ketenagakerjaan telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	jumlah tenaga kerja di bidang industri semakin menurun dimana pada tahun 2016 sebanyak 8.003 orang menjadi 7.788 orang pada tahun 2020.	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Pengembang an Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Meningkatn ya produktivit as komoditi dan produk unggulan	Pendapatan per kapita	Meningkatka n nilai tambah produk unggulan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatkan pembinaan Home Industri	Program pengembanga n UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
Membangun Infrastruktur yang	Proporsi nilai tambah industri	1. Situasi Pandemi Covid 19	Percepatan Pertumbuha	Program: Perencanaan Dan Pembangunan	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap	Perlambatan Pertumbuhan	Pembanguna n Ekonomi,	Pengembang an Komoditi	Meningkatn ya	Pendapatan per kapita	Meningkatka n nilai	Pertumbuh an UMKM	Meningkatkan kapasitas pelaku	Program pengembangan	Persentase jumlah usaha



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	kecil terhadap total nilai tambah industri.	banyak membuat para pelaku IKM kehilangan pembeli sehingga membuat mereka terhambat produksi karena kurangnya modal. Banyak IKM yang stagnan/tidak beroperasi sementara.2. Kurangnya tenaga penyuluh industri untuk melakukan pendampingan IKM menjadi salah satu alasan mengapa target tidak tercapai3. Dukungan anggaran untuk pengembangan industri kecil menengah dan pemuktahiran data IKM di Kabupaten Tapanuli Utara dari APBD sungguhlah sangat minim.	n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	IndustriKegiatan: 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	total nilai tambah industri masih kecil	Ekonomi	penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	produktivit as komoditi dan produk unggulan		tambah produk unggulan		usaha, memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan pengembangan kemitraan	n UMKM	mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Dalam perencanaan pembangunan belum berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda sudah melakukan sosialisasi Inovasi kepada perangkat daerah melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi inovasi tapanuli utara	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatka n Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudny a tata kelola pemerintah an yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatka n Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Pembangunan Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD setiap tahun
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut	Bertambahnya jumlah penduduk miskin dan bantuan sosial yang masih	Penurunan angka kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Persentase permohonan Bansos yang telah ditindaklanjuti mengalami penurunan	Permasalaha n Kemiskinan	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan	Meningkatka n Kualitas Pelayanan Publik dengan	Terwujudny a tata kelola pemerintah an yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatka n kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
	jenis kelamin dan kelompok umur.	kurang		Daerah Kabupaten/Kota	di tahun 2020		dan penganggura n	Sistem e- Government	baik dan bersih						tertangani
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Jumlah desa tertinggal.	Berdasarkan Indeks Desa Membangun satu desa tertinggal mempunyai ambang batas > 0,491 dan < 0,599, Faktor penyebab karena minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya dan lain lain	Penurunan angka kemiskinan	1. Program penataan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa2. Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa3. Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa4. Program Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan, Lembaga Adat danMasyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa danLembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaserta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adatyang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yangSama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tertinggal setiap tahun mengalami penurunan, meskipun masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 138 desa pada tahun 2020	Perkembangan desa yang lambat	Meningkatkan peran aktif lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam pembangunan desa menuju desa mandiri melalui optimalisasi pengolahan potensi lokal	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Meningkatkan kapasitas Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Meningkatkan penataan desa	Program Penataan Desa	Jumlah desa naik status
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Jumlah Desa Mandiri.	Belum adanya desa yang memiliki fasilitas dasar desa yang terpenuhi, mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga	Penurunan angka kemiskinan	1. Program penataan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa Swadaya sebanyak 10 Desa	Perkembangan desa yang lambat	Meningkatkan peran aktif lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam pembangunan desa menuju desa mandiri melalui optimalisasi	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Meningkatkan kapasitas Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Meningkatkan penataan desa	Program Penataan Desa	Jumlah desa naik status



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		dimensi sekaligus mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			pengolahan potensi lokal								
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		Penurunan angka kemiskinan	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 sebesar 9.37 %	Permasalahan Kemiskinan	Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Tidak melakukan pendataan terhadap Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Penurunan angka kemiskinan	Program rehabilitasi sosialKegiatan :Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibandingkan provinsi dan kawasan di sekitar Danau Toba tetapi lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional.	Permasalahan Kemiskinan	Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Indeks Kebebasan Sipil.	Tidak pernah melakukan pendataan/survey tentang kebebasan sipil	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	belum ada data tersaji terkait indeks kebebasan sipil	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
				Politik Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Dampak bencana yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa akan tetapi lebih berdampak kepada rusaknya sarana dan prasarana.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.		Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan penanganan bencana	Program Penanggulang an Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah karena hanya memiliki kendaraan operasional sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terbatas dan kurang memadai.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulan gan bencana	Program : Pengelolaan Persampahan , Kegiatan : Pengelolaan Sampah		Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas infrastuktu r daerah	Indeks infrastruktu r daerah	Meningkatka n akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukima n layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan penanganan bencana	Program Penanggulang an Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		anggaran	hidup dan kapasitas penanggulangan bencana	terhadap Bencana.		yang baik	n	dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	daerah yang baik		responsif				
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Pihak ke 3 pengangkutan belum beroperasi tahun sebelumnya.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulangan bencana	Program : Perlindungan Lingkungan Hidup, Kegiatan : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3		Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Infrastruktur untuk timbulan sampah belum tersedia	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulangan bencana	Program : Pengelolaan Persampahan , Kegiatan : Pengelolaan Sampah		Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Selama ini Sertifikat SNI tidak diwajibkan untuk dilampirkan pada laporan semester Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulangan bencana	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 sebanyak 8 perusahaan	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.											
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1. Kemampuan dan keterampilan pelaku IKM belum ada dalam menghasilkan produk ramah lingkungan 2. teknologi pembuatan produk Produk Hijau/Hasil Industri Hijau merupakan teknologi tinggi yang membutuhkan dana yang tinggi dan SDM yang dilatih secara berkelanjutan. 3. emahaman akan regulasi sertifikasi Produk Hijau/Hasil Industri Hijau yang tercantum pada peraturan masih membutuhkan analisa dan komprehensi yang mendalam	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program: Perencanaan Dan Pembangunan Industri Kegiatan: 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Belum ada data terkait produk ramah lingkungan	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembanguna n Ekonomi, penanggulan gan kemiskinan dan penganggura n	Pengembang an Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Meningkatr ya produktivit as komoditi dan produk unggulan	Pendapatan per kapita	Meningkatka n nilai tambah produk unggulan	Pertumbuh an UMKM	Meningkatkan pembinaan Home Industri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persenatase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikat produk usaha
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD telah memprogramkan namun belum bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran.	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) ada	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembanguna n berkelanjutan	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/ Wilay ah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan jumlah desa tangguh bencana	Program Penanggulang an Bencana	Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Dampak bencana yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa akan tetapi lebih berdmnak kepada	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas	Program Penanggulangan Bencana. Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Belum ada data terkait Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang	Meningkatka n Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan	Terwujudny a indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatka n sistem penanggulan gan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatkan penanganan bencana	Program Penanggulang an Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		rusaknya sarana dan prasarana.	angkatan kerja				berbasis pembangunan berkelanjutan	Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	yang baik						
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Belum dilaksanakan inventarisasi data, belum dibuat legislasi dan kebijakan dan belum pernah dibuat anggaran untuk kegiatan tersebut.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program : Pengelolaan Keanegaragaman Hayati Kegiatan : 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati2. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Sudah dituangkan dalam Peraturan terkait APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan aset Daerah	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Belum dilaksanakan inventarisasi data yang terdapat di Pihak LSM Lingkungan dan belum adanya kegiatan yang dilakukan untuk penyusunan Dokumen Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Tapanuli Utara.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program : Pengelolaan Keanegaragaman Hayati Kegiatan : 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Belum dilaksanakan inventarisasi data yang terdapat di Pihak LSM Lingkungan dan belum adanya kegiatan yang dilakukan untuk penyusunan Dokumen Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Tapanuli Utara.	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Pembangunan Daerah	Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program pembangunan daerah
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Pendataan tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP lebih cenderung ke Kepolisian dan TNI	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program : Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan instansi vertikal yang berada di wilayah kecamatan	belum ada data terkait Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat	Pendataan tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP lebih cenderung	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program : Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Belum ada data	Belum optimalnya penerapan tata kelola	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Persentase gangguan ketetraman dan ketertiban



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	tinggalnya.	ke Kepolisian dan TNI		Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan instansi vertikal yang berada di wilayah kecamatan		pemerintahan yang baik	Pemerintahan	dengan Sistem e-Government	an yang baik dan bersih					Ketertiban Umum	umum yang ditangani
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak adanya laporan ke Fasilitas Layanan dikarenakan tidak mengetahui tempat fasilitas layanan pengaduan tindak kekerasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 1 orang tahun 2020	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak adanya laporan ke Fasilitas Layanan dikarenakan tidak mengetahui tempat fasilitas layanan pengaduan tindak kekerasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum dari tahun 2018-2019 adalah 100 %	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengoptimalkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum pernah dilakukan pendataan, sampel yang dibutuhkan cukup banyak dan berkaitan dengan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Belum ada data	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belum ada target sebelumnya	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan	Program Pengelolaan Keuangan DaerahKegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Belum ada data	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			kerja	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											ditetapkan
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Dari Tahun 2016 s.d 2018 belum ada dilakukan penilaian, Tahun 2020 tdk dilakukan karena refocusing dan adanya metode baru PMPRB	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Penataan Organisasi Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dari Tahun 2016 s.d 2018 belum ada dilakukan penilaian, Tahun 2020 tdk dilakukan karena refocusing dan adanya metode baru PMPRB	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tatalaksana, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	Program Administrasi Umum	Cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Dari Tahun 2016 s.d 2018 belum ada dilakukan penilaian, Tahun 2020 tdk dilakukan penilaian karena pandemi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Penataan Organisasi Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dari Tahun 2016 s.d 2018 belum ada dilakukan penilaian, Tahun 2020 tdk dilakukan penilaian karena pandemi	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Optimalisasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Belum ada regulasi yang mengharuskan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah, Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	Belum ada regulasi yang mengharuskan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level maturitas SPIP
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Pencatatan sipil kabupaten tapanuli utara tidak melakukan pelaporan terhadap kepemilikan akta lahir anak umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program : Pencatatan Sipil Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Pencatatan sipil kabupaten tapanuli utara tidak melakukan pelaporan terhadap kepemilikan akta lahir anak umum 1 - 5 tahun, melainkan 0 - 18 tahun.	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		1 - 5 tahun, melainkan 0 - 18 tahun.													
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tapanuli utara tidak memapping penduduk berdasarkan pendapatan (dimana setiap warga negara wajib memiliki dokumen kependudukan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Tidak ada program pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pendataan penduduk berdasarkan penghasilan.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tapanuli utara tidak memapping penduduk berdasarkan pendapatan (dimana setiap warga negara wajib memiliki dokumen kependudukan	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Belum ada petunjuk sosialisasi PPID dari Kementerian	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Meningkatkan sistem informasi daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	belum optimalnya pengelolaan penerimaan PAD	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	belum optimalnya pengelolaan penerimaan PAD	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	kondisi Taput dengan PAD yang relatif rendah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Pengelolaan Pendapatan DaerahKegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	kondisi Taput dengan PAD yang relatif rendah	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo telah memprogramkan kegiatan ini namun belum bisa optimal akibat refocusing	Peningkatan infrastruktur dasar	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup pemerintah daerah	Diskominfo telah memprogramkan kegiatan ini namun belum bisa optimal akibat refocusing anggaran	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

KLHS PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RPJMD										
Tujuan	Indikator	Permasalahan	Isu Stragetis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Visi : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM yang Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata							
								Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan		Sasaran dan Indikator Sasaran		Strategi	Program Pembangu nan	Indikator Program Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		anggaran		Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				Government	bersih						
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Pemda belum pernah mengalokasikan dana untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Percepatan Pertumbuha n Ekonomi dan Peningkatan kualitas angkatan kerja	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintaha n	Meningkatka n Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e- Government	Terwujudny a tata kelola pemerintah an yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatka n akuntabilit as kinerja pemerintah	Nilai akuntabilit as kinerja pemerintah	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana dengan baik
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Belum adanya pemilahan yang tepat di setiap indikator dan belum adanya SDM terlatih	Peningkatan tata kelola pemerintaha n	Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masvarakat	Belum adanya pemilahan yang tepat di setiap indikator dan belum adanya SDM terlatih	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintaha n	Meningkatka n Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e- Government	Terwujudny a tata kelola pemerintah an yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatka n Kualitas Perencanaan Pembangunan n	Persentase Capaian Indikator Pembangunan Daerah	Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program pembangunan daerah



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan desentralisasi fiskal yang digulirkan sejak tahun 2001 merupakan upaya koreksi fundamental atas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Dalam kebijakan tersebut berlaku prinsip *Money Follows Functions*, yang berarti bahwa pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah disertai dengan sumber-sumber pendanaan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan penuh kepada daerah dalam penguatan pajak dan retribusi daerah (*Local Taxing Power*) dan transfer dari pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan. Disamping itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah serta penerimaan hibah dari pemerintah atau pihak lain. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber kekayaan negara secara proporsional demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Memiliki pendapatan yang besar adalah penting, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan. Tantangan ke depan bagi daerah adalah bagaimana meningkatkan dan menjamin ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara memadai dalam rangka penyediaan layanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks baik menyangkut kuantitas maupun kualitas. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengelola pendapatan dan belanja tersebut secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Saat ini, kondisi perekonomian global dan Indonesia sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, social dan ekonomi dan berbagai lembaga internasional melakukan revisi penurunan peoyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai Negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang telah dirilis, perekonomian Nasional Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,01%. Semua sector mengalami kontraksi dan hanya sektor pertanian yang tumbuh nasional 1,75%. Selain itu sisi pengeluaran semua sector mengalami kontraksi dan hanya konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 1,94 %. Demikian juga halnya Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -1,07%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara juga mengalami perlambatan yaitu dari 4,62% pada Tahun 2019 menjadi 1,50% pada Tahun 2020.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat yang sampai saat ini masih berlangsung, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, social, ekonomi terutama dunia usaha dan UMKM. Pemerintah Pusat telah melakukan kebijakan pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi yang lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian focus kebijakan nasional dan alokasi APBN akan diprioritaskan pada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melihat arah kebijakan nasional, maka Kabupaten Tapanuli Utara juga akan bersinergi dalam pemulihan ekonomi lokal. Melihat kondisi kapasitas dana transfer yang masih terbatas, pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapanuli utara harus lebih efektif dan efisien. Postur APBD dan Target APBD ke depan perlu dilakukan penyesuaian dengan melihat dengan melihat kondisi perekonomian terkini. Berbagai potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan bersamaan dengan kualitas belanja harus dimaksimalkan berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target-target keuangan daerah.

Untuk memberi gambaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisa ini dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah tahun 2016-2020 dan proyeksi pendanaan pembangunan untuk 3 (tiga) tahun ke depan yaitu 2022-2024.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengandung makna bahwa :

- a. Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Belanja Daerah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah daerah;

- c. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya semaksimal mungkin agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*) dan diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Sedangkan pelaksanaan kebijakan belanja melalui tahapan analisis belanja, standar pelayanan minimal, standar harga satuan barang dan harga satuan pokok kegiatan atas komponen belanja tiap kegiatan, sehingga dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada prinsipnya digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja yang kurang strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) harus diminimalisir.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai gambaran kondisi perekonomian di lapangan, yaitu :

Tabel 3.1
Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,12	4,15	4,35	4,62	1,50
2	Pendapatan Perkapita					
	PDRB ADHB	21.312.628,59	22.718.451,43	24.332.248,79	26.140.944,69	27.246.495
	PDRB ADHK	17.151.461,02	17.731.975,77	18.374.588,91	19.102.542,89	19.267.812
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	1,89	1,42	1,33	2,94
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,96	72,38	72,91	73,33	73,47
5	Kemiskinan	11,25	11,35	9,75	9,48	9,37
6	Indeks Gini	0,309	0,329	0,282	0,282	0,282

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum, Pertumbuhan Ekonomi dari Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2019 terus mengalami perbaikan. Namun terjadinya Pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh yang besar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2020 yang mengalami perlambatan menjadi 1,50%.

Pendapatan Perkapita Tahun 2016 -2020 baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa arah kebijakan pembangunan sudah tepat, namun masih perlu ditingkatkan sehingga Pendapatan Perkapita jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami penurunan, namun di Tahun 2020 meningkat menjadi 2,94 %. Untuk mengatasi pengangguran perlu dilakukan berbagai kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja (Pro Job) sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diminimalkan di masa yang datang.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami Peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Indeks Pembangunan ini akan terus ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masyarakat.

Tingkat Kemiskinan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 secara umum mengalami penurunan, jika Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 sebesar 11,25 % maka pada Tahun 2020 adalah sebesar 9,37%. Tingkat Kemiskinan ini masih cukup tinggi sehingga masih perlu berbagai kebijakan dan program yang tepat dalam upaya mengurangnya (Pro Poor).

Indeks Gini (Gini Ratio) Tahun 2016 adalah sebesar 0.309 turun menjadi 0,282 pada Tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara semakin merata.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam siklus APBD, memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan *money follow program* yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Secara umum realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, baik pendapatan maupun belanja.

Secara rinci perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.2
Perkembangan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun						Tahun		
		2016			2017			2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.275.823.048.331,44	1.197.874.974.979,45	93,89	1.231.044.439.187,33	1.221.109.579.448,04	90,55	1.313.649.617.104,60	1.290.353.459.949,31	98,23
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	92.997.947.710,00	94.783.154.638,45	101,92	158.067.279.858,00	162.441.906.093,04	35,43	115.160.302.201,00	105.729.074.994,31	91,81
1.1.1.	Pajak Daerah	11.440.181.766,00	12.862.246.705,44	112,43	15.730.000.000,00	14.229.820.630,70	90,46	24.896.060.566,00	17.621.282.629,57	70,78
1.1.2.	Retribusi Daerah	45.701.161.944,00	45.108.112.180,50	98,7	8.140.809.000,00	47.787.543.065,25	77,68	7.001.500.000,00	4.441.482.532,78	63,44
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.550.000.000,00	9.499.944.717,00	125,83	8.798.722.253,00	8.548.722.253,00	97,16	9.717.966.635,00	9.467.966.635,00	97,43
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.306.604.000,00	27.312.851.035,51	96,49	125.397.748.605,00	91.875.820.144,09	21,46	73.544.775.000,00	74.198.343.196,96	100,89
1.2.	Dana Perimbangan	963.002.529.976,00	894.622.014.138,00	92,9	841.851.289.768,00	828.361.615.959,00	98,4	873.634.126.000,00	868.012.988.517,00	99,36
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.428.948.976,00	26.641.817.772,00	71,18	29.903.699.768,00	28.249.355.154,00	94,47	30.469.795.000,00	37.516.300.069,00	123,13
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	650.827.006.000,00	650.827.006.000,00	100,00	639.394.068.000,00	639.394.068.000,00	100,00	639.394.068.000,00	639.394.068.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	274.746.575.000,00	217.153.190.366,00	79,04	172.553.522.000,00	160.718.192.805,00	93,14	203.770.263.000,00	191.102.620.448,00	93,78
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	219.822.570.645,44	208.469.806.203,00	94,84	231.125.869.561,33	230.306.057.396,00	99,65	324.855.188.903,60	316.611.396.438,00	97,46
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0	13.184.000.000,00	0,00	0,00	3.312.000.000,00	0,00	53.515.000.000,00	53.296.880.000,00	99,59
1.3.2.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	68.141.268.645,44	43.617.810.228,00	64,01	42.927.043.561,33	38.795.231.396,00	90,37	50.418.430.903,60	44.462.674.701,00	88,19
1.3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	147.031.302.000,00	147.031.302.000,00	100,00	188.198.826.000,00	188.198.826.000,00	100,00	198.421.758.000,00	198.421.758.000,00	100,00
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	4.650.000.000,00	4.636.693.975,00	99,71	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	14.888.786.100,00	99,26
1.3.5.	Pendapatan lainnya	0	0		0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	5.541.297.637,00	73,88



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Uraian	Tahun						Tahun		
		2016			2017			2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	BELANJA	1.384.695.484.581,32	1.251.194.183.763,24	90,36	1.273.906.756.787,32	1.203.503.299.521,51	86,76	1.369.671.636.252,18	1.293.318.440.932,50	94,43
2.1	Belanja Tidak Langsung	842.054.433.491,69	591.587.689.232,00	90,1	798.043.392.851,25	760.274.029.343,00	95,27	800.060.710.374,69	773.011.018.758,56	96,62
2.1.1	Belanja Pegawai	640.095.331.216,69	392.873.345.400,00	87,48	499.122.074.582,25	478.193.191.976,00	95,81	520.849.124.076,07	500.290.223.119,56	96,05
2.1.2	Belanja Subsidi	1.182.985.000,00	1.112.065.000,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Hibah	13.995.800.000,00	12.024.468.800,00	85,91	24.658.067.300,00	23.672.648.100,00	96,00	40.604.926.723,62	36.490.120.907,00	89,87
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	962.410.000,00	53,47	1.150.000.000,00	853.644.364,00	74,23	850.000.000,00	669.426.417,00	78,76
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	183.409.817.275,00	183.049.033.532,00	99,8	248.618.880.964,00	248.417.021.903,00	99,92	232.756.659.575,00	230.916.041.315,00	99,21
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.570.500.000,00	1.566.366.500,00	99,74	24.494.370.005,00	9.137.523.000,00	37,30	5.000.000.000,00	4.645.207.000,00	92,9
2.2	Belanja Langsung	542.641.051.089,63	659.606.494.531,24	90,76	475.863.363.936,07	443.229.270.178,51	72,49	569.610.925.877,49	520.307.422.173,94	91,34
2.2.1	Belanja Pegawai	46.905.157.571,00	168.374.290.886,00	93,77	54.168.239.431,00	55.324.298.667,00	39,47	56.106.606.860,00	51.504.519.564,00	91,8
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	247.541.757.271,63	252.303.797.557,21	84,67	257.374.465.843,96	232.060.017.601,40	70,23	319.255.665.911,49	287.140.871.146,04	89,94
2.2.3	Belanja Modal	248.194.136.247,00	238.928.406.088,03	96,27	164.320.658.661,11	155.844.953.910,11	86,93	194.248.653.106,00	181.662.031.463,90	93,52
3.	PEMBIAYAAN									
3.1	Penerimaan Pembiayaan	119.289.789.356,01	119,289,789,356.01	100	55.637.928.918,22	55.710.584.792,05	0,00	60.633.554.851,58	60.633.554.851,58	100,00
3.1.1	Penggunaan SILPA	119.289.789.356,01	119,289,789,356.01	100	55.637.928.918,22	55.710.584.792,05	0,00	60.633.554.851,58	60.633.554.851,58	100,00
3.1.2	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.417.353.106,13	10,332,651,654.00	99,19	12.775.611.318,23	12.683.309.867,00	99,28	4.611.535.704,00	4.611.535.704,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1	Penyertaan Modal	9.170.615.538,00	9,170,615,538.00	100	12.149.529.251,00	12.149.529.251,00	100	3.488.198.234,00	3.488.198.234,00	100,00
3.2.2	Pembayaran Beban Utang	1.246.737.568,13	1,162,036,116.00	93,21	626.082.067,23	533.780.616,00	85,26	1.123.337.470,00	1.123.337.470,00	100,00
	Pembiayaan Netto	108.872.436.249,88	108.957.137.702,01	100,08	42.862.317.599,99	-12.683.309.867,00	-29,59	56.022.019.147,58	56.022.019.147,58	100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Uraian	Tahun					
		2019			2020		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.343.753.897.013,78	1.333.001.122.805,50	99,2	1.265.630.281.040,50	1.290.868.909.824,44	101,99
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	123.753.915.831,00	113.990.759.581,50	92,11	103.038.584.850,50	133.375.094.965,44	129,44
1.1.1.	Pajak Daerah	25.286.261.096,00	21.200.906.447,20	83,84	13.425.585.064,50	19.678.100.705,83	146,57
1.1.2.	Retribusi Daerah	6.178.167.775,00	4.578.665.558,25	74,11	4.312.706.512,00	4.601.554.356,83	106,7
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.717.966.635,00	8.024.092.439,00	82,57	6.047.857.658,00	7.557.286.367,00	124,96
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.571.520.325,00	80.187.095.137,05	97,11	79.252.435.616,00	101.538.153.535,78	128,12
1.2.	Dana Perimbangan/Pendapatan Tranfer	1.148.141.781.182,78	1.134.513.257.921,00	98,81	1.079.495.153.508,00	1.078.788.903.404,00	99,93
1.2.1	Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	915.000.585.882,00	898.881.627.467,00	98,24	812.405.758.000,00	809.570.224.807,00	99,65
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	20.818.576.882,00	17.428.148.711,00	83,71	20.474.010.000,00	22.262.521.838,00	108,74
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.074.368.000,00	4.034.744.879,00	66,42	3.645.866.000,00	3.426.977.205,00	94,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	659.877.311.000,00	659.877.311.000,00	100,00	609.962.657.000,00	606.062.527.000,00	99,36
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	228.230.330.000,00	217.541.422.877,00	95,32	178.323.225.000,00	177.818.198.764,00	99,72
1.2.2	Tranfer Pemerintah Pusat-Lainnya	184.186.164.000,00	183.145.248.800,00	99,43	224.378.807.000,00	224.378.807.000,00	100
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	184.186.164.000,00	183.145.248.800,00	99,43	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00	100
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				32.361.990.000,00	32.361.990.000,00	100
1.2.3	Tranfer Pemerintah Pemerintah Provinsi	48.955.031.300,78	52.486.381.654,00	107,21	42.710.588.508,00	44.839.871.597,00	104,99
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.955.031.300,78	52.486.381.654,00	107,21	42.710.588.508,00	44.839.871.597,00	104,99
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.858.200.000,00	84.497.105.303,00	117,59	83.096.542.682,00	78.704.911.455,00	94,72
1.3.1	Pendapatan Hibah	52.858.200.000,00	67.751.162.621,00	128,18	66.350.600.000,00	69.863.645.716,00	105,29
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan lainnya	19.000.000.000,00	16.745.942.682,00	88,14	16.745.942.682,00	8.841.265.739,00	52,8



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Uraian	Tahun					
		2019			2020		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	BELANJA	1.388.428.656.501,17	1.306.760.873.866,58	94,12	1.655.119.008.883,78	1.468.351.970.646,22	88,71
2.1	Belanja Operasional	927.833.399.164,52	853.920.757.274,85	92,03	930.233.631.381,78	843.090.065.102,86	90,63
2.1.1	Belanja Pegawai	553.176.043.675,74	508.112.651.090,00	91,85	540.477.767.089,84	491.483.123.408,00	90,93
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	362.067.355.488,78	334.618.697.184,85	92,42	373.309.393.868,94	341.115.892.680,86	91,38
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.871.039.500,00	604.339.500,00	15,61
2.1.4	Belanja Hibah	11.225.000.000,00	10.448.392.000,00	93,08	11.295.930.923,00	9.202.176.914,00	81,46
2.1.5	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.365.000.000,00	741.017.000,00	54,29	1.279.500.000,00	684.532.600,00	53,5
2.2	Belanja Modal	200.896.396.418,65	194.947.102.074,73	97,04	418.830.375.502,00	339.159.979.339,36	80,98
2.2.1	Belanja Modal Tanah	841.991.404,38	837.750.000,00	99,5	1.700.000.000,00	1.691.144.000,00	99,48
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.445.360.175,01	34.617.013.026,20	94,98	55.819.942.561,00	51.036.494.674,60	91,43
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.499.522.603,34	31.039.547.225,73	98,54	106.579.674.789,96	57.823.060.309,86	54,25
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.054.116.852,99	114.963.653.929,80	97,38	252.152.776.951,04	226.099.706.572,90	89,67
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.055.405.382,93	13.489.137.893,00	95,97	2.577.981.200,00	2.509.573.782,00	97,35
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	4.742.083.950,00	72,96	37.110.320.300,00	36.198.159.704,00	97,54
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	4.742.083.950,00	72,96	37.110.320.300,00	36.198.159.704,00	97,54
2.4	Belanja Transfer						
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	253.198.860.918,00	253.150.930.567,00	99,98	268.944.681.700,00	267.903.766.500,00	99,61
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Desa	252.400.048.700,00	252.400.048.700,00	100	268.944.681.700,00	267.903.766.500,00	99,61
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	798.812.218,00	750.861.867,00	94	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi, perkiraan pertumbuhan ekonomi, realisasi penerimaan PAD dan tidak memberatkan masyarakat serta dunia usaha. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan terkait Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Cukai Hasil Tembakau, Minyak/Gas/Pertambangan Lainnya. Sedangkan penganggaran Dana Alokasi Umum dialokasikan sesuai Peraturan Presiden.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa.

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.197.874.974.979,45	1.221.109.579.448,04	1.290.353.459.949,31	1.333.001.122.805,50	1.290.868.909.824,44
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	94.783.154.638,45	162.441.906.093,04	105.729.074.994,31	113.990.759.581,50	133.375.094.965,44
1.1.1.	Pajak Daerah	12.862.246.705,44	14.229.820.630,70	17.621.282.629,57	21.200.906.447,20	19.678.100.705,83
1.1.2.	Retribusi Daerah	45.108.112.180,50	47.787.543.065,25	4.441.482.532,78	4.578.665.558,25	4.601.554.356,83
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.499,944,717,00	8.548.722.253,00	9.467.966.635,00	8.024.092.439,00	7.557.286.367,00
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.312.851.035,51	91.875.820.144,09	74.198.343.196,96	80.187.095.137,05	101.538.153.535,78
1.2.	Dana Perimbangan	894.622.014.138,00	828.361.615.959,00	868.012.988.517,00	898.881.627.467,00	809.570.224.807,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.641.817.772,00	28.249.355.154,00	37.516.300.069,00	21.462.893.590,00	25.689.499.043,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	650.827.006.000,00	639.394.068.000,00	639.394.068.000,00	659.877.311.000,00	606.062.527.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	217.153.190.366,00	160.718.192.805,00	191.102.620.448,00	217.541.422.877,00	177.818.198.764,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	208.469.806.203,00	230.306.057.396,00	316.611.396.438,00	320.128.735.757,00	347.923.590.052,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.184.000.000,00	3.312.000.000,00	53.296.880.000,00	67.751.162.621,00	69.863.645.716,00
1.3.2.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	43.617.810.228,00	38.795.231.396,00	44.462.674.701,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	147.031.302.000,00	188.198.826.000,00	198.421.758.000,00	183.145.248.800,00	224.378.807.000,00
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	4.636.693.975,00	0,00	14.888.786.100,00	52.486.381.654,00	44.839.871.597,00
1.3.5	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	5.541.297.637,00	16.745.942.682,00	8.841.265.739,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (data diolah)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah menentukan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function) dan melaksanakan pembangunan (development function). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dari catatan yang ada selama periode tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 94.783.154.683,45. Pada Tahun 2020 Jumlah PAD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 133.375.094.965,44. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan adanya peningkatan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan mencapai 10%. Namun apabila diperhatikan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah, yaitu rata-rata 9 persen. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus mendapat perhatian yang lebih serius demi meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Realisasi Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan terbesar apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Selama Tahun 2016 – Tahun 2020, jumlah Dana Perimbangan mengalami fluktuasi. Jumlah Dana Perimbangan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 894.622.014.138.00. Pada Tahun 2020 Dana Perimbangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 809.570.224.807,00 atau berkurang sebesar Rp. 85.051.789.331,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2016. Pengurangan ini terjadi akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Realisasi pendapatan daerah sampai saat ini masih mengalami banyak kendala terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1. Pemutakhiran data Pendapatan Asli Daerah belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan
2. Subjek/objek/petugas pemungut pajak/retribusi daerah belum sepenuhnya jujur dalam mengisi potensi pajak/retribusi daerah
3. Penetapan target penerimaan dari pajak/retribusi daerah masih ditetapkan dengan perkiraan yang tidak terukur.
4. Sering terjadi keterlambatan penyeteroran PAD ke kas daerah
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah
6. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi untuk tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain :

1. Merancang disain/mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak
2. Memanfaatkan aplikasi e-pendapatan dalam mengefisiensi dan efektifitas penyeteroran pajak melalui ATM dan OVO
3. Pemasangan Tapping Box dalam penjaringan pajak di restoran dan hotel.
4. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD yang diharapkan.
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
6. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
7. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah
8. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah
9. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan

10. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima.

b. Belanja Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu yang biasanya selama 5 (lima) tahun. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Besaran Belanja Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami peningkatan.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 - Tahun 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA	1.251.194.183.763,24	1.203.503.299.521,51	1.293.318.440.932,50	1.306.760.873.866,58	1.486.351.970.645,86
I	Belanja Operasi	591.587.689.232,00	760.274.029.343,00	773.011.018.758,56	853.920.757.274,85	843.090.065.102,86
1	Belanja Pegawai	591.587.689.232,00	760.274.029.343,00	773.011.018.758,56	508.112.651.090,00	491.483.123.408,00
2	Belanja Barang Dan Jasa	252.303.797.557,21	232.060.017.601,40	287.140.871.146,04	334.618.697.184,85	341.115.892.680,86
3	Belanja Subsidi	1.112.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	12.024.468.800,00	23.672.648.100,00	36.490.120.907,00	10.448.392.000,00	9.202.176.914,00
5	Belanja Bantuan Sosial	962.410.000,00	853.644.364,00	669.426.417,00	741.017.000.000	684.532.600
6	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	604.339.500
II	Belanja Modal	238.928.406.088,03	155.844.953.910,11	181.662.031.463,90	194.947.102.074,73	339.159.979.339,00
III	Belanja Tidak Terduga	1.566.366.500,00	9.137.523.000,00	4.645.207.000,00	4.742.083.950,00	36.198.159.704,00
IV	Belanja Transfer	183.049.033.532,00	248.417.021.903,00	230.916.041.315,00	253.150.930.567,00	267.903.766.500,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (data diolah)

Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 belanja daerah dibagi berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jenis Belanja dikategorikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Target Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1,384.695.484.581,32 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.251.194.183.763,24 atau sebesar 90,36%.

Pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan rasionalisasi dan refocusing anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk didalamnya adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Jumlah Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.386.174.327.183,75 dengan realiasi sebesar Rp. 1.218.448.204.146,22 atau sebesar 87,90 %.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal;
- c. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 - Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I	PEMBIAYAAN					
A.	Penerimaan Pembiayaan	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58	52.582.578.176,39	298.724.851.129,00
1	Penggunaan SiLPA	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58	52.582.578.176,39	70.055.851.129,00
2	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	228.669.000.000,00
B.	Pengeluaran Pembiayaan	10,332,651,654.00	12.683.309.867,00	4.611.535.704,00	7.907.818.689,00	6.559.428.709,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal	9,170,615,538.00	12.149.529.251,00	3.488.198.234,00	7.900.981.425,00	6.559.428.709,00
3	Pembayaran Beban Utang	1,162,036,116.00	533.780.616,00	1.123.337.470,00	6.837.264,00	0,00
C	Pembiayaan Netto	108.957.137.702,01	43.027.274.925,05	56.022.019.147,58	44.674.759.497,39	292.165.422.420,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	55.637.928.918,22	60.633.554.851,55	52.582.578.176,39	70.915.008.426,28	96.682.361.598,39

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.5 tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 adalah dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan SiLPA, sedangkan Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun 2020 juga berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Netto Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 108.957.137.702,01. Pada Tahun 2020, Pembiayaan Neto Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 389.488.727.843,28. Peningkatan ini terjadi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 326.670.000.000,00 yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Apabila dilihat SiLPA per tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, pembiayaan netto nilainya mengalami naik turun dan belum ada konsistensi. Dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran sehingga nilai anggaran yang tersisa dapat lebih diminimalkan.

3.1.2. Neraca Daerah

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan

demikian Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami pertumbuhan yang positif dan dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.6
Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
	Kas di Kas Daerah	55.667.576.987,05	52.717.294.742,58	45.348.356.912,39	56.170.465.206,28	91.139.652.656,50
	Kas di BUD	0	48.850.399.930,58	41.420.588.055,39	51.946.558.992,28	87.024.856.583,50
	Kas di Bendahara FKTP	0	3.866.894.812,00	3.927.768.857,00	4.223.906.214,00	4.114.796.073,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	28.107.805,00	0	0	30.402.350,00	34.456.000,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.900.000,00	0	0	10.800,00	64.294.824,00
	Kas di BLUD	0.00	6.700.710.363,00	6.413.766.830,00	3.175.388.322,00	4.409.924.361,00
	Kas di Bendahara BOS	2.908.147.901,40	1.215.549.746,00	820.454.434,00	11.569.144.098,00	1.034.033.756,80
	Kas Lainnya	0	0	0		255.902.723,00
	Setara Kas	0	0	0		
	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	-	-
	Piutang Pendapatan	5.237.410.811,74	5.624.096.404,49	24.567.575.854,81	45.805.331.932,00	26.505.221.391,25
	Piutang Pendapatan – BLUD	0		7.805.251.436,00	-	-
	Piutang Pajak	0	-			
	Piutang Retribusi	0				
	Piutang Dana Bagi Hasil	0				
	Piutang Lain-lain	165.990.775,00	140.376.450,00	108.355.450,00	204.504.714,42	3.226.920.794,61
	Penyisihan Piutang	-2.370.722.938,01	-3.028.509.903,15	-3.885.865.828,28	-4.354.124.225,35	-4.065.046.414,18
	Beban dibayar dimuka	0	0	0		
	Persediaan	8.725.830.316,00	11.542.211.911,49	9.870.127.481,14	8.524.639.904,22	12.229.437.390,63



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH ASET LANCAR	70.377.241.658,18	74.911.729.714,41	91.048.022.560,06	121.125.763.101,57	134.834.797.483,61
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00		
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	46.053.532.484,50	56.786.310.404,50	60.042.672.375,00	68.526.911.223,00	74.174.838.822,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	46.053.532.484,50	56.786.310.404,50	60.042.672.375,00		
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	49.576.321.223,50	60.309.099.143,50	63.565.461.114,00	72.049.699.962,00	77.679.627.561,00
1.3.	ASET TETAP					
	Tanah	845.849.170.307,00	781.727.477.748,00	787.945.692.488,00	795.151.725.682	814.466.289.342
	Peralatan Dan Mesin	239.879.201.531,00	248.574.918.445,00	266.869.154.508,00	293.426.620.723	341.871.326.921
	Gedung Dan Bangunan	564.776.565.527,00	526.600.334.702,00	543.861.559.596,00	577.894.494.204	683.625.448.613
	Jalan,Irigasi dan Jaringan	856.951.614.721,00	917.367.768.243,00	1.021.811.455.713,00	1.139.752.391.781	1.391.191.425.712
	Aset Tetap Lainnya	9.534.668.670,00	7.842.473.229,00	8.730.096.417,00	10.988.649.018	131.271.586
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.909.572.401,00	3.617.361.546,00	3.617.361.546,00	2.251.758.197	
	Akumulasi Penyusutan	-688.712.586.574,00	-784.461.994.413,00	-871.716.382.968,96	-951.194.270.594	-1.060.098.930.932
	JUMLAH ASET TETAP	1.833.188.206.583,00	1.701.268.339.500,00	1.761.118.937.299,04	1.868.271.369.011	2.184.182.718.214
1.4.	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
1.5.	ASET LAINNYA					
	Aset tidak berwujud	737.262.636,95	695.243.187,00	472.141.293,00	342.262.496	642.070.392
	Aset lain-lain	55.106.403.118,40	53.088.895.406,00	50.670.159.656,00	55.545.834.122	58.953.843.625
	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-			
	JUMLAH ASET LAINNYA	55.843.665.755,35	51.365.402.843,00	51.142.300.949,00	55.888.096.618,00	59.595.914.017,00



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH ASET DAERAH	2.008.985.435.220,03	1.887.854.571.200,91	1.969.293.457.672,10	2.117.334.928.692,46	2.456.311.057.276
2.	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.960.000,00	0	0		
	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	28.400.000,00	18.900.000,00
	Utang Beban	879.988.100,00	752.325.228,00	1.194.026.551,00	12.827.739.229,00	37.861.945.561,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	610.162.067,23	84.341.451,23	84.341.451,23	84.341.451,63	66.129.021.378,86
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.498.110.167,23	836.666.679,23	1.278.368.002,23	12.940.480.680,63	104.009.866.939,86
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Dalam Negeri	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	232.655.668.168,80
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	3.986.668.168,80	232.655.668.168,80
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.484.778.336,03	4.823.334.848,03	5.265.036.171,03	16.927.148.849,43	336.665.535.108,66
3.	EKUITAS					
3.1.	Ekuitas	2.003.500.656.884,00	1.883.031.236.352,88	1.964.028.421.501,07	2.100.407.779.843	2.119.645.522.167
	JUMLAH EKUITAS	2.003.500.656.884,00	1.883.031.236.352,88	1.964.028.421.501,07	2.100.407.779.843	2.119.645.522.167
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.008.985.435.220,03	1.887.854.571.200,91	1.969.293.457.672,10	2.117.334.928.692,46	2.456.311.057.275,52

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (data diolah)

3.1.2.1. Aset

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,45 persen per tahun. Jika pada tahun 2016 total aset daerah sebesar Rp. 2.008.985.435.220,03 maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.456.311.057.275,52. Meskipun pertumbuhan aset tidak besar, kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam kondisi sehat dan memberikan indikasi bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi yang menjanjikan jika keuangannya dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Nilai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun tumbuh berfluktuasi, dimana nilai kewajiban pemerintah daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.484.110.167.23. Nilai kewajiban Pemerintah Daerah Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 336.665.535.108, 66.

3.1.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.003.500.656.884,00 dan Tahun 2020 menjadi 2.456.311.057.275,32.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar walaupun persinya setiap tahun semakin berkurang. Porsi Dana Alokasi Umum pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 mencapai 47 persen dan semakin berkurang hingga mencapai 44 persen pada tahun 2020. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui : (1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD sumber pendapatan daerah.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pendataan maupun pemungutan pendapatan.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
7. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah
8. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Tapanuli Utara pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) harus diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur

surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan neto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara umum telah mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2016-2020, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 44,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif besar persentasenya sehingga belanja untuk masyarakat (belanja publik) masih relative terbatas. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sedangkan idealnya pembiayaan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	Tahun Anggaran 2020	552.692.792.675,74	1.663.215.289.466,78	32,48
2	Tahun Anggaran 2019	540.259.856.089,84	1.396.336.475.190,75	38,69
3	Tahun Anggaran 2018	654.369.911.758,07	1.374.283.171.956,18	47,62
4	Tahun Anggaran 2017	630.448.115.893,25	1.286.682.368.105,55	49,00
5	Tahun Anggaran 2016	789.634.600.072,32	1.395.112.837.687,45	56,60

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya semakin berkurang. Jika pada 2016 persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan adalah sebesar 56,60%, maka pada Tahun 2020 persentase belanja aparatur berkurang hingga menjadi 32,48 %. Penurunan persentase Belanja Aparatur pada Tahun 2020 diakibatkan adanya penerimaan pembiayaan dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan untuk Belanja Modal.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Realisasi pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.197.874.974.979,45	1.221.109.579.448,04	1.290.537.707.622,31	1.333.001.122.805,50	1.290.868.909.824,44
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1.251.194.183.763,24	1.203.503.299.521,51	1.293.318.440.932,50	1.306.760.873.886,57	1.486.351.970.646,22
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,332,651,654,00	12.683.309.867,00	4.611.535.704,00	7.900.981.425,00	6.559.428.709,00
	Defisit Riil	-63.651.860.437,79	4.922.970.059,53	-7.392.269.014,19	18.332.430.249,93	-202.042.489.530,78

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (data diolah)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 mencapai Rp. -63.651.860.437,79 kemudian menjadi Rp. -202.042.489.530,78 pada tahun 2020.

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada Tabel sebagai berikut :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.9
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Defisit Riil	-63.651.860.437,79	4.922.970.059,53	-7.392.269.014,19	18.332.430.249,93	-202.042.489.530,78
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.197.874.974.979,45	1.221.109.579.448,04	1.290.537.707.622,31	1.333.001.122.805,50	1.290.868.909.824,44
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1.251.194.183.763,24	1.203.503.299.521,51	1.293.318.440.932,50	1.306.760.873.886,57	1.486.351.970.646,22
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,332,651,654,00	12.683.309.867,00	4.611.535.704,00	7.900.981.425,00	6.559.428.709,00
	Penutup Defisit Riil					
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Penutup Defisit Riil)	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58	52.582.578.176,36	298.724.851.129,08
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	119,289,789,356.01	55.710.584.792,05	60.633.554.851,58	52.582.578.176,36	70.055.851.129,08
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	228.669.000.000,00
C	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Penerimaan Pembiayaan - Defisit Riil)	55.637.928.918,22	60.633.554.851,58	52.582.578.176,39	70.915.008.426,28	96.682.361.598,30

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (data diolah)

Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan pembiayaan adalah dari SiLPA yang nilainya berfluktuasi setiap tahun. Kusus untuk Tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan juga berasal Penerimaan Pinjaman Daerah. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum maksimal dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kedepan dapat lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pemanfaatan utamanya diperuntukkan bagi penyertaan modal.

3.3. Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang²² dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1, disebutkan bahwa kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah

dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa Perangkat Daerah;
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
5. Penerimaan dana bagi hasil hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh.

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Asumsi-asumsi dan yang mendasari proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain yang diasumsikan berasal dari peningkatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah diakibatkan oleh :
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
 - b. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP)
2. Pendapatan Transfer diasumsikan meningkat setiap tahun sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat. Kenaikan Pendapatan Transfer berasal dari kenaikan Dana Perimbangan setiap tahunnya yang diproyeksikan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahun namun nilainya relatif kecil. Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan hasil analisis data eksisting dan asumsi-asumsi, Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut:



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI					
		APBD TA. 2019 (Rp)	APBD TA. 2020 (Rp)	APBD TA. 2021 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2022 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2022 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2024 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PENDAPATAN	1.333.001.122.805,50	1.290.868.909.824,44	1.350.525.803.624,00	1.469.059.442.000,00	1.299.022.919.206,00	1.498.203.611.000,00	1.326.803.457.579,00	1.532.138.160.000,00	1.347.423.200.982,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.990.759.581,50	133.375.094.965,44	128.523.314.000,00	166.584.906.000,00	140.441.969.888,00	175.743.346.000,00	145.356.847.479,00	185.506.313.000,00	150.972.716.488,33
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.200.906.447,20	19.678.100.705,83	19.167.598.082,00	34.001.506.000,00	29.091.047.443,00	35.021.550.000,00	33.021.550.729,00	36.072.198.000,00	37.072.197.248,33
4.1.2	Retribusi Daerah	4.578.665.558,25	4.601.554.356,83	6.427.857.200,00	11.891.537.000,00	6.901.860.000,00	13.318.521.000,00	7.118.520.750,00	14.916.744.000,00	8.316.743.240,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.024.092.439,00	7.557.286.367,00	7.086.082.639,00	8.835.000.000,00	8.607.286.366,00	8.835.000.000,00	9.235.000.000,00	8.835.000.000,00	8.837.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.187.095.137,05	101.538.153.535,78	95.841.776.079,00	111.856.863.000,00	95.841.776.079,00	111.568.275.000,00	95.981.776.000,00	125.682.371.000,00	96.746.776.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.134.513.257.921,00	1.078.788.903.404,00	1.151.845.946.942,00	951.379.585.000,00	1.141.835.006.636,00	962.241.240.000,00	1.164.560.660.100,00	973.232.159.000,00	1.177.504.542.494,00
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.082.026.876.267,00	1.033.949.031.807,00	1.105.839.096.306,00	951.379.585.000,00	1.094.328.156.000,00	962.241.240.000,00	1.113.679.821.000,00	973.232.159.000,00	1.124.104.895.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	898.881.627.467,00	809.570.224.807,00	884.115.485.306,00	951.379.585.000,00	905.953.328.000,00	962.241.240.000,00	916.663.004.000,00	973.232.159.000,00	927.088.078.000,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	681.340.204.590,00	631.752.026.043,00	664.818.067.306,00	725.017.316.000,00	646.563.315.000,00	732.483.537.000,00	656.892.915.000,00	740.028.091.000,00	666.227.992.000,00
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.462.893.590,00	25.689.499.043,00	67.181.908.306,00	26.862.349.000,00	48.754.353.000,00	27.130.972.000,00	55.540.353.000,00	27.402.282.000,00	60.875.430.000,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	659.877.311.000,00	606.062.527.000,00	597.636.159.000,00	698.154.967.000,00	597.808.962.000,00	705.352.565.000,00	601.352.562.000,00	712.625.809.000,00	605.352.562.000,00
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	217.541.422.877,00	177.818.198.764,00	219.297.418.000,00	226.362.269.000,00	259.390.013.000,00	229.757.703.000,00	259.770.089.000,00	233.204.068.000,00	260.860.086.000,00
4.2.1.3	Dana Insentif Daerah	0,00	32.361.990.000,00	29.706.794.000,00	0,00	0,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	183.145.248.800,00	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00		188.374.828.000,00		192.016.817.000,00		192.016.817.000,00
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	52.486.381.654,00	44.839.871.597,00	46.006.850.636,00		47.506.850.636,00		50.880.839.100,00		53.399.647.494,00



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI					
		APBD TA. 2019 (Rp)	APBD TA. 2020 (Rp)	APBD TA. 2021 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2022 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2022 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2024 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	52.486.381,654,00	44.839.871.597,00	46.006.850.636,00		47.506.850.636,00		50.880.839.100,00		53.399.647.494,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.497.105.303,00	78.704.911.455,00	70.156.542.682,00	351.094.951.000,00	16.745.942.682,00	360.219.025.000,00	16.885.950.000,00	373.399.688.000,00	18.945.942.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	76.751.162.621,00	69.863.645.716,00	12.745.942.682,00	54.051.488.000,00	16.745.942.682,00	54.321.746.000,00	16.885.950.000,00	54.593.354.000,00	18.945.942.000,00
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	16.745.942.682,00	8.841.265.739,00	57.410.600.000,00	23.000.000.000,00	0,00	28.000.000.000,00	0,00	37.000.000.000,00	0,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				222.676.295.000,00		226.016.439.000,00		229.406.686.000,00	
4.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				51.367.168.000,00		51.880.840.000,00		52.399.648.000,00	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa jenis belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja operasi diproyeksikan meningkat dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Proyeksi belanja operasi pada Perubahan RPJMD ini lebih kecil dari proyeksi belanja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 pada tahun yang sama. Kenaikan belanja operasi secara khusus diperuntukkan untuk Belanja Hibah dan Belanja Bunga. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Tetap Lainnya. Untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 belanja modal diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Belanja Modal diprioritaskan untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Bangunan dan Gedung. Besaran Belanja Modal Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta asumsi APBD Tahun 2022-2024 sebelum perubahan.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap setiap tahunnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahunnya yang akan dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Bagi Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Rumusan kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 secara umum digunakan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat, mendanai program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara serta pemenuhan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 yang dirinci berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI					
		APBD TA. 2019 (Rp.)	APBD TA. 2020 (Rp.)	APBD TA. 2021 (Rp.)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2022 (Rp.)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2022 (Rp.)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2023 (Rp.)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2023 (Rp.)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2024 (Rp.)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2024 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	BELANJA	1.306.760.873.866,58	1.468.351.970.646,22	1.599.204.316.523,00	1.481.261.410.000,00	1.330.616.919.206,00	1.509.904.654.000,00	1.348.397.457.579,01	1.542.839.295.000,00	1.369.017.200.982,33
5.1	BELANJA OPERASI	843.090.065.102,86	843.090.065.102,86	1.006.045.412.603,00	928.765.410.000,00	926.776.358.237,00	957.939.654.000,00	930.733.905.611,40	993.546.295.000,00	943.092.394.319,53
5.1.1	Belanja Pegawai	508.112.651.090,00	491.483.123.408,00	591.728.687.359,00	618.564.006.000,00	592.594.828.401,00	633.502.238.000,00	595.557.802.543,01	648.812.941.000,00	598.535.591.555,72
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.610.697.184,85	341.115.892.680,86	344.148.741.624,00	310.657.000,00	261.831.625.587,00	309.833.000.000,00	253.976.676.819,39	304.843.000.000,00	246.357.376.514,81
5.1.3	Belanja Hibah	10.448.392.000,00	9.202.176.914,00	68.396.472.820,00	10.000.000.000,00	66.671.920.063,00	20.000.000.000,00	79.671.920.063,00	35.000.000.000,00	96.671.920.063,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	741.017.000,00	684.532.600,00	1.771.510.800,00	1.365.000.000,00	1.527.506.186,00	1.365.000.000,00	1.527.506.186,00	1.365.000.000,00	1.527.506.186,00
5.1.6	Belanja Bunga	0,000	604.339.500,00	0,00	0,00	4.150.478.000,00	0,00	4.150.478.000,00	0,00	4.150.478.000,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa				5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				304.700.404.000,00		308.936.416.000,00		313.232.354.000,00	
	Belanja Tidak Terduga				7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		8.500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	194.947.102.074,73	339.159.979.339,36	325.489.139.720,00	552.496.000.000,00	133.071.862.540,00	551.965.000.000,00	144.287.166.554,32	549.293.000.000,00	149.914.657.395,38
5.2.1	Belanja Tanah	837.750.000,00	1.691.144.000,00	3.755.168.962,00		6.061.998.000,00		6.122.617.980,00		6.153.231.069,90
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	34.617.013.026,20	51.036.494.674,60	46.446.341.063,00		31.675.651.600,00		31.992.408.116,00		32.152.370.156,58
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	31.039.547.225,73	57.823.060.309,86	109.169.060.628,00		44.068.615.166,00		44.509.301.317,66		44.731.847.824,25
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.963.653.929,80	226.099.706.572,90	165.461.282.267,00		50.336.989.874,00		60.724.945.161,66		65.934.624.895,76
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.489.137.893,00	2.509.573.782,00	657.286.800,00		928.607.900,00		937.893.979,00		942.583.448,90
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.742.083.950,00	36.198.159.704,00	10.474.955.600,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	253.150.930.567,00	267.903.766.500,00	257.194.808.600,00		260.768.698.429,00		263.376.385.413,29		266.010.149.267,42
5.4.1	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa		0,00	0,00		2.899.290.744,00		2.928.283.651,44		2.957.566.487,95
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	252.400.048.700,00	267.903.766.500,00	257.194.808.600,00		257.869.407.685,00		260.448.101.761,85		263.052.582.779,47
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	750.881.867,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah ataupun pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Beban/Pokok Hutang.

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 diarahkan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu.
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian, dan
3. Pembayaran Beban/Pokok Hutang.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.12
Realisasi Pembiayaan Tahun 2019-2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET	Sebelum Perubahan APBD TA. 2022 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2022 (Rp)	PROYEKSI			
		APBD TA. 2019 (Rp)	APBD TA. 2020 (Rp)	APBD TA. 2021 (Rp)			Sebelum Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	Sebelum Perubahan APBD TA. 2024 (Rp)	Sesudah Perubahan APBD TA. 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	PEMBIAYAAN DAERAH									
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.582.578.176,39	298.724.851.129,08	260.549.552.399,00	22.201.968.000,00	55.000.000.000,00	21.701.043.000,00	45.000.000.000,00	20.701.135.000,00	45.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.582.578.176,39	70.055.851.129,00	96.682.361.598,00	22.201.968.000,00	55.000.000.000,00	21.701.043.000,00	45.000.000.000,00	20.701.135.000,00	45.000.000.000,00
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	163.867.190.801,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.907.818.689,00	6.559.428.709,00	11.871.039.500,00	10.000.000.000,00	23.406.000.000,00	10.000.000.000,00	23.406.000.000,00	10.000.000.000,00	23.406.000.000,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.900.981.425,00	6.559.428.709,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6.2.2	Pembayaran Beban/Pokok Utang	6.837.264,00	0,00	3.871.039.500,00	0,00	15.406.000.000,00		15.406.000.000,00		15.406.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	44.674.759.487,39	292.165.422.420,08	248.678.512.899,00	12.201.968.000,00	31.594.000.000,00	11.701.043.000,00	21.594.000.000,00	10.701.135.000,00	21.594.000.000,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung proyeksi pendanaan ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan kemampuan riil keuangan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil pagu perangkat daerah dan kerangka pendanaan berdasarkan alokasi prioritas I, II, III Tahun 2020-2024. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam perhitungan pendanaan, alokasi prioritas dipisahkan menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I dipergunakan untuk membiayai prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program unggulan pencapaian visi misi kepala daerah, yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.
- c. Rencana alokasi prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja yang bersifat mendukung belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Data Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 3.13, Tabel 3.14 dan Tabel 3.15 sebagai berikut



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.13
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi untuk Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021 (Target)	PROYEKSI		
				APBD TA. 2022	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1,290,868,909,824.44	1,350,525,803,624.00	1,299,022,919,206.00	1,326,803,457,579.00	1,347,423,200,982.33
2	Penerimaan Pembiayaan daerah	298,724,851,129.08	260,549,552,399.00	55,000,000,000.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
	Total Penerimaan	1,589,593,760,953.52	1,611,075,356,023.00	1,354,022,919,206.00	1,371,803,457,579.00	1,392,423,200,982.33
	Dikurangi :					
1	Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat	843,090,065,002.86	1,006,045,412,603.00	794,239,155,095.00	812,841,173,664.00	835,755,879,837.00
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	746,503,695,950.66	605,029,943,420.00	559,783,764,111.00	558,962,283,915.00	556,667,321,145.33

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (Data diolah)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.14
Realisasi Kapasitas Riil Pagu Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi untuk Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2020	APBD TA. 2021 (Target)	PROYEKSI		
		(Rp)	(Rp)	APBD TA. 2022	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1,290,868,909,824.44	1,350,525,803,624.00	1,299,022,919,206.00	1,326,803,457,579.00	1,347,423,200,982.33
2	Penerimaan Pembiayaan daerah	298,724,851,129.08	260,549,552,399.00	55,000,000,000.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
	Total Penerimaan	1,589,593,760,953.52	1,611,075,356,023.00	1,354,022,919,206.00	1,371,803,457,579.00	1,392,423,200,982.33
	Dikurangi :					
1	Belanja Transfer	267,903,766,500.00	257,194,808,600.00	260,768,698,429.00	263,376,385,413.29	266,010,149,267.42
2	Belanja Tidak Terduga	36,198,159,704.00	10,474,955,600.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,559,428,709.00	11,871,039,500.00	23,406,000,000.00	23,406,000,000.00	23,406,000,000.00
	Total	310,661,354,913.00	279,540,803,700.00	294,174,698,429.00	296,782,385,413.29	299,416,149,267.42
	Kapasitas Riil Pagu Perangkat Daerah	1,349,064,006,883.78	1,331,534,552,323.00	1,093,254,220,777.00	1,108,427,072,165.71	1,126,413,051,714.91

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (Data diolah)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi APBD TA.	APBD TA. 2021	PROYEKSI		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Kapasitas Keuangan	1,349,064,006,883.78	1,331,534,552,323.00	1,093,254,220,777.00	1,108,427,072,165.71	1,126,413,051,714.91
1	Prioritas I	832,599,016,000.00	935,877,428,983.00	744,239,155,095.00	762,841,173,664.00	785,755,879,837.00
2	Prioritas II	418,830,375,502.00	325,489,139,720.00	281,982,010,885.00	292,302,318,953.01	301,402,994,435.33
3	Prioritas III	97,634,615,381.78	70,167,983,620.00	67,033,054,797.00	53,283,579,548.70	39,254,177,442.58
	Total	1,349,064,006,883.78	1,331,534,552,323.00	1,093,254,220,777.00	1,108,427,072,165.71	1,126,413,051,714.91

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (Data diolah)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (existing) dengan kondisi yang diharapkan "gap expectation". Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya (RPJMD Tapanuli Utara Tahun 2014-2019). Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2015-2019), isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam gambaran umum pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 (lima) tahun terakhir yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II, identifikasi permasalahan dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat Akibat Pandemi COVID-19

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 4,12 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 4,62 persen, namun pada tahun 2020 LPE Tapanuli Utara mengalami penurunan kembali hingga menjadi 1,50 persen, namun demikian realisasi ini masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar -1,07 persen.

2. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pada periode Tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Tapanuli Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi 9,37 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Tapanuli Utara belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada

Triwulan I dan sesuai data BPS Kabupaten Tapanuli Utara terjadi pertambahan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 10.969 jiwa pada tahun 2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Tapanuli Utara cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Angka kemiskinan Tapanuli Utara berada di atas Provinsi Sumatera Utara (8,75%) dan Kabupaten Toba (8,71%).

3. Penanganan Pengangguran Belum Optimal dan Cenderung Meningkat

Tingkat pengangguran terbuka di Tapanuli Utara menunjukkan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 1,89 persen. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga menjadi 1,33 persen. Kondisi ini berubah pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Jumlah pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat menjadi 2,94 persen.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan SDM merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Indeks Pembangunan Manusia di Tapanuli Utara pada tahun 2018 sebesar 72,91 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,38 pada tahun 2017. Jika dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas SDM di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan di setiap tahunnya, namun jika diperbandingkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara maka pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Tapanuli Utara masih berada di bawah Kabupaten Toba, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deli Serdang. Meskipun begitu, angka IPM yang mencapai 73,47 pada tahun 2020 ini berada di atas angka IPM provinsi (71,77) maupun angka IPM Nasional (71,94). Kenaikan angka IPM ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk indeks, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan memberi pengaruh yang cukup signifikan pada seluruh aspek pembangunan dan menyebabkan target pembangunan terkoreksi terutama pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan masyarakat di Tapanuli Utara memiliki capaian rata-rata lama sekolah hingga selama 9,85 tahun. Angka ini mengindikasikan masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas memiliki rata-rata sekolah hingga 9,85 tahun atau masih menamatkan pendidikan SMP. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara masih berada di bawah beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara seperti Kabupaten Toba (10,52 tahun), Kota Padangsidimpuan (11,00 tahun), dan Kota Medan (11,39 tahun).

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Sebagai indikator yang dapat melihat derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, AHH menjadi salah satu impact yang harus diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan bidang kesehatan daerah.

Capaian AHH Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 68,63 pada tahun 2020. Dengan capaian tersebut, AHH Kabupaten Tapanuli Utara berada dibawah AHH Provinsi Sumatera (69,10) bahkan dibawah Kabupaten Toba (70,08) dan Kabupaten Humbang Hasundutan (69,27).

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan

pemerintahan daerah yang relevan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empirik permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan dipetakan sebagai berikut:

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Berdasarkan beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1. Belum terpenuhinya standar pendidikan
		2. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah
		4. Kurangnya sarana pendukung sekolah
		5. Pemenuhan SPM pendidikan yang belum tercapai
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1. Pemanfaatan Pelayanan kesehatan belum optimal
		2. Belum optimalnya pelayanan rujukan
		3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
		4. Ketersediaan dan pemanfaatan alkes belum optimal
		5. Sulitnya Akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya
		6. Pemenuhan SPM Kesehatan yang belum tercapai
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Belum Optimalnya infrastruktur jaringan jalan
		2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
		3. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
		4. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
		5. Cakupan air bersih/air minum belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan melihat target Universal Access/SDGs dan SPM
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
		2. Rendahnya daya dukung sarana prasarana wilayah permukiman
		3. Kualitas lingkungan permukiman yang kurang memenuhi syarat
		4. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani dan rawan terciptanya daerah kumuh baru
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda
		2. Masih kurangnya jumlah desa yang dibina menuju desa tangguh bencana
		3. Masih rendahnya responstime mencapai lokasi bencana
		4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1. Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		2. Belum optimalnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial karena kapasitas yang masih rendah
		3. Pemenuhan SPM Sosial yang belum tercapai
II	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1. Pertumbuhan angkatan kerja, tidak seimbang dengan penyedia lapangan kerja
		2. Kurangnya keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender
		2. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD
		3. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah
		2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
		3. Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan
		4. Masih belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
		5. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal
		6. Belum berkembangnya Teknologi Tepat Guna secara terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis komoditi lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
		7. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh pemerintah daerah
		2. Masih adanya konflik pertanahan antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah daerah
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	1. Belum maksimalnya tata kelola lingkungan hidup
		2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
		3. Menurunnya kualitas lingkungan
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal
		2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan
2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		2. Masih kurangnya pembinaan pengelolaan administrasi desa
		3. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya
		4. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa.
		5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa
		6. Belum optimalnya data profil desa dalam penanggulangan permasalahan yang terintegrasi di perdesaan
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Masih tingginya jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia subur
		2. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		3. Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.
2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	1. Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dibutuhkan pembinaan kedisiplinan
		3. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas ketersediaan layanan angkutan orang/ barang hingga ke kecamatan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
		2. Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
		3. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Masih banyak koperasi yang belum berkualitas
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi UMKM sehingga menyulitkan pengembangan usaha
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		2. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1. Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan
		2. Belum optimalnya pembinaan SDM
		3. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan kreatifitas kepemudaan
		4. Belum optimalnya penerapan regulasi kepemudaan
		5. Kurangnya sinergitas dengan lintas sektor
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1. Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan. Faktanya semua instansi pemerintah memiliki data, namun data yang dimiliki tidak terintegrasi satu sama lain
		2. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
		3. Publikasi data statistik sektoral melalui media komunikasi/multi media belum optimal
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah
		2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan
		2. Belum adanya regulasi tentang penetapan kebudayaan
		3. Kurang optimalnya SDM terhadap pelestarian kebudayaan
		4. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebudayaan
		5. Belum optimalnya fungsi masyarakat dan lembaga kebudayaan

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1. Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur
		2. Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi
		3. Rendahnya pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1. Kurangnya tata kelola kearsipan yang baku pada perangkat daerah
		2. Masih rendahnya kapasitas tenaga teknis kearsipan
		3. Tidak tersedianya tenaga kearsipan
		4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan
		5. Kurangnya kesadaran, perhatian dan kepedulian akan arsip
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendahnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya air tawar
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata
		2. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain
		3. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakteristik masing-masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
		4. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru
		5. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
		6. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1. Rendahnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
		2. Rendahnya Produksi Perternakan
3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan dan peningkatan produksi hasil kehutanan
		2. Masih adanya lahan kritis yang harus dikonservasi
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perlunya penataan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan bukan logam (Galian C) yang terkait pajak dan prosedur pertambangan
		2. Pengembangan energi baru terbarukan belum berjalan secara optimal
		3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan
3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Masih rendahnya pemasaran produk daerah
3.7	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Kurangnya kualitas produk industri kecil menengah

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
3.8	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Belum optimalnya pembinaan transmigran pada daerah transmigrasi.
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
4.1	Sekretariat Daerah	1. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas kinerja
		2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
		3. Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan
		4. Perlunya peningkatan pelayanan kelurahan
		5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian
		6. Kurangnya komitmen bersama (eksekutif dan legislatif) dalam menjalankan pemerintahan secara lebih maksimal
		7. Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
5.1	Perencanaan	1. Kualitas perencanaan yang belum optimal, sehingga menyebabkan keselarasan antar dokumen yang belum optimal
		2. Pencapaian target indikator pembangunan daerah masih rendah
5.2	Keuangan	1. Perlunya peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian
		2. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam pendanaan belanja daerah
		3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
		4. Perlu adanya komitmen dalam proses penyusunan APBD agar tepat waktu dalam setiap tahapan
5.3	Kepegawaian	1. Belum terlaksananya penerapan Sistem Merit
		2. Kurangnya ASN yang profesional dan berintegritas
		3. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatan yang tersedia
		4. Kurangnya bimbingan dan diklat untuk pengembangan kemampuan ASN
		5. Tidak adanya perlindungan terhadap karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit
5.4	Penelitian dan Pengembangan	1. Kurangnya kajian/penelitian/riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
6.1	Inspektorat	1. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

No	Urusan	Permasalahan
1	2	3
VII	Unsur Pemerintahan Umum	
7.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

Rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi*

PDRB sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya terdiri dari beberapa sektor/lapangan usaha yang membentuknya, begitu pula PDRB Tapanuli Utara yang dibentuk oleh 17 sektor/lapangan usaha. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 kontribusi sektor-sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara cenderung menurun dan fluktuatif, yaitu pada sektor pertanian, perdagangan, dan sektor konstruksi. Pertanian merupakan sektor kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Tapanuli Utara, pada tahun 2018 tercatat kontribusinya sebesar 45,28 persen, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 42,97 persen, dan naik melambat pada tahun 2020 sebesar 43,31 persen. Sektor perdagangan juga merupakan sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara. Pada tahun 2018 kontribusi dari sektor ini tercatat sebesar 14,48 persen, kemudian meningkat engan kontribusi sebesar 15,26 persen pada tahun 2019 dan terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,68 persen di tahun 2020.

2. *Permasalahan Kemiskinan*

Angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 sebesar 9,37 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,82 persen dan lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (8,75 persen) dengan jumlah pendapatan perkapita per bulan sebesar 406.813 rupiah. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh : (a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu belum terjangkau secara optimal;

(b) Masih rendahnya ketrampilan/keahlian yang dimiliki sebagian masyarakat; (c) Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin; dan (d) Aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah. Tingginya angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap permasalahan pengangguran. Tingginya angka pengangguran bukan semata-mata karena ketiadaan lapangan pekerjaan namun juga karena rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada dan tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja sebagai tempat untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja.

3. *Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan*

Beberapa permasalahan bidang Pendidikan antara lain fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, akses menuju fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih kurang, masih kurangnya tenaga kesehatan, masih terbatasnya fasilitas pelayanan Kesehatan, masih adanya permasalahan balita gizi buruk, masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

4. *Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa*

Ketersediaan pangan pokok semakin menurun akibat alih fungsi lahan pertanian dan penurunan produksi pertanian. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat namun dalam keterkaitannya dengan penyediaan pangan dan keamanan cadangan pangan, ini menjadi masalah karena luas tanam menjadi berkurang, dan produksi pangan pun akan menurun, sedangkan kebutuhan pangan selalu bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sebagai upaya mempertahankan produksi pangan, telah ditetapkan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang masih perlu pengawalan dari sisi teknis pelaksanaan supaya tujuan dari ditetapkannya Perda itu dapat diwujudkan. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan pola konsumsi belum memenuhi pola pangan harapan (beragam bergizi seimbang dan aman/B2SA). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tapanuli Utara belum mencapai 100%.

Keberadaan industri usaha pangan skala kecil dan mikro yang belum berkembang, belum didukung perdagangan dan jasa yang berpotensi langsung

mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat lokal selain sebagai faktor penggerak ekonomi lokal atau daerah.

5. *Permasalahan Infrastruktur Dasar*

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Hingga tahun 2018 jalan kabupaten dalam kondisi baik masih 50,95 persen dan irigasi masih 67,42 persen. Pemenuhan sistem penyediaan air minum yang layak juga belum maksimal, masih ada nya sumber air yang tidak terlindungi. Pipanisasi air minum belum menjangkau seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Bahkan cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya masih 21,06 persen. Rendahnya daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Tapanuli Utara masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pertumbuhan daerah.

6. *Kualitas Lingkungan Hidup*

Kualitas lingkungan hidup harus tetap ditingkatkan guna mencegah dan mengendalikan kerusakan sumber daya alam dari dampak aktivitas sosial dan perekonomian. Mengembangkan bina lingkungan lestari antara lain dengan (a) mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan khususnya dalam pengolahan limbah rumah tangga; (b) meningkatkan daya dukung kawasan lindung; (c) mencegah kerusakan SDA utamanya penanganan lahan-lahan kritis dan lahan kurang produktif serta perlindungan sumber daya air.

7. *Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya*

Permasalahan pada bidang Pariwisata dapat dilihat dari: (1) Penurunan Jumlah Wisatawan dari yang semula berjumlah 172.010 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 141.350 orang di tahun 2020, dan (2) Masih rendahnya PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 sebesar 225.367.000 rupiah. Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu: a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain); b. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan

kabupaten/kota; c. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata masih kurang profesional, dan d. Dampak Pandemi COVID-19 menyebabkan kebijakan pembatasan di berbagai daerah, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan kebijakan social distancing di tempat umum menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

8. *Perkembangan desa yang lambat*

Desa tidak berkembang akibat pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal desa yang belum optimal, kurangnya partisipasi Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam perencanaan desa.

9. *Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik*

Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Pengelolaan keuangan daerah, dimana belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat. Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan rata-rata selama tahun 2014-2018 mencapai 60,30 persen (belanja tidak langsung) dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Rendahnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran tepat waktu juga menjadi masalah. Permasalahan berikutnya terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.
- b. Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi. Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi masih perlu mendapatkan perhatian. Penempatan pegawai belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, keadilan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menyisakan

berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar OPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

- c. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi beberapa kendala, antara lain : (a) penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel; (b) penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah, profesional, cepat, tepat dan terpercaya; (c) penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah; (d) belum optimalnya pelaksanaan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); serta (e) belum optimalnya penerapan pola pengembangan karir PNS.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada Bab II dan Tabel 4.1 terkait Permasalahan perurutan sesuai dengan gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 4.2.
Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar masalah
1	2	3
Pertumbuhan ekonomi yang melambat	Rendahnya investasi dan Pengelolaan Sumberdaya alam yang kurang maksimal	Terbatasnya lahan dan Status kepemilikan lahan (tanah adat)
		Belum ada penelitian tentang potensi sumber daya alam daerah
		Rendahnya tingkat pendidikan dan Keahlian
		Belum optimalnya ketersediaan sarana Teknologi dan Informasi
	Rendahnya Pemanfaatan Informasi dan teknologi	Rendahnya kompetensi Angkatan kerja
	Rendahnya kualitas dan daya saing angkatan kerja	Kurangnya kemitraan dengan dunia usaha
		Keterbatasan anggaran
	Arus barang/jasa yang lambat	Infrastruktur yang kurang mendukung
Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Fasilitas sarana prasarana belum tersedia secara mencukupi	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Ruang Kelas Belajar
		Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Unit Sekolah
		Masih kurangnya media pembelajaran
		Masih kurangnya meubelair
	Ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas	Masih kurangnya kualitas tenaga pendidik
	Akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan	Masih Kurangnya kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan
		Jauhnya jarak menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar masalah
1	2	3
	masih kurang	Masih Kurangnya minat dokter spesialis bekerja di daerah
	Masih kurangnya Tenaga kesehatan	Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan
		Masih Kurangnya alat-alat kesehatan
	Masih kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan	Masih Kurangnya bangunan yang terstandar
		Akreditasi rumah sakit masih Tipe B
		Masih kurangnya pemenuhan obat dan gizi
		Masih kurangnya advokasi kepada masyarakat
Pengembangan sektor pariwisata yang tidak berkembang dan tidak terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Kurangnya berkembang destinasi wisata	Kurangnya amenitas pendukung pariwisata
		Kurangnya aksesibilitas menuju objek wisata
		Kurangnya kuantitas dan kualitas objek wisata
		Kurangnya ketersediaan lahan
	Kurangnya pemasaran di sektor pariwisata	Kurangnya promosi di sektor pariwisata
		Kurangnya event dan atraksi di sektor pariwisata
	Kurangnya kelembagaan di sektor pariwisata	Kurangnya komunitas/ kelompok yang mengembangkan budaya local
		Kurangnya kelompok sadar wisata
	Kurangnya pelaku dan industri ekonomi kreatif	Rendahnya minat masyarakat berusaha di bidang pariwisata
		Masih tingginya kepentingan sektoral
Belum optimalnya ketahanan pangan secara berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa	Kurangnya komoditi produk pertanian	Belum tersedianya bibit unggul
		Kurangnya saprodi
		Masih tingginya alih fungsi lahan
	Rendahnya nilai tambah komoditi pertanian	Masih kurangnya industri pengolahan
		Belum adanya sertifikasi pelaku industri pengolahan
		Belum maksimalnya peran pasar lelang
	Harga komoditi pertanian yang kurang stabil	Kualitas Kemasan belum menarik
	Nilai jual produk pertanian masih rendah	Promosi produk pertanian masih rendah
		Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi
		Kurangnya pemahaman PHBS masyarakat
Kurangnya pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Rendahnya pemenuhan akses sanitasi layak	Kurangnya tersedianya sistem pengolahan air limbah
		Kurang tersedianya sistem pengelolaan sampah
		Kurang tersedianya Tempat Pembuangan Akhir /Tempat Pembuangan Sementara (TPA/TPS)
		Rendahnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya
		Kurangnya sumber air minum

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar masalah
1	2	3
	Belum optimalnya pemenuhan akses air minum layak	Kurangnya sistem pengelolaan sumber air minum (SPAM) Kurangnya akses air minum Kurangnya kinerja aparatur
Masih rendahnya tata kelola pemerintahan	Kurangnya profesionalisme aparatur	Beban kerja tidak sebanding dengan jumlah pegawai Kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan Penempatan pegawai tidak memenuhi prinsip "the right man in the right place" Kurangnya pemerataan pegawai Belum optimalnya kompetensi pegawai Belum optimalnya komitmen dari aparatur
		Belum optimalnya pengawasan internal
		Belum optimalnya evaluasi kinerja aparatur
		Kurangnya kajian untuk mengambil kebijakan
		Belum optimalnya pelaksanaan program/kegiatan
		Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
		Belum optimalnya pengelolaan penganggaran
	Kurangnya Akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya manajemen asset daerah
		Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kolaborasi pembangunan
	Kurangnya efesiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran	Kurangnya informasi/media pengaduan di masyarakat
		Kurangnya informasi terkait kegiatan yang melibatkan masyarakat
		Belum Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten
	Kurangnya Partipisipasi pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan	Kurangnya informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemulihan dan peremajaan lahan kritis
		Masih adanya kasus penebangan liar
Pengelolaan lingkungan yang tidak sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan tata ruang	Belum tersedianya Pejabat Pengawas lingkungan hidup
	kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengawasan terkait izin lingkungan yang diterbitkan
	Belum optimalnya pelestarian lahan kritis	Kurangnya kemampuan Perangkat desa dalam menggali potensi desa
	Belum optimalnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masih terkendala dengan status kepemilikan Hak Ulayat
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggali potensi desa
Desa tidak berkembang akibat potensi lokal tidak dimanfaatkan	Kurangnya kemampuan Pemerintah Desa mengelola potensi desa	Belum optimalnya lembaga ekonomi desa mengelola potensi desa
	Kurangnya partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat	

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar masalah
1	2	3
	desa, pemuda dan perempuan dalam perencanaan desa	Kurangnya SDM pengguna teknologi informasi
	Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan potensi desa	Terbatasnya jaringan internet (Blank spot)
	Belum adanya hasil penelitian dan survey potensi desa	Belum dilaksanakannya penelitian dan survey potensi desa
		Belum tersedianya Data dan informasi potensi Desa yang akurat

4.2. Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses perencanaan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah maupun berasal dari dinamika nasional serta dunia internasional. Kebijakan nasional maupun regional yang terkait dengan pembangunan daerah juga dapat menjadi isu strategis. Substansi utama dalam identifikasi dan penyajian isu strategis adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh yang besar bagi pencapaian target pembangunan dimasa yang akan datang.

4.2.1. Telaahan Isu Global

4.2.1.1. Pandemi COVID-19

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan Oktober 2021, tercatat sebanyak 4.240.019 terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari data tersebut terdapat 14.360 kasus aktif. Jumlah yang sembuh adalah 4.082.454 orang dan meninggal sebanyak 143.205 orang yang tersebar di 34 provinsi (sumber: www.COVID19.go.id).

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkahlangkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

4.2.1.2. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Keberlanjutan Kabupaten dan Komunitas; (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; (13) Aksi Terhadap Iklim; (14) Kehidupan Bawah Laut; (15) Kehidupan di Darat; (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan pencaanangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Bila pada *Millenium Development Goals* (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada *Sustainable Development Goals* (SDG's) terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. Sasaran SDG's tersebut adalah :

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.

10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara -negara.
11. Membuat Kabupaten dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai komitmen bersama di dunia internasional, SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda nasional dan agenda pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar pencapaian terhadap sasaran SDG's dapat lebih maksimal.

4.2.1.3. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih-guna lahan. Fenomena perubahan iklim diawali dengan menumpuknya berbagai gas yang dihasilkan dari kegiatan tersebut pada atmosfer. Gas-gas tersebut memiliki sifat kekhususan seperti kaca yang bersifat meneruskan radiasi gelombang-pendek atau cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang-panjang atau radiasi-balik yang dipancarkan bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi meningkat. Dengan adanya penumpukan gas-gas tersebut, keadaan di bumi identik dengan keadaan di dalam rumah kaca yang selalu lebih panas dibanding suhu udara di luarnya. Dari pemaknaan inilah, gas-gas tersebut

dikenal dengan istilah "gas rumah kaca" dan pengaruh yang ditimbulkannya dikenal dengan istilah "efek rumah kaca". Proses alam inilah yang selanjutnya akan menimbulkan suatu pemanasan global yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Fenomena pemanasan global bukan suatu proses instan yang terjadi dalam hitungan bulan atau belasan tahun, tetapi merupakan akumulasi secara bertahap dalam peningkatan konsentrasi kandungan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Beberapa dampak negatif pemanasan global adalah menurunnya produksi pangan, terganggunya fluktuasi dan distribusi ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit tanaman serta dampak bagi kehidupan sosial ekonomi manusia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas total daratan 1,9 juta kilometer persegi yang tersebar di 17.000 buah pulau. Sedangkan luas lautan sebesar 5,8 juta kilometer persegi termasuk zona ekonomi eksklusif. IbuKabupaten negara dan hampir semua ibu Kabupaten Kabupaten terletak di wilayah pantai serta 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir dengan panjang pantai total sekitar 81.000 km. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan merupakan daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara yang notabene masih agraris, perubahan iklim akan menyebabkan gangguan pada daur air dan produksi pangan di Indonesia. Hujan yang intensitasnya semakin tinggi pada perioda musim hujan yang semakin pendek telah menyebabkan banjir di tempat-tempat yang tidak biasa. Penggundulan hutan telah memperparah permasalahan ini. Saat yang sama, penghutanan kembali dan pemeliharaan hutan yang masih ada bisa membantu beradaptasi dengan pola hujan dan daur air yang berubah ini.

Naiknya permukaan air laut karena pemanasan global (*global warming*) dapat menyebabkan bencana besar bagi suatu pulau kecil dan membahayakan juga penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Tenggelam atau hilangnya suatu pulau kecil merupakan salah satu fenomena yang akan pasti terjadi apabila dampak perubahan iklim tidak diindahkan. Dampak perubahan iklim bukan hanya akan dirasakan oleh wilayah pesisir saja akan tetapi juga dapat memengaruhi wilayah daratan yang berkaitan dengan perubahan musim tanam, kekeringan atau kemarau panjang, longsor dan banjir serta juga kebakaran hutan.

Masyarakat yang mendiami suatu daerah rentan perubahan iklim, sebagaimana halnya Indonesia, harus melakukan suatu upaya adaptasi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Mengingat hal tersebut, langkah antisipatif akan lebih efektif dan biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah bila dibanding dengan upaya adaptasi yang dilakukan nanti pada saat keadaan sudah semakin memburuk dimana dampak sudah semakin besar sehingga upaya adaptasi akan membutuhkan biaya lebih mahal.

Dampak pemanasan global menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Tapanuli Utara dengan iklim yang semakin panas. Kondisi ini disebabkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang meningkat sebesar 11 persen akibat kerusakan/pemanfaatan hutan, sumber bergerak dan tidak bergerak. Perubahan iklim ini berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian dan perkebunan akibat peningkatan populasi hama, penyakit tanaman, pertambahan umur produksi dan tidak jelasnya masa tanam. Demikian juga halnya dalam bidang kesehatan manusia dengan ditemukannya kondisi prevalensi penyakit yang semakin meningkat disebabkan perubahan cuaca dan iklim seperti ISPA, batuk, influenza dan Demam Berdarah Dengue.

4.2.1.4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi semakin besar dalam perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas layanan pada sektor pemerintahan, industri, jasa maupun sosial. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi saat ini banyak instansi yang membangun aplikasi masing-masing dan banyak data yang belum terintegrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Dalam pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan TIK dapat memperluas layanan dan pemerataan kualitas layanan. Dalam bidang ekonomi, industri, maupun jasa, pemanfaatan TIK juga dapat memberikan dampak yang besar. Namun demikian, saat ini pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim, sehingga manfaat TIK bagi petani dan nelayan belum signifikan seperti memberikan informasi harga yang paling aktual dan memperluas jaringan penjualan kepada nelayan. Dalam bidang perdagangan dan ekonomi kreatif, pemanfaatan TIK berdampak besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Luasnya pemanfaatan TIK membutuhkan berbagai keahlian dalam mengelola perangkat TIK maupun memanfaatkan informasi. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK. Pengembangan TIK juga membutuhkan SDM yang berasal dari berbagai bidang khususnya *Science, Technology, Engineering* dan *Mathematics* (STEM). Pengembangan SDM TIK tersebut juga sejalan dengan besarnya pasar TIK di Indonesia. Pengembangan kemampuan SDM dalam memproduksi barang dan jasa TIK diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasar TIK, terutama dalam menghadapi industri 4.0.

4.2.1.5. Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia

Mengacu pada Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi terdapat empat isu yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

4.2.2.1. Isu Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik. Secara kewilayahan, hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif, kecuali kawasan Maluku dan Papua. Perkembangan perekonomian domestik banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, harga komoditas internasional, agenda nasional (Pemilihan Umum) serta perubahan musim panen. Perkembangan sektor fiskal digambarkan dengan realisasi penerimaan perpajakan, dimana hingga akhir triwulan I tahun 2019 mencapai Rp. 350,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi terhadap target APBN relatif menurun. Pendapatan negara dan hibah turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Di sisi lain, realisasi belanja negara turun dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga BI7DRR pada level 6,00 persen. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik yang diharapkan menjaga stabilisasi.

Sementara itu perekonomian Indonesia diprediksi masih tumbuh positif dan stabil pada 5,2 persen. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring stabilnya tingkat inflasi dan meningkatnya bantuan sosial. Konsumsi LNPRT akan tumbuh melambat pada sisa triwulan 2019 terkait dengan telah selesainya pelaksanaan pemilu nasional. Ekspor dan impor juga diprediksi melambat terkait lemahnya kondisi perekonomian global. Di sisi lain, sektor pertanian pada triwulan II tahun 2019 diprediksi meningkat seiring dengan pergeseran masa panen.

4.2.2.2. Agenda Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara perlu mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 sebab terdapat 4 (empat)

tahun yang beririsan antara kedua dokumen tersebut yakni Tahun 2021 sampai dengan 2024, sebagai kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Keterkaitan misi, arahan Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah:

Gambar 4.1
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Sebelum menganalisis keselarasan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dalam RPJMD dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN, terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal terkait RPJMN. Hal pertama adalah bahwa RPJMN disahkan Januari 2020, dengan periode 2020–2024. Sedangkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara, semula sudah disusun dan dibahas pada tahun 2019, dengan periode sampai tahun 2024. Revisi

RPJMD dilakukan di masa pandemi COVID-19, sementara RPJMN disahkan sebelum masa pandemi COVID-19. Fakta bahwa RPJMN disahkan sebelum pandemi COVID-19 menyebabkan ada kemungkinan perbedaan indikator makro yang diprediksi.

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Sumatera Utara yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya. Sedangkan di Kabupaten Tapanuli Utara proyek prioritas nasional yang dilaksanakan seperti pembangunan kawasan Pariwisata Danau Toba termasuk pembangunan Desa Wisata.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan Work From Home, Physical Distancing, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa.

Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas. Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kabupaten Tapanuli Utara.

4.2.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Mempedomani Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, disampaikan bahwa isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah:

1. Pendidikan

Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, belum optimalnya kualitas tenaga pendidik; yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, puskesmas, ketersediaan obat, Gerakan masyarakat Sehat (Germas) dan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin. Selanjutnya, penurunan prevalensi stunting juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan pula percepatan penanganan pandemik covid 19

3. Ketenagakerjaan

Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk usia kerja, sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020 dan terdapat sekitar 1,23 juta orang

penduduk usia kerja di Sumatera Utara yang terdampak Covid-19 atau sebesar 11,51 persen dari total penduduk usia kerja di Sumut. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan penanganan yang lebih serius.

Untuk itu, Pengelolaan Balai Latihan Kerja, Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi melalui model e-commerce serta pembangunan aplikasi bursa lowongan kerja online yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

4. *Agraris*

Terbatasnya Sarana dan Prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan populasi ternak sapi, pencapaian swasembada komoditas pangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris

5. *Pariwisata*

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi Wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pembangunan desa – desa wisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. *Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga*

Dalam upaya membangun pergaulan masyarakat yang kondusif ditengah maraknya penyakit masyarakat yaitu judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, perlu dilakukan penanganan lebih serius untuk membangun peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan dalam upaya

menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan serta kondisi kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berkeyakinan

7. *Reformasi Birokrasi*

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), mempertahankan Nilai laporan kinerja keuangan daerah serta peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

8. *Infrastruktur*

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sepanjang \pm 3.000 km tentunya memerlukan penentuan prioritas penanganan ruas jalan yang menjadi jalan strategis Provinsi yang mendukung Fungsi Daya Dukung Lingkungan, Susur Pantai Timur, Kawasan Strategis Prioritas Nasional Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, Kawasan Daerah Tertinggal dengan tentunya tetap memperhatikan peningkatan kemantapan jalan secara keseluruhan. Selanjutnya kebutuhan pembangunan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh menjadi sesuatu yang urgensi dalam upaya pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

4.2.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan dan hasil identifikasi permasalahan, maka rumusan isu strategis yang akan dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara pada lima tahun yang akan datang antara lain :

1. *Pembangunan Ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran*

Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami perlambatan sejak tahun 2014 sampai 2017. Jika pada tahun 2014 angkanya sebesar 5,11 persen, maka pada tahun 2017 menjadi 4,15 persen. Perlu upaya serius dalam

rangka menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dan semakin menurunnya kesempatan kerja dengan demikian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 sebesar 9,75 persen sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,42 persen. Terbukanya akses jalan menuju kawasan ekonomi khusus maupun strategis hingga ke kecamatan dan desa diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di masa lima tahun mendatang. Beberapa hal yang bisa menjadi concern pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian, khususnya akibat pandemi COVID-19 dapat dilakukan beberapa strategi seperti peningkatan kapasitas nilai tambah produk pertanian melalui optimalisasi teknologi tepat guna, sarana prasarana pertanian maupun penyuluhan pertanian; memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk berwirausaha kembali di masa pemulihan ekonomi.

2. *Penguatan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa*

Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara yang didominasi oleh sektor pertanian membutuhkan perhatian serius dari seluruh *stakeholder*. Pengembangan ekonomi harus diarahkan pada revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian juga harus ditopang oleh sektor industri yang mendukung sektor pertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana (alsintan, teknologi pertanian, pupuk dan bibit unggul) sangat dibutuhkan agar produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Secara eksplisit, selain sektor pertanian, sektor perkebunan dan peternakan juga menjadi bagian yang harus ditingkatkan. Untuk sektor peternakan dibutuhkan penyiapan prasarana berupa industri pengolahan pakan ternak yang mengutamakan penggunaan bahan baku lokal, demikian juga dengan sektor lainnya.

3. *Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan*

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan sekaligus masuk dalam urusan

wajib pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian yang besar dalam pembangunan.

Usia harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara masih harus ditingkatkan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan.

Rata-rata lama sekolah juga harus ditingkatkan sehingga wajib belajar 12 tahun dapat tercapai dan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan hingga tingkat sarjana diberbagai disiplin ilmu juga harus ditingkatkan.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, melihat potensi yang cukup besar dalam pemenuhan peserta didik serta budaya dan animo masyarakat yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi sangat besar, maka keberadaan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki berbagai Fakultas dan Jurusan yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang di Kawasan Tapanuli dan sekitarnya sangat dibutuhkan.

4. *Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya*

Ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menuntut upaya serius Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan sektor pariwisata. Selain Danau Toba, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat objek wisata baru di beberapa wilayah sebagai alternatif daerah tujuan wisata sehingga pemerataan pembangunan dapat tercipta. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT) membuka peluang yang cukup besar terhadap berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif.

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang, perlu penyediaan amenities yang memadai agar mampu meningkatkan waktu kunjungan wisata, harus ada fasilitas yang mendukung 5M dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung

wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Promosi pariwisata berlandaskan protokol kesehatan sehingga mampu memberi kenyamanan kepada wisatawan; dan peningkatan kondusivitas daerah melalui antisipasi merebaknya pandemi COVID-19.

5. *Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata*

Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai sangat dibutuhkan bagi stimulus percepatan pembangunan daerah. Hal ini relevan guna meningkatkan daya saing daerah yang diikuti dengan peningkatan investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur secara merata dapat mendorong investasi masuk ke daerah dan tahap selanjutnya akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

6. *Pengelolaan lingkungan yang sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan*

Global Warming yang merupakan hasil dari industrialisasi yang tidak diikuti dengan pengelolaan lingkungan secara baik, telah memberikan pelajaran pada dunia bahwa "harga" kerusakan lingkungan alam akan jauh lebih mahal dari pembangunan itu sendiri dan hal ini akan semakin mahal pada generasi yang akan datang. Kesadaran bersama ini melahirkan konsep baru dalam pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*). Perlindungan terhadap lingkungan (sumber mata air, kawasan hutan) harus dilakukan agar dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

7. *Meningkatkan peran aktif lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam pembangunan desa menuju desa mandiri melalui optimalisasi pengolahan potensi lokal*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi pembangunan desa, yang diikuti dengan kewenangan berupa anggaran yang cukup besar. Momentum ini tentu sangat strategis

bagi daerah secara sinergis mengembangkan desa, mengingat sebagian besar permasalahan dan potensi pembangunan berada di desa.

8. *Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan*

Tatakelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dan inovatif cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam penerapan e-government, inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta inovasi lainnya belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengakibatkan tingkat daya saing daerah masih rendah.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap -tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu:

"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Tapanuli Utara** : Adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agamadan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- Lumbung Pangan** : Bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.

- Lumbung Sumberdaya Manusia** : Bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).
- Berkualitas** : Bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.
- Daerah Tujuan Wisata** : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

5.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal

3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government;

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Definisi Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

MISI	PENJELASAN
1	2
Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau serta peningkatan perlindungan petani dan meningkatkan lahan pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas (jenis) komoditi unggulan dan produk unggulan dengan meningkatkan komoditi pertanian yang memiliki daya saing dan memanfaatkan SDA dan SDM local
Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan menjadikan RSUD dan Puskesmas serta layanan kesehatan lainnya menjadi pusat layanan kesehatan yang memenuhi mutu pelayanan kesehatan (Akreditasi) serta pemberian pelayanan kesehatan dasar dan KB secara gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit.
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi SDM yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui pengentasan kemiskinan serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata melalui pemenuhan prinsip kepariwisataan terkait amenities, aksesibilitas dan atraksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah

MISI	PENJELASAN
1	2
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim
Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Menjadikan desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government;	Mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)

Misi tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD.

Tabel 5.2
Keselarsan Misi Pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025

Misi RPJMD Tahun 2019-2024	Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1	2
Misi 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Misi 1 : Menempatkan sektor pertanian dan agroindustri yang maju sebagai andalan perekonomian rakyat didukung sektor pariwisata, pertambangan dan energy
Misi 2 : Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Misi 5: Memperkuat perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak.
Misi 3 :	Misi 2:

Misi RPJMD Tahun 2019-2024	Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1	2
Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas
Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Misi 6: Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) sesuai kebutuhan masyarakat.
Misi 5: Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Misi 8: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman melalui pemanfaatan ruang yang serasi antar penggunaan pertanian, permukiman, kegiatan sosial ekonomi, konservasi dan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam lingkungan yang berkesinambungan.
Misi 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	Misi 7: Membangun infrastuktur yang maju untuk semua wilayah kabupaten Tapanuli Utara
Misi 7 : Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Misi 3: Menciptakan kondisi dinamis, bagi terjaminnya kesatuan dan persatuan yang harmonis.
Misi 8 : Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan system e-government;	Misi 4 : Terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), bagi terjaminnya pelayanan masyarakat yang optimal

Misi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara juga mempunyai keterkaitan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut ini.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 5.3
Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024

No.	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2018-2023	Misi RPJMN Tahun 2020- 2024
1	2	3	4
1.	Misi 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
2.	Misi 2 : Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3.	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
4.	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No.	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2018-2023	Misi RPJMN Tahun 2020- 2024
1	2	3	4
1.	Misi 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
2.	Misi 2 : Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3.	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
4.	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

Misi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara juga mempunyai keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Keselaran Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017- 2037 dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024

Kebijakan RTRW Kab. Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024
1	2
Pengembangan struktur ruang daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
	1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
	2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
	3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
	7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa Mandiri
Pengembangan pola ruang daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
	1 : Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
	6 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Penetapan kawasan strategis daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
	5 : Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
	6 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/ wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

5.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis dan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang jelas tentang tujuan dan sasaran dari setiap misi yang akan dilaksanakan. Tujuan dan sasaran memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan pendukung.

Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, perubahan berbagai kebijakan Nasional, perubahan Perangkat Daerah serta kondisi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran, perubahan dan penyesuaian target Indikator Kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Perubahan dan penyesuaian ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan. Dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga terjadi kesesuaian antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD disampaikan sebagaimana Tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2019 - 2024

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3		4	
1	Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan	1	Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat		Meningkatnya pendapatan masyarakat
		2	Meningkatkan ketahanan pangan	1	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan
				2	Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani
		3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	1	Ketersediaan faktor produksi
				2	Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh Perlindungan Petani
				3	Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Perubahan					
		1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan.	1	Menurunnya Daerah Rentan Pangan
				2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan.

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3		4	
2	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	1	Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah		Peningkatan Jenis Komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi
		2	Peningkatan produk unggulan daerah	1	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk pengembangan produk unggulan daerah
				2	Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulam daerah
				3	Peningkatan jumlah home industri produk unggulan daerah
				4	Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah
Perubahan					
		1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Meningkatkan Nilai Investasi
		2		Meningkatnya PDRB sektor pertanian	
		3		Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	
		4		Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	
		5		Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	
		6		Meningkatkan Koperasi Berkualitas	
3	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1	Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	1	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas
		2	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Perubahan					
		1	Meningkatnya sistem pendidikan daerah	1	Memenuhi standar pendidikan
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
				2	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan
Perubahan					

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3		4	
		1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja
				2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga
5	Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata	1	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas kepariwisataan
Perubahan					
		1	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
6	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan
				2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
				3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
		2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1	Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang
				2	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
		3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah
				2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsive
Perubahan					
		1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan
				2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
				3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
				4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3		4	
		2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang
		3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	1	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah
				2	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsive
7	Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri	1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1	Meningkatkan status desa
Perubahan					
		1	Meningkatnya kapasitas Desa	1	Meningkatkan status desa
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i>	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja
				2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
				3	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Perubahan					
		1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja
				2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
				3	Meningkatkan Pendapatan Daerah
				4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
				5	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
				6	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas
		2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Keberhasilan dari tujuan dan sasaran dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja dengan target yang terukur. Indikator kinerja dan target kinerja merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Perubahan dan penyesuaian target kinerja tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indicator makro pembangunan daerah dan pencapaian visi dan misi daerah. Perubahan Tujuan dan sasaran yang disertai dengan Indikator kinerja dan target kinerja diampaikan sebagaimana Tabel 5.6 berikut ini :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 5.6
Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024

1	Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Tujuan 1.1	Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,45-4,55	1,5	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90				Semua OPD
				Angka kemiskinan	Persen	9,25	9,37	9	8,75	8,5	8,25				Semua OPD
				Gini ratio	Nilai	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				Semua OPD
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp. Juta	27,99	27,246	30,06	32,16	34,46	36,96				Semua OPD
		Tujuan 1.2	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,93	77,84	74,94	74,95	74,97	74,98				Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.2.1	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,93	77,84	74,94	74,95	74,97	74,98				Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.2.2	Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani naik kelas	Persen	50	50	51	52	53	54				Dinas Pertanian
		Tujuan 1.3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	98	99	99	99	100	100				Dinas Pertanian
		Sasaran 1.3.1	Ketersediaan faktor produksi	Persentase ketersediaan faktor produksi	Persen	61	61	62	63	64	65				Dinas PUTR, Dinas Pertanian
		Sasaran 1.3.2	Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Cakupan kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Kelompok	5	5	10	15	20	25				Dinas Pertanian
		Sasaran	Meningkatnya	Cakupan luas	Kecamatan	0	0	4	7	10	15				Dinas Pertanian



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.3.3	perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	lahan yang ditetapkan sebagai LP2B										
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
		Tujuan 1.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai						75,95	76,95	77,95	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.1.1	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen						13,89	9,52	5,16	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.1.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan.	PPH Konsumsi	Skor						88	89	90	Dinas Ketahanan Pangan
2	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Tujuan 2.1	Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah	Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	110	110	120	130	140	150			Dinas Pertanian
				Peningkatan jumlah komoditi unggulan daerah	Ton	9	9	9	10	10	11			Dinas Pertanian
		Sasaran 2.1.1	Peningkatan jenis komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi	Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	110	110	120	130	140	150			Dinas Pertanian
				Peningkatan jumlah/jenis komoditi unggulan daerah	Ton	9	9	9	10	10	11			Dinas Pertanian
		Tujuan 2.2	Peningkatan produk unggulan daerah	Nilai Tambah Produk	Juta Rupiah	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
		Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk	Persentase koperasi sehat	Persen	21,31	21,31	21,31	21,5	21,98	22,45			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pengembangan produk unggulan daerah												
		Sasaran 2.2.2	Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan UMKM terstandarisasi	Produk	14	14	17	20	22	25				Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.2.3	Peningkatan jumlah home industry produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,17	2,17	2,21	2,71	3,02	3,4				Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.2.4	Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,1	15,1	15,5	16,01	16,42	16,83				Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN															
		Tujuan 2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen							2,3-2,8	2,8-3,5	3,5-4,5	Semua OPD
		Sasaran 2.1.1	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Miliar Rupiah							150	175,00	200,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah							2.783,38	2.845,24	2.907,10	Dinas Pertanian
		Sasaran 2.1.3	Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen							2,37	2,4	2,43	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.1.4	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen							15,73	15,85	15,95	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran	Meningkatkan	Pertumbuhan	Persen							0,59	0,87	1,16	Dinas Koperasi,



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2.1.5	Pertumbuhan UMKM	UMKM										UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.1.6	Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen						8	9	10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan 3.1	Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,73	73,47	74,24	74,75	75,26	75,77			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sasaran 3.1.1	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,76	9,85	9,98	10,02	10,24	10,28			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka melek huruf	Persen	99,47	99,67	99,52	99,58	99,64	99,7			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat kunjungan ke perpustakaan	Persen	34	34	34,17	35,94	36,05	36,11			Dinas Perpustakaan
		Tujuan 3.2	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,61	68,63	68,77	68,92	69,07	69,23			Dinas Kesehatan
		Sasaran 3.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,61	68,63	68,77	68,92	69,07	69,23			Dinas Kesehatan
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak	4	4	4	4	3	3			Dinas PPKBPPPA
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
		Tujuan 3.1	Meningkatnya sistem pendidikan daerah	Indeks Pendidikan	Poinmt						0,71	0,72	0,725	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sasaran 3.1.1	Memenuhi standar pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun						10,02	10,24	10,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun						13,72	13,75	13,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3. Rasio	Nilai						0,45	0,46	0,47	Dinas



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			perpustakaan per Satuan Penduduk (per 1.000)											Perpustakaan
		Tujuan 3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Point						0,752	0,755	0,757	Dinas Kesehatan
		Sasaran 3.2.1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	Tahun						68,92	69,07	69,23	Dinas Kesehatan, RSUD Tarutung
				2. Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Total Fertility Rate)	Jumlah Anak						3,7	3,6	3,5	Dinas PPKBPPKB
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Tujuan 4.1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,72	2,94	1,67	1,61	1,55	1,5			Dinas Ketenagakerjaan
		Sasaran 4.1.1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,72	2,94	1,67	1,61	1,55	1,5			Dinas Ketenagakerjaan
		Sasaran 4.1.2	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan	Persentase wirausaha pemuda pemula	Persen	0,008	0,008	0,012	0,016	0,02	0,024			Dinas Pemuda dan Olahraga
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
		Tujuan 4.1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen						2,00-1,50	2,00-1,50	2,00-1,50	Dinas Ketenagakerjaan
		Sasaran	Meningkatkan	Tingkat	Persen						82,23	82,25	82,29	Dinas



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4.1.1	produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)										Ketenagakerjaan
		Sasaran 4.1.2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen						48,52	52,15	53,42	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Cakupan pembinaan olahraga	Persen						41,71	47,22	48,39	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Meningkatnya Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Tujuan 5.1.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	158.000	141.350	163.000	165.000	170.000	175.000			Dinas Pariwisata
		Sasaran 5.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Persen	30	30	36	40	46	50			Dinas Pariwisata dan PUTR
			Lama tinggal	Hari		0.5	0.7	0.8	0.9	1				Dinas Pariwisata
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
		Tujuan.5.1	Meningkatnya Jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang						143.350	144.350	145.350	Dinas Pariwisata
		Sasaran 5.1.1	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen						35,50	39,00	40,50	Dinas Pariwisata
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Tujuan 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai		60,07	62,14	63,51	64,72	66,05			Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan
		Sasaran	Meningkatnya	Persentase	Persen	56,54	56,54	57,2	57,85	58,5	61,03			Dinas PUTR



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6.1.1	kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	panjang jalan dalam kondisi mantap dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik										
		Sasaran 6.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	81	84,51	82	83	85	87			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 6.1.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase fasilitas keselamatan transportasi	Persen	21,57	21,57	22,5	24	25,5	27			Dinas Perhubungan
		Tujuan 6.2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen	100	100	100	100	100	100			Dinas PUTR
		Sasaran 6.2.1	Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Jumlah regulasi tentang tata Ruang	Regulasi RTR (Peraturan Daerah/Perbup)	4	1	1	1	1	1			Dinas PUTR
		Sasaran 6.2.2	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Cakupan ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,81	85,14	84,81	85,76	86,71	87,66			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tujuan 6.3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	70,14	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22			Dinas Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.3.1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	70,14	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22			Dinas Lingkungan Hidup



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran 6.3.2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	Persentase desa tangguh bencana	Persen	20	-	40	60	90	100			BPBD
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
		Tujuan 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai						59,17	59,74	60,44	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan
		Sasaran 6.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen						79,03	79,73	81	Dinas PUTR
		Sasaran 6.1.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen						85,76	86,71	87,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 6.1.3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen						56	58,5	61,25	Dinas Perhubungan
		Sasaran 6.1.4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen						62	64	66	Dinas PUTR
		Tujuan 6.2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen						40	60	70	Dinas PUTR
		Sasaran 6.2.1	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen						40	60	70	Dinas PUTR
		Tujuan 6.3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai						72,75	73,05	73,35	Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		daerah yang baik												
		Sasaran 6.3.1	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai						72,75	73,05	73,35	Dinas Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.3.2	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai						116	114	112	BPBD
7	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Tujuan 7.1	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	0	0	1	2			Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Sasaran 7.1.1	Meningkatkan status desa	a. Desa sangat tertinggal	Desa	11	9	5	3	1	0			Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
				b. Desa tertinggal	Desa	129	138	90	47	4	0			Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
				c. Desa berkembang	Desa	86	94	116	146	178	180			Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
				d. Desa maju	Desa	15	0	30	45	57	59			Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
				e. Desa mandiri	Desa	0	0	0	0	1	2			Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
		Tujuan 7.1	Meningkatnya kapasitas Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai						0,60	0,61	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Sasaran 7.1.1	Meningkatkan status desa	Jumlah Desa Naik Status	Desa						26	30	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Tujuan 8.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	C	B	B	B			Semua OPD



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang baik dan bersih												
	Sasaran 8.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB				Semua OPD
	Sasaran 8.1.2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				Semua OPD
	Sasaran 8.1.3	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi (akumulasi)	Persen	33	55	77	87	100	100				Dinas Komunikasi dan Informatika
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN														
	Tujuan 8.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai							CC	B	B	Sekretariat Daerah
	Sasaran 8.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai							B	BB	BB	Inspektorat
	Sasaran 8.1.2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini							WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Sasaran 8.1.3	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen							-1,5-0,5	0,5-1,5	1,5-2,1	Badan Pendapatan Daerah
	Sasaran 8.1.4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	Nilai							Baik	Baik	Baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi dan Informasi
		Sasaran 8.1.5	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan antar Dokumenn Perencanaan Pembangunan	Persen						100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Sasaran 8.1.6	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai						38	39	40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Tujuan 8.2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen						100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Sasaran 8.2.1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen						100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase penurunan gangguan gangguan trantibum	Persen						5	5	5	Satuan Polisi Pamong Praja



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara berkelanjutan.

6.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Hal ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran. Gambaran strategi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
VISI Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata		
Misi 1 Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan		
Meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan	1. Menurunnya daerah rentan pangan	Menurunkan Desa Rentan Pangan
	2. Meningkatkan diversifikasi pangan	Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berkualitas
Misi 2 Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatkan nilai investasi	1. Peningkatan kemudahan berinvestasi
	2. Meningkatkan PDRB sektor pertanian	2. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
	3. Meningkatkan kontribusi PRDB sektor industri pengolahan	Meningkatkan sarana dan prasarana industri pengolahan produk daerah.
	4. Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan
	5. Meningkatkan pertumbuhan UMKM	1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan pengembangan kemitraan
	6. Meningkatkan koperasi berkualitas	2. Meningkatkan pembinaan Home Industry Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan inovasi koperasi
Misi 3 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		
1. Meningkatnya sistem pendidikan daerah	1. Memenuhi standar pendidikan	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan
		2. Meningkatkan minat baca masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
		2. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan		
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM	1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	1. Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja
		2. Menjalin hubungan kerjasama industrial
	2. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	1. Meningkatkan kompetensi kepemudaan
		2. Meningkatkan kompetensi keolahragaan
Misi 5 Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata		
Meningkatnya jumlah wisatawan	Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	1. Meningkatkan jumlah dan daya tarik obyek wisata
		2. Mengembangkan ekonomi Kreatif
		3. Meningkatkan Promosi kepariwisataan
		4. Meningkatkan Kapasitas SDM Kepariwisata
Misi 6 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup		
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	1. Meningkatkan fungsi dan kondisi jalan baik
		2. Meningkatkan interkoneksi menuju ke sentra produksi dan destinasi wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
	2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	1. Meningkatkan akses dan pelayananan air minum
		2. Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak
		3. Meningkatkan pelayanan dan perumahan layak
		4. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni
	3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	1. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan
		2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
	4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
		2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air
2. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	1. Menyusun regulasi terkait tata ruang 2. Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTR
3. Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	1. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	2. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsive	1. Meningkatkan jumlah desa tangguh bencana
		2. Meningkatkan penanganan bencana
Misi 7 Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri		
Meningkatnya kapasitas Desa	Meningkatkan status desa	1. Meningkatkan penataan desa
		2. Meningkatkan Kerjasama Desa
		3. Meningkatkan Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa
		4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Misi 8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government		
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan
	2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan keuangan
	3. Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
	4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi
		2. Meningkatkan sistem informasi daerah
		3. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
	5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
	6. Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	1. Meningkatkan perencanaan kebutuhan ASN
		2. Meningkatkan manajemen kinerja ASN
		3. Meningkatkan pembinaan karir dan kompetensi
4. Optimalisasi sistem pendukung kepegawaian		
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
		2. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan akan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, namun tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan, artinya program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua kebijakan pembangunan

daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2019 - 2024 digambarkan sebagai berikut :

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung akses, kualitas dan kapasitas pelayanan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis, seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, pemetaan pengembangan komoditi unggulan pertanian di setiap kecamatan sebagai acuan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit pertanian dan pupuk bersubsidi, melaksanakan percepatan pembangunan di perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa serta penyediaan infrastruktur perdesaan yang memadai dan dapat menstimulasi penciptaan kegiatan ekonomi pedesaan, pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta pembinaan terhadap generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya terhadap seni budaya dan olah raga menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kelurahan/desa sampai tingkat kabupaten serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Penanganan permasalahan pembangunan terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Demikian juga halnya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur,

khususnya infrastruktur jalan ke lokasi wilayah daerah strategis seperti menuju lokasi wisata dan sentra-sentra produksi serta infrastruktur irigasi terus dilaksanakan secara konsisten, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tidak produktif, pelaksanaan pengembangan komoditi unggulan di setiap kecamatan atau wilayah, peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan masyarakat desa terus dilaksanakan.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender dan peningkatan peran generasi muda dalam pengembangan kreativitas. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Pemulihan dampak Pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, perbaikan pelayanan kesehatan daerah, perbaikan sistem ketahanan bencana, perbaikan pelayanan perlindungan sosial yang terdampak akibat terjadinya pandemik. Kebijakan tahun ke tiga juga diarahkan kepada pembangunan daerah yang lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pemerintahan diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

6.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di

masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah pembangunan daerah, penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti daerah kawasan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan.

Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19 juga masih terus dilanjutkan dengan terus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi lainnya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

6.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2024)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada Tabel 6.2 berikut ini :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
Misi 1							
Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan							
1	Meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan	1	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	1	Menurunnya Desa Rentan Pangan	1	Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian
						2	Meningkatkan Produksi dan pemasaran Hasil Perikanan Budidaya
						3	Menurunkan Desa Rawan Pangan
		2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan	1	Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berkualitas	1	Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi dan Sehat
						2	Meningkatkan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan
Misi 2							
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal							
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Meningkatkan Nilai Investasi	1	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	1	Meningkatkan Informasi dan Kemudahan Bagi Pengusaha dalam Penanaman Modal
						2	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tepat Waktu
				2	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Meningkatkan Sistem Informasi Daerah
						2	Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi
		2	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Produksi	1	Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Komoditi Unggulan Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
		3	Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	2	Meningkatkan sarana dan prasarana Industri Pengolahan Produk Daerah	1	Peningkatan daya saing Produk industri Daerah
						2	Meningkatkan Kapasitas Home Industri
						3	Melakukan Pengkajian dan Pembangunan Industri Pakan Ternak
		4	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	3	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan	1	Meningkatkan penataan/ pembangunan Pasar Tradisional
						2	Meningkatkan Tera dan Tera Ulang
						3	Peningkatan Penggunaan dan Promosi Produk Unggulan daerah
		5	Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	1	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan pengembangan kemitraan	1	Memberdayakan Usaha Mikro melalui Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
						2	Memfasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
				2	Meningkatkan pembinaan Home Industri	1	Meningkatkan Kapasitas Home Industri
		6	Meningkatkan Koperasi Berkualitas	1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Inovasi Koperasi	1	Peningkatan Kelembagaan Digitalisasi Koperasi
						2	Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembaharuan Koperasi
Misi 3							
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan							
1	Meningkatnya sistem pendidikan daerah	1	Memenuhi standar pendidikan	1	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah	1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
					pertama dan anak usia dini serta kesetaraan		
						2	Meningkatkan SDM Pendidikan
						3	Melakukan Kajian Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
				2	Meningkatkan minat baca masyarakat	1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan
						2	Meningkatkan Kapasitas SDM Kesehatan
						3	Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
						4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat
				2	Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana	1	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana
Misi 4 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan							
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM	1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	1	Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja	1	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Tenaga Kerja
				2	Menjalin Hubungan Kerjasama Industrial	1	Meningkatnya Hubungan Industrial
		2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	1	Meningkatkan kompetensi kepemudaan	1	Meningkatkan Pembinaan Pemuda
				2	Meningkatkan kompetensi keolahragaan	1	Meningkatkan Pembinaan Olah Raga
Misi 5 Meningkatkan Destinasi Wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam, budaya, rohani dan agrowisata							



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
1	Meningkatnya jumlah wisatawan	1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	1	Meningkatkan jumlah dan daya tarik obyek wisata	1	Meningkatkan sarana dan Prasarana Kepariwisata
				2	Meningkatkan Promosi kepariwisataan	1	Menyelenggarakan even-even pariwisata
				3	Meningkatkan Kapasitas SDM Kepariwisata	1	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kepariwisata
				4	Mengembangkan ekonomi Kreatif		
Misi 6 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	1	Meningkatkan interkoneksi jalan dan jembatan sampai tingkat desa dan menuju ke sentra produksi dan destinasi wisata	1	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
		2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	1	Meningkatkan Akses dan Pelayanan Pelayananan Air Minum	1	Meningkatkan Kapasitas dan Distribusi Pelayanan Air Minum
				2	Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak	1	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung
				3	Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	1	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				4	Meningkatkan Pelayanan dan Perumahan Layak	1	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh
		3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	1	Meningkatkan Keamanan Transportasi Darat dan Danau	1	Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
		4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi untuk mendukung pertanian
				2	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air	1	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan		Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang		Menyusun regulasi terkait tata ruang		Menyusun RDTR Kecamatan
					Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTR		Melaksanakan Pengendalian Pembangunan sesuai RTR
3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	1	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah		Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Meningkatkan Penanganan Pencemaran Air dan Kerusakan Lahan serta mengurangi alih fungsi lahan
		2	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif	1	Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	1	Penguatan Kapasitas Masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana
						2	Meningkatkan Penanganan Bencana
Misi 7							
Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri							
1	Meningkatnya kapasitas Desa	1	Meningkatkan status desa	1	Meningkatkan Penataan Desa	1	Melaksanakan Penataan Desa
				2	Meningkatkan Kerjasama Desa	1	Meningkatkan Kerja Sama antar desa
				3	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa
				4	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Desa
Misi 8							
Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri							



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1	Meningkatkan Kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tata laksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	1	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Administrasi dan Umum dengan Meningkatkan Kualitas tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi)Penataan Organisasi, Tata Laksana, Tertib Regulasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
						2	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra
						3	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan
						4	Meningkatkan Peran Pengawas dalam Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
		2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan	1	Meningkatkan Koordinasi dan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan	1	Meningkatkan Tata kelola Keuangan
						2	Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik daerah
						3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		3	Meningkatkan pendapatan daerah	1	Meningkatkan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	1	Meningkatkan penerimaan pajak daerah
						2	Meningkatkan penerimaan retribusi
						3	Meningkatkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
							daerah yang dipisahkan
						4	Meningkatkan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah
		4	Meningkatkan kualitas pelayanan public	1	Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi		Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi
				2	Meningkatkan Sistem Informasi Daerah	2	Meningkatkan Kualitas Informasi Daerah
				3	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan kepada Masyarakat	3	Menetapkan Prosedur Operasi Standar Pelayanan Publik
				2	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	1	Meningkatkan Informasi dan Kemudahan Bagi Pengusaha dalam Penanaman Modal
						2	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tepat Waktu
						3	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah
						4	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan
						5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		5	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan dan Pemerintah Atasan
				2	Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2		3		4		5
		6	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas		Perencanaan Pengembangan Karier ASN	1	Pengembangan Karir ASN berdasarkan kinerja
					Pemetaan kompetensi ASN	2	Meningkatkan profesionalitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	2	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Meningkatkan Koordinasi Penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.	1	Meningkatkan koordinasi penanganan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
				2	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik.	1	Melaksanakan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik.

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk pencapaian target visi misi pembangunan. Program pembangunan daerah yang bersifat prioritas ditentukan sesuai dengan keterkaitannya dalam pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat disampaikan pada Tabel 6.3 berikut ini.



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1 :										
Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan										
Tujuan 1.1										
Meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	75,99	77,84	74,95	75,95	76,95	77,95	77,95	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 1.1.1										
Menurunkan Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan rentan Pangan	Persen	NA	NA	18,25	13,89	9,52	5,16	5,16	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
Program										
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infra struktur kemandirian pangan yang di fasilitasi	%	NA	NA	14,29	28,57	28,57	28,57	28,57	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan									Dinas Pertanian
	- Padi sawah	Ton	113.938	118.205	160,790	118.400	118.600	118.800	118.800	
		Kw/Ha	49,6	49,6	59,32	49.63	49.64	49.65	49.65	
	- Padi ladang	Ton	66.275	75.787	11.000	70.200	70.400	70.600	70.600	
		Kw/Ha	29,66	29,66	26,57	29,68	29,69	29,69	29,69	
	- Jagung	Ton	89.087	124.117	27.000	85.000	88.000	91.000	91.000	
		Kw/Ha	51,73	51,73	49,58	51,82	51,86	51,89	51,89	
	- Produksi Daging	Ton	1.396	2.281	2.335	2.387	2.437	2.487	2.487	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200	200	200	200	200	200	200	Dinas Ketahanan Pangan
	Luas Lahan Budidaya	Ha	5,5	23,7	10	20	25	30	30	
	Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	ekor	589.804	1.198.770	750.601	819.161	891.577	963.235	963.235	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penanganan Kerawanan pangan	Jumlah Desa/Kelurahan rentan pangan yang ditangani	Desa/Kelurahan	NA	NA	46	35	24	13	13	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 1.1.2										
Meningkatkan diversifikasi pangan	PPH Konsumsi	Skor	85	85	87	88	89	90	90	Dinas Ketahanan Pangan
Program										
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Daerah	Persen	3,19	37,97	3,34	3,76	4,16	4,57	4,57	Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Persen	1 1,63	4,65	13,95	18,60	23,26	27,91	27,91	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi	Persen	25	0	16	20	28	36	36	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 2 :										
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal										
Tujuan 2.1										
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	1,5	1,8-2,3	2,3-2,8	2,8-3,5	3,5-4,5	3,5-4,5	Semua OPD
Sasaran 2.1.1										
Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Miliar Rupiah	951,00	380,00	125,00	150,00	175,00	200,00	200,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program										
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah	22	20	30	40	45	50	50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Persen	87	88	89	90	91	92	92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2.1.2										
Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	2.601,04	2.660,74	2.721,52	2.783,38	2.845,24	2.907,10	2.907,10	Dinas Pertanian



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program										
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	38	39	40	42	44	46	46	Dinas Pertanian
Sasaran 2.1.3										
Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,23	2,27	2,21	2,37	2,40	2,43	2,43	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program										
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	NA	20	20	30	35	40	40	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2.1.4										
Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,26	15,68	15,5	15,73	15,85	15,95	15,95	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program										
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	58	46	43	66,67	73,33	73,33	73,33	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Persen	NA	25,8	60	30	35	40	40	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pelaksanaan event promosi	Persen	NA	NA	12	33,33	33,33	50	50	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2.1.5										
Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Persen	2,71	482,01	17,46	0,59	0,87	1,16	1,16	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program										
Program pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	0,05	0,08	0,15	0,27	0,36	0,47	0,47	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persenatase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk usaha	Persen	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,45	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2.1.6										
Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	4	6	7	8	9	10	10	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program										
Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Persen	NA	NA	20	23	24	25	25	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen	0,42	1,56	2,58	3,34	4,15	5,04	5,04	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan	Persen	NA	1,98	4,59	4,67	4,76	4,85	4,85	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Misi 3 :										
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan										
Tujuan 3.1										
Meningkatnya sistem pendidikan daerah	Indeks Pendidikan	Persen	NA	NA	NA	71,51	72,33	72,54	72,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
Sasaran 3.1.1										
Memenuhi standar pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,71	9,85	9,98	10,02	10,24	10,28	10,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,69	13,70	13,72	13,75	13,78	13,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Rasio perpustakaan per Satuan Penduduk (per 1.000)	Nilai	0,42	0,42	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	Dinas Perpustakaan
Program										
Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	16,20	16,20	16,28	16,30	16,32	16,34	16,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	82,04	79,17	79,19	79,21	79,23	79,25	79,25	
	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi	Persen	16,67	16,67	16,67	33,33	50	66,67	66,67	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	12,29	2,74	2,78	2,82	2,86	2,90	2,90	Dinas Perpustakaan
Tujuan 3.2										
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	NA	NA	NA	75,26	75,49	75,74	75,74	Dinas Kesehatan
Sasaran 3.2.1										
Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	68,46	68,63	68,77	68,92	69,07	69,23	69,23	Dinas Kesehatan, RSUD Tarutung
	2. Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah anak	4	4	4	3,7	3,6	3,5	3,5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Program										
Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Tarutung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan jenis tenaga kesehatan	Persen	50	42,85	42,85	42,85	57	76	76	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan Minuman yang dibidan agar memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	Persen	85	85	85	86	87	88	88	Dinas Kesehatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak Terlayani (Unmeet Need)	Persen	21,30	21,30	21,20	20,82	20,71	20,60	20,60	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Misi 4 :										
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan										
Tujuan 4.1										
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,33	2,94	2,89	2,00-1,50	2,00-1,50	2,00-1,50	2,00-1,50	Dinas Ketenagakerjaan
Sasaran 4.1.1										
Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	81,78	81,82	82,20	82,23	82,25	82,29	82,29	Dinas Ketenagakerjaan
Program :										
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan	Persen	69,91	12,50	29,00	32,80	35,56	40,00	40,00	Dinas Ketenagakerjaan
Sasaran 4.1.2										
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	33,33	43,66	46,17	48,52	52,15	53,42	53,42	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	37,24	32	41,42	41,71	47,22	48,39	48,39	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program :										
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing	Orang	75	6	47	67	114	140	140	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase pembinaan organisasi kepemudaan	Persen	0	0	11,54	15,38	19,23	23,08	23,08	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	177	42	42	123	126	129	129	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 5 :										
Meningkatkan Destinasi Wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam, budaya, rohani dan agrowisata										
Tujuan 5.1										
Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	155.000	141.350	163.000	143.350	144.350	145.350	145.350	Dinas Pariwisata



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 5.1.1										
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	persen	20,75	28,50	33,50	35,50	39,0	40,50	40,50	Dinas Pariwisata
Program :										
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata yang dibenahi	Destinasi	1	1	3	2	6	5	5	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Event/promosi dan pemasaran kepariwisataan yang diikuti dan dilaksanakan	Event/Pro mosi	16	7	17	20	21	22	22	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	9	24	30	31	33	36	36	Dinas Pariwisata
Misi 6 :										
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup										
Tujuan 6.1										
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai	40,56	56,61	62,14	59,17	59,74	60,44	60,44	Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Lingdup, BPBD
Sasaran 6.1.1										
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	55,80	56,54	57,20	79,03	79,73	81,00	81,00	Dinas PUTR
Program :										
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kondisi mantap	Persen	64,75	66,68	66,75	69,05	69,45	69,95	69,95	Dinas PUTR
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	82	84,61	85,38	89,00	90,00	92,05	92,05	Dinas PUTR
Sasaran 6.1.2										
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	82,35	84,51	82,00	85,76	86,71	87,66	87,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program :										
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	28,83	31,26	33,69	75,60	76,80	77,80	77,80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	79,5	89,22	92,71	93,71	94,71	95,71	95,71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	55	60	65	84,60	85,65	86,70	86,70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	82,35	84,51	84,37	85,38	86,39	87,40	87,40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	9,25	7,94	7,44	6,94	6,44	5,94	5,94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 6.1.3										
Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	20,25	51,50	22,50	56,00	58,50	61,25	61,25	Dinas Perhubungan
Program :										
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persen	30	31	33	35	37	40	40	Dinas Perhubungan
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	30	55	60	65	70	75	75	Dinas Perhubungan
	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	20	20	22	24	27	30	30	Dinas Perhubungan
Sasaran 6.1.4										
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	N/A	N/A	60	62	64	66	66	Dinas PUTR
Program :										
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi	Persen	15	22,0	22,02	22,04	22,06	22,08	22,08	Dinas PUTR



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 6.2										
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen	100	100	100	40	60	70	70	Dinas PUTR
Sasaran 6.2.1										
Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	20	25	35	40	60	70	70	Dinas PUTR
Program :										
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Dokumen	1	1	1	4	5	6	6	Dinas PUTR
Tujuan 6.3										
Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,12	70,14	70,16	72,75	73,05	73,35	73,35	Dinas Lingkungan Hidup, BPBD
Sasaran 6.3.1										
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,12	70,14	70,16	72,75	73,05	73,35	73,35	Dinas Lingkungan Hidup
Program:										
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	80	80,5	81	53,81	53,91	54,01	54,01	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70	71	72	75,50	76,50	77,50	77,50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	88,46	88,56	88,76	88,86	88,96	89,06	89,06	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 6.3.2										
Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	118	118	118	116	114	112	112	BPBD
Program :										
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana	Persen	0	0	0	1,66	3,32	6,64	6,64	BPBD
	Respon Time mencapai lokasi bencana	Jam	2x24	2x24	2x24	2x24	2x24	2x24	2x24	BPBD
	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	Persen	85	81	10	65	70	75	75	BPBD



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 7										
Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri										
Tujuan 7.1										
Meningkatnya kapasitas Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,5677	0,5818	0,5904	0,6000	0,6100	0,6200	0,6200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Sasaran 7.1.1										
Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	N/A	N/A	23	26	30	35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program										
Program Penataan Desa	Cakupan fasilitasi penataan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Misi 8 :										
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government										
Tujuan 8.1										
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	C	CC	B	B	B	Sekretariat Daerah
Sasaran 8.1.1										
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	Inspektorat
Program :										
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	93	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	NA	10	10	10	10	10	10	Inspektorat



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level maturitas SPIP	Level	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Inspektorat
	Level Kapabilitas APIP	Level	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Inspektorat
Program Administrasi Umum	Cakupan pemenuhan administrasi umum	Persen	N/A	N/A	90	92	95	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan program perekonomian dan pembangunan	Persen	N/A	98,2	98,4	98,6	98,8	99	99	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Aparatur	Capaian pengembangan aparatur	Persen	-	93,09	94,42	95,77	97,16	98,58	98,58	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat struktural	Persen	20	22	23	24	25	26	26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
	Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Persen	10	11	12	13	14	15	15	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase agenda kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	42,85	43,75	60	75	75	75	75	Sekretariat DPRD
Sasaran 8.1.2										
Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua Perangkat Daerah
Program										
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data asset yang akurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran 8.1.3										
Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen				-1,5-0,5	0,5-1,5	1,5-2,1	1,5-2,1	Badan Pendapatan Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan pajak daerah	Persen				100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase capaian retribusi daerah	Persen				100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase capaian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Persen				100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase capaian pendapatan lain-lain yang sah	Persen				100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 8.1.4										
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program										
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi per tahun	Persen				94	95	96	96	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan aplikasi e-goverment yang terintegrasi	Persen				38	40	43	43	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin dan orang tidak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	Persen	50	52	70	75	80	82	82	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti	Persen	2	2	4	6	8	10	10	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	60	65	70	72	75	75	75	Dinas Sosial
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	90,85	98	99	99	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	Persen	98,49	87,26	95,77	99	99	99	99	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Kepemilikan Kartu Indetitas Anak	Persen	12	10	35	40	50	55	55	
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun	Persen	69,04	85	88	90	95	98	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
	Cakupan Penerbitan Akta Kawin	Persen	76,05	79,27	82	85	89	92	92	
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persen	85,86	100	100	100	100	100	100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan public yang dilaksanakan	Persen				75	80	85	85	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif	Persen				80	85	90	90	Kecamatan
Sasaran 8.1.5										
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan antar Dokumenn Perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program										
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2. Persentase hasil monitoring terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran 8.1.6										
Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	36,43	37,29	38	39	40	40	Badan Kepegawaian Daerah dan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pengembangan SDM
Program										
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian dan tingkat kelengkapan data informasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	20	10	10	11	12	13	13	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Tujuan 8.2										
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja,
Sasaran 8.2.1										
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	NA	NA	NA	5	5	5	5	Satuan Polisi Pamong Praja,
Program										
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen		100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir 2024	OPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketetraman dan ketertiban umum yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelaksanaan penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja



BAB VII

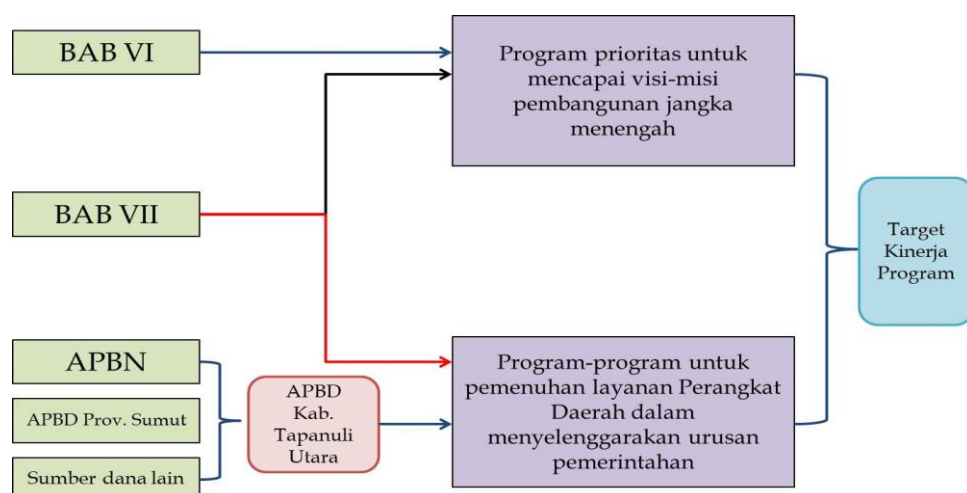
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Program pembangunan merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan pagu program indikatif yang merupakan jumlah anggaran tersedia untuk mendanai program pembangunan tahunan. Indikasi rencana program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan sumber-sumber pendanaan lainnya) sebagaimana diuraikan pada Gambar 7.1.

Gambar 7.1
Indikasi Program Pembangunan RPJMD



Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "money follow program". Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep "money follow function" selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Dalam konsep penyusunan pagu indikatif dengan konsep "money follow program" tidak bisa secara ideal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib seperti pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk Pendidikan, Kesehatan, Dana Desa serta peruntukan lainnya sehingga potensi dana yang bisa diarahkan untuk mendanai program-program prioritas daerah menjadi sangat terbatas.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan menjadi salah satu potensi dana yang besarnya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah. Dalam memproyeksikan Dana Alokasi Khusus sering memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara rencana dengan realisasi. Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan dialokasikan oleh Pemerintah setelah APBN ditetapkan yang besaran nilainya akan disesuaikan dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana yang dapat dialokasikan secara leluasa untuk pendanaan program-program yang bersifat prioritas, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan masih rendah dan tingkat kenaikannya yang relatif terbatas akan mempengaruhi tingkat capaian target pembangunan daerah.

Bahwa sampai dengan saat ini pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) masih terus terjadi telah mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mengatasi dampaknya. Pengalokasian dana untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan. Kebijakan ini akan mempengaruhi tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Secara umum alokasi belanja yang bersifat pagu indikatif dipergunakan untuk pemenuhan belanja wajib yang bersifat mengikat, program prioritas daerah terkait

pencapaian visi dan misi, dan belanja prioritas lainnya yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Perumusan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Realisasi Tahun Anggaran 2020, Target Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2022 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut ini:



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 7.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI	TARGET	PROYEKSI		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	1.290.868.909.824,44	1.350.525.803.624,00	1.299.022.919.206,00	1.326.803.457.579,00	1.347.423.200.982,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	133.375.094.965,44	128.523.314.000,00	140.441.969.888,00	145.356.847.479,00	150.972.716.488,33
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.678.100.705,83	19.167.598.082,00	29.091.047.443,00	33.021.550.729,00	37.072.197.248,33
4.1.2	Retribusi Daerah	4.601.554.356,83	6.427.857.200,00	6.901.860.000,00	7.118.520.750,00	8.316.743.240,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.557.286.367,00	7.086.082.639,00	8.607.286.366,00	9.235.000.000,00	8.837.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.538.153.535,78	95.841.776.079,00	95.841.776.079,00	95.981.776.000,00	96.746.776.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.078.788.903.404,00	1.151.845.946.942,00	1.141.835.006.636,00	1.164.560.660.100,00	1.177.504.542.494,00
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.033.949.031.807,00	1.105.839.096.306,00	1.094.328.156.000,00	1.113.679.821.000,00	1.124.104.895.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	809.570.224.807,00	884.115.485.306,00	905.953.328.000,00	916.663.004.000,00	927.088.078.000,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	631.752.026.043,00	664.818.067.306,00	646.563.315.000,00	656.892.915.000,00	666.227.992.000,00
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.689.499.043,00	67.181.908.306,00	48.754.353.000,00	55.540.353.000,00	60.875.430.000,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	606.062.527.000,00	597.636.159.000,00	597.808.962.000,00	601.352.562.000,00	605.352.562.000,00
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	177.818.198.764,00	219.297.418.000,00	259.390.013.000,00	259.770.089.000,00	260.860.086.000,00
4.2.1.3	Dana Insentif Daerah	32.361.990.000,00	29.706.794.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00	188.374.828.000,00	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	42.710.588.508,00	46.006.850.636,00	47.506.850.636,00	50.880.839.100,00	53.399.647.494,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	42.710.588.508,00	46.006.850.636,00	47.506.850.636,00	50.880.839.100,00	53.399.647.494,00



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO	URAIAN	REALISASI	TARGET	PROYEKSI		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	4	5	6	7	8
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83.096.542.682,00	70.156.542.682,00	16.745.942.682,00	16.885.950.000,00	18.945.942.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	12.745.942.682,00	16.745.942.682,00	16.885.950.000,00	18.945.942.000,00
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	66.350.600.000,00	57.410.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 7.2
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI	TARGET	PROYEKSI		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	4	5	6	7	8
5	BELANJA	1.655.119.008.883,78	1.599.204.316.523,00	1.330.616.919.206,00	1.348.397.457.579,01	1.369.017.200.982,33
5.1	BELANJA OPERASI	930.233.631.381,78	1.006.045.412.603,00	926.776.358.237,00	930.733.905.611,40	943.092.394.319,53
5.1.1	Belanja Pegawai	540.259.856.089,84	591.728.687.359,00	592.594.828.401,00	595.557.802.543,01	598.535.591.555,72
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	373.527.304.868,94	344.148.741.624,00	261.831.625.587,00	253.976.676.819,39	246.357.376.514,81
5.1.3	Belanja Hibah	11.295.930.923,00	68.396.472.820,00	66.671.920.063,00	79.671.920.063,00	96.671.920.063,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.279.500.000,00	1.771.510.800,00	1.527.506.186,00	1.527.506.186,00	1.527.506.186,00
5.1.6	Belanja Bunga	3.871.039.500,00	0	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00
5.2	BELANJA MODAL	418.830.375.502,00	325.489.139.720,00	133.071.862.540,00	144.287.166.554,32	149.914.657.395,38
5.2.1	Belanja Tanah	630.000.000,00	3.755.168.962,00	6.061.998.000,00	6.122.617.980,00	6.153.231.069,90
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	96.891.418.818,00	46.446.341.063,00	31.675.651.600,00	31.992.408.116,00	32.152.370.156,58
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	105.634.474.461,00	109.169.060.628,00	44.068.615.166,00	44.509.301.317,66	44.731.847.824,25
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.494.501.023,00	165.461.282.267,00	50.336.989.874,00	60.724.945.161,66	65.934.624.895,76
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.179.981.200,00	657.286.800,00	928.607.900,00	937.893.979,00	942.583.448,90
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.110.320.300,00	10.474.955.600,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	268.944.681.700,00	257.194.808.600,00	260.768.698.429,00	263.376.385.413,29	266.010.149.267,42
5.4.1	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	0	0	2.899.290.744,00	2.928.283.651,44	2.957.566.487,95
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	268.944.681.700,00	257.194.808.600,00	257.869.407.685,00	260.448.101.761,85	263.052.582.779,47

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara (Data diolah)

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Penggunaan Program yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Penggunaan Program dan Pendanaan untuk Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk Tahun 2022 – 2024 Keputusan Menteri Dalam Negeri yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2021 disajikan pada Tabel 7.3 dan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 7.4 berikut ini :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 7.3
Program Prioritas yang disertai Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Target Pendanaan Tahun 2021
Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				530.929.931.499,43		473.173.058.796,00	
1.01	Pendidikan				140.914.068.838,34		473.173.058.796,00	
1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN				140.914.068.838,34		473.173.058.796,00	
1.01.1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN				140.012.900.034,34		473.173.058.796,00	
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	82,34	86,82	2.042.133.379,00			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	76,87	78,67	273.261.819,00			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90,6	90,87	33.137.500,00			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	92,49	95,95	246.626.000,00			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.16	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	60	63,91	50.896.331.063,34			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	89,67	89,8	10.304.137.100,00			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	98,03	98,06	76.970.916.477,00			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.19	Program Pendidikan Non Formal		0	0	0			Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.20	Program Pengembangan Nilai Budaya		69,98	73,76	147.525.500,00			Dinas Pendidikan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	331.488.887.286,00	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD				16,28	141.469.171.510,00	Dinas Pendidikan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				79,2		
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi				33		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi				3 Obyek	215.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan				139.007.993.544,72		315.128.307.721,00	
1.02.1.02.01	DINAS KESEHATAN				56.181.891.269,60		191.786.071.396,00	
1.02.1.02.01.01	DINAS KESEHATAN				56.181.891.269,60		191.786.071.396,00	
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	97,38	99,18	4.115.231.550,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	96,84	97,11	197.077.249,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	0	0			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	73,92	77,84	10.507.900,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.15	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	98,08	98,21	233.938.600,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.16	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Indeks Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	63,58	63,6	869.005.400,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.17	Program peningkatan sumber daya kesehatan	Indeks Sumber Daya Kesehatan	93,25	97,03	2.959.617.593,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.18	Program peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	53,66	57,44	47.796.512.977,60			Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	64.699.994.840,00	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar				100	126.046.719.056,00	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase puskesmas				40	414.798.800,00	Dinas Kesehatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sumber Daya Manusia Kesehatan	yang memiliki minimal sembilan jenis tenaga kesehatan						
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan Minuman yang dibidan agar memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) dan Doog Manufacture				100	584.558.700,00	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase posyandu aktif				85	40.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02	RSU DAERAH TARUTUNG				82.826.102.275,12		123.342.236.325,00	
1.02.1.02.02.01	RSU DAERAH TARUTUNG				82.826.102.275,12		123.342.236.325,00	
1.02.1.02.02.01.15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan mutu pelayanan dan manfaat	131,06	132,86	79.287.944.323,12			RSUD Tarutung
1.02.1.02.02.01.16	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit	97,49	97,76	3.538.157.952,00			RSUD Tarutung
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	20.250.541.186,00	RSUD Tarutung
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar				100	103.091.695.139,00	RSUD Tarutung
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				167.965.230.773,11		140.082.819.721,00	
1.03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				167.965.230.773,11		140.082.819.721,00	
1.03.1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				167.965.230.773,11		140.082.819.721,00	
1.03.1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,26	95,72	1.577.241.599,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi	90,35	94,27	120.235.100,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		baik						
1.03.1.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	88,13	88,26	13.563.600,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik	95,11	95,13	44.320.550.799,58			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Rasio jaringan irigasi 2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	94,82	98,61	12.530.037.900,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.17	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan kabupaten (K10) dalam kondisi baik	95,5	97,3	97.929.094.507,14			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.18	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan ke pusat – pusat kegiatan	99,4	99,67	11.084.334.869,39			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.19	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Persentase drainase dalam kondisi baik 2. Persentase pemenuhan kebutuhan drainase	95,93	99,39	99.391.600,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.24	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	1	4	290.780.798,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	11.884.132.159	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Prasarana Irigasi dalam Kondisi baik				67,66	11.978.942.753	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang				66,76	115.569.744.809	Dinas Pekerjaan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik						Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik				61,85		
		Persentase jembatan kabupaten (K10) dalam kondisi baik				84,2		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang memiliki kompetensi				10	230.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan dokumen rencana tata ruang				40	420.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				70.910.257.988,26		64.039.288.617,00	
1.04.1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				70.910.257.988,26		64.039.288.617,00	
1.04.1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				70.910.257.988,26		64.039.288.617,00	
1.04.1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	91,27	93,07	5.402.205.165,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	96,67	96,94	3.510.271.121,40			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	78,81	82,28	10.234.750,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.15	Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	91,6	95,51	4.246.978.400,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	77,06	77,19	3.659.300.750,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.17	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Cakupan pelayanan areal Tempat Pemakaman Umum (TPU)	87,86	87,88	64.123.215,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.1.04.01.01.19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	1. Persentase luas lahan bersertifikat milik pemerintah	88,39	92,17	2.275.858.154,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2. Persentase penyelesaian kasus tanah negara						
1.04.1.04.01.01.20	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	1. Cakupan proposi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	83,11	83,37	42.653.568.100,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2. Persentase Permukiman yang tertata						
1.04.1.04.01.01.37	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		76,64	80,55	2.729.303.322,86			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.38	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Cakupan pengembangan kawasan permukiman	90,49	90,62	424.760.550,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.39	Program Penataan/Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman		35,69	35,72	5.511.303.860,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.01.40	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		65,78	69,56	422.350.600,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	11.878.565.563	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengendalian, pembangunan dan pengembangan perumahan				100	25.114.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum				35,52	2.628.506.656	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh				37,2	1.035.215.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						53.797.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.05	Program Pengelolaan Dan	Persentase rumah tangga				93,25	2.599.853.117	Dinas Perumahan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Sistem Air Limbah	berakses sanitasi layak						Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU				65	34.266.747.035	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan						3.748.225.350	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan				60	3.457.695.696	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Terlaksananya Penetapan Subjen dan Objek Redistribusi Tanah dan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				100	34.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK				100	4.174.985.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Terlaksananya penatagunaan tanah				100	135.933.100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				7.561.547.785,00			
1.05.1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				6.666.651.296,00		10.920.946.692,00	
1.05.1.05.01.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				6.666.651.296,00		10.920.946.692,00	
1.05.1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	94,25	96,05	4.940.001.196,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98,56	98,83	88.389.300,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		96,54	100	149.999.900,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	0	0			Satuan Polisi Pamong Praja



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.1.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,87	100	15.999.900,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.15	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		97,96	97,99	852.344.650,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.16	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah		96,21	100	619.916.350,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.17	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		0	0	0			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	6.897.162.542	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketetraman dan ketertiban umum yang ditangani				100	3.425.672.950	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM				100	598.111.200	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				894.896.489,00		4.771.163.363,00	
1.05.1.05.02.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				894.896.489,00		4.771.163.363,00	
1.05.1.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,15	95,94	473.138.886,00			Badan Kesatuan bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	77,54	79,34	60.228.770,00			Badan Kesatuan bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,73	100	16.432.500,00			Badan Kesatuan bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.01.15	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat		75,36	78,83	345.096.333,00			Badan Kesatuan bangsa dan Politik
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	3.025.079.000,00	Badan Kesatuan bangsa dan Politik



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten/Kota							
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa				100	325.541.000,00	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik				100	871.239.063,00	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif				100	51.466.600,00	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					100	100.000.000,00	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial				100	397.837.700,00	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
4.01.4.01.24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				10.611.725.125,00		7.154.169.294,00	
4.01.4.01.24.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				10.611.725.125,00		7.154.169.294,00	
4.01.4.01.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	70,97	71,1	423.810.175,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01.4.01.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	79,59	79,62	619.064.600,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01.4.01.24.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	78,7	82,48	12.784.300,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01.4.01.24.01.15	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Indeks Resiko Bencana Alam	0	0	0			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Tingkat Waktu Tanggap						



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Persentase sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan						
4.01.4.01.24.01.16	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana Daerah	Persentase korban bencana yang menerima bantuan logistic	73,84	77,31	141.138.850,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01.4.01.24.01.17	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	81,68	85,59	9.414.927.200,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.075.387.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana				1,66	5.078.781.994,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana				10		
1.06	Sosial				4.570.832.570,00		5.082.796.659,00	
1.06.1.06.01	DINAS SOSIAL				4.570.832.570,00		5.082.796.659,00	
1.06.1.06.01.01	DINAS SOSIAL				4.570.832.570,00		5.082.796.659,00	
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	94,51	98,42	424.056.820,00			Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98,92	99,05	100.111.500,00			Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,97	100	13.400.000,00			Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.15	Program Penanganan Fakir Miskin		96,05	99,84	236.747.600,00			Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.16	Program Pemberdayaan Sosial		0	0	0			Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.17	Program Rehabilitasi Sosial		91,04	91,3	9.235.000,00			Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Indeks Perlindungan Sosial	87,06	90,53	3.787.281.650,00			Dinas Sosial
1.06.01	Program Penunjang Urusan	Cakupan layanan				100	3.552.084.409,00	Dinas Sosial



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang yang tertangani						
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kelembagaan				10	163.500.000,00	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS terlantar diluar panti social yang ditangani				6	267.236.150,00	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani				70	1.043.237.800,00	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani				70	35.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam pahlawan kondisi baik				100	21.738.300,00	Dinas Sosial
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				31.075.146.188,00			
2.01	Tenaga Kerja				792.879.446,00			
2.01.2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN				792.879.446,00		3.701.668.900,00	
2.01.2.01.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN				792.879.446,00		3.701.668.900,00	
2.01.2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,81	96,6	429.732.599,00			Dinas Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95,46	97,26	39.729.297,00			Dinas Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	66,04	66,31	6.630.750,00			Dinas Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.01.15	Program Pembinaan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa	78,51	81,98	12.037.500,00			Dinas Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.01.16	Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Cakupan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja	89,97	93,88	160.965.600,00			Dinas Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.01.17	Program Perlindungan	Cakupan Perlindungan	96,33	96,46	44.305.750,00			Dinas



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan						Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.01.18	Program Kemitraan Ketenaga Kerjaan	Cakupan Penempatan Tenaga Kerja	94,7	94,73	99.477.950,00			Dinas Ketenagakerjaan
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.846.817.500,00	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				75	758.013.600,00	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Capaian pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				44,25	40.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Capaian Perlindungan Ketenagakerjaan				40	56.837.800,00	Dinas Ketenagakerjaan
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Capaian Warga Transmigrasi yang Mendapatkan Pelatihan				100	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.03	Pangan				3.842.273.517,00		6.199.199.950,00	
2.03.2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				3.842.273.517,00		6.199.199.950,00	
2.03.2.03.01.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				3.842.273.517,00		6.199.199.950,00	
2.03.2.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	96,46	98,26	400.530.784,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	93,02	93,29	120.265.105,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,54	100	13.999.900,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.15	Program Ketahanan Pangan	Cakupan ketersediaan pangan	59,77	63,69	413.964.882,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.16	Program Penganekaragaman, Keamanan, Mutu dan Pengolahan Pangan	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	98,2	98,32	26.405.800,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.17	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		97,9	97,93	2.867.107.046,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.01	Program Penunjang Urusan	Cakupan layanan				100	3.287.030.200,00	Dinas Ketahanan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang yang tertangani						Pangan dan Perikanan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						519.777.300,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Daerah				3,5	535.093.300,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari				16,5		
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Bebas Kerawanan Pangan				50	65.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi				16	49.999.650,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya Ikan				200 orang	1.742.299.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Luas Lahan Budidaya				20 Ha		
		Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan				520278 Ekor		
2.05	Lingkungan Hidup				5.020.818.902,00		12.132.460.300,00	
2.05.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				5.020.818.902,00		12.132.460.300,00	
2.05.2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				5.020.818.902,00		12.132.460.300,00	
2.05.2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	91,86	91,99	395.305.151,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	84,2	84,23	143.144.364,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	84,85	88,63	33.751.600,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Dokumen Lingkungan Hidup	92,61	94,41	179.247.338,00			Dinas Lingkungan Hidup
		2. Regulasi terkait Lingkungan Hidup						
2.05.2.05.01.01.16	Program Pengembangan Kinerja	1. Cakupan pelayanan	92,56	96,02	4.006.688.615,00			Dinas Lingkungan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Persampahan	dan penanganan persampahan						Hidup
		2. Persentase pengurangan sampah						
2.05.2.05.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan informasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	90,26	90,39	78.807.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.18	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Capaian peningkatan perlindungan dan pelestarian ekosistem	96,92	96,94	103.942.234,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.19	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase pengurangan lahan kritis	92,24	96,02	79.932.600,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	7.461.789.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)				Nilai 53,701	357.387.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				Nilai 74,90		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Cakupan layanan pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan				100	101.931.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Cakupan layanan keberadaan MHA				100	20.636.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan layanan penghargaan yang diterima				100	61.528.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan layanan penanganan pengaduan				100	13.949.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang diangkut				25	3.655.237.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.06	Administrasi Kependudukan dan				1.716.579.321,00		4.993.809.452,00	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Catpil							
2.06.2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.716.579.321,00		4.993.809.452,00	
2.06.2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.716.579.321,00		4.993.809.452,00	
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,7	92,73	381.421.614,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	88,81	92,6	46.201.000,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,11	99,89	8.922.300,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	94,71	96,51	14.620.700,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,73	100	3.607.500,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	87,76	91,22	13.837.400,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	96,09	100	5.108.500,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	89,93	90,06	1.242.860.307,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	3.669.695.401,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga				100	1.166.461.151,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk				100		
		Cakupan Kepemilikan Kartu Indetitas Anak				100		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun				100	104.296.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akta				100		



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kawin						
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian				100		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pengolahan Data Perkembangan kependudukan Persemester, Cakupan OPD / Satuan Kerja yang melaksanakan Kerja sama tentang Pemanfaatan Data, Terbangunya penataan ,pegelolaan, pelayanan dan Perencanaan, Fasilitasi dan Penerapan Dukcapil Go Digital, Meningkatkan Tingkat Pemahaman dan kesadaran perlunya dokumen kependudukan ,Terlaksanya Analisis data Kependudukan yang akurat				85	5.951.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Buku Induk kependudukan dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan				86	47.405.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				1.991.662.993,00		10.089.030.281,00	
2.07.2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.991.662.993,00		10.089.030.281,00	
2.07.2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.991.662.993,00		10.089.030.281,00	
2.07.2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80,93	84,84	503.535.860,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	74,56	74,68	21.110.000,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan	86,19	86,22	9.969.900,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan						
2.07.2.07.01.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa	94,77	98,55	315.508.400,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.16	Program Peningkatan Manajemen Penataan Desa	Cakupan peningkatan manajemen penataan desa	95,53	97,33	397.201.433,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.17	Program Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Cakupan pengembangan ekonomi pedesaan	98,68	98,95	389.821.200,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat	Cakupan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat	92,78	96,24	354.516.200,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	3.680.172.820,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama antar desa yang difasilitasi				100	248.484.859,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa				100	5.400.977.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				100	759.395.102,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				6.186.295.575,00		12.147.529.677,00	
2.08.2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.186.295.575,00		12.147.529.677,00	
2.08.2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.186.295.575,00		12.147.529.677,00	
2.08.2.08.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan layanan	94,72	98,64	429.591.395,00			Dinas Pengendalian



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkantoran	administrasi yang tertangani						Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2.08.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	87,24	87,37	668.180.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2.08.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	98,48	98,5	38.569.200,00			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2.08.01.01.15	Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga	Cakupan pelayanan KB	94,3	98,08	315.218.800,00			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2.08.01.01.16	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk	89,3	91,11	4.082.513.180,00			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2.08.01.01.17	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan	95,93	96,2	611.732.400,00			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Gender						
2.08.2.08.01.01.18	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	95,03	98,49	40.490.600,00			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	Program Penunjang Urusan	Cakupan layanan				100	4.983.575.927,00	Dinas Pengendalian



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang yang tertangani						Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik				4,07	209.219.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan pelayanan KB				80	5.825.518.150,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif				82	918.699.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak				60	60.516.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Khusus Anak				60	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Perhubungan				1.785.457.211,00		4.954.617.005,00	
2.09.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN				1.785.457.211,00		4.954.617.005,00	
2.09.2.09.01.01	DINAS PERHUBUNGAN				1.785.457.211,00		4.954.617.005,00	
2.09.2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	89,74	89,76	886.104.760,00			Dinas Perhubungan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.2.09.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	91,01	94,79	304.691.851,00			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	88,57	90,37	11.257.900,00			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.15	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	99,04	99,31	242.067.200,00			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.16	Program Peningkatan Layanan Angkutan	Cakupan pelayanan angkutan umum	87,26	90,72	293.745.200,00			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu dengan kebutuhan rambu	94,65	98,57	47.590.300,00			Dinas Perhubungan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	4.087.855.188,00	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Cakupan pelayanan keselamatan lalu lintas jalan				12	859.200.217,00	Dinas Perhubungan
		Cakupan pelayanan angkutan jalan				34		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pelayanan Keseamatan Pelayaran				100	7.561.600,00	Dinas Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika				5.901.966.910,00		10.199.558.224,00	
2.10.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.901.966.910,00		10.199.558.224,00	
2.10.2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.901.966.910,00		10.199.558.224,00	
2.10.2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	96,35	96,48	3.897.077.032,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95,31	95,34	275.892.500,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan	47,51	51,29	9.281.800,00			Dinas Komunikasi dan Informatika



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		keuangan						
2.10.2.10.01.01.15	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		92,28	94,08	976.323.025,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		91,3	91,57	648.868.653,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.17	Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik Sektoral		95,39	98,86	94.523.900,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	7.714.098.224	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan aplikasi informatika dan e-government				4	1.150.453.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						549.873.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi				66,54	694.592.700	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1.136.383.116,00		3.972.336.906,00	
2.11.2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.136.383.116,00		3.972.336.906,00	
2.11.2.11.01.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.136.383.116,00		3.972.336.906,00	
2.11.2.11.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	97,28	97,41	328.898.216,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99,94	99,97	13.390.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,22	100	18.154.200,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01.01.15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Peningkatan kualitas dan nilai usaha UMKM	74,02	75,82	383.772.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase kualitas kelembagaan koperasi	99,31	99,58	392.168.700,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Menengah
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.004.743.306,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	NA			22	406.923.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Cakupan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi				30	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian				3,1	88.660.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan				4,58	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk usaha				0,25	670.378.300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan				0,22	651.631.300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12	Penanaman Modal				806.520.301,00		3.669.261.652,00	
2.12.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				806.520.301,00		3.669.261.652,00	
2.12.2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				806.520.301,00		3.669.261.652,00	
2.12.2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	89,34	89,37	429.362.551,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	89,1	92,89	78.761.150,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan	87,98	89,78	7.182.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan						Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01.15	Program Pelayanan Investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	76,07	76,34	98.028.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01.16	Program Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Perizinan	Cakupan pemantauan dan pengawasan perizinan	85,04	88,51	138.198.700,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Cakupan pelayanan perijinan yang ditindaklanjuti	96,09	100	54.987.900,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.890.427.552,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian realisasi investasi				0,5	127.108.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal						39.297.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu				89	154.785.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						374.190.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal						83.452.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				1.350.744.267,00		6.870.003.396,00	
2.13.2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				1.350.744.267,00		6.870.003.396,00	
2.13.2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				1.350.744.267,00		6.870.003.396,00	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.2.13.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	93,1	96,88	432.448.086,00			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.2.13.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95,51	97,31	101.298.281,00			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.2.13.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,73	100	11.996.000,00			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.2.13.01.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Cakupan pembinaan dan peran serta pemuda	93,84	97,31	37.052.300,00			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.2.13.01.01.16	Program Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga		0	0	0			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.2.13.01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	Cakupan pembinaan dan permasalahan Olahraga	97,7	97,83	767.949.600,00			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	3.071.700.396,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing				50 Orang	431.937.900,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga				150 Medali	3.186.545.500,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan				33	179.819.600,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.17	Perpustakaan				543.564.629,00		3.864.223.050,00	
2.17.2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN				543.564.629,00		3.864.223.050,00	
2.17.2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN				543.564.629,00		3.864.223.050,00	
2.17.2.17.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	88,7	88,73	280.508.427,00			Dinas Perpustakaan
2.17.2.17.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95,67	99,46	6.500.000,00			Dinas Perpustakaan
2.17.2.17.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan	98,2	100	13.399.700,00			Dinas Perpustakaan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		keuangan						
2.17.2.17.01.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	82,01	82,28	243.156.502,00			Dinas Perpustakaan
2.17.2.17.01.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		0	0	0			Dinas Perpustakaan
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	3.127.776.250,00	Dinas Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung				2,8	589.566.800,00	Dinas Perpustakaan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah				20	146.880.000,00	Dinas Perpustakaan
3	Urusan Pilihan				48.424.384.183,00			
3.02	Pariwisata				5.582.407.091,00		10.999.864.737,00	
3.02.3.02.01	DINAS PARIWISATA				5.582.407.091,00		10.999.864.737,00	
3.02.3.02.01.01	DINAS PARIWISATA				5.582.407.091,00		10.999.864.737,00	
3.02.3.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,41	96,32	651.972.351,00			Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99,37	99,5	43.123.200,00			Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,97	100	13.944.400,00			Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.15	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan destinasi pariwisata	95,18	98,96	3.216.152.900,00			Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	97,4	99,2	599.642.700,00			Dinas Pariwisata
		2. Persentase peningkatan PAD sektor wisata						
3.02.3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	98,2	99,35	1.057.571.540,00			Dinas Pariwisata



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	4.062.175.800,00	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan pembenahan di 3 destinasi pariwisata				30	5.943.704.553,00	Dinas Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan				100	187.232.200,00	Dinas Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					0	0	Dinas Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan				17	806.752.184,00	Dinas Pariwisata
3.03	Pertanian				37.836.770.986,00			
3.03.3.03.01	DINAS PERTANIAN				37.836.770.986,00		65.063.390.288,00	
3.03.3.03.01.01	DINAS PERTANIAN				37.836.770.986,00		65.063.390.288,00	
3.03.3.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	89,74	89,87	934.576.147,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	82,43	82,46	361.802.481,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,18	99,96	14.993.300,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.15	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil tanaman pangan	93,72	95,52	721.181.500,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.16	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Cakupan penyerapan teknologi pertanian di masyarakat	88,24	88,51	840.817.400,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman Pangan	Cakupan penanggulangan penyakit tanaman pangan	91,82	95,28	71.460.000,00			Dinas Pertanian



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.3.03.01.01.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian			0	0			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.19	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	91,31	91,44	571.344.650,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Hortikultura	Cakupan penerapan teknologi pertanian di masyarakat	76,42	76,45	95.679.690,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Hortikultura	Cakupan penanggulangan penyakit tanaman hortikultura	76,67	80,45	134.350.800,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.22	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Perkebunan	1. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil perkebunan	98	99,8	212.109.700,00			Dinas Pertanian
		2. Cakupan penanggulangan penyakit tanaman perkebunan						
3.03.3.03.01.01.23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Cakupan penerapan teknologi pertanian di masyarakat	95,46	98,93	148.392.000,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Perkebunan		95,07	98,99	247.468.000,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.25	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan penanggulangan penyakit ternak	96,98	97,11	387.421.400,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.26	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging (kg), produksi telur (kg)	95,31	95,34	1.335.551.280,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.27	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan penerapan teknologi peternakan di masyarakat	89,48	93,27	43.585.200,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.28	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	51,73	53,53	29.771.394.731,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.29	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan komoditi hasil pertanian yang dipasarkan	70,13	70,4	105.593.107,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.30	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh pertanian yang sesuai dengan kompetensi	95,7	99,16	1.839.049.600,00			Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.31	Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani		0	0	0			Dinas Pertanian



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	15.331.903.056,00	Dinas Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan					10.035.968.400,00	Dinas Pertanian
		- Padi sawah				118,2 Ton		
						49,62Kw/Ha		
		- Padi ladang				70 Ton		
						29,66Kw/Ha		
		- Jagung				80 Ton		
						51,72Kw/Ha		
		- Produksi Daging				2,250 Ton		
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian				40	35.532.318.200,00	Dinas Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				80	719.999.362,00	Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				85	771.283.270,00	Dinas Pertanian
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit perkebunan				75		
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan izin usaha pertanian				10	129.999.600,00	Dinas Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani dibina				60	2.541.918.400,00	Dinas Pertanian
3.07	Perindustrian				5.005.206.106,00			
3.07.3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				5.005.206.106,00		9.166.142.664,00	
3.07.3.07.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				5.005.206.106,00		9.166.142.664,00	
3.07.3.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	95,63	95,89	588.513.974,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90,35	93,81	71.568.300,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.07.3.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,09	100	13.231.900,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.15	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase pengembangan usaha perdagangan	98,28	98,41	39.379.300,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.16	Program Pengembangan, Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional	Cakupan peningkatan pasar tradisional	98,54	98,57	4.020.087.852,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.17	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	91,91	95,69	114.855.630,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.18	Program Pengembangan Industri		79,62	81,43	157.569.150,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	5.733.050.964,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi IKM				30	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				60	2.278.091.700,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin				30	1.070.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting				60	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang				25	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pelaksanaan event promosi				30	85.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				70.033.565.149,79			
4.01	Administrasi Pemerintahan				56.413.434.750,79			
4.01.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH				22.462.894.469,00		41.186.120.617,00	
4.01.4.01.03.01	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA				987.397.946,00			
4.01.4.01.03.01.16	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	99,89	99,92	395.846.100,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.17	Program Perumusan dan	Cakupan Perumusan dan	95,7	99,48	591.551.846,00			Sekretariat Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian Kebijakan Pemerintah	Pengendalian Kebijakan Pemerintahan						
4.01.4.01.03.02	BAGIAN ORGANISASI				379.273.855,00			
4.01.4.01.03.02.21	Program Reformasi Birokrasi	Cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi	96,35	96,62	379.273.855,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.03	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				314.906.937,00			
4.01.4.01.03.03.19	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	93,23	97,14	276.607.537,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.03.20	Program Peningkatan BUMD dan Lembaga keuangan	Cakupan Peningkatan BUMD dan Lembaga keuangan Berkinerja Baik	89,26	89,39	38.299.400,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				570.495.700,00			
4.01.4.01.03.04.24	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	92,46	96,24	570.495.700,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.05	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				678.109.750,00			
4.01.4.01.03.05.22	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	90,21	90,48	90.480.600,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.05.23	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	77,84	81,31	587.629.150,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.07	BAGIAN UMUM				16.554.717.276,00			
4.01.4.01.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	96,17	96,3	5.954.962.246,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	85,27	85,3	5.084.594.965,00			Sekretariat Daerah
		2. Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.07.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH	Cakupan kinerja pelayanan Kedinasan	86,87	88,67	4.817.989.715,00			Sekretariat Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KDH/ Wakil KDH						
4.01.4.01.03.07.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase kualitas pemeliharaan gedung/kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati serta kendaraan pool	81,55	81,82	697.170.350,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.08	BAGIAN HUKUM				1.088.930.559,00			
4.01.4.01.03.08.18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum	84,51	88,43	1.088.930.559,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.09	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				300.302.800,00			
4.01.4.01.03.09.27	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan serta Kebijakan Bupati	Persentase Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa	99,97	100	106.396.900,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.09.28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Persentase Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol	96,2	99,98	193.905.900,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				1.215.791.246,00			
4.01.4.01.03.10.25	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Pengadaan Barang/Jasa	98,01	98,28	1.215.791.246,00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.11	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				372.968.400,00			
4.01.4.01.03.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	94,98	98,9	372.968.400,00			Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Umum Setdakab Tapanuli Utara						21.954.247.947,00	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	21.954.247.947,00	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerjasama Setdakab Tapanuli Utara						498.956.500,00	
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang				100	498.956.500,00	Sekretariat Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti						
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara						359.564.500,00	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana dengan baik				98,4	359.564.500,00	Sekretariat Daerah
		Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai APBD				100		
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tapanuli Utara						1.713.443.550,00	
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti				100	1.713.443.550,00	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setdakab Tapanuli Utara						348.585.900,00	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan						348.585.900,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara						938.499.000,00	
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti				100	938.499.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Tapanuli Utara						233.348.400,00	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	233.348.400,00	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01	Bagian Organisasi Setdakab						655.874.500,00	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.0008	Tapanuli Utara							
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	655.874.500,00	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Tapanuli Utara						13.080.979.920,00	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	13.080.979.920,00	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa						1.402.620.400,00	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan						1.402.620.400,00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.04	SEKRETARIAT DPRD				13.528.851.400,00		33.212.733.738,00	
4.01.4.01.04.01	SEKRETARIAT DPRD				13.528.851.400,00		33.212.733.738,00	
4.01.4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	87,04	90,82	7.229.609.045,00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	94,43	96,24	302.165.047,00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		76,8	77,07	522.007.000,00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	78,87	82,33	11.492.000,00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		94	97,91	4.191.631.308,00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.16	Program Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah	Cakupan penetapan dokumen perencanaan, rekomendasi dan pengawasan kebijakan pembangunan	84,8	84,93	1.271.947.000,00			Sekretariat DPRD
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	24.426.171.638,00	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase agenda kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD				100	8.786.562.100,00	Sekretariat DPRD



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase pembahasan peraturan daerah kabupaten tapanuli utara				80		Sekretariat DPRD
4.03	Perencanaan				2.185.572.366,00		7.601.378.513,00	
4.03.4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.185.572.366,00		7.601.378.513,00	
4.03.4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.185.572.366,00		7.601.378.513,00	
4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	79,59	79,72	514.633.060,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	41,24	41,27	7.856.600,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	76,74	80,52	5.714.800,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator sasaran daerah	74,01	75,81	357.599.859,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.16	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Kesra	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pemerintahan, social dan kesra	86,46	86,73	210.002.500,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang perekonomian daerah	81,07	84,54	155.312.710,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.18	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	90,91	94,82	250.961.099,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.19	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah		81,23	81,36	149.497.638,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.20	Program Penelitian dan Pengembangan		61,36	61,38	533.994.100,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	5.150.241.073,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program pembangunan daerah				55	1.366.673.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang diterapkan				20	118.367.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD setiap tahun				100	966.096.640,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04	Keuangan				6.195.022.298,00			
4.04.4.04.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				6.195.022.298,00		279.785.732.427,00	
4.04.4.04.05.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (SKPD)				6.195.022.298,00		279.785.732.427,00	
4.04.4.04.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	89,92	93,7	1.857.648.553,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	93,8	95,6	321.865.532,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	72,3	72,57	14.753.700,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.15	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	89,41	92,88	1.428.286.880,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.16	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	95,97	99,88	76.546.600,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.17	Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	Cakupan Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	94,12	94,25	345.063.875,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Cakupan Peningkatan Pendapatan Daerah	98,4	98,42	703.063.798,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Daerah
4.04.4.04.05.01.19	Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Cakupan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	91,12	94,9	769.845.900,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah	81,37	83,17	677.947.460,00			Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	10.142.159.892,00	Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD dan P-APBD				100	267.352.293.585,00	Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		Rasio Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah				11,2		
		Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan				100		
		Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaian tepat waktu				100		
		Persentase OPD dengan penyerapan anggaran belanja sesuai dengan target				100		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset tanah pemerintah daerah yang disertifikasi				30	802.064.500,00	Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		Persentase kesesuaian data rincian total Barang Milik Daerah (BMD)				100		



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan aktiva tetap di neraca						
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10	1.489.214.450,00	Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		Persentase peningkatan penerimaan retribusi				10		
		Persentase peningkatan penerimaan pendapatan lain- lain yang sah				10		
4.05	Kepegawaian				1.785.703.693,00			
4.05.4.05.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				1.785.703.693,00		5.444.011.602,00	
4.05.4.05.06.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				1.785.703.693,00		5.444.011.602,00	
4.05.4.05.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		93,53	93,79	504.036.751,00			Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		92,09	95,56	59.940.500,00			Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		21,74	25,66	77.014.000,00			Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		83,03	83,16	11.731.000,00			Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.06.01.15	Program Pengembangan Aparatur		88,1	88,13	418.410.499,00			Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.06.01.16	Program Pendayagunaan Aparatur		62,21	65,99	309.161.508,00			Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.06.01.17	Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur		65,68	67,48	405.409.435,00			Badan Kepegawaian Daerah
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	3.524.240.952,00	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kelengkapan data dan informasi kepegawaian				100	899.425.900,00	Badan Kepegawaian Daerah
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				100	888.444.400,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				10		



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.02.4.02.01	INSPEKTORAT				3.453.832.042,00		8.971.817.879,00	
4.02.4.02.01.01	INSPEKTORAT				3.453.832.042,00		8.971.817.879,00	
4.02.4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,84	94,64	531.680.642,00			Inspektorat
4.02.4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	89,05	89,32	915.778.600,00			Inspektorat
4.02.4.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		96,3	99,77	180.315.700,00			Inspektorat
4.02.4.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,09	100	130.053.000,00			Inspektorat
4.02.4.02.01.01.15	Program Peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini BPK Laporan Keuangan Kabupaten Tapanuli Utara : WTP	99,86	99,98	1.063.010.900,00			Inspektorat
4.02.4.02.01.01.16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Maturitas SPIP Kabupaten Tapanuli Utara : level III	99,49	99,52	144.411.900,00			Inspektorat
4.02.4.02.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Progres RAD Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Tapanuli Utara	95,76	99,54	488.581.300,00			Inspektorat
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	7.113.630.179,00	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP				100	1.592.017.100,00	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP				10		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level maturitas SPIP				Level III	266.170.600,00	Inspektorat
		Level Kapabilitas APIP				Level III		
4.01.4.01.09	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG				4.414.375.138,79		11.957.950.105,00	
4.01.4.01.09.01	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG				4.414.375.138,79		11.957.950.105,00	
4.01.4.01.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan layanan	92,49	94,29	202.281.700,00			Kantor Kecamatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkantoran	administrasi yang tertangani						Tarutung
4.01.4.01.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	93,37	93,64	18.588.000,00			Kantor Kecamatan Tarutung
4.01.4.01.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,54	100	6.983.600,00			Kantor Kecamatan Tarutung
4.01.4.01.09.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	95,15	99,06	53.758.400,00			Kantor Kecamatan Tarutung
4.01.4.01.09.01.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kelurahan	99,1	99,2	4.132.763.438,79			Kantor Kecamatan Tarutung
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	5.879.220.800,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	40.554.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif				67	6.038.175.305,00	Kantor Kecamatan Tarutung
4.01.4.01.10	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA				240.852.028,00		1.589.381.392,00	
4.01.4.01.10.01	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA				240.852.028,00		1.589.381.392,00	
4.01.4.01.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	95,35	99,27	173.273.438,00			Kantor Kecamatan Siatas Barita
4.01.4.01.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99,82	99,95	25.767.990,00			Kantor Kecamatan Siatas Barita
4.01.4.01.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,97	100	4.298.000,00			Kantor Kecamatan Siatas Barita
4.01.4.01.10.01.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan	94,9	98,68	37.512.600,00			Kantor Kecamatan Siatas Barita



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan kecamatan	Pelayanan Pemerintahan kecamatan						
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.534.518.392,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	54.863.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
4.01.4.01.11	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING				213.916.142,00		1.589.381.392,00	
4.01.4.01.11.01	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING				213.916.142,00		1.589.381.392,00	
4.01.4.01.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	98,1	98,23	164.306.342,00			Kantor Kecamatan Adiankoting
4.01.4.01.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	94,9	94,93	25.109.800,00			Kantor Kecamatan Adiankoting
4.01.4.01.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		0	0			Kantor Kecamatan Adiankoting
4.01.4.01.11.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	98,2	100	24.500.000,00			Kantor Kecamatan Adiankoting
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.534.518.392,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	54.863.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
4.01.4.01.12	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON				781.693.000,00		2.730.143.800,00	
4.01.4.01.12.01	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON				781.693.000,00		2.730.143.800,00	
4.01.4.01.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	94,75	94,78	135.714.500,00			Kantor Kecamatan Sipoholon
4.01.4.01.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	37,27	41,05	5.285.000,00			Kantor Kecamatan Sipoholon



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	86,3	88,1	2.813.000,00			Kantor Kecamatan Sipoholon
4.01.4.01.12.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	98,25	98,52	39.996.600,00			Kantor Kecamatan Sipoholon
4.01.4.01.12.02.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kelurahan	93,59	97,06	597.883.900,00			Kantor Kecamatan Sipoholon
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.680.544.800,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	49.599.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
4.01.4.01.13	KANTOR KECAMATAN PAHAJE JULU				819.221.393,00		3.542.073.409,00	
4.01.4.01.13.01	KANTOR KECAMATAN PAHAJE JULU				819.221.393,00		3.542.073.409,00	
4.01.4.01.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	96,59	98,39	142.518.800,00			Kantor Kecamatan Pahae Julu
4.01.4.01.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	88,88	89,15	21.664.350,00			Kantor Kecamatan Pahae Julu
4.01.4.01.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	94,23	97,69	4.890.400,00			Kantor Kecamatan Pahae Julu
4.01.4.01.13.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	93,37	97,29	39.083.200,00			Kantor Kecamatan Pahae Julu
4.01.4.01.13.02.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kelurahan	99,07	99,2	611.064.643,00			Kantor Kecamatan Pahae Julu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.619.947.494,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten/Kota							
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	68.400.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif				67	853.725.915,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
4.01.4.01.14	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE				811.253.000,00		2.792.110.503,00	
4.01.4.01.14.01	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE				811.253.000,00		2.792.110.503,00	
4.01.4.01.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	93,88	97,8	150.496.500,00			Kantor Kecamatan Pahae Jae
4.01.4.01.14.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	97,37	97,5	6.736.100,00			Kantor Kecamatan Pahae Jae
4.01.4.01.14.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		0	0			Kantor Kecamatan Pahae Jae
4.01.4.01.14.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	95,99	99,77	39.696.900,00			Kantor Kecamatan Pahae Jae
4.01.4.01.14.02.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kelurahan	97,93	99,73	614.323.500,00			Kantor Kecamatan Pahae Jae
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.004.886.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	56.730.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif				67	730.494.503,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
4.01.4.01.15	KANTOR KECAMATAN PURBATUA				189.301.595,00		1.536.713.094,00	
4.01.4.01.15.01	KANTOR KECAMATAN PURBATUA				189.301.595,00		1.536.713.094,00	
4.01.4.01.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	95,62	99,4	106.323.395,00			Kantor Kecamatan Purbatua
4.01.4.01.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98,17	99,97	30.005.700,00			Kantor Kecamatan Purbatua



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,63	99,9	714.700,00			Kantor Kecamatan Purbatua
4.01.4.01.15.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	96,45	99,92	52.257.800,00			Kantor Kecamatan Purbatua
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.496.013.094,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	40.700.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
4.01.4.01.16	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN				219.197.865,00		1.465.163.992,00	
4.01.4.01.16.01	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN				219.197.865,00		1.465.163.992,00	
4.01.4.01.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	98,19	99,99	141.515.365,00			Kantor Kecamatan Simangumban
4.01.4.01.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99,73	100	14.232.400,00			Kantor Kecamatan Simangumban
4.01.4.01.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,54	100	5.917.900,00			Kantor Kecamatan Simangumban
4.01.4.01.16.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	96,09	100	57.532.200,00			Kantor Kecamatan Simangumban
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.429.610.992,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	35.553.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
4.01.4.01.17	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR				195.269.580,00		2.345.401.896,00	
4.01.4.01.17.01	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR				195.269.580,00		2.345.401.896,00	
4.01.4.01.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan layanan	97,93	98,2	132.666.480,00			Kantor Kecamatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkantoran	administrasi yang tertangani						Sipahutar
4.01.4.01.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	88,29	91,75	17.666.600,00			Kantor Kecamatan Sipahutar
4.01.4.01.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	96,09	100	3.884.400,00			Kantor Kecamatan Sipahutar
4.01.4.01.17.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	99,57	99,7	41.052.100,00			Kantor Kecamatan Sipahutar
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.293.001.896,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	52.400.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
4.01.4.01.18	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN				249.750.850,00		1.837.245.500,00	
4.01.4.01.18.01	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN				249.750.850,00		1.837.245.500,00	
4.01.4.01.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	96,22	99,68	139.483.650,00			Kantor Kecamatan Pangaribuan
4.01.4.01.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	96,07	99,98	26.796.500,00			Kantor Kecamatan Pangaribuan
4.01.4.01.18.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,87	100	2.195.400,00			Kantor Kecamatan Pangaribuan
4.01.4.01.18.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	99,78	99,81	81.275.300,00			Kantor Kecamatan Pangaribuan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.795.645.500,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7.01.02	Program Penyelenggaraan	Cakupan layanan				90	41.600.000,00	



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	penunjang yang tertangani						
4.01.4.01.19	KANTOR KECAMATAN GAROGA				164.215.087,00		2.110.732.750,00	
4.01.4.01.19.01	KANTOR KECAMATAN GAROGA				164.215.087,00		2.110.732.750,00	
4.01.4.01.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,76	96,67	111.795.257,00			Kantor Kecamatan Garoga
4.01.4.01.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	88,5	88,63	15.614.730,00			Kantor Kecamatan Garoga
4.01.4.01.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	99,84	99,87	7.665.100,00			Kantor Kecamatan Garoga
4.01.4.01.19.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	90,04	93,82	29.140.000,00			Kantor Kecamatan Garoga
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.050.038.650,00	Kantor Kecamatan Garoga
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	37.720.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	22.974.100,00	Kantor Kecamatan Garoga
4.01.4.01.20	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG				872.114.278,00		3.886.200.650,00	
4.01.4.01.20.01	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG				872.114.278,00		3.886.200.650,00	
4.01.4.01.20.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	99	99,02	179.479.200,00			Kantor Kecamatan Siborongborong
4.01.4.01.20.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	91,23	95,02	28.812.050,00			Kantor Kecamatan Siborongborong
4.01.4.01.20.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	97,55	99,35	4.663.800,00			Kantor Kecamatan Siborongborong



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.20.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	99,72	99,99	64.008.100,00			Kantor Kecamatan Siborongborong
4.01.4.01.20.02.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kelurahan	93,15	96,62	595.151.128,00			Kantor Kecamatan Siborongborong
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	2.957.401.100,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	46.800.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif				67	881.999.550,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
4.01.4.01.21	KANTOR KECAMATAN PAGARAN				211.299.500,00		1.667.679.900,00	
4.01.4.01.21.01	KANTOR KECAMATAN PAGARAN				211.299.500,00		1.667.679.900,00	
4.01.4.01.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	99,33	99,6	144.411.000,00			Kantor Kecamatan Pagaran
4.01.4.01.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	94,75	98,21	25.934.900,00			Kantor Kecamatan Pagaran
4.01.4.01.21.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	94,74	98,66	3.097.100,00			Kantor Kecamatan Pagaran
4.01.4.01.21.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	99,27	99,4	37.856.500,00			Kantor Kecamatan Pagaran
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.619.031.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	48.648.900,00	Kantor Kecamatan Pagaran
4.01.4.01.22	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN				217.617.400,00		1.591.407.400,00	
4.01.4.01.22.01	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN				217.617.400,00		1.591.407.400,00	
4.01.4.01.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan layanan	96,49	99,96	134.885.600,00			Kantor Kecamatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal	Realisasi 2020		Target 2021		OPD Penanggungjawab
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkantoran	administrasi yang tertangani						Parmonangan
4.01.4.01.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	96,06	99,98	34.204.900,00			Kantor Kecamatan Parmonangan
4.01.4.01.22.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	98,11	98,23	3.895.200,00			Kantor Kecamatan Parmonangan
4.01.4.01.22.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	99,83	99,86	44.631.700,00			Kantor Kecamatan Parmonangan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.498.847.400,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	92.560.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
4.01.4.01.23.01	KANTOR KECAMATAN MUARA				209.886.900,00		1.621.829.400,00	
4.01.4.01.23.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	92,62	96,08	147.406.900,00			Kantor Kecamatan Muara
4.01.4.01.23.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	85,84	89,75	23.402.500,00			Kantor Kecamatan Muara
4.01.4.01.23.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	29,85	29,98	1.498.400,00			Kantor Kecamatan Muara
4.01.4.01.23.01.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan kecamatan	93,34	93,37	37.579.100,00			Kantor Kecamatan Muara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				100	1.567.154.700,00	Kantor Kecamatan Muara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan penunjang yang tertangani				90	54.674.700,00	Kantor Kecamatan Muara



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 7.4
Proyeksi Pendanaan per Urusan, Perangkat Daerah dan Program Tahun 2022 -2024

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				432.117.486.761,00		434.167.000.000,00		435.480.000.000,00	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	329.755.641.647,00	100	330.800.000.000,00	100	331.300.000.000,00	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	16,30	102.191.845.114,00	16,32	103.192.000.000,00	16,34	104.000.000.000,00	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
				2. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	79,21		79,23		79,25		
				3. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi	%	33,33		50,00		66,67		
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidikan Yang Terpetakan dan Terdistribusikan	%	80,00	150.000.000,00	85,00	150.000.000,00	90,00	150.000.000,00	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Kependidikan	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	%	11,65	20.000.000,00	12,05	25.000.000,00	12,45	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				231.491.478.422,00		233.438.776.000,00		235.230.000.000,00	Dinas Kesehatan dan RSU Daerah Tarutung
		A	DINAS KESEHATAN				138.112.161.157,00		139.010.000.000,00		139.680.000.000,00	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	71.466.437.357,00	100	71.600.000.000,00	100	71.650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar	%	100	63.818.930.300,00	100	64.500.000.000,00	100	65.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan jenis tenaga kesehatan	%	42,85	1.600.010.000,00	57,00	1.650.000.000,00	76,00	1.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan Minuman yang dibina agar memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	%	100	728.336.000,00	100	730.000.000,00	100	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	%	86,00	498.447.500,00	87,00	530.000.000,00	88,00	580.000.000,00	Dinas Kesehatan
		B	RSU DAERAH TARUTUNG				93.379.317.265,00		94.428.776.000,00		95.550.000.000,00	RSU Daerah Tarutung
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	21.250.541.186,00	100	21.300.000.000,00	100	21.350.000.000,00	RSU Daerah Tarutung
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	%	100	72.128.776.079,00	100	73.128.776.000,00	100	74.200.000.000,00	RSU Daerah Tarutung



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			60.953.105.358,00		63.994.582.624,00		66.749.522.681,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			52.997.942.603,00		55.641.728.624,00		58.013.751.181,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	10.860.315.120,00	100	11.002.559.430,00	100	11.309.761.675,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi	%	22,04	6.320.857.420,00	22,06	6.738.228.980,00	22,08	7.345.431.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	69,05	35.216.770.063,00	69,45	36.790.218.974,00	69,95	37.811.825.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	89,00		90,00		92,05		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Orang	77,00	200.000.000,00	97,00	426.232.920,00	117,00	647.839.684,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Dokumen	4,00	400.000.000,00	5,00	684.488.320,00	6,00	898.892.822,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		B	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.955.162.755,00		8.352.854.000,00		8.735.771.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	%	75,60	3.196.253.934,00	76,80	3.356.000.000,00	77,80	3.523.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	%	93,71	3.658.909.800,00	94,71	3.841.855.000,00	95,71	4.000.398.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	76,00	149.999.759,00	78,00	157.500.000,00	80,00	165.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	09	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK	%	100	949.999.262,00	100	997.499.000,00	100	1.047.373.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			20.464.612.000,00		20.506.742.450,00		21.525.122.615,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	11.411.781.000,00	100	11.417.000.000,00	100	11.421.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam	%	100	38.000.000,00	100	38.000.000,00	100	39.900.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	1. Persentase rumah layak huni	%	85,38	1.546.000.000,00	86,39	1.546.000.000,00	87,40	1.623.300.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2. Persentase Kawaasan Pemukiman Kumuh	%	6,94		6,44		5,94		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	%	84,60	7.468.831.000,00	85,65	7.505.742.450,00	86,70	8.440.922.615,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.264.032.482,00		15.062.801.600,00		15.294.301.600,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		A	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja				11.354.852.832,00		11.087.801.600,00		11.264.301.600,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	7.891.286.492,00	100	7.913.000.000,00	100	7.915.000.000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	%	100	577.492.200,00	100	580.500.000,00	100	755.000.000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
				2. Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	%	100		100		100		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran sesuai dengan SPM	%	100	2.886.074.140,00	100	2.594.301.600,00	100	2.594.301.600,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.909.179.650,00		3.975.000.000,00		4.030.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.570.179.650,00	100	3.575.000.000,00	100	3.580.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Desa yang Dibina Menuju Desa Tangguh Bencana	%	1,66	339.000.000,00	3,32	400.000.000,00	6,64	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2.Respon Time mencapai lokasi bencana	Jam	2x24		2x24		2x24		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				3. Persentase Sarana dan Prasarana yang Ditangani Akibat Bencana	%	65,00		70,00		75,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
			DINAS SOSIAL				4.225.783.786,00		4.304.500.000,00		4.395.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.972.550.100,00	100	2.980.000.000,00	100	2.995.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	76,00	164.000.000,00	78,00	184.000.000,00	80,00	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti	%	6	240.390.400,00	8	270.000.000,00	10	290.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin dan orang tak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	%	75,00	595.254.900,00	80,00	610.500.000,00	82,00	630.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	%	72,00	232.588.886,00	75,00	235.000.000,00	80,00	250.000.000,00	Dinas Sosial



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	unit	1	20.999.500,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	Dinas Sosial
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.532.217.505,00		4.680.000.000,00		4.790.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.989.431.605,00	100	3.990.000.000,00	100	3.985.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan	%	32,80	470.000.000,00	35,56	600.000.000,00	40,00	700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penyampaian informasi kesempatan kerja	%	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Cakupan Perlindungan Ketenagakerjaan	%	44,33	52.785.900,00	46,28	60.000.000,00	50,16	65.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.574.042.300,00		5.581.000.000,00		5.613.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	5.194.016.800,00	100	5.200.000.000,00	100	5.230.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah dan Publik	%	4,17	190.035.100,00	4,22	191.000.000,00	4,27	192.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah yang Aktif	%	100,00	39.990.400,00	100,00	40.000.000,00	100,00	41.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	%	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.304.680.554,00		7.775.000.000,00		8.120.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	4.530.690.354,00	100	4.550.000.000,00	100	4.570.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infra struktur kemandirian pangan yang di fasilitasi	%	28,57	2.173.997.100,00	29,40	2.500.000.000,00	30,36	2.700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Cadangan Pangan Daerah	%	3,76	444.993.100,00	4,16	475.000.000,00	4,57	525.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	%	18,60		23,26		27,91		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	%	13,89	130.000.000,00	9,52	200.000.000,00	5,16	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi	%	20,00	25.000.000,00	28	50.000.000,00	36,00	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.388.146.800,00		1.388.146.800,00		1.455.549.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	cakupan pemenuhan dokumen pembebasan lahan yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan	%	100	74.999.800,00	100	74.999.800,00	100	78.749.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	%	85,76	2.313.147.000,00	86,71	1.313.147.000,00	87,66	1.376.800.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.852.572.350,00		9.348.321.150,00		9.520.127.992,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	7.501.232.650,00	100	7.501.232.650,00	100	7.501.232.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup yang dilaksanakan	%	100		100	389.500.000,00	100	510.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	53,81	157.429.700,00	53,91	195.000.000,00	54,01	201.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	75,50		76,50		77,50		
				3. Indeks Kualitas Lingkungan Udara (IKU)	Nilai	88,86		88,96		89,06		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan RTH yang dikelola	%	100	55.100.000,00	100	57.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kegiatan usaha yang memiliki dokumen pengelolaan limbah	usaha	35	43.601.100,00	45	47.961.000,00	45	52.757.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Cakupan kebutuhan SDM penilai dokumen AMDAL	%	10	60.085.000,00	40	106.314.400,00	100	126.155.132,00	Dinas Lingkungan Hidup
				2. Cakupan usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan	%	15,50		18,50		21,50		
				3. Cakupan pengawasan usaha yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintha kabupaten	%	100		100		100		
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Cakupan fasilitasi MHA	%	100	123.213.000,00	100	125.220.000,00	100	127.656.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penvuluhan Lingkungan	Cakupan sekolah (SD/SMP/SMA) yang dibina menjadi sekolah adiwiyata	%	22,85	41.230.000,00	26,67	42.010.000,00	30,47	43.101.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Hidup untuk Masyarakat									
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan keikutsertaan dalam lomba lingkungan hidup	%	75,00	43.601.000,00	75,00	47.961.100,00	75,00	52.757.210,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Lingkungan Hidup Yang ditangani	%	100	40.427.900,00	100	44.470.000,00	100	48.317.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Sampah yang diangkut ke TPA	%	26,00	786.652.000,00	27,00	791.652.000,00	28,00	796.652.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.524.671.570,00		4.585.019.200,00		4.630.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.757.851.970,00	100	3.780.000.000,00	100	3.800.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	1. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99	621.303.700,00	100	653.019.200,00	100	665.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	99		99		99		
				3. Cakupan Kepemilikan Kartu Indetitas Anak	%	40		50		55		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun	%	90	42.884.000,00	95	45.000.000,00	98	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2. Cakupan Penerbitan Akta Kawin	%	85		89		92		
				3. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100		100		100		
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja sama tentang Pemanfaatan Datakependudukan	%	23	31.247.300,00	23	35.000.000,00	23	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan Buku Profil Kependudukan	Ada/ Tidak Ada	Ada	71.384.600,00	Ada	72.000.000,00	Ada	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.015.005.837,00		5.140.000.000,00		5.225.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.702.408.772,00	100	3.730.000.000,00	100	3.760.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan fasilitasi penataan desa	%	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	%	100	420.277.165,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	%	100	367.449.700,00	100	400.000.000,00	100	425.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	%	100	449.870.200,00	100	460.000.000,00	100	465.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.032.068.935,00		5.892.068.935,00		5.902.068.935,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Perlindungan Anak
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang Tidak Terlayani (Unmeet Need)	%	20,82	50.000.000,00	20,71	60.000.000,00	20,6	70.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42	4.975.359.735,00	44	4.825.359.735,00	46	4.825.359.735,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	%	90	1.006.709.200,00	92	1.006.709.200,00	94	1.006.709.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				4.914.272.688,00		4.915.190.438,00		5.025.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	4.593.801.988,00	100	4.245.190.438,00	100	4.350.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	35,00	305.840.800,00	37,00	650.000.000,00	40,00	650.000.000,00	Dinas Perhubungan
				2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	65,00		70,00		75,00		
				3. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	%	24,00		27,00		30,00		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga	%	100	14.629.900,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.175.629.200,00		8.107.700.000,00		8.167.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	7.217.680.500,00	100	7.130.000.000,00	100	7.150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan Pertahun	%	94,00	670.248.700,00	95,00	690.000.000,00	96,00	730.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi e-government yang Terintegrasi	%	38,00	287.700.000,00	40,00	287.700.000,00	43,00	287.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				11.231.578.600,00		11.345.000.000,00		11.525.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	9.281.000.000,00	100	9.320.000.000,00	100	9.380.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan	%	23		24		25		Dinas Koperasi, Usaha



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koperasi	Koperasi			496.658.000,00		510.000.000,00		525.000.000,00	Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	%	3,34	250.608.700,00	4,15	265.000.000,00	5,04	270.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Bantuan	%	4,67	150.000.000,00	4,76	150.000.000,00	4,85	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha	%	0,30	235.560.000,00	0,35	250.000.000,00	0,45	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	0,27	817.751.900,00	0,36	850.000.000,00	0,47	900.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.301.167.292,00		4.332.027.800,00		4.357.327.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.323.830.492,00	100	3.325.000.000,00	100	3.350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	40,00	314.309.000,00	45,00	344.000.000,00	50,00	344.300.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	Event	5,00	53.098.500,00	6,00	53.098.500,00	7,00	53.098.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	90,00	117.595.800,00	91,00	117.595.800,00	92,00	117.595.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Izin Yang Dikendalikan	%	70,00	407.613.000,00	75,00	407.613.000,00	80,00	407.613.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dikendalikan	%	78,00	84.720.500,00	80,00	84.720.500,00	85,00	84.720.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.842.834.596,00		5.032.197.000,00		5.102.197.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.077.887.596,00	100	3.100.000.000,00	100	3.120.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas	1. Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing	Orang	67		114		140		Dinas Pemuda dan Olah



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Daya Saing Kepemudaan				307.750.000,00		475.000.000,00		525.000.000,00	Raga
				2. Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	%	15,38		19,23		23,08		
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	123	1.457.197.000,00	126	1.457.197.000,00	129	1.457.197.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				195.976.000,00		210.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Data Statistik Sektoral Yang dikelola	%	16,50	195.976.000,00	33,00	210.000.000,00	50,00	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase aplikasi yang menerapkan kemanan informasi	%	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				219.999.900,00		230.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Jumla h	3	219.999.900,00	6	230.000.000,00	8	250.000.000,00	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.813.296.950,00		3.670.000.000,00		3.750.000.000,00	Dinas Perpustakaan
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.206.051.850,00	100	3.050.000.000,00	100	3.100.000.000,00	Dinas Perpustakaan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	2,82	607.245.100,00	2,86	620.000.000,00	2,90	650.000.000,00	Dinas Perpustakaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				56.716.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	Dinas Perpustakaan
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	%	25	56.716.000,00	30	60.000.000,00	35	65.000.000,00	Dinas Perpustakaan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.407.581.013,00		1.500.000.000,00		1.700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200	1.407.581.013,00	200	1.500.000.000,00	200	1.700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
				2. Luas Lahan Budidaya	Hektar	20		25		30		
				3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Ekor	819.161		891.577		963.235		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				10.259.061.475,00		10.991.779.426,00		12.119.792.107,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	4.165.143.700,00	100	4.956.168.659,00	100	5.016.175.704,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	Program Peninekatan Dava Tarik	Destinasi Wisata vane dibenahi	Destinas	2		6		5		Dinas Pariwisata



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Destinasi Pariwisata		i		4.811.655.100,00		4.900.000.000,00		5.100.000.000,00	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Event/promosi dan pemasaran kepariwisataan yang diikuti dan dilaksanakan	Event	20	818.912.675,00	21	550.000.000,00	22	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI yang difasilitasi	Jumla h	N/A	100.000.000,00	10	200.000.000,00	15	250.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	31	363.350.000,00	33	385.610.767,00	36	1.153.616.403,00	Dinas Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				26.485.775.935,00		28.245.400.100,00		29.774.500.100,00	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
		A	DINAS PERTANIAN									
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	16.342.217.235,00	100	16.700.000.000,00	100	17.100.000.000,00	Dinas Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan			6.489.944.700,00		6.989.900.000,00		7.489.000.000,00	Dinas Pertanian
				Padi Sawah	Ton	18.400,00		18.600,00		118.800,00		
					Kw/ha	49,63		49,64		49,65		
				Padi Ladang	Ton	70.200,00		70.400,00		70.600,00		
					Kw/ha	29,68		29,69		29,69		
				Jagung	Ton	85.000,00		88.000,00		91.000,00		
					Kw/ha	51,82		51,86		51,89		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%	42,0	2.205.314.400,00	44,0	3.100.500.000,00	46,0	3.705.500.000,00	Dinas Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	86,0	180.000.000,00	87,0	180.000.000,00	88,0	180.000.000,00	Dinas Pertanian
				Cakupan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit perkebunan	%	76,0		78,0		80,0		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan izin usaha pertanian	%	12,0	50.000.100,00	14,0	50.000.100,00	16,0	50.000.100,00	Dinas Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase rumah tangga petani yang masuk kelembagaan petani	%	90,0	1.218.299.500,00	92,0	1.225.000.000,00	94,0	1.250.000.000,00	Dinas Pertanian
		B	DINAS KETAHANAN PANGAN				1.369.992.000,00		1.590.000.000,00		1.800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Daging	Ton	2.387,00	720.000.000,00	2.437,00	740.000.000,00	2.487,00	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	42,0	200.000.000,00	44,0	400.000.000,00	46,0	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	82,0	449.992.000,00	84,0	450.000.000,00	86,0	450.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.176.831.202,00		1.475.000.002,00		1.505.000.002,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	66,67	846.746.700,00	73,33	1.115.000.000,00	73,33	1.120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	32	90.084.500,00	45	115.000.000,00	62	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	30	65.000.002,00	35	65.000.002,00	40	65.000.002,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pelaksanaan event promosi	%	33,33	175.000.000,00	33,33	180.000.000,00	50,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.438.303.400,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengerajin	%	30	5.438.303.400,00	35	3.000.000.000,00	40	3.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				35.328.080.691,00		35.668.358.000,00		36.158.358.000,00	Sekretariat daerah
4	01	01	Program Administrasi Umum	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	%	92	30.736.059.897,00	95	31.028.358.000,00	100	31.428.358.000,00	Sekretariat daerah
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	3.466.567.500,00	100	3.500.000.000,00	100	3.560.000.000,00	Sekretariat daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Program perekonomian dan Pembangunan	%	96,6	1.125.453.300,00	98,8	1.140.000.000,00	99	1.170.000.000,00	Sekretariat daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD				33.592.572.835,00		35.832.191.337,00		38.525.000.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	23.024.516.835,00	100	24.592.191.337,00	100	26.095.000.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Agenda Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	%	100	10.568.056.000,00	100	11.240.000.000,00	100	12.430.000.000,00	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	%	75,00		75,00		75,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN									



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PEMERINTAHAN									
5	01		PERENCANAAN				6.277.336.939,00		6.650.803.400,00		6.965.803.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	4.708.487.939,00	100	4.715.000.000,00	100	4.730.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	%	100	733.045.600,00	100	1.100.000.000,00	100	1.400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase hasil monitoring terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	%	100	835.803.400,00	100	835.803.400,00	100	835.803.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02		KEUANGAN				282.593.314.296,00		288.185.628.662,01		292.552.042.341,33	Badan Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
		A.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	6.928.227.396,00	100	7.117.225.096,00	100	7.732.225.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	%	100	274.893.565.000,00	100	280.296.881.666,01	100	284.048.295.441,33	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Data Aset yang Akurat	%	100	771.521.900,00	100	771.521.900,00	100	771.521.900,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		B	BADAN PENDAPATAN DAERAH				5.575.790.938,00		5.925.597.609,00		6.241.247.609,00	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	4.014.692.238,00	100	4.175.597.609,00	100	4.375.597.609,00	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah	%	100	1.561.098.700,00	100	1.750.000.000,00	100	1.865.650.000,00	Badan Pendapatan Daerah
				2. Persentase Capaian Retribusi Daerah	%	100		100		100		
				3. Persentase Capaian Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	%	100		100		100		
				4. Persentase Capaian Pendapatan Lain-Lain yang Sah	%	100		100		100		
5	03		KEPEGAWAIAN				4.954.037.327,00		4.990.200.000,00		5.045.200.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Daya Manusia
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.485.203.827,00	100	3.490.200.000,00	100	3.495.200.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian dan tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	%	100	1.468.833.500,00	100	1.500.000.000,00	100	1.550.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.416.330.000,00		1.450.000.000,00		1.475.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Persen	100	1.416.330.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.475.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	11		12		13		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				262.351.500,00		350.000.000,00		400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian Yang Ditindaklanjuti	%	100	262.351.500,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				15.664.066.882,00		15.720.000.000,00		15.810.000.000,00	Inspektorat Daerah
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	9.607.066.882,00	100	9.620.000.000,00	100	9.670.000.000,00	Inspektorat Daerah
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	%	100	5.345.000.000,00	100	5.350.000.000,00	100	5.360.000.000,00	Inspektorat Daerah
				2. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	%	10,00		10,00		10,00		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level maturitas SPIP	Level	III	712.000.000,00	III	750.000.000,00	III	780.000.000,00	Inspektorat Daerah
				Level Kapabilitas APIP	Level	III		III		III		
7			UNSUR KEWILAYAHAN				47.114.988.418,00		47.801.785.846,00		48.237.839.800,00	Semua Kecamatan
7	01		KECAMATAN TARUTUNG				12.194.520.433,00		12.262.450.000,00		12.282.450.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	6.720.677.950,00	100	6.750.000.000,00	100	6.755.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	61.393.700,00	80	65.000.000,00	85	70.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang	%	80		85		90		Kantor Kecamatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Desa dan Kelurahan	Aktif			5.367.448.783,00		5.367.450.000,00		5.367.450.000,00	Tarutung
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Tarutung
7	01		KECAMATAN SIATAS BARITA				1.756.956.000,00		1.815.000.000,00		1.840.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	1.656.968.200,00	100	1.670.000.000,00	100	1.675.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.987.800,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	25.000.000,00	90	30.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	15.000.000,00	85	20.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	01		KANTOR KECAMATAN ADIAN KOTING				1.876.177.792,00		1.925.000.000,00		1.950.200.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	1.776.545.792,00	100	1.780.000.000,00	100	1.785.200.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.632.000,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	01		KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON				3.810.657.890,00		3.850.040.750,00		3.869.540.750,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.940.712.940,00	100	2.945.000.000,00	100	2.949.500.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.904.200,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	780.040.750,00	85	780.040.750,00	90	780.040.750,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipoholon
7	01		KECAMATAN PAHAE JULU				3.628.395.085,00		3.667.750.000,00		3.687.750.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.787.665.212,00	100	2.792.000.000,00	100	2.797.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.995.000,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	750.734.873,00	85	750.750.000,00	90	750.750.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Julu
7	01		KECAMATAN PAHAE JAE				2.788.519.873,00		2.828.834.046,00		2.848.985.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.068.349.046,00	100	2.073.349.046,00	100	2.078.500.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.687.400,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	630.483.427,00	85	630.485.000,00	90	630.485.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	01		KECAMATAN PURBATUA				1.745.812.788,00		1.780.300.000,00		1.805.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	1.646.148.788,00	100	1.635.300.000,00	100	1.640.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.664.000,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Purbatua
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang	%	75		80		85		Kantor Kecamatan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemerintahan Desa	ditindaklanjuti			10.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	Purbatua
7	01		KECAMATAN SIMANGUMBAN				1.563.072.842,00		1.614.070.000,00		1.634.070.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	1.439.002.842,00	100	1.445.000.000,00	100	1.450.000.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	69.070.000,00	80	69.070.000,00	85	69.070.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Simangumban
7	01		KECAMATAN SIPAHUTAR				2.745.084.996,00		2.800.000.000,00		2.825.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.634.622.096,00	100	2.640.000.000,00	100	2.645.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	55.462.900,00	80	60.000.000,00	85	65.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	01		KECAMATAN PANGARIBUAN				2.162.232.900,00		2.213.000.000,00		2.238.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.048.017.900,00	100	2.053.000.000,00	100	2.058.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	59.215.000,00	80	60.000.000,00	85	65.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	01		KECAMATAN GAROGA				2.301.570.000,00					Kantor Kecamatan Garoga



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									2.340.000.000,00		2.371.000.000,00	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.194.850.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.216.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.000.000,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	20.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7	01	04	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	32.720.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	15.000.000,00	85	20.000.000,00	Kantor Kecamatan Garoga
7	01		KECAMATAN SIBORONGBORONG				4.779.807.929,00		4.825.830.000,00		4.846.760.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.889.223.129,00	100	3.894.000.000,00	100	3.899.900.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	63.784.800,00	80	70.000.000,00	85	75.000.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	781.800.000,00	85	781.830.000,00	90	781.860.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	01		KECAMATAN PAGARAN				1.755.030.050,00		1.770.874.950,00		1.785.874.950,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	1.656.004.150,00	100	1.635.874.950,00	100	1.635.874.950,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	44.025.900,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	10.000.000,00	90	10.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Pagaran
7	01		KECAMATAN PARMONANGAN				1.639.337.300,00		1.690.813.000,00		1.715.700.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	1.540.813.800,00	100	1.545.813.000,00	100	1.550.700.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

NO			Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						PD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	43.523.500,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Parmonangan
7	01		KECAMATAN MUARA				2.367.812.540,00		2.417.823.100,00		2.537.509.100,00	Kantor Kecamatan Muara
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	2.230.414.240,00	100	2.235.414.000,00	100	2.340.100.000,00	Kantor Kecamatan Muara
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	%	75	82.398.300,00	80	82.409.100,00	85	82.409.100,00	Kantor Kecamatan Muara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	%	80	10.000.000,00	85	20.000.000,00	90	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Muara
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Muara
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	%	80	25.000.000,00	85	40.000.000,00	85	40.000.000,00	Kantor Kecamatan Muara
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	%	75	10.000.000,00	80	20.000.000,00	85	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Muara
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.199.128.463,00		5.234.639.200,00		5.255.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	3.271.491.800,00	100	3.278.000.000,00	100	3.281.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa	%	100	269.631.000,00	100	270.000.000,00	100	272.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik	%	100	964.255.763,00	100	970.100.000,00	100	980.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif	%	100	31.539.200,00	100	31.539.200,00	100	32.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	%	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial	%	100	602.210.700,00	100	620.000.000,00	100	620.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Total				1.330.616.919.206,00		1.348.397.487.579,01		1.369.017.300.982,33	

* Angka Sementara



BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau capaian indikator kinerja daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Kinerja Utama, merupakan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Indikator Kinerja perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 menjadi target bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator Kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Indikator (IKU) dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah yang akan diacu setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Pencapaian indikator kinerja daerah ini menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator Makro Pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai pembangunan ekonomi dan social. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara Nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Makro Pembangunan ini juga digunakan sebagai alat ukur untuk mempresentasikan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada Tabel 8.1 berikut ini :

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum						Sesudah		
			Target	Realisasi	Target				Target		
			2020		2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,55	1,5	4,65	4,75	4,9	5	2,3-2,8	2,8-3,5	3,5-4,5
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,25	9,37	9,00	8,75	8,5	8,25	9,72-9,2	9,2-8,7	8,7-8,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,4	2,94	1,29	1,27	1,26	1,24	2,0-1,5	2,0-1,5	2,0-1,50
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,73	73,47	74,24	74,75	75,26	75,77	73,75	73,95	74,247
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,3	0,282	0,3	0,3	0,3	0,3	0,29-0,20	0,29-0,20	0,29-0,20
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	27,99	27,24	30,06	32,16	34,46	36,96	27,38	27,45	27,52
7	Emisi Rumah Kaca	Nilai							NA	NA	NA

Sumber : Tim Penyusunan Perubahan RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (data diolah)

Untuk Indikator emisi Gas Rumah Kaca tidak dihitung tingkat kabupaten dan indikator mengacu pada Provinsi

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk memberi gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah.

Indikator Kinerja Tujuan akan menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang didelegasikan melalui Perjanjian Kinerja oleh Kepala Daerah. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah sampai dengan Tahun 2024 yang mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19 disajikan Tabel 8.2 berikut ini.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum						Sesudah		
			Target	Realisasi	Target				Target		
			2020		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,55	1,5	4,65	4,75	4,9	5	2,3-2,8	2,8-3,5	3,5-4,5
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,25	9,37	9	8,75	8,5	8,25	9-8,75	8,75-8,5	8,5-8,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,4	2,94	1,29	1,27	1,26	1,24	2,0-1,5	2,0-1,5	2,0-1,5
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,73	73,47	74,24	74,75	75,26	75,77	73,75	73,95	74,247
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,3	0,282	0,3	0,3	0,3	0,3	0,29-0,20	0,29-0,20	0,29-0,20
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	27,99	27,24	30,06	32,16	34,46	36,96	27,38	27,45	27,52
7	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,93	74,93	74,94	74,95	74,97	75,95	76,95	77,95	77,95
8	Indeks Pendidikan	%		70,86	71,32				71,51	72,33	72,54
9	Indeks Kesehatan	%		74,81	75,03				75,26	75,49	75,74
10	Jumlah Wisatawan	Orang	158.000	141.350	163.000	168.000	173.000	178.000	143.350	144.350	145.350
11	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	55,87	56,61	57,26	59,17	59,74	60,44	59,17	59,74	60,44
12	Meningkatnya Status Desa	Jumlah desa naik status	21	38	23	26	30	35	51	56	62
13	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,69	13,69	13,70	13,72	13,75	13,78	13,72	13,75	13,78
14	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,3	68,3	68,47	68,64	68,81	68,98	68,92	69,07	69,23
15	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	%	81	81	82	83	85	87	85,76	86,71	87,66
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,14	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22	72,75	73,05	73,35
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	CC	BB	BB	A	A	B	BB	BB

Sumber : Tim Penyusunan Perubahan RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (data diolah)

8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indicator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) merupakan indicator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Penetapan Indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat tingkat capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indicator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah;
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Bahwa penetapan Indicator Kinerja Kunci pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan dalam Tabel 8.3 sebagai berikut :



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	4,55	1,5	4,65	4,75	4,9	5	2,3-2,8	2,8-3,5	3,5-4,5	3,5-4,5
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	44,52	43,31	44,15	43,75	43,35	43	43,75	43,35	43,00	43,00
1.1.3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	3	2,45	3,1	3,25	3,4	3,5	3,25	3,40	3,50	3,50
1.1.5	Laju Inflasi	Persen	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3,50	3,50	3,50	3,50
1.1.6	Pendapatan perkapita	Rp	27,99	27,25	30,06	32,16	34,46	36,96	27,38	27,45	27,52	27,52
1.1.7	Angka kemiskinan	Persen	9,25	9,25	9	8,75	8,5	8,25	9-8,75	8,75-8,5	8,5-8,25	8,5-8,25
1.1.8	Indeks Gini	Nilai	0,3	0,282	0,3	0,3	0,3	0,3	0,29-0,20	0,29-0,20	0,29-0,20	0,29-0,20
1.1.9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1.10	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	8,3	10,6	8,35	8,4	8,45	8,5	11,34	11,73	12,11	12,11
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,73	73,73	74,24	74,75	75,26	75,77	73,75	73,95	74,247	74,247
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,76	9,85	9,98	10,02	10,24	10,28	10,02	10,24	10,28	10,28
1.2.3	Angka melek huruf	Persen	99,50	99,67	99,52	99,58	99,64	99,7	99,58	99,64	99,70	99,70
1.2.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,3	68,61	68,47	68,64	68,81	68,98	68,92	69,07	69,23	69,23
1.2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,4	1,72	1,29	1,27	1,26	1,24	2,74-2,40	2,40-2,00	2,00-1,50	2,00-1,50



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	83,95	82,18	83,96	83,99	84,04	84,05	82,23	82,25	82,29	82,29
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	CC	BB	BB	A	A	B	BB	BB	BB
II	Aspek Pelayanan Umum											
2.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib											
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
-	APK PAUD	Persen		16,2	16,28	16,3	16,32	16,34	16,3	16,32	16,34	16,34
-	APK SD/MI	Persen	105,04	96,55	105,15	105,25	105,36	105,46	96,59	96,61	96,63	96,63
-	APK SMP/MTs	Persen	115,18	112,24	115,3	115,41	115,53	115,64	112,28	112,3	112,32	112,32
2	Angka Partisipasi Murni (APM)											
-	APM PAUD	Persen	16,26	16,2	16,28	16,3	16,32	16,34	16,3	16,32	16,34	16,34
-	APM SD/MI	Persen	89,05	83,76	89,05	89,05	89,05	89,05	83,8	83,82	83,84	83,84
-	APM SMP/MTs	Persen	100	74,58	100	100	100	100	74,62	74,64	74,66	74,66
3	Angka Putus Sekolah											
-	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,03	0,37	0,03	0,03	0,03	0,03	0,32	0,3	0,28	0,28
-	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,12	0,05	0,1	0,1	0,09	0,08	0,03	0,02	0,01	0,01
4	Angka Kelulusan											
-	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV											
-	PAUD	Persen	10,9	10,86	10,94	10,96	10,98	11	10,96	10,98	11	11



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020		2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	SD	Persen	70,77	69,78	74,31	78,02	81,92	86,02	71,89	73,33	74,79	74,79
-	SMP	Persen	91,48	49,76	92,12	92,77	93,41	94,07	51,26	52,29	53,33	53,33
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	6,3	11,08	6,29	6,28	6,27	6,26	6,28	6,27	6,26	6,26
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	4	8	4	4	3	3	4	3	3	3
3	Prevalensi Stunting	Persen	9	8,7	6,3				6	5,5	5	5
4	Bed Occupancy Rate (Ideal 80%)	Persen	80	48,11	80	80	80	80	64	66	68	68
5	Average Length of Stay	Hari	6	5,34	6	6	6	6	4,8	4,7	4,6	4,6
6	Gross Death Rate	Orang	29	55,73	26	19	15	15	43	42	41	41
7	Net Death Rate	Orang	17	24,17	15	12	10	10	24	23	22	22
8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan RSU	Nilai	85	85,27	86	86	86	87	90	92	95	95
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	65,4	67,15	66,05	66,71	67,38	68,06	69,05	69,45	69,95	69,95
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	1223	92,057	1223	1223	1223	1223	153,06	168,06	183,06	183,06
3	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	1074	1,985	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074
	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	%							8,99	10,99	12,99	12,99
4	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	1074	52,49	1074	1074	1074	1074	77,49	82,49	87,49	87,49
5	Panjang jaringan irigasi sekunder	Meter	334784	334.784	334.784	334784	334784	334784	334.784	334.784	334.784	334.784
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67,64	69	67,66	67,68	67,7	67,72	73,1	75,1	76,1	76,1
7	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya	Persen	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Perda	4	1	2	2	2	2	4	5	6	6
9	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	90,28	89,22	92,71	95,14	97,57	100	93,71	94,71	95,71	95,71
10	Cakupan penduduk mendapat akses air minum aman	Persen	31,26	31,26	33,69	36,12	38,55	40,98	75,60	76,80	77,80	77,80
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1	Luas kawasan kumuh	Hektar	1.026,24	1.026,24	1.006,80	987,46	968,08	948,69	987,46	968,08	948,69	948,69
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	85,31	84,51	88,27	91,24	94,2	97,16	85,38	86,39	87,4	87,4
3	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Rasio/1000 penduduk	24,8	24,85	24,5	24,2	23,9	23,6	24,2	23,9	23,6	23,6
5	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	60	82,4	65	70	75	80	84,60	85,65	86,70	86,70
6	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	82	81	83	85	87	87	85,76	86,71	87,66	87,66
7	Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,81	85,14	84,81	85,76	86,71	87,66	85,76	86,71	87,66	87,66
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai		118	118	118	118	118	118	118	118	118



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020		2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	50	50	55	60	65	70	60	65	70	70
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	50	52	55	60	65	70	60	65	70	70
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	83,95	81,82	83,96	83,99	84,04	84,05	82,23	82,25	82,29	82,29
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,4	2,94	1,29	1,27	1,26	1,24	2,77	2,67	2,58	2,58
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	Indeks Pembangunan Gender	Persen	97,51	97,51	97,52	97,53	97,54	97,55	97,53	97,54	97,55	97,55
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
1	Skor pola pangan harapan	Nilai	86	90,55	87	88	89	90	89,56	90,62	91,25	91,25
2	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,93	77,84	74,94	74,95	74,96	74,97	75,95	76,95	77,95	77,95
3	Persentase Wilayah Bebas Kerawanan Pangan	Persen	46	NA	48	53	55	60	53	55	60	60
4	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi	Persen	14	0	16	20	28	36	20	28	36	36



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan											
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tida k ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	ada	Ada
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tida k ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	ada	Ada
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,14	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22	72,75	73,05	73,35	73,35
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	80,5	80	81	81,5	82	82,5	53,81	53,91	54,01	54,01
6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,66	88,56	88,76	88,86	88,96	89,06	88,86	88,96	89,06	89,06
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	72	70	73	74	75	75	72	75,5	76,5	77,5
8	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	22	22	24	26	27	28	26	27	28	28
9	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah	Unit	328	328	338	348	358	368	348	358	368	368
11	Jumlah truk pengangkut sampah	Unit	18	18	19	20	21	21	23	24	25	25
12	Cakupan pengawasan Amdal											
-	Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Usuran/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020		2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	10	10	6	10	10	10	6	6	6	6
14	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani	Persen	55	100	60	65	70	75	100	100	100	100
2.12	Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
1	Rasi penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100	100	96	96	100	100	100	97	97	98	98
2	Rasio penduduk yang mempunyai akte lahir	66	60	44,21	49	72	78	100	54	59	64	69
3	Rasio pasangan nikah ber-akte nikah	72	68	82	85	77	81	100	88	91	94	94
2.13	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Meningkatkan status Desa	Desa	20	38	23	26	30	35	26	30	35	35
2.14	Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Orang	4	4	4	3,7	3,6	3,5	3,7	3,6	3,5	3,5
2	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	67,1	67,03	67,3	67,6	68,9	69	67,3	67,6	68,96	68,96
2.15	Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan											
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum											
-	Jumlah penumpang bus dan minibus	Orang	2.898.700	2.898.700	2.927.687	2.956.963	2.986.532	3.016.397	2.956.963	2.986.532	3.016.397	3.016.397
-	Jumlah penumpang kapal danau	Orang	23.052	23.052	23.913	23.983	24.462	24.951	23.983	24.462	24.951	24.951
-	Jumlah penumpang pesawat udara	Orang	20.300	203.000	206.045	209.135	212.272	215.456	209.135	212.272	215.456	215.456



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020		2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1326	1.326	1.342	1360	1378	1396	1.360	1.378	1.396	1.396
3	Jumlah pelabuhan udara/danau/ terminal bis											
-	Jumlah pelabuhan udara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	Jumlah pelabuhan danau	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	Jumlah terminal bis	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah angkutan darat	Ken daraan	1.610	1.610	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	Persen	69	69	71	73	75	77	73	75	77	77
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
1	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen	75	50	85	95	100	100	77	87	100	100
2	Pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi	4	2	5	6	7	8	5	6	7	7
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
1	Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen		6	6,5	6,7	6,9	7	8	9	10	10
2	Pertumbuhan UMKM	Persen	2,18	482,01	1,8	2,04	1,69	1,25	0,59	0,87	1,16	1,16
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
1	Nilai investasi	Milyar Rupiah	N/A	380	125	150	175	200	150	175	200	200
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
1	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	43,89	43,66	46,17	48,52	52,15	53,42	48,52	52,15	53,42	53,42



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	37,24	32	41,42	100	100	100	41,71	47,22	48,39	48,39
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
1	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan											
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	100	0	1	100	100	100	2	3	4	4
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
1	Rasio perpustakaan per Satuan Penduduk	Persen	0,43	0,42	0,44	0,45	0,46	0,47	0,45	0,46	0,47	0,47
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	Persen	12,18	2,74	14,41	16,64	18,87	21,1	2,82	2,86	2,90	2,90
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100	48,89	100	100	100	100	51,1	53,33	55,56	55,56
3	Urusan Pemerintahan Pilihan											
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
1	Capaian produksi perikanan	Ton	2.100	2.136.00	2.100	2.150	2.200	2.300	2.605.00	2.717.00	2.834.00	2.957.00
2	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	5	5	5	10	15	20	10	15	20	25



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
1	Jumlah Wisatawan	Orang	158.000	141.350	163.000	165.000	170.000	175.000	143.350	144.350	145.350	145.350
2	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Persen	30	30	36	40	46	50	35	40	40	40
3	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	12	12	15	16	16	16	15	13	12	12
4	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	16	5	18	20	22	24	10	12	15	15
5	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	orang	400	400	410	420	430	440	420	430	440	450
8	Jumlah Objek Tujuan Wisata	lokasi	34	34	35	35	35	35	35	35	35	34
9	PAD sektor pariwisata	Ribu	300.000.000	300.000	350.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	400.000	450.000	500.000	500.000
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1	Produksi dan produktivitas pangan											
-	Padi sawah	Ton	160.685	118.205	160.790	160.898	161.087	161.142	118.400	118.600	118.800	118.800
		Kw/Ha	59,28	49,6	59,32	59,36	59,4	59,45	49.63	49.64	49.65	49.65
-	Padi ladang	Ton	10.500	75.787	11.000	11.500	12.000	12.500	70.200	70.400	70.600	70.600
		Kw/Ha	26,53	29,66	26,57	26,61	26,65	26,7	29,68	29,69	29,69	29,69
-	Jagung	Ton	26.000	124.117	27.000	28.000	29.000	30.000	85.000	88.000	91.000	91.000
		Kw/Ha	49,54	51,73	49,58	49,63	49,69	49,72	51,82	51,86	51,89	51,89
-	Kacang Tanah	Ton	2780	2.853	2.800	2.820	2.840	2.860	2.820	2.840	2.860	2.860
		Kw/Ha	17,8	17,86	17,88	17,91	17,94	17,96	17,91	17,94	17,96	17,96



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020		2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Produktivitas komoditi unggulan pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	7,34	6,91	7,66	7,99	8,35	8,68	7,99	8,35	8,68	8,68
3	Produksi Daging	Ton	1.659	2.281	1.740	1.834	1.998	2.181	2.387	2.437	2.487	2.487
4	Persentase Kelompok Tani dibina	Persen	62	59	64	66	68	70	62	64	66	66
3.30	Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan*											
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,1	15,68	15,5	16,01	16,42	16,83	15,73	15,85	15,95	15,95
3.31	Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian*											
1	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,32	2,27	2,35	2,37	2,4	2,43	2,37	2,4	2,43	2,43
3.32	Usuran Pemerintahan Bidang Transmigrasi											
1	Persentase transmigran yang dibina	Persen	10	50	10	15	20	25	15	20	25	25
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4.01	Sekretariat Daerah											
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	88	88	90	92	95	100	92	95	100	100
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	87	88	90	92	95	100	92	95	100	100
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten	Nilai	82	82	83	84	85	86	84	85	86	86



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02	Sekretariat DPRD											
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
5.01	Perencanaan											
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.02	Keuangan											
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase realisasi PAD terhadap target	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.03	Kepegawaian											
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Sebelum						Sesudah			Kondisi Akhir (2024)
			Target	Realisasi	Target				Target			
			2020	2021*	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	34,45	36,43	37,29				38	39	40	40
5.04	Pendidikan dan Pelatihan											
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	22	10,5	10	24	25	26	11	12	13	13
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	16	100	18	20	21	22	100	100	100	100
5.05	Penelitian dan Pengembangan											
1	Peningkatan Hasil Kelitbangan	Persen	5	NA	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
6.01	Inspektorat Daerah											
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	100	93	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penurunan temuan BPK dan APIP	Persen	10	NA	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
4	Level kapabilitas APIP	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
7	Unsur Kewilayahan											
7.01	Kecamatan											
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	65	65	70	75	80	85	75	80	85	85
8	Unsur Pemerintahan Umum											
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik											
1	Jumlah konflik SARA	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB IX

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilakukan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 disajikan sebagaimana berikut ini.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode. Pedoman transisi bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan maupun dokumen rencana pembangunan. Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara akan menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2025, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

9.2. Kaidah Pelaksanaan



Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2020, target tahun 2021 dan rencana tahun 2022-2024. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2023 dan RKPD (dan perubahan RKPD) Tahun 2024.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dengan mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
5. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan Tujuan, Sasaran dan Program-program dalam RPJMD dengan penuh tanggung jawab.
6. Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD dan RKPD secara periodik.
7. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
8. RPJMD ini akan menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah serta menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan evaluasi.
9. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal dan mensukseskan terwujudnya ***"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"***

Tarutung, Desember 2021


BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/894/KPTS/2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024.

A. Dasar hukum mengingat diubah, sehingga berbunyi :

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor ...);

25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor ...);

- B. Sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.

C. KELENGKAPAN PERSYARATAN EVALUASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelengkapan persyaratan Evaluasi RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Pasal 263 ayat (3) menyatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh kalimat yang menyatakan bahwa RPJMD memperhatikan pada RPJMN perlu diubah menjadi RPJMD berpedoman kepada RPJMN.
2. Pasal 245, Pasal 267 ayat (2) dan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan KLHS atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan dilengkapi dokumen :
 - a. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD
 Persetujuan bersama Bupati Tapanuli Utara dengan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2019-2024 Nomor 24/SKB/TU/XII/2021 dan Nomor 12/PB/DPRD-TU/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Nikson Nababan, M.Si selaku Bupati Tapanuli Utara dan Ir. Poltak Pakpahan selaku Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara serta Fatimah Hutabarat, SE dan Ir. Reguel Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Rancangan Peraturan Daerah RPJMD

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Tapanuli Utara dimaksud secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

c. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Perubahan RPJMD

KLHS Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dimaksud secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

d. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD

Berita Acara (BA) dimaksud adalah BA tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara beserta stakeholders dari Kabupaten Tapanuli Utara. Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD menjadi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara diantaranya:

- 1) Kesepakatan Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
- 2) Strategi dan program pembangunan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

e. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJMD

Hasil Pengendalian dan Evaluasi dimaksud sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

f. Reviu Dokumen PRPJMD

Laporan Hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Nomor 700/5464/6-1/6-1.1/III/2021/2021 tanggal 20 Desember 2021 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/781/B.1/IJ tanggal 24 Agustus 2016.

D. HASIL EVALUASI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada sub bab latar belakang agar dipertajam penjelasan singkat terkait penyebab dilakukannya Perubahan RPJMD yang dikaitkan dengan hasil evaluasi RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Agar Penyajian data diseragamkan tahunnya (*time series* 5 tahun) dari tahun 2016-2020 yang bersumber dari SIPD, BPS, ataupun dari Walidata (Kominfo). Data yang disajikan dapat berupa table, grafik, gambar dan lain-lain, serta diberikan interpretasi dan penjelasan terhadap table, grafik, gambar yang disajikan;
2. Dalam mendukung penyajian permasalahan yg ada di Bab IV, agar data dukungnya dilengkapi di Bab II, sebagai contoh : belum optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan didukung sektor industri, perdagangan dan jasa yang belum didukung data sektor industri, perdagangan dan jasa.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Tambahkan narasi terkait dengan arah kebijakan:
 - a. Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024;
 - b. Belanja Daerah Tahun 2022-2024;
 - c. Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024.
2. Dalam penyajian data martikulasi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah agar disajikan data sebelum dan sesudah perubahan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Penyajian permasalahan pembangunan, agar di dukung dengan data dan analisis pencapaian yang termuat dalam Bab II, sebagai contoh Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, yang belum dilengkapi dengan data Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan, Jumlah Tenaga Pendidik dan Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan sehingga data yang disajikan di Bab II tidak sinkron dengan penyajian permasalahan di Bab IV.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Dalam penentuan indikator tujuan dan sasaran agar memperhatikan penjelasan dari deskripsi misi, serta kertas kerja pohon kinerja (*cascading*) dan *crosscutting*;
2. Penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran harus dilihat kembali apakah data dukungnya sudah termuat pada Bab II. Selain itu tambahkan indikator baru yang dapat menjadi daya ungkit keberhasilan Kepala Daerah Terpilih misalnya untuk meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat tambahkan

indikator Indeks Pendidikan, Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat agar ditambahkan indikator Indeks Kesehatan;

3. Perlu diperhatikan korelasi antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai contoh :

Misi : Data indikator tujuan di misi 1 meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan hanya mendukung untuk ketahanan pangan akan tetapi belum berkaitan dengan kesejahteraan petani sehingga perlu ditinjau kembali penetapan indikator ini agar mampu menjawab misi pertama.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penentuan Strategi, dan arah kebijakan pembangunan agar memperhatikan permasalahan pembangunan serta isu strategis yang termuat dalam Bab IV dan Indikator Capaian Kinerja sesuai dengan peraturan yang baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020).

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Dalam penentuan Strategi, dan arah kebijakan pembangunan agar memperhatikan permasalahan pembangunan serta isu strategis yang termuat dalam Bab IV dan Indikator Capaian Kinerja sesuai dengan peraturan yang baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020);
2. Disarankan agar dalam pengalokasian pagu indikatif program perangkat daerah memperhatikan target pembangunan serta dukungan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai, khususnya Program menjadi Prioritas Pembangunan;
3. Dalam penyajian martikulasi data pendanaan dan program pembangunan daerah agar disajikan data sebelum dan sesudah perubahan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sesuai dengan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa RPJMD harus diselaraskan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penyelarasan dilakukan pada target indikator makro dan program prioritas, sebagai contoh agar memuat indikator penurunan emisi gas rumah kaca dalam indikator makro P.RPJMD;

2. Dalam penyajian martikulasi data kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar menampilkan data sebelum dan sesudah perubahan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710413 199603 1 002



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah terjadinya pemetaan wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu (3) tahun sebagaimana sisa masa berlaku RPJMD 2019-2024, berpedoman kepada RPJPD dan RTRW,
 - (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup
 - (2) Isi dan Uraian Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat daerah dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan daerah dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
 - b. Bappeda dalam penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah;
 - (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

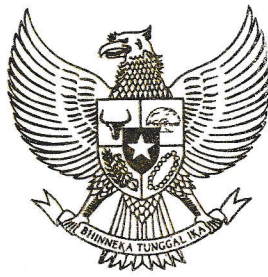
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN





GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/894/KPTS/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur;
- b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tapanuli Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Tapanuli Utara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Tapanuli Utara segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Tapanuli Utara segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Utara paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R.I di Jakarta;
3. Bupati Tapanuli Utara di Tarutung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
5. Inspektur Provsu di Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002